



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025—2029**

**MATRIKS KEMENTERIAN/LEMBAGA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2025—2029**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MATRIKS KEMENTERIAN/LEMBAGA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

1. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
002.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan				10.628.070.786				
002.CF.5806	Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat				10.628.070.786				
002.CF.5806.QMB	Komunikasi Publik				10.628.070.786				
002.CF.5806.QMB.001	Kunjungan Kerja Diluar Masa Reses dan Diluar Sidang DPR (8 Kali Setahun)	0	4640	kegiatan	3.742.431.557	01	03	01	01
002.CF.5806.QMB.002	Kunjungan Kerja pada Masa Reses (5 Kali Dalam Setahun)	0	2900	kegiatan	5.905.064.474	01	03	01	01
002.CF.5806.QMB.003	Kunjungan Kerja pada Masa Reses atau pada Masa Sidang (1 Kali Satu Tahun)	0	580	kegiatan	605.679.946	01	03	01	01



KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
002.CF.5806.QMB.004	Rumah Aspirasi Anggota DPR	0	580	kegiatan	374.894.809	01	04	02	01
002.WA	Program Dukungan Manajemen				83.672.540				
002.WA.5795	Pengelolaan Teknologi Informasi				83.672.540				
002.WA.5795.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				83.672.540				
002.WA.5795.UAB.001	Sistem Informasi Anggota Legislatif dan Konstituen	0	1	Sistem Informasi	83.672.540	01	03	01	01
TOTAL					10.711.743.326				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

Catatan:

Dewan Perwakilan Rakyat hanya memiliki Rincian Indikasi Prioritas Nasional Tahun 2025—2029



- 4 -

MAHKAMAH AGUNG

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 07.03.02 - Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata	persen	54	35	55



- 5 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
005.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				528.183.912				
005.BF.1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum				6.133.375				
005.BF.1046.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				6.133.375				
005.BF.1046.UAC.001	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240	240	Orang	6.133.375	04 07	19 02	04 02	02 01
005.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				110.634.396				
005.BF.1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				68.028.575				
005.BF.1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	44739	44739	Orang	68.028.575	08 07	02 02	01 02	04 01
005.BF.1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan				42.605.821				
005.BF.1049.QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1000	1000	Perkara	2.101.700	07	02	02	01
005.BF.1049.QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan	6679	6679	Perkara	40.504.121	07	02	02	01
005.BF.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				384.930.471				



- 6 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
005.BF.1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				112.918.500				
005.BF.1053.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	226077	226077	Orang	112.918.500	07 04	02 16	02 03	01 01
005.BF.1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan				272.011.971				
005.BF.1053.QCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	21037	24193	Perkara	100.309.961	07	02	02	01
005.BF.1053.QCA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	32565	37449	Perkara	64.844.432	07	02	02	01
005.BF.1053.QCA.003	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	5137	6203	Perkara	94.403.475	07	02	02	01
005.BF.1053.QCA.004	Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Itsbat Nikah diluar Negeri	200	241	Perkara	12.454.103	07 04	02 16	02 03	01 01
005.BF.1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer				12.621.253				
005.BF.1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan				12.621.253				
005.BF.1058.QCA.001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	393	393	Perkara	12.621.253	07	02	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
005.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara				12.873.030				
005.BF.1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				7.484.640				
005.BF.1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3264	3264	Orang	7.484.640	07	02	02	01
005.BF.1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan				5.388.390				
005.BF.1059.QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	30	30	Perkara	5.388.390	07	02	02	01
005.BF.7019	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama				991.387				
005.BF.7019.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				991.387				
005.BF.7019.UAC.001	Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum	80	92	Orang	991.387	07	02	02	01
005.WA	Program Dukungan Manajemen				232.468.572				
005.WA.1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan				36.000.000				
005.WA.1064.TBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				36.000.000				



- 8 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
005.WA.1064.TBA.001	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara	1	1	Layanan	30.000.000	07	03	01	01
005.WA.1064.TBA.002	Pengintegrasian sistem penanganan perkara di MA	0	1	Layanan	6.000.000	07	03	01	01
005.WA.1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung				24.800.000				
005.WA.1067.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				24.800.000				
005.WA.1067.PFA.001	Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung	1	0	Rancangan Standar	8.800.000	07	03	01	01
005.WA.1067.PFA.002	Penyusunan kajian/naskah akademik terkait RUU Jabatan Hakim	0	0	Rancangan Standar	2.000.000	07	03	01	01
005.WA.1067.PFA.003	Penyusunan Kajian terkait Contempt of Court	0	0	Rancangan Standar	2.000.000	07	03	01	01
005.WA.1067.PFA.004	Penyusunan peraturan internal MA terkait pola rekrutmen, jenjang karir serta mutasi dan rotasi hakim	0	0	Rancangan Standar	4.000.000	07	03	01	01
005.WA.1067.PFA.005	Penyusunan kajian beban kinerja ideal hakim dan penetapan analisis beban kinerja hakim, panitera pengganti, dan jurusita	0	1	Rancangan Standar	6.000.000	07	03	01	01



- 9 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
005.WA.1067.PFA.006	Penyusunan kajian integrasi sistem penanganan perkara di MA	0	0	Rancangan Standar	2.000.000	07	03	01	01
005.WA.1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan				171.668.572				
005.WA.1073.SCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan				169.168.572				
005.WA.1073.SCG.001	Peningkatan Kapasitas Hakim	440	440	Orang	169.168.572	07	03	01	01
005.WA.1073.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal				2.500.000				
005.WA.1073.TBC.003	Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Hakim	1	1	Layanan	2.500.000	07	03	01	01
TOTAL					760.652.484				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 10 -

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 07.04 - Persentase peningkatan pengendalian perkara	persen	- (indikator baru)	61	69
PP 07.04 - Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan	persen	- (indikator baru)	60	80
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 07.04.01 - Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	persen	- (indikator baru)	61	69
KP 07.04.02 - Tingkat kecukupan personil jaksa	persen	98,02	98,20	99,20
KP 07.04.02 - Tingkat pengembangan kapasitas personil jaksa	persen	10,65	50	85
KP 07.04.02 - Tingkat kesesuaian pengelolaan SDM jaksa	persen	77,6	80	90



- 11 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				146.963.000				
006.BF.1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah				136.713.000				
006.BF.1103.QMB	Komunikasi Publik				136.713.000				
006.BF.1103.QMB.051	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4138	4138	kegiatan	136.713.000	07	02	03	01
006.BF.1115	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus				2.750.000				
006.BF.1115.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				2.250.000				
006.BF.1115.PEF.001	Sosialisasi Pedoman Corruption Impact Assessment (CIA) dan Indeks Kerawanan Korupsi	0	0	orang	2.250.000	07	05	01	02
006.BF.1115.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				500.000				
006.BF.1115.UAE.001	Asesmen Kompetensi Dasar dan Lanjutan Bagi Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi	0	0	Laporan	500.000	07	05	01	02



- 12 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
006.BF.6580	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus				7.500.000				
006.BF.6580.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				1.500.000				
006.BF.6580.PFA.001	Penyusunan Pedoman Corruption Impact Assessment (CIA) dan Indeks Kerawanan Korupsi	0	0	Pedoman	1.500.000	07	05	01	02
006.BF.6580.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				6.000.000				
006.BF.6580.UAE.001	Pelaksanaan Corruption Impact Assessment (CIA) dan Indeks Kerawanan Korupsi	0	1	Laporan	6.000.000	07	05	01	02
006.WA	Program Dukungan Manajemen				7.211.560.709				
006.WA.1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI				1.000.000				
006.WA.1081.PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur				1.000.000				
006.WA.1081.PBQ.001	Penyusunan rekomendasi kebijakan manajemen talenta Kejaksaan RI	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	04	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
006.WA.1083	Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI				10.822.336				
006.WA.1083.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				2.122.336				
006.WA.1083.PBD.051	Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (Dominus Litis)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	2.122.336	07	04	01	01
006.WA.1083.PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi				4.500.000				
006.WA.1083.PBO.051	Pembuatan Kebijakan Pelaksanaan Statistik Kriminal Indonesia	1	0	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000	07	04	01	01
006.WA.1083.PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur				4.200.000				
006.WA.1083.PBQ.099	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan SDM Kejaksaan	3	0	Rekomendasi Kebijakan	4.200.000	07	04	02	02
006.WA.1088	Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi				802.000.000				
006.WA.1088.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				2.000.000				



- 14 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
006.WA.1088.PFA.001	Penyusunan pedoman metadata statistik kriminal Indonesia	0	0	Pedoman	1.000.000	07	04	01	01
006.WA.1088.PFA.002	Penyusunan pedoman proses bisnis pelaksanaan statistik kriminal Indonesia	0	0	Pedoman	1.000.000	07	04	01	01
006.WA.1088.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				800.000.000				
006.WA.1088.UAB.001	Pembangunan Sistem Informasi command center Pusdalops	0	1	Sistem Informasi	600.000.000	07	04	01	01
006.WA.1088.UAB.002	Pengembangan sistem informasi statistik kriminal Indonesia	0	0	Sistem Informasi	200.000.000	07	04	01	01
006.WA.1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI				5.042.987.640				
006.WA.1091.RAQ	Sarana Bidang Hukum				371.000.000				
006.WA.1091.RAQ.001	Pembentukan kantor pejabat di MA untuk pemberian advis blaad dalam perkara kasasi	0	1	Unit	3.000.000	07	04	01	02
006.WA.1091.RAQ.002	Pembentukan kantor pejabat penghubung di Setneg dalam rangka pemberian nasihat hukum kepada Presiden, pemberian teknis hukum dalam perjanjian internasional dan kontrak karya, postulat rejection, pernyataan perang dan atau pernyataan negara saat darurat	0	1	Unit	3.000.000	07	04	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
006.WA.1091.RAQ.051	Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Penanganan Perkara Kejaksaan RI	55	55	Unit	365.000.000	07	04	01	01
006.WA.1091.RPW	Prasarana Bidang Hukum				2.574.000.000				
006.WA.1091.RPW.001	Pembangunan rupbasan	0	8	Unit	1.824.000.000	07	04	01	01
006.WA.1091.RPW.002	Pembangunan rumah dinas Jaksa di wilayah	0	1	Unit	150.000.000	07	04	01	01
006.WA.1091.RPW.003	Pembangunan command center Pusdalops	0	0	Unit	600.000.000	07	04	01	01
006.WA.1091.TBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				2.097.987.640				
006.WA.1091.TBB.053	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tugas dan Fungsi Kesehatan Yustisial	1	1	Paket	2.097.987.640	07	04	01	01
006.WA.5276	Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerja Sama Pemulihan Aset Nasional maupun Transnasional				65.132.600				
006.WA.5276.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				1.000.000				
006.WA.5276.PBD.001	Penyusunan Grand Design Tata Kelola Badan Pemulihan Aset	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	04	01	01



- 16 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
006.WA.5276.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				1.000.000				
006.WA.5276.PFA.001	Penyusunan pedoman pelaksanaan tata kelola rubbasan	0	0	Pedoman	1.000.000	07	04	01	01
006.WA.5276.QKB	Pemantauan produk				47.132.600				
006.WA.5276.QKB.051	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	38	38	laporan	47.132.600	07	05	01	02
006.WA.5276.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				15.000.000				
006.WA.5276.UAB.001	Pengembangan Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS)	0	1	Sistem Informasi	15.000.000	07	04	01	01
006.WA.5276.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1.000.000				
006.WA.5276.UAE.001	Asesmen Kompetensi Jaksa dan Kelembagaan dalam Penelusuran Aset	0	0	Laporan	1.000.000	07	05	01	02
006.WA.6577	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1.281.118.133				
006.WA.6577.PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi				1.000.000				
006.WA.6577.PBO.001	Grand Design pengembangan teknologi/ satu sistem informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung <i>Corporate University</i>	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	04	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
006.WA.6577.PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur				5.140.400				
006.WA.6577.PBQ.002	Penyusunan konten pembelajaran pada peningkatan kompetensi jaksa	0	0	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000	07	04	02	02
006.WA.6577.PBQ.003	Penyusunan dokumen evaluasi pembelajaran, pengajaran dan metode pembelajaran bagi peningkatan kompetensi Jaksa	0	0	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000	07	04	02	02
006.WA.6577.PBQ.051	Penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/ Pendidikan Kekhususan Jaksa	2	0	Rekomendasi Kebijakan	1.140.400	07	04	02	02
006.WA.6577.RPW	Prasarana Bidang Hukum				1.000.000.000				
006.WA.6577.RPW.001	Pembangunan/pengembangan sentra diklat	0	1	Unit	1.000.000.000	07	04	02	01
006.WA.6577.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				202.000.000				
006.WA.6577.UAB.001	Pengembangan teknologi dan sistem informasi corporate university	0	0	Sistem Informasi	200.000.000	07	04	02	01
006.WA.6577.UAB.002	Integrasi sistem informasi corporate university dan mobile apps corporate university	0	1	Sistem Informasi	2.000.000	07	04	02	01
006.WA.6577.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				72.977.733				



- 18 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
006.WA.6577.UAC.001	Peningkatan Sertifikasi Jaksa	0	1000	Orang	4.000.000	07	04	02	02
006.WA.6577.UAC.002	Implementasi pelaksanaan corporate university	0	500	Orang	3.000.000	07	04	02	02
006.WA.6577.UAC.004	Penguatan kapasitas SDM dalam Penelusuran Aset	0	120	Orang	2.908.563	07	05	01	02
006.WA.6577.UAC.051	Peningkatan Kompetensi Jaksa	840	840	Orang	63.069.170	08 07	02 04	01 02	04 02
006.WA.6578	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan				500.000				
006.WA.6578.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				500.000				
006.WA.6578.PBD.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Pengawasan Internal di Kejaksaan	0	0	Rekomendasi Kebijakan	500.000	07	05	03	01
006.WA.6773	Strategi Kebijakan Penegakan Hukum				8.000.000				
006.WA.6773.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				8.000.000				
006.WA.6773.PBD.001	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Upaya Paksa	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	04	01	01



- 19 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
006.WA.6773.PBD.002	Penyusunan rekomendasi kebijakan evaluasi penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restorative	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	04	01	01
006.WA.6773.PBD.003	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum	0	1	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000	07	04	01	01
006.WA.6773.PBD.004	Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penerapan Deffered Prosecutor Agreement	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	04	01	01
006.WA.6773.PBD.005	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka pembentukan kantor pejabat penghubung di MA untuk pemberian Advis Blaad dalam perkara kasasi	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	04	01	02
006.WA.6773.PBD.006	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka pembentukan kantor pejabat penghubung di Setneg dalam rangka pemberian nasihat hukum kepada presiden	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	04	01	02
TOTAL					7.358.523.709				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 20 -

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

1. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
007.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden				42.897.092				
007.CA.1148	Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri				42.897.092				
007.CA.1148.PEC	Kerja sama				42.897.092				
007.CA.1148.PEC.001	Layanan Kerja Sama Selatan-Selatan	10	12	Kesepakatan	39.116.742	02	09	03	01
007.CA.1148.PEC.002	Dokumen Manajemen Pengetahuan KSST	3	3	Dokumen	3.780.350	02	09	03	02
TOTAL					42.897.092				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

Catatan:

Kementerian Sekretariat Negara hanya memiliki Rincian Indikasi Prioritas Nasional Tahun 2025—2029



- 21 -

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 04.17 - Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	persen	94,03	96	99,8
PP 07.01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"	daerah	- (indikator baru)	150	514
PP 07.09 - Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat		72,01 (2023)	73	85
PP 07.09 - Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		83,75 (Persentase capaian penerapan SPM di daerah tahun 2023)	88	92
PP 07.09 - Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (<i>local tax ratio</i>)	persen PDB	1,20	1,25	1,45
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 01.04.01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik	daerah	- (indikator baru)	12	20



- 22 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.04.01 - Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam aspek wawasan kebangsaan pada wilayah konflik dan rentan	kegiatan	5	5	5
KP 02.09.01 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara		61,13	63,00	78,00
KP 02.12.07 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD)	kab/kota	127 (2023)	180	514
KP 02.12.07 - BUMD air minum dengan tarif <i>Full Cost Recovery</i> (FCR)	persen	42,49 (2023)	60	100
KP 02.12.07 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan tarif/retribusi layanan air limbah domestik	kab/kota	17 (2023)	40	100
KP 02.12.07 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki Perda terkait tata kelola air limbah domestik	kab/kota	135 (2023)	150	514
KP 02.12.08 - Jumlah provinsi yang melakukan pelaporan kinerja air minum di tingkat kab/kota	provinsi	38 (2023)	38	38
KP 02.12.08 - Jumlah provinsi yang melakukan pelaporan kinerja sanitasi (air limbah domestik) di tingkat kab/kota	provinsi	1 (2023)	15	38
KP 06.07.03 - Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa	desa	- (indikator baru)	90	800
KP 06.07.03 - Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	desa	- (indikator baru)	150	1.660
KP 07.01.01 - Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada mendagri	persen	100 (2023)	100	100
KP 07.01.01 - Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik	persen	100	100	100



- 23 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 07.01.02 - Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	persen	3,55	10	50
KP 07.09.01 - Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori sangat baik	provinsi	13 (2023)	17	30
KP 07.09.02 - Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori tuntas paripurna	provinsi	2 (2023)	5	34
KP 07.09.02 - kabupaten/kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setidaknya berkategori tuntas madya	kabupaten/kota	28 (2023)	152	354
KP 07.09.02 - Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori sangat inovatif (prov,kab,kota)	daerah (prov/kab/kota)	75 (2023)	82	147
KP 07.09.03 - Jumlah daerah dengan proporsi pajak daerah terhadap PAD meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300	300	546
KP 07.09.03 - Jumlah daerah dengan proporsi retribusi daerah terhadap PAD meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300	300	546
KP 07.09.03 - Jumlah provinsi yang memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik	provinsi	4	19	38
KP 07.09.03 - Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pendanaan alternatif	daerah (prov/kab/kota)	7	2	11



- 24 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa				1.922.797.336				
010.CM.1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah				733.440.980				
010.CM.1237.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				2.050.000				
010.CM.1237.PBL.001	Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	1	0	Rekomendasi Kebijakan	2.050.000	07	09	01	01
010.CM.1237.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				731.390.980				
010.CM.1237.UBA.001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	17	30	Provinsi	686.823.750	07	09	01	03
010.CM.1237.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	80	508	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.157.650	07	09	02	03
010.CM.1237.UBA.003	Daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	10	38	Provinsi	6.105.100	07	09	01	02
010.CM.1237.UBA.004	Pilot Project kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	1	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.326.120	07	09	01	02
						06	04	01	01
						06	04	01	02



- 25 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						06	04	01	07
						06	04	01	08
						06	04	01	09
						06	04	01	10
010.CM.1237.UBA.004.0000	Pilot Project kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan - Pusat	1	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.326.120	06	04	01	03
						06	04	01	04
						06	04	01	05
						06	04	01	06
010.CM.1237.UBA.005	Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dalam perizinan berusaha	76	118	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.768.160	07	09	02	03
010.CM.1237.UBA.006	Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPSTSP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	50	126	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	07	09	02	03
010.CM.1237.UBA.007	Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPSTSP	76	118	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	07	09	02	03
010.CM.1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi				61.085.862				
010.CM.1241.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				6.967.125				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.1241.PBL.001	Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	10	10	Rekomendasi Kebijakan	6.105.100	07	09	02	03
010.CM.1241.PBL.002	Rekomendasi penyelesaian batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi	0	10	Rekomendasi Kebijakan	862.025	07	09	02	03
010.CM.1241.PEC	Kerja sama				32.750.887				
010.CM.1241.PEC.001	Penguatan Kerja Sama Pembangunan lintas batas negara di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	2	2	Kesepakatan	12.210.200	07	09	01	02
						02	09	04	03
						04	09	04	02
010.CM.1241.PEC.002	Penyelesaian permasalahan segmen batas wilayah negara, penegasan, dan pemeliharaan batas negara	3	3	Kesepakatan	8.288.447	02	09	01	02
010.CM.1241.PEC.003	K/L yang mengintegrasikan kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau	12	30	Kesepakatan	12.252.240	07	09	01	03
010.CM.1241.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				21.367.850				
010.CM.1241.UBA.001	Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	10	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	07	09	02	03
						06	04	01	01
						06	04	01	02



- 27 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						06	04	01	07
						06	04	01	08
						06	04	01	09
						06	04	01	10
010.CM.1241.UBA.001.0000	Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan - Pusat	10	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	06	04	01	03
						06	04	01	04
						06	04	01	05
						06	04	01	06
010.CM.1241.UBA.002	Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan	10	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.157.650	06	04	01	01
						06	04	01	02
						06	04	01	07
						06	04	01	08
						06	04	01	09
						06	04	01	10
						07	09	02	03
010.CM.1241.UBA.002.0000	Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan - Pusat	10	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.157.650	06	04	01	03
						06	04	01	04



- 28 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.1241.UBA.003	Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	10	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	06	04	01	05
						06	04	01	06
						06	04	01	01
						06	04	01	02
						06	04	01	07
						06	04	01	08
						06	04	01	09
						06	04	01	10
						07	09	02	03
010.CM.1241.UBA.003.0000	Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan - Pusat	10	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	06	04	01	03
						06	04	01	04
						06	04	01	05
						06	04	01	06
010.CM.1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa				182.399.170				
010.CM.1244.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				700.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.1244.UAB.001	Sistem Informasi Desa Berbasis Prodeskel/Epdeskel yang Terintegrasi dengan SIPD	1	0	Sistem Informasi	700.000	06 06	01 07	01 03	002 03
010.CM.1244.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				181.699.170				
010.CM.1244.UBB.001	Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	90	800	Desa	31.220.800	06	07	03	02
010.CM.1244.UBB.002	Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	50	1500	Desa	102.850.000	06	07	03	02
010.CM.1244.UBB.003	Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	100	160	Desa	5.695.000	06	07	03	01
010.CM.1244.UBB.004	Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital dalam peningkatan kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa	100	0	Desa	1.000.000	06 06	01 07	02 03	02 02
010.CM.1244.UBB.006	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	125	500	Desa	13.600.000	06	07	03	02
010.CM.1244.UBB.007	Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	0	200	Desa	23.600.000	06	07	03	02
010.CM.1244.UBB.008	Desa yang dokumen perencanaannya diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional	0	60	Desa	3.733.370	06	07	03	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa				195.372.000				
010.CM.1248.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				174.372.000				
010.CM.1248.UAC.004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	3060	5850	Orang	174.372.000	06	01	02	02
						06	07	03	02
						08	02	01	02
010.CM.1248.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				21.000.000				
010.CM.1248.UBB.001	Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital	0	25000	Desa	21.000.000	06	07	03	02
010.CM.1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah				39.000.027				
010.CM.1254.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				7.000.000				
010.CM.1254.PBL.001	Rekomendasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan partisipasi masyarakat	0	38	Rekomendasi Kebijakan	7.000.000	07	09	01	02
010.CM.1254.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				24.000.000				
010.CM.1254.UAB.001	Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah	1	0	Sistem Informasi	24.000.000	07	09	01	03
						02	17	07	02
						06	01	01	002



- 31 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.1254.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				8.000.027				
010.CM.1254.UBA.001	Daerah yang menerapkan SIPD bidang perencanaan pembangunan daerah	0	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.000.027	07	09	01	03
010.CM.1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa				56.985.900				
010.CM.1259.PAC	Peraturan Pemerintah				1.040.000				
010.CM.1259.PAC.001	Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Aglomerasi	0	0	RPP	1.040.000	07	09	01	02
010.CM.1259.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				19.315.300				
010.CM.1259.PBL.001	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa di DOB	4	4	Rekomendasi Kebijakan	18.315.300	07	09	02	03
010.CM.1259.PBL.002	Rekomendasi Model Ideal Penataan Daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	09	01	01
010.CM.1259.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				36.630.600				
010.CM.1259.UBA.001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan	10	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	36.630.600	07	09	02	03



- 32 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				17.769.856				
010.CM.1261.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				17.769.856				
010.CM.1261.UBA.001	Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	10	14	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.965.138	07	09	01	03
010.CM.1261.UBA.002	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	65	105	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.804.718	07	09	01	03
010.CM.1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah				20.227.150				
010.CM.1276.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				20.227.150				
010.CM.1276.UBA.001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	110	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.742.390	07	09	03	03
010.CM.1276.UBA.002	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah	110	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.484.760	07	09	03	03
010.CM.1283	Pembinaan inovasi daerah				19.475.269				



- 33 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.1283.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				19.475.269				
010.CM.1283.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	2	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.157.650	07	09	01	02
010.CM.1283.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.317.619	07	09	02	03
010.CM.1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi				17.300.000				
010.CM.1285.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				9.500.000				
010.CM.1285.PBL.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Kapasitas Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	0	8	Rekomendasi Kebijakan	9.500.000	07	09	02	02
010.CM.1285.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				7.800.000				
010.CM.1285.PFA.001	Standardisasi Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	10	20	NSPK	7.800.000	07	09	02	02
010.CM.3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa				30.631.832				
010.CM.3991.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				6.105.100				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.3991.PBL.001	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	2	2	Rekomendasi Kebijakan	6.105.100	07	09	01	03
010.CM.3991.QMA	Data dan Informasi Publik				3.310.000				
010.CM.3991.QMA.001	Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	1	0	Data	3.310.000	07	09	02	03
010.CM.3991.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				21.216.732				
010.CM.3991.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	12.210.200	07	09	02	03
010.CM.3991.UBA.002	Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	15	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.006.532	07	09	02	03
010.CM.6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				67.666.610				
010.CM.6136.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				510.510				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6136.UAB.001	Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia - Bidang Trantibumlinmas	1	1	Sistem Informasi	510.510	07	09	02	01
010.CM.6136.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				67.156.100				
010.CM.6136.UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18.315.300	07 08	09 04	02 01	01 03
010.CM.6136.UBA.002	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18.315.300	07 08	09 04	02 01	01 03
010.CM.6136.UBA.003	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18.315.300	07	09	02	01
010.CM.6136.UBA.004	Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	08	04	01	03
010.CM.6136.UBA.005	Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	08	04	02	01
010.CM.6138	Penataan kelembagaan Desa				16.669.500				
010.CM.6138.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				16.669.500				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6138.QDB.001	Fasilitasi lembaga posyandu dalam penerapan 6 bidang SPM	1500	2500	Lembaga	16.669.500	04	15	01	02
						04	16	01	02
						06	07	03	02
010.CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah				282.096.245				
010.CM.6139.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				42.200.000				
010.CM.6139.PBL.001	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6	0	Rekomendasi Kebijakan	13.000.000	07	09	01	01
010.CM.6139.PBL.002	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar	10	0	Rekomendasi Kebijakan	17.000.000	07	09	01	01
010.CM.6139.PBL.003	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	8	0	Rekomendasi Kebijakan	12.200.000	07	09	01	01
010.CM.6139.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				239.896.245				
010.CM.6139.UBA.001	Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	12.210.200	06	06	04	01
						07	09	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6139.UBA.002	Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.631.375	07	09	02	01
010.CM.6139.UBA.003	Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	02	17	07	02
						02	18	01	02
010.CM.6139.UBA.004	Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	08	04	05	01
010.CM.6139.UBA.100	Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	38	48	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	07	09	01	03
010.CM.6139.UBA.101	Daerah yang Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Energi Baru Terbarukan (EBT)	0	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.641.000	02	11	03	01
010.CM.6139.UBA.200	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.262.750	02	12	07	002
						07	09	02	01
010.CM.6139.UBA.201	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.262.750	07	09	02	01
						06	06	04	02
010.CM.6139.UBA.202	Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	20	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.105.100	03	01	05	04



- 38 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6139.UBA.203	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	33	33	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.157.650	03	01	01	09
010.CM.6139.UBA.204	Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	02	12	07	001
						06	06	04	02
010.CM.6139.UBA.300	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.262.750	04	15	05	01
						07	09	02	01
010.CM.6139.UBA.301	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.262.750	07	09	02	01
						06	02	03	02
010.CM.6139.UBA.302	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.262.750	08	04	01	03
						07	09	02	01
010.CM.6139.UBA.303	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	4	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.073.570	07	09	02	03
						02	22	06	01
						03	05	05	002
						03	05	06	002
						03	05	07	002
						03	05	08	002



- 39 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						03	05	01	002
						03	05	09	002
						03	05	10	002
						03	05	12	002
						03	05	13	002
010.CM.6139.UBA.303.3513	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata - Kab. Probolinggo	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.786.785	03	05	11	002
010.CM.6139.UBA.304	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	12.210.200	07	15	01	12
						07	09	02	03
010.CM.6139.UBA.305	Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.157.650	04	11	02	02
010.CM.6139.UBA.400	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.262.750	04	05	02	01
						07	09	02	01
010.CM.6139.UBA.401	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Perpres No.68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	11	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	04	07	01	01



- 40 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6139.UBA.403	Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	01	05	02	01
						04	17	01	02
010.CM.6139.UBA.404	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	04	19	05	02
010.CM.6139.UBA.404.0000	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Pusat	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	01	05	02	01
010.CM.6139.UBA.405	Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	04	19	04	02
010.CM.6139.UBA.405.0000	Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO - Pusat	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	01	05	02	01
010.CM.6139.UBA.406	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	04	09	03	02
						04	18	01	02
010.CM.6139.UBA.407	Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.105.100	04	07	04	03
						07	09	01	03
010.CM.6139.UBA.408	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.441.000	08	02	01	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6139.UBA.409	Daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi untuk mendukung penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	0	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.641.000	07 04	09 11	02 01	03 03
010.CM.6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah				30.869.400				
010.CM.6140.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				7.500.000				
010.CM.6140.PBL.001	Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen ASN daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	1	0	Rekomendasi Kebijakan	800.000	07	09	01	01
010.CM.6140.PBL.002	Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	1	0	Rekomendasi Kebijakan	4.200.000	07	09	01	01
010.CM.6140.PBL.003	Rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000	07	09	01	01
010.CM.6140.PBL.004	Rekomendasi Model Ideal Perangkat Daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	09	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6140.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				23.369.400				
010.CM.6140.UBA.001	Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	38	190	Daerah (Prov/Kab/Kota)	23.369.400	07	09	02	03
010.CM.6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah				116.672.770				
010.CM.6141.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				1.000.000				
010.CM.6141.PBL.001	Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Masukan Revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	07	09	01	01
010.CM.6141.QMA	Data dan Informasi Publik				16.957.260				
010.CM.6141.QMA.001	Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	1	0	Data	3.472.500	07	09	03	02
010.CM.6141.QMA.002	Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	1	Data	13.484.760	07	09	03	01
						02	12	07	003
						02	18	01	02
010.CM.6141.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				98.715.510				
010.CM.6141.UBA.011	Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	19	0	Provinsi	3.750.000	07	09	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6141.UBA.012	Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	300	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.000.000	07	09	03	01
						02	18	01	02
010.CM.6141.UBA.013	Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	2	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.170.000	02	12	08	004
						02	18	01	02
						07	09	03	03
010.CM.6141.UBA.014	Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD	300	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18.850.000	07	09	03	01
						02	12	07	003
010.CM.6141.UBA.015	Daerah Yang Melakukan Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Secara Wajar	500	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18.750.000	07	09	03	01
010.CM.6141.UBA.016	Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai	110	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000	07	09	03	01
010.CM.6141.UBA.017	Daerah yang Difasilitasi dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah	0	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.993.380	07	09	03	02
010.CM.6141.UBA.018	Daerah yang Difasilitasi dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai atas Penerimaan Daerah	0	550	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.993.380	07	09	03	01
010.CM.6141.UBA.019	Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat	0	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	22.250.000	07	09	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6141.UBA.020	Daerah Dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	0	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.458.750	07	09	03	01
						02	12	07	003
010.CM.6141.UBA.021	Daerah Yang Menerbitkan Obligasi/Sukuk Daerah	0	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000	07	09	03	03
010.CM.6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri				4.000.000				
010.CM.6142.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				4.000.000				
010.CM.6142.UBA.001	Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah berkategori "Baik"	0	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.000.000	07	09	02	03
010.CM.6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri				31.134.766				
010.CM.6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				31.134.766				
010.CM.6144.UAC.001	KDH dan WKDH yang mengikuti Orientasi	1092	1092	Orang	10.350.000	07	09	02	02
						01	01	03	01
010.CM.6144.UAC.002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	360	390	Orang	2.776.576	06	01	02	02
						07	09	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6144.UAC.003	Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan	180	300	Orang	3.355.360	07	09	02	02
010.CM.6144.UAC.004	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	450	570	Orang	7.130.140	07	09	02	02
010.CM.6144.UAC.005	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	150	270	Orang	1.518.440	07	09	02	02
010.CM.6144.UAC.007	Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150	270	Orang	6.004.250	07	09	02	02
010.CM.6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa				0				
010.CM.6484.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				0				
010.CM.6484.UAC.001	Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang ditingkatkan Kualitasnya	0	0	Orang	0	06	07	03	02
010.CM.6484.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				0				
010.CM.6484.UBA.001	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	0	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	06	07	03	02
010.CM.6484.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				0				



- 46 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CM.6484.UBB.001	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	0	0	Desa	0	06	07	03	02
010.CP	Program Tata Kelola Kependudukan				274.965.721				
010.CP.1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan				93.130.147				
010.CP.1268.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga				78.194.225				
010.CP.1268.QAB.001	Lembaga pengguna yang terkoneksi dengan data warehouse kependudukan berbasis NIK Nasional	1300	1540	Lembaga	78.194.225	06	01	01	004
						06	01	02	03
						07	01	02	01
010.CP.1268.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				14.935.922				
010.CP.1268.UBA.001	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian yang Terintegrasi Antar Lembaga	40	60	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14.935.922	06	01	01	004
						06	01	02	03
010.CP.1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan				21.972.569				
010.CP.1269.PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik				2.050.000				
010.CP.1269.PBM.001	Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	1	0	Rekomendasi Kebijakan	2.050.000	07	01	02	01
010.CP.1269.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				13.904.660				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CP.1269.QAA.001	Akta Kelahiran yang diterbitkan	1057769	78265	Akta	1.095.806	04 07	17 01	01 02	01 02
010.CP.1269.QAA.002	Akta Kematian yang diterbitkan	400000	500000	Akta	3.982.001	04 07	16 01	03 02	01 02
010.CP.1269.QAA.003	Akta Perkawinan yang diterbitkan	1088508	1360364	Akta	5.537.720	04 07	16 01	03 02	01 02
010.CP.1269.QAA.004	Akta Perceraian yang diterbitkan	86838	50487	Akta	3.289.133	04 07	16 01	03 02	01 02
010.CP.1269.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				6.017.909				
010.CP.1269.UBA.001	Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	15	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.017.909	06 06	01 01	01 02	004 03
010.CP.6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital				159.863.005				
010.CP.6997.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				159.863.005				
010.CP.6997.UAB.001	Aplikasi ID digital	1	0	Sistem Informasi	159.863.005	07 07	01 10	02 05	02 02



- 48 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum				741.845.625				
010.CR.1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya				23.500.000				
010.CR.1233.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				3.800.000				
010.CR.1233.QDC.001	Fasilitasi penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500	800	Orang	3.800.000	01	01	02	03
010.CR.1233.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				4.900.000				
010.CR.1233.UAC.001	Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur	180	180	Orang	4.900.000	01	01	01	01
010.CR.1233.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				14.800.000				
010.CR.1233.UBA.002	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku, Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan	5	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.800.000	08	01	02	02
010.CR.1233.UBA.003	Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.600.000	01 02	01 04	02 01	01 01



- 49 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CR.1233.UBA.004	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Daerah melalui Tim Terpadu	0	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.400.000	01	01	02	01
010.CR.6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan				718.345.625				
010.CR.6145.PBC	Kebijakan Bidang Politik				7.300.000				
010.CR.6145.PBC.001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	2	2	Rekomendasi Kebijakan	4.800.000	07	01	03	03
010.CR.6145.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan Pertimbangan Urgensi terhadap Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000	01	04	01	01
010.CR.6145.PBC.003	Kebijakan Bidang Organisasi Kemasyarakatan	0	0	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000	01	04	01	01
010.CR.6145.PEB	Forum				7.150.000				
010.CR.6145.PEB.001	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	6	8	forum	7.150.000	07	01	01	03
010.CR.6145.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				4.800.000				
010.CR.6145.QDB.001	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	8	8	Lembaga	4.800.000	07	01	01	01
010.CR.6145.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				15.500.000				
010.CR.6145.QDC.001	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	400	800	Orang	4.000.000	04 07	19 01	02 01	01 03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.CR.6145.QDC.002	Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	2000	4000	Orang	11.500.000	01 04	04 19	01 02	02 01
010.CR.6145.QEI	Bantuan Lembaga				672.445.625				
010.CR.6145.QEI.001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	8	8	Lembaga	672.445.625	07	01	01	01
010.CR.6145.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				11.150.000				
010.CR.6145.UBA.001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	19	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.500.000	01	03	01	02
010.CR.6145.UBA.002	Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	19	19	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.650.000	01	03	01	02
010.WA	Program Dukungan Manajemen				235.872.421				
010.WA.4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu				235.872.421				
010.WA.4255.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga				9.730.107				
010.WA.4255.QAB.001	Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	76	76	Lembaga	9.730.107	07	01	03	02
010.WA.4255.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				226.142.314				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
010.WA.4255.QAH.001	Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1	1	layanan	226.142.314	07	01	03	02
TOTAL					3.175.481.103				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 52 -

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional				
PN 02 - Asia Power Index (Diplomatic Influence)		65,6	65,7	66,1
PN 07 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		93	93,5	95,5
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 02.09 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara		- (indikator baru)	0,546	0,58
PP 02.09 - Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional		4,97 (2023)	4,10 (Skala 5)	4,50 (Skala 5)
PP 02.09 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional		4,07	4,10 (Skala 5)	4,18 (Skala 5)
PP 02.09 - Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi		75	76	80
PP 07.16 - Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri	persen	85	87	89
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 02.09.01 - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga		52,43	69,75	76,21
KP 02.09.02 - Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	persen	75	75	79



- 53 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.09.02 - Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral	persen	75	75	79
KP 02.09.02 - Persentase keberhasilan pencalonan Indonesia/wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional	persen	75	75	79
KP 02.09.02 - Angka pembangunan postur diplomasi		0	5	25
KP 02.09.02 - Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	persen	15	20	40
KP 02.09.03 - Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional	persen	0	20	100
KP 02.09.04 - Persentase kesepakatan kerja sama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	persen	75	80	84
KP 02.09.04 - Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas	persen	75	80	82
KP 07.16.02 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri		96	96	96,4
KP 07.16.02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		97,5	98	98,4
KP 07.16.02 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri		98,5	98,7	99,1



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
011.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional				6.881.113				
011.AA.6026	Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional				6.881.113				
011.AA.6026.PBC	Kebijakan Bidang Politik				6.881.113				
011.AA.6026.PBC.004	Penyusunan Strategi Kebijakan Pengembangan Aset Soft Power	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.766.755	08	02	07	03
011.AA.6026.PBC.009	Penyusunan Grand Design Strategi dan Dasar Hukum Kerja Sama Pembangunan Indonesia	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.811.200	02	09	03	02
011.AA.6026.PBC.010	Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Diaspora dalam Pembangunan Nasional	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.136.203	02	09	02	03
011.AA.6026.PBC.011	Rekomendasi Kebijakan Skema Fasilitas bagi Diaspora	0	1	Rekomendasi Kebijakan	2.166.955	02	09	02	03
011.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral				15.582.702				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
011.AK.6021	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral				15.582.702				
011.AK.6021.PBC	Kebijakan Bidang Politik				1.986.093				
011.AK.6021.PBC.001	Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait diplomasi ekonomi termasuk koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, perumusan norma pelaksanaan diplomasi guna mendorong kemitraan strategis	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.986.093	02	09	04	01
011.AK.6021.PEA	Koordinasi				10.096.981				
011.AK.6021.PEA.052	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	27	31	kegiatan	10.096.981	02	09	02	01
011.AK.6021.PEB	Forum				3.499.628				
011.AK.6021.PEB.051	Partisipasi Aktif Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB	11	0	forum	2.399.628	02	09	02	01
011.AK.6021.PEB.052	Diplomasi Hilirisasi Industri dan Mineral Kritis	9	0	forum	1.100.000	02	09	04	01
011.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik				1.349.116.653				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
011.AL.4439	Pelayanan dan Pelindungan WNI Perwakilan RI				1.044.031.924				
011.AL.4439.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				1.044.031.924				
011.AL.4439.QAA.001	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI)	133000	133000	Orang	1.044.031.924	04 07	19 16	04 02	02 02
011.AL.6028	Pelayanan dan Pelindungan WNI Pusat				305.084.729				
011.AL.6028.PEC	Kerja sama				144.294.088				
011.AL.6028.PEC.001	Koordinasi dan Kerja Sama Pelayanan dan Pelindungan	3	3	Dokumen	144.294.088	07	16	02	01
011.AL.6028.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				160.790.641				
011.AL.6028.QAA.001	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	21000	21000	Orang	160.790.641	04 07	19 16	04 02	02 02
011.AM	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional				6.485.619				
011.AM.6030	Optimalisasi Diplomasi Hukum dan Perjanjian Internasional				6.485.619				
011.AM.6030.PEC	Kerja sama				6.485.619				



- 57 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
011.AM.6030.PEC.004	Penetapan Batas Maritim/ Penegasan Batas Darat	5	7	Kesepakatan	6.485.619	02	09	01	01
011.WA	Program Dukungan Manajemen				929.656				
011.WA.6015	Pengelolaan Organisasi				929.656				
011.WA.6015.UAD	Perencanaan dan Penganggaran				929.656				
011.WA.6015.UAD.001	Penyusunan Strategi Kebijakan Penguatan Postur Diplomasi	1	0	Dokumen	219.884	02	09	02	02
011.WA.6015.UAD.002	Koordinasi Penyusunan Regulasi Pendukung Postur Diplomasi	0	0	Dokumen	709.772	02	09	02	02
TOTAL					1.378.995.743				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



KEMENTERIAN PERTAHANAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 02.01 - Persentase pemenuhan pembangunan kekuatan pokok TNI	persen	30,3	30,3	100
PP 02.02 - Ranking industri pertahanan (SIPRI top 100)	peringkat	>100	<100	<100
PP 02.03 - Persentase sumber daya nasional yang dimanfaatkan menjadi kekuatan pertahanan	persen	100	100	100
PP 02.06 - Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi	persen	54,22	54,22	100
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 02.01.01 - Persentase pemenuhan alutsista	persen	30,3	30,3	100
KP 02.01.02 - Persentase penurunan pelanggaran terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa	persen	51,3	40	15
KP 02.01.03 - Persentase pemenuhan peralatan siber	persen	67,5	67,5	80
KP 02.01.04 - Persentase pemenuhan sarpras rumah dinas	persen	69,42	69,42	76,33
KP 02.01.05 - Persentase pemenuhan harwat alutsista	persen	49,7	49,7	60



- 59 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.02.01 - Persentase peningkatan kemampuan industri pertahanan	persen	60	68	100
KP 02.02.02 - Persentase pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan	persen	100	100	100
KP 02.02.03 - Persentase perjanjian imbal dagang kandungan lokal dan ofset (IDKLO) yang terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri	persen	100	100	100
KP 02.03.01 - Persentase kader bela negara yang telah terbentuk	persen	- (indikator baru)	10	100
KP 02.03.01 - Persentase kelulusan komponen cadangan dengan nilai baik	persen	100	100	100
KP 02.03.02 - Persentase penataan dan pembinaan komponen pendukung	persen	- (indikator baru)	100	100
KP 02.06.05 - Persentase realisasi rencana luas wilayah perairan indonesia (pedalaman, kepulauan, teritorial, ZEE, dan landas kontinen) yang diperbarui melalui surta hidrografi dan oseanografi	persen	54,22	54,22	100
KP 02.06.05 - Persentase pemenuhan peralatan dan sarpras penyelenggaraan hidro oseanografi	persen	42,1	42,1	100



- 60 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI				1.148.253.837				
012.AB.6513	Dukungan Kesiapan Operasi Matra Laut				1.148.253.837				
012.AB.6513.QHA	Operasi Bidang Pertahanan				1.148.253.837				
012.AB.6513.QHA.001	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	14	14	operasi	940.732.617	02	06	03	01
012.AB.6513.QHA.002	Survei Hidro-Oseanografi I	2	2	operasi	127.521.220	02	06	05	01
012.AB.6513.QHA.003	Survei Hidro-Oseanografi II	0	1	operasi	40.000.000	02	06	05	01
012.AB.6513.QHA.004	Survei Hidro-Oseanografi III	0	1	operasi	40.000.000	02	06	05	01
012.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit				7.357.354.090				
012.AC.1538	Peningkatan Perumahan Dinas Matra Udara				1.395.661.405				
012.AC.1538.RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				1.395.661.405				
012.AC.1538.RBM.001	Rumah Dinas Prajurit	133	0	unit	1.395.661.405	02	01	04	01
012.AC.6508	Peningkatan Perumahan Dinas Matra Darat				4.249.999.998				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AC.6508.RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				4.249.999.998				
012.AC.6508.RBM.001	Melaksanakan Pembangunan Rumdis Prajurit TNI AD (SBSN)	1	1	unit	4.249.999.998	02	01.	04	01
012.AC.6538	Penyelenggaraan Pendidikan Integratif				40.000.000				
012.AC.6538.SCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan				40.000.000				
012.AC.6538.SCG.001	Pendidikan SDM Pertahanan Siber	0	100	Orang	20.000.000	02	01	03	02
012.AC.6538.SCG.002	Pelatihan SDM Pertahanan Siber	0	100	Orang	20.000.000	02	01	03	02
012.AC.6542	Peningkatan Perumahan Dinas Integratif				755.747.996				
012.AC.6542.RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				755.747.996				
012.AC.6542.RBM.001	Rumdis Prajurit (SBSN)	1	1	unit	755.747.996	02	01	04	01
012.AC.6556	Peningkatan Perumahan Dinas Matra Laut				915.944.690				
012.AC.6556.RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				915.944.690				
012.AC.6556.RBM.001	Perumahan Dinas Prajurit	173	173	unit	915.944.690	02	01	04	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan				469.887.940.943				
012.AF.1464	Pembangunan/ Pengadaan Sarpras Pertahanan Matra Darat				948.009.878				
012.AF.1464.RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				948.009.878				
012.AF.1464.RBM.001	Pembangunan Pos Pamtas	0	100	unit	86.182.716	02	01	02	01
012.AF.1464.RBM.002	Pembangunan prioritas Bangfas atau Sarpras atau Gedung Kantor Satuan	0	100	unit	861.827.162	02	01	01	06
012.AF.1465	Pengadaan Alutsista Matra Darat				31.711.777.785				
012.AF.1465.RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				31.711.777.785				
012.AF.1465.RAF.001	Pengadaan atau penggantian Prioritas Ranpur	0	100	Unit	5.779.508.077	02	01	01	03
012.AF.1465.RAF.002	Pengadaan atau penggantian Prioritas Pesawat Terbang	100	100	Unit	3.612.213.267	02	01	01	03
012.AF.1465.RAF.003	Pengadaan atau penggantian Prioritas Senjata dan Aloptik	0	100	Unit	1.765.828.483	02	01	01	03



- 63 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AF.1465.RAF.004	Pengadaan atau penggantian Prioritas Munisi	0	100	Unit	15.038.546.618	02	01	01	03
012.AF.1465.RAF.005	Pengadaan atau penggantian Prioritas Rantis	0	100	Unit	580.666.823	02	01	01	03
012.AF.1465.RAF.006	Pengadaan atau penggantian Prioritas Alat Angkut Air	0	100	Unit	1.487.705.869	02	01	01	03
012.AF.1465.RAF.007	Pendukung Alutsista Strategis	0	100	Unit	3.447.308.648	02	01	01	03
012.AF.1532	Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan Matra Udara				5.125.000.000				
012.AF.1532.RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				5.125.000.000				
012.AF.1532.RBM.001	Gedung/Bangunan dan Fasilitas Lainnya	0	0	unit	5.125.000.000	02	01	01	06
012.AF.6494	Pengadaan Alutsista Matra Udara				9.511.399.479				
012.AF.6494.RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				9.511.399.479				
012.AF.6494.RAF.001	Pengadaan Pesawat	0	1	Unit	1.074.987.000	02	01	01	05
012.AF.6494.RAF.002	Peningkatan/Pengadaan Senri Senrat	1	1	Unit	6.836.412.479	02	01	01	05
012.AF.6494.RAF.003	Amunisi	0	1	Paket	400.000.000	02	01	01	05



- 64 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AF.6494.RAF.004	Radar	0	1	Paket	400.000.000	02	01	01	05
012.AF.6494.RAF.005	PSU	0	1	Paket	400.000.000	02	01	01	05
012.AF.6494.RAF.006	UAV	0	1	Paket	400.000.000	02	01	01	05
012.AF.6509	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista Matra Darat				5.312.206.329				
012.AF.6509.RCF	OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				5.312.206.329				
012.AF.6509.RCF.001	Pemeliharaan Prioritas Ranpur	0	100	Unit	1.034.554.640	02	01	05	01
012.AF.6509.RCF.002	Pemeliharaan Prioritas Pesawat Terbang	0	100	Unit	3.192.602.809	02	01	05	01
012.AF.6509.RCF.003	Pemeliharaan Prioritas Senjata	0	100	Unit	461.988.807	02	01	05	01
012.AF.6509.RCF.004	Pemeliharaan Prioritas Munisi	0	100	Unit	103.119.745	02	01	05	01
012.AF.6509.RCF.006	Pemeliharaan Prioritas Rantis	0	100	Unit	259.970.164	02	01	05	01
012.AF.6509.RCF.007	Pemeliharaan Prioritas Alang Air	0	100	Unit	259.970.164	02	01	05	01
012.AF.6509.RCF.009	Pemeliharaan Roket	0	1	Unit	0	02	01	05	01
012.AF.6509.RCF.010	Pemeliharaan Meriam	0	0	Unit	0	02	01	05	01
012.AF.6514	Pengadaan Alutsista Matra Laut				12.583.248.675				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AF.6514.RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				12.583.248.675				
012.AF.6514.RAF.001	KRI, KAL dan Alpung	2	2	Unit	4.172.800.000	02	01	01	04
012.AF.6514.RAF.002	Ranpur/Rantis	0	0	Unit	2.000.000.000	02	01	01	04
012.AF.6514.RAF.003	Pesawat Udara	0	0	Unit	2.000.000.000	02	01	01	04
012.AF.6514.RAF.004	Senjata dan Peralatan Elektronika	236	236	Unit	1.612.546.716	02	01	01	04
012.AF.6514.RAF.005	Amunisi	212885	212885	Unit	2.197.901.959	02	01	01	04
012.AF.6514.RAF.006	Pengadaan Peralatan Hidro-Oseanografi	0	1	Unit	600.000.000	02	06	05	02
012.AF.6515	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista Matra Laut				18.302.543.602				
012.AF.6515.RCF	OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				18.302.543.602				
012.AF.6515.RCF.001	KRI, KAL dan Alpung	15	15	Unit	14.302.543.602	02	01	05	02
012.AF.6515.RCF.002	Ranpur/Rantis	0	19	Unit	2.000.000.000	02	01	05	02
012.AF.6515.RCF.003	Pesawat Udara	0	4	Unit	2.000.000.000	02	01	05	02
012.AF.6516	Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan Matra Laut				1.810.667.667				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AF.6516.RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				1.810.667.667				
012.AF.6516.RBM.001	Dermaga KRI dan Sarpras Pangkalan	0	1	unit	383.363.016	02	01	01	06
012.AF.6516.RBM.002	Pangkalan Militer TNI AL	3	3	unit	817.916.403	02	01	01	06
012.AF.6516.RBM.003	Posal/Pos Kawasan Perbatasan	0	1	unit	188.378.566	02	01	02	01
012.AF.6516.RBM.004	Sarpras Militer Pulau Strategis	0	1	unit	121.009.682	02	01	01	06
012.AF.6516.RBM.005	Pembangunan Sarpras Hidro-Oseanografi	0	1	unit	300.000.000	02	06	05	02
012.AF.6517	Pengadaan Non Alutsista Matra Laut				470.435.626				
012.AF.6517.RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				470.435.626				
012.AF.6517.RBM.001	Siber	1	1	unit	470.435.626	02	01	03	01
012.AF.6532	Pengadaan Alutsista Integratif				14.000.000.000				
012.AF.6532.RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				14.000.000.000				
012.AF.6532.RAF.001	Pengadaan Senjata	0	1	Paket	3.500.000.000	02	01	01	02
012.AF.6532.RAF.002	Pengadaan Munisi	0	1	Paket	3.500.000.000	02	01	01	02
012.AF.6532.RAF.003	Pengadaan Materiel Alutsista	0	1	Paket	3.500.000.000	02	01	01	02



- 67 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AF.6532.RAF.004	Pengadaan Matsiber	0	1	Paket	3.500.000.000	02	01	03	01
012.AF.6546	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista Matra Udara				38.142.653.478				
012.AF.6546.RCF	OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				38.142.653.478				
012.AF.6546.RCF.001	Pesawat Terbang	216	216	Unit	35.334.075.677	02	01	05	03
012.AF.6546.RCF.002	Senri Senrat	3	3	Unit	622.237.989	02	01	05	03
012.AF.6546.RCF.003	Amunisi	0	4	Unit	629.000.000	02	01	05	03
012.AF.6546.RCF.004	Radar	29	29	Unit	869.310.524	02	01	05	03
012.AF.6546.RCF.005	PSU	3	3	Unit	374.735.115	02	01	05	03
012.AF.6546.RCF.006	UAV	4	0	Unit	313.294.173	02	01	05	03
012.AF.6552	Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan				2.469.598.797				
012.AF.6552.RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)				1.200.000.000				
012.AF.6552.RBC.001	Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) Kalimantan	0	35203	km	1.200.000.000	02	01	02	01



- 68 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AF.6552.RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				1.269.598.797				
012.AF.6552.RBM.001	Politeknik Unhan Kabupaten Belu NTT	0	0	unit	0	02	01	04	02
012.AF.6552.RBM.002	Smart Campus Unhan Sentul	0	1	unit	1.209.598.797	02	01	04	02
012.AF.6552.RBM.003	Rumdis Politeknik Unhan Kabupaten Belu NTT	0	0	unit	0	02	01	04	02
012.AF.6552.RBM.010	Jalur Penghubung Sektor Selatan Perbatasan Papua - PNG	0	1	unit	20.000.000	02	01	02	02
012.AF.6552.RBM.011	Jalur Logistik Sektor Utara Perbatasan Papua - PNG	0	1	unit	20.000.000	02	01	02	02
012.AF.6552.RBM.012	Jalur Penghubung dan Logistik Pos Perbatasan di NTT	0	1	unit	20.000.000	02	01	02	02
012.AF.6559	Pengadaan/Harwat Alutsista Strategis				329.500.399.628				
012.AF.6559.RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				329.500.399.628				
012.AF.6559.RAF.730	Alutsista Dalam Negeri Kemhan	1	1	Paket	27.465.810.848	02	02	02	01
012.AF.6559.RAF.731	Alutsista Luar Negeri Kemhan	1	1	Paket	247.038.488.117	02	01	01	01



- 69 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AF.6559.RAF.732	Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri melalui Skema Spend to Invest	0	1	Paket	16.000.000.000	02	02	03	01
012.AF.6559.RAF.734	Pembangunan dan Peningkatan RS TNI	1	1	Paket	2.996.100.663	02	01	04	01
012.AF.6559.RAF.736	Alutsista Luar Negeri Integratif	0	1	Paket	2.000.000.000	02	01	01	01
012.AF.6559.RAF.737	Alutsista Luar Negeri Matra Darat	0	1	Paket	2.000.000.000	02	01	01	01
012.AF.6559.RAF.738	Alutsista Luar Negeri Matra Laut	0	1	Paket	2.000.000.000	02	01	01	01
012.AF.6559.RAF.739	Alutsista Luar Negeri Matra Udara	0	1	Paket	2.000.000.000	02	01	01	01
012.AF.6559.RAF.740	Alutsista Dalam Negeri Integratif	0	1	Paket	2.000.000.000	02	02	02	01
012.AF.6559.RAF.741	Alutsista Dalam Negeri Matra Darat	0	1	Paket	2.000.000.000	02	02	02	01
012.AF.6559.RAF.742	Alutsista Dalam Negeri Matra Laut	0	1	Paket	2.000.000.000	02	02	02	01
012.AF.6559.RAF.743	Alutsista Dalam Negeri Matra Udara	0	1	Paket	2.000.000.000	02	02	02	01
012.AF.6559.RAF.744	Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri melalui Skema Spend to Invest (Ranpur)	0	1	Paket	4.000.000.000	02	02	03	01
012.AF.6559.RAF.745	Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri melalui Skema Spend to Invest (Kapal Permukaan)	0	1	Paket	4.000.000.000	02	02	03	02



- 70 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AF.6559.RAF.746	Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri melalui Skema Spend to Invest (Kapal Selam)	0	1	Paket	4.000.000.000	02	02	03	02
012.AF.6559.RAF.747	Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri melalui Skema Spend to Invest (Pesawat Terbang)	0	1	Paket	4.000.000.000	02	02	03	03
012.AF.6559.RAF.748	Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri melalui Skema Spend to Invest (Helikopter)	0	1	Paket	4.000.000.000	02	02	03	03
012.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan				871.488.000				
012.AJ.1403	Pembinaan Kesadaran Bela Negara				45.488.000				
012.AJ.1403.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				45.488.000				
012.AJ.1403.PEF.130	Bela Negara	900	2000	orang	41.488.000	02	03	01	01
012.AJ.1403.PEF.131	Sosialisasi Bela Negara melalui Media Digital	0	100	orang	4.000.000	02	03	01	01
012.AJ.6554	Pembinaan Potensi dan Kekuatan Sumber Daya Pertahanan				826.000.000				
012.AJ.6554.PAH	Peraturan lainnya				8.000.000				



- 71 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.AJ.6554.PAH.001	Regulasi terkait Komduk	0	1	peraturan	4.000.000	02	03	02	02
012.AJ.6554.PAH.002	Penataan dan Penetapan Komduk	0	1	peraturan	4.000.000	02	03	02	02
012.AJ.6554.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				64.175.648				
012.AJ.6554.QAH.001	Bantuan DPP LVRI	1	1	layanan	64.175.648	02	03	02	01
012.AJ.6554.SCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan				753.824.352				
012.AJ.6554.SCG.053	Pembentukan Komcad	9525	9525	Orang	706.824.352	02	03	01	02
012.AJ.6554.SCG.054	Pembinaan Komduk SDM	0	300	Orang	3.000.000	02	03	02	01
012.AJ.6554.SCG.055	Pembinaan Komduk Non SDM	0	1	Kegiatan	4.000.000	02	03	02	01
012.AJ.6554.SCG.056	Penyegaran Komcad	0	1	Kegiatan	40.000.000	02	03	01	02
012.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan				8.932.766.528				
012.KA.1406	Pembinaan dan Pengembangan Industri Pertahanan				8.752.766.528				
012.KA.1406.RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				8.752.766.528				
012.KA.1406.RAF.005	First Article Hybrid Vertical Take Off Landing (VTOL) Fixed Wing Target Drone	1	1	Unit	0	05	01	13	01



- 72 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
012.KA.1406.RAF.054	Pengembangan Pesawat N219A	0	1	Paket	417.266.528	02	02	01	01
						05	01	13	01
012.KA.1406.RAF.055	Pembangunan Pabrik Propelan	0	1	Paket	8.155.500.000	02	02	03	01
012.KA.1406.RAF.056	First Article Matra Darat	0	1	Paket	60.000.000	02	02	01	02
012.KA.1406.RAF.057	First Article Matra Laut	0	1	Paket	60.000.000	02	02	01	02
012.KA.1406.RAF.058	First Article Matra Udara	0	1	Paket	60.000.000	02	02	01	02
012.KA.6555	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan				180.000.000				
012.KA.6555.SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa				180.000.000				
012.KA.6555.SDB.031	Litbang Alpalhankam Matra Darat	0	1	Purwarupa	60.000.000	02	02	01	01
012.KA.6555.SDB.032	Litbang Alpalhankam Matra Laut	0	1	Purwarupa	60.000.000	02	02	01	01
012.KA.6555.SDB.033	Litbang Alpalhankam Matra Udara	0	1	Purwarupa	60.000.000	02	02	01	01
TOTAL					488.197.803.398				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

KEMENTERIAN KEUANGAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional				
PN 07 - Rasio pendapatan negara terhadap PDB	persen	12,82	12,36	13,75–18,00
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 07.12 - Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	persen PDB	10,07	10,24	11,52–15,00
PP 07.12 - Rasio PNBPN (persen PDB)	persen PDB	2,61	2,11	2,21–2,99
PP 07.13 - Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara		86	86	88
PP 07.14 - Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman	persen PDB	2,29	2,53	2,45–2,50
PP 07.14 - Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin keberlanjutan fiskal	persen PDB	39,5	39,15	39,01–39,10
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 05.03.02 - Waktu penahanan (<i>dwell time</i>) di pelabuhan selama fase impor	hari	2,85	2,90 - 2,85	2,66 - 2,60
KP 07.09.03 - Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	persen	6,81	6,10	6,50
KP 07.12.01 - Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi	persen	90	90	90



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 07.12.01 - Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh WP badan dan orang pribadi berdasarkan target yang ditetapkan	persen	100	100	100
KP 07.12.01 - Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara	persen	100	100	100
KP 07.12.02 - Rasio capaian PNBPN terhadap target yang ditetapkan	persen	90-100	90-100	90-100
KP 07.13.01 - Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah		84	85	87
KP 07.13.02 - Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	persen	100	100	100
KP 07.13.02 - Alokasi TKD untuk infrastruktur	triliun rupiah	70,4	55,6	55,6
KP 07.13.02 - Persentase kinerja hibah daerah	persen	75	75	75
KP 07.14.01 - Imbal hasil (<i>yield</i>) SBN	persen	7,0	6,8-7,2	6,0-7,0
KP 07.14.01 - Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara	persen	100	100	100



- 75 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara				46.984.314				
015.CB.4776	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD				25.665.927				
015.CB.4776.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				1.137.049				
015.CB.4776.PBA.201	Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (PN)	1	0	Kajian	1.137.049	07	13	01	02
015.CB.4776.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				24.528.878				
015.CB.4776.UAE.201	Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran Pusat	30	30	Rekomendasi	22.020.364	07	13	01	03
015.CB.4776.UAE.203	Rekomendasi Sinergi Penganggaran Pusat dan Daerah	3	3	Rekomendasi	2.508.514	07	13	01	02
						07	13	02	02
015.CB.4779	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi				15.608.724				
015.CB.4779.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				6.062.220				
015.CB.4779.UAC.201	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	1150	0	Orang	6.062.220	07	09	03	01
						07	13	02	01
015.CB.4779.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				9.546.504				



- 76 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.CB.4779.UBB.201	Bimtek BUMDes (PN)	2000	0	Desa	9.546.504	07	09	03	01
						07	13	02	01
015.CB.4780	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD				4.073.728				
015.CB.4780.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				4.073.728				
015.CB.4780.UAE.201	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	2	0	Rekomendasi	4.073.728	07	09	03	01
015.CB.4781	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD				1.635.935				
015.CB.4781.UAD	Perencanaan dan Penganggaran				1.635.935				
015.CB.4781.UAD.201	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	1	1	Dokumen	1.635.935	07	13	02	02
015.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara				28.726.817				
015.CC.4786	Perumusan Kebijakan Administratif				6.090.361				
015.CC.4786.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				6.090.361				
015.CC.4786.UAE.001	Rekomendasi Monitoring Pengelolaan PNPB	6	0	Rekomendasi	6.090.361	07	12	02	01
015.CC.4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi				6.436.804				
015.CC.4787.QAE	Pelayanan Publik kepada UMKM				6.436.804				
015.CC.4787.QAE.201	Promosi Ekspor UMKM (PN)	100	0	UMKM	6.436.804	06	03	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.CC.4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum				11.079.652				
015.CC.4789.QHB	Operasi Bidang Keamanan				11.079.652				
015.CC.4789.QHB.201	Joint Task Force On Narcotics (PN)	3	0	operasi	6.512.700	07	06	04	01
015.CC.4789.QHB.202	Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi (PN)	1	0	operasi	4.566.952	02	06	03	01
						05	01	16	10
015.CC.4790	Perumusan Kebijakan Administratif				3.520.000				
015.CC.4790.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				3.520.000				
015.CC.4790.PBA.201	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	3.520.000	07	12	01	03
015.CC.4795	Perumusan Kebijakan Administratif				1.600.000				
015.CC.4795.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				1.600.000				
015.CC.4795.PBA.201	Rekomendasi Kebijakan Penggalan Potensi Perpajakan melalui Analisis Input Output	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000	07	12	01	03
015.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko				63.704.778				
015.CD.4798	Pengelolaan Aset				28.135.838				
015.CD.4798.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				15.352.225				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.CD.4798.PBA.201	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	5.021.137	06 07	05 12	01 02	06 04
015.CD.4798.PBA.203	Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)	5	0	Rekomendasi Kebijakan	7.505.976	02 02	21 16	03 03	02 04
015.CD.4798.PBA.204	Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	2.825.112	07 02	13 16	01 03	03 02
015.CD.4798.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				12.783.613				
015.CD.4798.UAE.201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	27090	0	Rekomendasi	12.783.613	07	12	02	04
015.CD.4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif				2.185.918				
015.CD.4801.PAA	Undang-Undang				2.185.918				
015.CD.4801.PAA.301	RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara	1	1	RUU	2.185.918	07	12	02	03
015.CD.4808	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara				18.605.467				
015.CD.4808.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				8.168.597				



- 79 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.CD.4808.PBA.203	Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.724.050	06	05	02	02
015.CD.4808.PBA.207	Penyusunan Rekomendasi/Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif (PN)	1	1	Rekomendasi Kebijakan	6.444.547	07	14	02	01
015.CD.4808.UAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan				10.436.870				
015.CD.4808.UAL.201	Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (Sovereign Credit Rating) Indonesia (PN)	1	0	Dokumen	1.797.987	07	14	01	01
015.CD.4808.UAL.208	Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial - Social Fund Linked Sukuk (PN)	1	1	Dokumen	6.705.743	02	13	05	01
015.CD.4808.UAL.208.0000	Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial - Social Fund Linked Sukuk (PN) - Pusat	1	1	Dokumen	6.705.743	03	04	02	003
015.CD.4808.UAL.302	Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dukungan Pemerintah Melalui Platform KPBU 4.0	1	1	Dokumen	1.933.140	07	14	02	02
015.CD.4809	Pengelolaan risiko Keuangan Negara				3.715.630				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.CD.4809.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				3.715.630				
015.CD.4809.UAE.204	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	2	0	Rekomendasi	890.553	06	05	02	02
015.CD.4809.UAE.205	Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN)	2	0	Laporan	1.122.521	07	15	01	03
015.CD.4809.UAE.206	Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) (PN)	2	0	Rekomendasi	1.702.556	02	11	03	03
015.CD.6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi				382.840				
015.CD.6212.UAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan				382.840				
015.CD.6212.UAL.208	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	100000	0	Dokumen	382.840	02	14	002	004
015.CD.6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara				5.748.085				
015.CD.6214.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				5.748.085				
015.CD.6214.UAE.203	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	5	0	Laporan	5.748.085	03	03	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.CD.6219	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif				4.931.000				
015.CD.6219.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				4.931.000				
015.CD.6219.PBA.001	Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan	0	4	Rekomendasi Kebijakan	4.931.000	07	14	01	01
015.CE	Program Kebijakan Fiskal				50.793.646				
015.CE.4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan				5.150.000				
015.CE.4763.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				5.150.000				
015.CE.4763.PBA.209	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pillar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	750.000	07 05	12 04	01 01	02 03
015.CE.4763.PBA.210	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	600.000	07	12	01	03
015.CE.4763.PBA.211	Kajian Penguatan Peran APBN dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000	07	12	02	02
015.CE.4763.PBA.212.0000	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN) - Pusat	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000	03	04	03	006



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.CE.4763.PBA.213	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Akses Indonesia pada OECD (PN)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000	02	09	06	02
015.CE.4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan				44.044.321				
015.CE.4764.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				44.044.321				
015.CE.4764.PBA.201	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perpajakan	10	10	Rekomendasi Kebijakan	10.427.511	07 04	12 13	01 05	02 02
015.CE.4764.PBA.202	Rekomendasi Kebijakan APBN	6	6	Rekomendasi Kebijakan	16.483.770	07 07 07	13 13 15	01 01 01	01 02 11
015.CE.4764.PBA.204	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro	6	6	Rekomendasi Kebijakan	11.133.040	07	15	01	11
015.CE.4764.PBA.207	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Lembaga Pembiayaan Kerja Sama Pembangunan Internasional	0	1	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000	02	09	03	02
015.CE.4773	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan				1.599.325				



- 83 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.CE.4773.PAC	Peraturan Pemerintah				1.599.325				
015.CE.4773.PAC.202	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	1	0	RPP	1.599.325	07	14	01	02
015.WA	Program Dukungan Manajemen				17.398.988.840				
015.WA.4693	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi				22.898.875				
015.WA.4693.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				22.898.875				
015.WA.4693.UAB.002	Sistem Informasi PNPB	2	2	Sistem Informasi	3.315.866	07	12	02	05
015.WA.4693.UAB.203	Sistem Informasi Anggaran	1	1	Sistem Informasi	19.583.009	07	13	01	04
015.WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				2.400.000				
015.WA.4701.UAK	Pengelolaan Aset BUN				2.400.000				
015.WA.4701.UAK.201	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)	1	0	Unit	2.400.000	02	17	04	01
015.WA.4705	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi				28.842.708				
015.WA.4705.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				28.842.708				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.WA.4705.UAB.201	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPan) (PN)	1	0	Modul Aplikasi	10.527.030	07	12	02	04
015.WA.4705.UAB.202	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2 (PN)	1	0	Modul Aplikasi	15.089.160	07	13	01	04
015.WA.4705.UAB.203	Aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)	1	0	Modul Aplikasi	3.226.518	07	12	02	01
015.WA.4710	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi				202.942.533				
015.WA.4710.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				202.942.533				
015.WA.4710.UAB.201	Core Tax System (PN)	4	0	Sistem Informasi	201.742.533	07	12	01	01
015.WA.4710.UAB.209	Sistem Penanganan Pelanggaran Bidang Penerimaan Negara dalam rangka Penegakan Hukum (PN)	1	0	Sistem Informasi	1.200.000	07	12	01	04
015.WA.4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)				16.949.902.509				
015.WA.4712.UAM	Hasil Kelolaan Dana				16.949.902.509				
015.WA.4712.UAM.201	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	1000000	0	Kilo Liter	16.949.902.509	06 02	02 11	01 03	02 04



- 85 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.WA.4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)				126.856.872				
015.WA.4713.UAM	Hasil Kelolaan Dana				126.856.872				
015.WA.4713.UAM.201	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	1470000	0	Usaha Mikro	126.856.872	03	03	02	02
						06	03	02	02
015.WA.4749	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi				2.500.000				
015.WA.4749.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				2.500.000				
015.WA.4749.UAB.201	Sistem INSW Generasi II (PN)	1	0	Sistem Informasi	2.500.000	05	03	02	01
015.WA.4751	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)				8.577.600				
015.WA.4751.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				8.577.600				
015.WA.4751.PBA.203	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	1	0	Rekomendasi Kebijakan	8.577.600	02	14	002	004
015.WA.4752	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)				54.067.744				
015.WA.4752.UAM	Hasil Kelolaan Dana				54.067.744				
015.WA.4752.UAM.201	Beasiswa Dokter Spesialis (PN)	1000	0	Orang	20.283.872	04	15	03	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
015.WA.4752.UAM.201.0000	Beasiswa Dokter Spesialis (PN) - Pusat	1000	0	Orang	20.283.872	07	07	03	03
015.WA.4752.UAM.202.0000	Beasiswa Afirmasi (PN) - Pusat	1000	0	Orang	33.783.872	07	07	03	03
TOTAL					17.589.198.395				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 87 -

KEMENTERIAN PERTANIAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 02.10 - Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	persen	3,4 (2022)	3,5	3,3
PP 02.10 - Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)		0,693 (2023, angka kajian sementara BPS)	0,7445	0,8599
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 02.10.01 - Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	ton	23.578	196.984	2.309.701
KP 02.10.01 - Peningkatan luas panen padi KSPP Kalimantan Tengah	ha	0	146.806	1.643.167
KP 02.10.02 - Peningkatan produksi hortikultura KSPP Sumatera Utara	ton	481	25.840	56.240
KP 02.10.02 - Peningkatan luas panen hortikultura KSPP Sumatera Utara	ha	16,02	1.700	3.700
KP 02.10.03 - Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan	ton	0	65.724	3.240.081
KP 02.10.03 - Peningkatan luas panen padi KSPP Sumatera Selatan	ha	0	28.568	2.599.240
KP 02.10.04 - Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	0	33.624	238.020



- 88 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.10.04 - Peningkatan luas panen padi KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	0	10.930	183.111
KP 02.10.04 - Peningkatan produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	0	49.100	181.038
KP 02.10.04 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	0	9.048	29.640
KP 02.10.05 - Peningkatan produksi jagung KSPP Papua	ton	0	1.310	12.393
KP 02.10.05 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Papua	ha	0	189	1.589
KP 02.10.06 - Peningkatan produksi beras KSPP Papua Selatan	ton	0	0	3.719.000
KP 02.10.06 - Peningkatan luas panen padi KSPP Papua Selatan	ha	0	0	1.900.000
KP 02.10.07 - Lahan baku sawah yang dicetak	ribu ha	0	42	79,81
KP 02.10.07 - Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman	ribu ha	0	6,9	12,12
KP 02.10.10 - Produksi daging	juta ton	5,29 (2023)	4,96	5,56
KP 02.10.10 - Produksi telur	juta ton	6,89 (2023)	7,43	8,79
KP 02.10.10 - Produksi susu	ribu ton	837,22 (2023)	855,57	900,4
KP 02.10.11 - Produksi padi	juta ton	53,98	54,45	56,05
KP 02.10.11 - Produksi jagung	juta ton	19,56	21,48	25,89
KP 02.10.11 - Produksi aneka kacang	ribu ton	516,11	540,28	592,32
KP 02.10.11 - Produksi buah dan sayur	juta ton	28,82	30,66	35,47



- 89 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.10.11 - Produksi sorghum	ribu ton	17,34	18,21	18,95
KP 02.10.11 - Produksi ubi jalar	ton	1.430.341	1.517.449	1.707.902
KP 02.10.11 - Produksi kedelai	ton	349.099	370.359	416.842
KP 02.10.13 - Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	persen	0	100	100
KP 02.10.13 - Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	persen	0	70	90
KP 02.10.14 - Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi	komoditas	3	3	4
KP 02.10.16 - Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	lembaga	120	125	145
KP 02.10.16 - Persentase petani muda terhadap jumlah petani	persen	21,93 (ST 2023 BPS)	22,03	22,43
KP 02.10.17 - Produksi tanaman obat	ton	526.889 (2023)	529.523,45	540.193,61
KP 02.10.17 - Produksi vanili	ton	1.505 (2022)	1.582	1.588
KP 02.10.17 - Produksi lada	ton	75.205 (2022)	64.408	64.666
KP 02.10.17 - Produksi pala	ton	40.896 (2022)	41.527	41.693
KP 02.10.17 - Produksi florikultura	ribu tangkai	679.328,585 (2023)	597.622,50	596.969,14
KP 02.10.17 - Produksi cengkeh	ton	137.124 (2022)	133.570	134.105
KP 02.10.17 - Produksi kopi	ton	774.961 (2022)	780.957	80.221



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.10.17 - Produksi tebu	ton	2.405.907 (2022)	36.813.539	84.714.460
KP 02.10.17 - Produksi karet	ton	2.717.081 (2022)	2.496.364	3.080.114
KP 02.10.17 - Produksi kakao	ton	650.612 (2022)	632.787	634.796
KP 02.10.17 - Produksi teh	ton	124.661 (2022)	116.555	116.648
KP 02.10.17 - Pertumbuhan PDB tanaman perkebunan	persen	1,73 (2023)	1,94	3,03
KP 02.10.17 - Pertumbuhan PDB tanaman hortikultura	persen	-0,31 (2023)	1,36	3,04
KP 02.10.18 - Indeks Kepatuhan terhadap Standard dan Regulasi Budi Daya Pertanian Berkelanjutan		0	3,0	3,4
KP 02.10.18 - Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	persen	10,46 (2021)	11,0	13
KP 02.10.18 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	persen	73,4 (prognosis)	75	87
KP 02.10.18 - Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	persen	1,45 (2022)	1,47	1,55
KP 02.10.18 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	varietas dan/atau galur	28 (2021)	30	30
KP 02.10.18 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	aksesi	4.675,0 (2021)	4.700	4.800
KP 02.15.02 - Persentase penurunan susut pangan	persen	3	3-5	3-5
KP 04.14.01 - Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	kab/kota	- (indikator baru)	100	514



- 91 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 05.01.05 - Produksi kelapa sawit	ton	235.421.494 (2023)	239.646.870	257.074.690
KP 05.01.05 - Produksi bahan baku (CPO dan CPKO)	ton/hektar	51.794.263 (2022)	53.021.870	56.877.775
KP 05.01.06 - Produktivitas kelapa	ton/hektar	1,12 (2022)	1,13	1,21
KP 05.01.06 - Produksi kelapa	ton	2.867.054	2.880.690	2.936.021
KP 05.01.08 - Produksi sagu	ton	385.905 (2022)	393.623	478.451
KP 05.01.08 - Produksi ubi kayu	ton	16.764.227	17.270.926	18.330.731
KP 05.01.08 - Produktivitas sagu	ton/hektar	3,08 (2022)	3,12	3,19
KP 05.01.08 - Produktivitas ubi kayu	ton/hektar	27,11 (2023)	27,81	29,56
KP 08.03.03 - Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	persen	0,248 (2023)	0,091	0,439



- 92 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				2.384.997.298				
018.DL.1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian				173.949.999				
018.DL.1810.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM				30.751.009				
018.DL.1810.PDI.U01	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	500	2000	Orang	30.751.009	02	10	16	02
018.DL.1810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				27.307.500				
018.DL.1810.QDB.001	Penumbuhan dan Penguatan P4S	150	0	Lembaga	27.307.500	02	10	16	03
						06	07	07	02
018.DL.1810.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				46.410.000				
018.DL.1810.QDD.001	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	1691	0	Kelompok Masyarakat	46.410.000	06	03	02	01
						08	03	05	02
						02	10	16	02
018.DL.1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan				69.481.490				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.DL.1810.SCC.001	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	2310	0	Orang	15.826.459	02	10	16	02
018.DL.1810.SCC.001.3507	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur - Kab. Malang	390	0	Orang	1.671.129	05	01	08	02
018.DL.1810.SCC.002	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	5460	0	Orang	47.923.024	06	03	02	01
						02	10	16	02
018.DL.1810.SCC.002.3507	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur - Kab. Malang	930	0	Orang	4.930.283	05	01	08	02
018.DL.1810.SCC.003.1505	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Muaro Jambi	0	1000	Orang	1.146.401	02	10	02	03
018.DL.1810.SCC.003.1803	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Lampung Selatan	0	1000	Orang	1.146.401	02	10	03	03
018.DL.1810.SCC.003.3507	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Malang	0	1000	Orang	1.146.401	02	10	06	03
018.DL.1810.SCC.003.5303	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Kupang	0	1000	Orang	1.146.401	02	10	04	03
018.DL.1810.SCC.003.6305	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Tapin	0	1000	Orang	1.146.401	02	10	01	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.DL.1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian				849.586.679				
018.DL.1812.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				814.936.679				
018.DL.1812.QDC.001	Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian	37829	37829	Orang	814.936.679	02 06	10 07	16 07	02 02
018.DL.1812.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				34.650.000				
018.DL.1812.QDD.001	Percontohan penerapan Teknologi Pertanian	1020	0	Kelompok Masyarakat	30.600.000	02 06 02	14 07 10	002 04 16	005 02 02
018.DL.1812.QDD.002	Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan	5	0	Kelompok Masyarakat	4.050.000	02 06	10 07	16 04	03 02
018.DL.5892	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian				1.361.460.619				
018.DL.5892.PEA	Koordinasi				8.404.014				
018.DL.5892.PEA.001	Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS)	1	0	kegiatan	8.404.014	02	10	16	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.DL.5892.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				46.779.298				
018.DL.5892.QDC.001	Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	10500	0	Orang	46.779.298	02 06	10 03	16 02	03 01
018.DL.5892.SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan				1.306.277.307				
018.DL.5892.SAC.001	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV)	4886	4886	Orang	1.064.699.252	02	10	16	02
018.DL.5892.SAC.002	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma Tiga (D-III)	908	908	Orang	155.743.421	02	10	16	02
018.DL.5892.SAC.003	Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian	1053	1053	Orang	85.834.634	02	10	16	02
018.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				59.123.482.550				
018.EC.1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma				4.320.660.319				
018.EC.1777.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				50.698.450				
018.EC.1777.QDC.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	0	10000	Orang	50.698.450	02 05	10 01	17 06	01 03



- 96 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						06	07	04	02
018.EC.1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				4.269.961.869				
018.EC.1777.RAI.001	Kawasan Kelapa	6000	130313	Hektar	3.427.197.306	05	01	06	03
018.EC.1777.RAI.001.8207	Kawasan Kelapa - Kab. Pulau Morotai	100	0	Hektar	1.255.590	06	07	05	02
018.EC.1777.RAI.002	Kawasan Sagu	1700	8300	Hektar	208.148.214	05	01	08	01
						06	07	04	02
018.EC.1777.RAI.002.1408	Kawasan Sagu - Kab. Bengkalis	100	0	Hektar	405.320	06	07	05	02
018.EC.1777.RAI.002.9409	Kawasan Sagu - Kab. Biak Numfor	100	0	Hektar	591.210	06	07	05	02
018.EC.1777.RAI.003	Kawasan Pinang	2100	10850	Hektar	634.616.349	02	10	17	02
018.EC.1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan				201.416.501				
018.EC.1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				84.805.401				
018.EC.1779.QDD.001		21	21		14.128.481	02	10	18	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan			Kelompok Masyarakat		02	19	02	04
						06	07	04	02
018.EC.1779.QDD.002	Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	54	150	Kelompok Masyarakat	70.676.920	02	10	17	02
018.EC.1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				116.611.100				
018.EC.1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	80	400	Hektar	52.810.000	02	10	17	02
						02	19	02	03
						06	07	04	07
018.EC.1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	1200	5275	Hektar	63.801.100	05	01	06	03
						02	10	17	02
018.EC.5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan				24.406.837.237				
018.EC.5885.PDC	Sertifikasi Produk				10.665.119				
018.EC.5885.PDC.001	Sertifikat Produk Tanaman Pangan	30	36	produk	10.665.119	05	01	08	01
						05	01	08	02
						02	10	11	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.EC.5885.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				24.396.172.118				
018.EC.5885.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	946	4427	Unit	6.642.507.510	02	10	11	03
						02	15	02	02
						05	01	08	01
						06	07	04	02
018.EC.5885.RAG.002	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	66	90	Unit	115.915.755	02	10	11	03
						02	15	02	02
						05	01	08	01
						05	01	08	02
						06	07	04	02
018.EC.5885.RAG.003	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW)	11328	12701	Unit	17.637.748.853	02	10	07	03
018.EC.5885.RAG.003.1600	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	4251	Unit	6.039.519.309	02	10	03	03
018.EC.5885.RAG.003.5300	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	621	Unit	294.109.940	02	10	04	03
018.EC.5885.RAG.003.6200	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	3068	Unit	4.358.834.066	02	10	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.EC.5885.RAG.003.9400	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW) - Provinsi Papua	0	100	Unit	4.735.431	02	10	05	03
018.EC.5885.RAG.003.9500	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	3128	Unit	4.443.399.727	02	10	06	03
018.EC.5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura				2.729.502.915				
018.EC.5887.PDA	Standardisasi Produk				5.000.000				
018.EC.5887.PDA.010	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	500	500	produk	5.000.000	02	10	18	03
018.EC.5887.PDC	Sertifikasi Produk				2.000.000				
018.EC.5887.PDC.010	Sertifikat Produk Hortikultura	15	15	produk	2.000.000	02	10	17	03
018.EC.5887.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				4.800.000				
018.EC.5887.QDD.021	Kelompok Tani terlatih GAP	30	30	Kelompok Masyarakat	3.600.000	02	10	17	02
						02	19	02	04
						07	15	01	05
018.EC.5887.QDD.022	Kelompok Tani Terlatih GHP	10	10		1.200.000	07	15	01	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
				Kelompok Masyarakat		02	10	17	02
018.EC.5887.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				6.753.125				
018.EC.5887.RAG.010	Sarana Pascapanen Hortikultura	20	20	Unit	6.753.125	02	10	17	03
						03	03	01	01
						04	13	05	04
018.EC.5887.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				2.702.989.790				
018.EC.5887.RAI.010	Horticulture Development of Dryland Areas Project	2552	2552	Unit	2.702.989.790	03	03	03	04
						02	10	11	01
018.EC.5887.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				7.960.000				
018.EC.5887.RBK.010	Prasarana Pascapanen Hortikultura	4	4	unit	4.000.000	04	13	05	04
						02	10	17	03
018.EC.5887.RBK.011	Prasarana Pengolahan Hortikultura	6	6	unit	3.960.000	02	10	17	03
						03	03	01	01
						04	13	05	04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.EC.5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan				25.222.714.288				
018.EC.5888.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				97.000.000				
018.EC.5888.QDC.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Semusim dan Tahunan	0	19400	Orang	97.000.000	02	10	17	01
018.EC.5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				25.125.714.288				
018.EC.5888.RAI.001	Kawasan Lada	175	16100	Hektar	1.344.065.797	02	10	17	02
018.EC.5888.RAI.002	Kawasan Pala	600	9000	Hektar	75.795.960	02	10	17	02
018.EC.5888.RAI.003	Kawasan Cengkeh	650	12300	Hektar	83.066.724	02	10	17	02
018.EC.5888.RAI.004	Kawasan Tebu	550	87200	Hektar	7.924.377.708	02	10	17	02
						07	15	01	03
018.EC.5888.RAI.005	Kawasan Vanili	15	105	Hektar	45.748.932	02	10	17	02
018.EC.5888.RAI.006	Kawasan Kopi	1750	61110	Hektar	2.604.256.637	02	10	17	02
						06	07	04	02



- 102 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.EC.5888.RAI.007	Kawasan Kakao	2050	50009	Hektar	3.374.569.261	06	07	04	02
						02	10	17	02
018.EC.5888.RAI.008	Kawasan Karet	1100	40000	Hektar	3.014.159.364	02	10	17	02
018.EC.5888.RAI.009	Kawasan Jambu Mete	450	4600	Hektar	265.611.492	02	10	17	02
018.EC.5888.RAI.010	Kawasan Teh	0	4878	Hektar	493.294.813	02	10	17	02
018.EC.5888.RAI.011	Kawasan Tebu (Biofuel)	0	78550	Hektar	5.900.767.600	02	11	03	04
018.EC.5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan				820.949.064				
018.EC.5889.PDA	Standardisasi Produk				5.681.714				
018.EC.5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	13000	0	Standar	5.681.714	02	10	17	01
018.EC.5889.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				37.160.000				
018.EC.5889.QDD.001	Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan yang ditangani	15	16	Kelompok Masyarakat	4.360.000	02	10	17	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.EC.5889.QDD.002	Pembinaan Pengolahan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi	0	41	Kelompok Masyarakat	32.800.000	02	11	03	04
018.EC.5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				396.133.500				
018.EC.5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	257	434	Unit	274.056.000	05 06 02	01 07 10	06 04 17	03 02 03
018.EC.5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	37	134	Unit	122.077.500	02 05 05	10 01 01	17 06 08	03 03 01
018.EC.5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				381.973.850				
018.EC.5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	15	223	unit	238.685.000	05 02	01 10	06 17	03 03
018.EC.5889.RBK.001.1600	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Provinsi Sumatera Selatan	0	10	unit	10.140.000	06	04	01	02
018.EC.5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	8	134	unit	143.288.850	02 05	10 01	17 06	03 03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						05	01	08	01
018.EC.5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan				124.850.527				
018.EC.5890.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				27.607.173				
018.EC.5890.RAG.001	Produksi benih tanaman perkebunan	0	2984200	Unit	27.607.173	02	10	17	01
018.EC.5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				17.885.706				
018.EC.5890.RBK.002	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	21	7	unit	17.885.706	02	10	17	01
						05	01	06	02
018.EC.5890.RDK	OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				79.357.648				
018.EC.5890.RDK.001	Operasional Nursery	9	9	unit	25.100.598	05	01	06	02
						02	10	17	01
018.EC.5890.RDK.002	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	663	714	unit	43.962.883	02	10	17	01
						05	01	06	02
						05	01	08	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.EC.5890.RDK.002.6102	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan - Kab. Bengkayang	3	0	unit	40.380	06	07	05	02
018.EC.5890.RDK.002.8101	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan - Kab. Kepulauan Tanimbar	4	0	unit	37.852	06	07	05	02
018.EC.5890.RDK.002.8207	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan - Kab. Pulau Morotai	12	0	unit	107.270	06	07	05	02
018.EC.5890.RDK.002.9471	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan - Kota Jayapura	2	0	unit	21.120	06	07	05	02
018.EC.5890.RDK.003	Operasional laboratorium pengujian perbenihan tanaman perkebunan	0	2	unit	10.294.167	02	10	17	01
018.EC.5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak				236.551.700				
018.EC.5891.PEH	Promosi				15.200.000				
018.EC.5891.PEH.001	Promosi produk dan usaha peternakan prioritas	0	39	Kegiatan	15.200.000	02	10	10	03
018.EC.5891.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				163.171.700				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.EC.5891.QDB.001	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	9	0	Lembaga	2.431.700	02 06	10 07	16 04	03 02
018.EC.5891.QDB.002	Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Peternakan	0	39	Lembaga	38.200.000	02	10	16	03
018.EC.5891.QDB.003	Fasilitasi. pembinaan dan/atau pendampingan pelaku usaha komoditas peternakan yang siap edar	0	25	Lembaga	3.500.000	02	10	16	03
018.EC.5891.QDB.004	Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan Efisiensi Rantai Nilai	0	30	Lembaga	3.500.000	02	10	16	03
018.EC.5891.QDB.005	Fasilitasi dan pembinaan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan	0	39	Lembaga	50.060.000	02	10	16	03
018.EC.5891.QDB.006	Fasilitasi/ pembinaan/ pendampingan akses pembiayaan	0	39	Lembaga	47.580.000	02	10	16	03
018.EC.5891.QDB.007	Fasilitasi dan pembinaan Investasi Peternakan	0	35	Lembaga	16.600.000	02	10	10	03
018.EC.5891.QDB.008	Pembinaan penjaminan mutu produk hasil peternakan pada unit usaha produk hewan	0	1	Lembaga	1.300.000	02	10	13	03
018.EC.5891.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				1.300.000				
018.EC.5891.QDC.001	Pembinaan penjaminan mutu produk hasil peternakan kepada masyarakat	0	1	Orang	1.300.000	02	10	13	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.EC.5891.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				1.300.000				
018.EC.5891.QIC.001	Pengawasan penerapan jaminan mutu pada unit usaha produk hewan	0	1	Lembaga	1.300.000	02	10	13	03
018.EC.5891.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				25.980.000				
018.EC.5891.RAG.001	Sarana pasca panen/pengolahan/pemasaran hasil peternakan	8	72	Unit	25.980.000	02	10	10	03
018.EC.5891.RAG.002	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	0	0	Unit	-	02	10	10	03
						02	15	02	02
018.EC.5891.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				29.600.000				
018.EC.5891.RBK.001	Prasarana pasca panen/pengolahan/pemasaran hasil peternakan	0	61	unit	29.600.000	02	15	02	02
						02	10	10	03
018.EC.5891.RBK.002	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	0	0	unit	-	02	10	10	03
018.EC.6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian				1.059.999.999				
018.EC.6916.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				1.059.999.999				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.EC.6916.QDB.101	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	10	0	Lembaga	1.059.999.999	02	10	16	03
018.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				157.890.773.945				
018.HA.1761	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan				286.188.649				
018.HA.1761.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				286.188.649				
018.HA.1761.RAI.611	Kawasan Kedelai	26500	0	Hektar	251.220.000	02	10	11	02
018.HA.1761.RAI.612	Kawasan Ubi Kayu	1000	0	Hektar		05	01	08	01
018.HA.1761.RAI.613	Kawasan Ubi Jalar	1000	0	Hektar	7.293.956	06	07	04	02
						02	10	11	02
018.HA.1761.RAI.614	Kawasan Kacang Tanah	1500	0	Hektar	22.968.112	02	10	11	02
018.HA.1761.RAI.615	Kawasan Kacang Hijau	1500	0	Hektar	4.706.581	02	10	11	02
018.HA.1761.RAI.616	Kawasan Aneka Umbi Lainnya	500	0	Hektar		02	10	11	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan				11.514.026.570				
018.HA.1762.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				11.514.026.570				
018.HA.1762.RAI.621	Kawasan Padi	435000	0	Hektar	7.964.157.327	02	10	11	02
						07	15	01	03
018.HA.1762.RAI.622	Kawasan Jagung	250000	0	Hektar	1.462.136.002	02	10	11	02
018.HA.1762.RAI.625	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	50000	0	Hektar	163.000.000	07	15	01	03
						02	10	14	002
018.HA.1762.RAI.626	Kawasan Sorgum	0	0	Hektar	-	02	10	11	02
018.HA.1762.RAI.627.0000	Kawasan Padi (QW) - Pusat	305000	36796	Hektar	403.680.338	02	10	07	02
018.HA.1762.RAI.627.1600	Kawasan Padi (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	102031	Hektar	606.931.257	02	10	03	02
018.HA.1762.RAI.627.5300	Kawasan Padi (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	4969	Hektar	29.556.080	02	10	04	02
018.HA.1762.RAI.627.6200	Kawasan Padi (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	73638	Hektar	438.033.641	02	10	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1762.RAI.627.9500	Kawasan Padi (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	75066	Hektar	446.531.925	02	10	06	02
018.HA.1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat				521.650.000				
018.HA.1771.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				513.650.000				
018.HA.1771.RAI.010	Kawasan Bawang Merah	0	6800	Hektar	262.400.000	02	10	11	02
						07	15	01	03
018.HA.1771.RAI.011	Kawasan Aneka Cabai	4200	4200	Hektar	215.250.000	07	15	01	03
						02	10	11	02
018.HA.1771.RAI.012	Kawasan Tanaman Obat	0	100	Hektar	8.000.000	02	10	17	02
						05	01	11	04
018.HA.1771.RAI.013	Kawasan Sayuran Umbi	0	200	Hektar	28.000.000	02	10	11	02
018.HA.1771.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				8.000.000				
018.HA.1771.RBK.011	Prasarana Budidaya Sayuran	0	10	unit	8.000.000	02	10	17	02
018.HA.1773	Perlindungan Hortikultura				117.161.600				



- 111 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1773.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				13.848.000				
018.HA.1773.QDD.010	Kelompok Tani terlatih PHT	0	80	Kelompok Masyarakat	13.848.000	02	10	17	02
						06	07	04	02
						06	03	02	01
018.HA.1773.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				103.313.600				
018.HA.1773.RAI.010	Area pengendalian OPT Hortikultura	4417	4417	Unit	77.372.000	06	07	04	02
						02	10	17	02
						08	03	03	04
018.HA.1773.RAI.011	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim Hortikultura	0	140	Hektar	12.000.000	08	03	03	04
						02	10	17	02
018.HA.1773.RAI.014	Sarana Perlindungan Hortikultura	0	100	Unit	13.941.600	02	10	17	02
						08	03	03	04
						06	07	04	02
018.HA.1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak				8.817.535.967				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1783.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				3.960.000				
018.HA.1783.QDC.001	Fasilitasi dan pembinaan produsen pakan/bahan pakan	0	360	Orang	3.060.000	02	10	10	01
018.HA.1783.QDC.002	Fasilitasi dan pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pakan	0	20	Orang	900.000	02	10	10	01
018.HA.1783.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				8.143.560.500				
018.HA.1783.QEG.001	Bantuan Hijauan Pakan Ternak	0	900	Unit	126.728.000	02	10	10	01
						02	19	02	04
018.HA.1783.QEG.002	Bantuan pakan olahan/bahan pakan	0	310000	Unit	8.016.832.500	02	10	10	01
018.HA.1783.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk				55.500.000				
018.HA.1783.QJA.001	Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan	3,887	0	Produk	6.100.000	02	10	10	01
018.HA.1783.QJA.002	Pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan	0	8000	Produk	49.400.000	02	10	10	01
018.HA.1783.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				614.515.467				



- 113 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1783.RAG.001	Sarana Pakan/bahan pakan	0	35	Unit	112.000.000	02	10	10	01
018.HA.1783.RAG.002	Sarana Pakan Hijauan di UPT	0	1339	Unit	168.864.472	02	10	10	01
018.HA.1783.RAG.003	Hijauan Pakan Ternak	0	45	Unit	125.385.000	02	10	10	01
018.HA.1783.RAG.004	Pakan Olahan dan Bahan Pakan	35	35	Unit	204.465.995	02	10	10	01
018.HA.1783.RAG.005	Sarana penjaminan mutu dan keamanan pakan	0	5	Unit	3.800.000	02	10	10	01
018.HA.1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan				3.936.219.053				
018.HA.1784.PEC	Kerja sama				3.600.000				
018.HA.1784.PEC.001	Kerja Sama antar Lembaga	0	1	Dokumen	3.600.000	02	10	10	04
018.HA.1784.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				2.800.000				
018.HA.1784.PEF.001	Sosialisasi siskeswanas	0	10	orang	2.800.000	02	10	13	04



- 114 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				1.924.823.200				
018.HA.1784.QAH.001	Layanan Kesehatan Hewan	20000	0	layanan	12.379.200	02	10	10	04
						04	13	02	02
						04	14	01	04
018.HA.1784.QAH.003	Layanan untuk Pemberantasan PHMS pada ternak	0	25700000	layanan	1.884.664.000	02	10	10	04
018.HA.1784.QAH.004	Layanan surveilans penyakit hewan untuk pencegahan PHMS	0	453	layanan	27.180.000	02	10	10	04
						02	10	13	04
018.HA.1784.QAH.005	Layanan surveilans penyakit ternak untuk pemberantasan PHMS	0	10	layanan	600.000	02	10	10	04
018.HA.1784.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				10.220.000				
018.HA.1784.QDB.001	Pembinaan pengendalian dan penanggulangan penularan PHMS	0	2800000	Unit Kerja	10.220.000	02	10	10	04
018.HA.1784.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				1.736.000				
018.HA.1784.QDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan Hewan untuk Masyarakat	0	62	Orang	1.736.000	02	10	13	04



- 115 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1784.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				800.000				
018.HA.1784.QIA.001	Pengawasan terkait mutu, keamanan dan khasiat obat dan alat kesehatan hewan	0	1	Laporan	800.000	02	10	13	04
018.HA.1784.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk				22.944.552				
018.HA.1784.QJA.001	Hasil Uji Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	2500	0	Produk	14.694.552	02	10	13	04
018.HA.1784.QJA.002	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Pengujian Obat Hewan	0	2900	Produk	8.250.000	02	10	13	04
018.HA.1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit				12.885.775				
018.HA.1784.QJC.001	Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi	77675	0	Sampel	8.385.775	02	10	10	04
						04	13	02	02
018.HA.1784.QJC.003	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	0	1500	Sampel	4.500.000	02	10	13	04
018.HA.1784.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				936.978.306				
018.HA.1784.RAG.001	Sarana Kesehatan Hewan	0	1	Unit	20.000.000	02	10	10	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1784.RAG.002	Sarana ketersediaan Obat Hewan dan alat kesehatan hewan untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan PHMS target	0	9120300	Unit	51.562.000	02	10	10	04
018.HA.1784.RAG.003	Obat Hewan dan Bahan Biologik yang diproduksi	7175105	0	Unit	154.638.525	04	14	01	04
						02	10	13	04
018.HA.1784.RAG.004	Sarana pengujian obat hewan yang memenuhi standar mutu, khasiat dan keamanan	0	10	Unit	4.650.000	02	10	13	04
018.HA.1784.RAG.005	Sarana Laboratorium Kesehatan Hewan	0	3	Unit	672.000.000	02	10	13	04
018.HA.1784.RAG.007	SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	1	0	Unit	16.466.580	02	10	13	04
						02	16	05	02
018.HA.1784.RAG.008	SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah	1	0	Unit	17.661.200	02	10	13	04
018.HA.1784.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				1.003.372.220				
018.HA.1784.RBK.001	Prasarana Kesehatan Hewan	0	3	unit	912.000.000	02	10	10	04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1784.RBK.007	SBSN Prasarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	1	0	unit	55.533.421	02	10	13	04
						02	16	05	02
018.HA.1784.RBK.008	SBSN Prasarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah	1	0	unit	35.838.800	02	10	13	04
018.HA.1784.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				14.259.000				
018.HA.1784.UAC.001	Bimtek untuk tenaga kesehatan hewan	0	390	Orang	11.739.000	02	10	13	04
018.HA.1784.UAC.002	Bimtek untuk tenaga kesehatan hewan dalam Pemberantasan PHMS pada ternak	0	60	Orang	2.520.000	02	10	10	04
018.HA.1784.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				1.800.000				
018.HA.1784.UBA.001	Advokasi Kesehatan Hewan	0	9	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	1.800.000	02	10	13	04
018.HA.1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak				3.052.130.714				
018.HA.1785.PDA	Standardisasi Produk				917.370.902				



- 118 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1785.PDA.001	Benih Ternak Unggul	6400800	7351440	produk	371.885.835	02	10	10	01
018.HA.1785.PDA.002	Bibit Ternak Unggul	1790184	2135358	produk	545.485.067	02	10	10	01
018.HA.1785.PDC	Sertifikasi Produk				9.600.000				
018.HA.1785.PDC.001	Sertifikasi benih/bibit ternak	0	30	Sertifikat	4.200.000	02	10	10	01
018.HA.1785.PDC.002	Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practices	0	15	Sertifikat	1.200.000	02	10	18	02
018.HA.1785.PDC.003	Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	0	1422427	produk	4.200.000	02	10	10	01
018.HA.1785.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				843.250.000				
018.HA.1785.QAH.001	Layanan Optimalisasi Reproduksi	0	3000000	layanan	711.250.000	02	10	10	02
018.HA.1785.QAH.002	Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak	0	1900000	layanan	132.000.000	02	10	10	02
018.HA.1785.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				26.668.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1785.QDD.001	Fasilitasi dan pembinaan penguatan uji zuriat sapi perah untuk kelompok peternak	0	25	Kelompok Masyarakat	8.400.000	02	10	10	02
018.HA.1785.QDD.002	Fasilitasi dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak	0	12	Kelompok Masyarakat	18.268.000	02	10	10	02
018.HA.1785.QEL	Bantuan Hewan				838.426.522				
018.HA.1785.QEL.001	Ternak Ruminansia Perah	0	1500	Ekor	77.045.000	02	10	10	01
018.HA.1785.QEL.002	Ternak Ruminansia Potong	4100	5000	Ekor	73.209.160	02	10	10	01
						06	03	02	02
018.HA.1785.QEL.003	Ternak Unggas	600000	57000	Ekor	594.846.606	06	03	02	02
						02	10	10	01
018.HA.1785.QEL.004	Ternak Lainnya	200	3700	Ekor	93.325.756	02	10	10	01
						06	03	02	02
018.HA.1785.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				1.200.000				
018.HA.1785.QIA.001	Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan kelembagaan	0	2	Laporan	1.200.000	02	10	10	01
018.HA.1785.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk				34.403.777				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1785.QJA.001	Pengujian mutu benih (semen cair/semen beku) ternak	0	3400	Produk	650.000	02	10	10	01
018.HA.1785.QJA.002	Pengujian mutu benih (embrio) ternak	0	68	Produk	1.523.250	02	10	10	01
018.HA.1785.QJA.003	Pengujian performa bibit ternak	0	2140324	Produk	32.230.527	02	10	10	01
018.HA.1785.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				184.498.667				
018.HA.1785.RAG.001	Sarana Perbibitan Ternak	18	10	Unit	153.290.468	02	10	10	01
018.HA.1785.RAG.006	Ternak Yang Didata dan Ditandai	0	100000	Unit	9.200.000	02	10	10	02
						06	07	04	02
018.HA.1785.RAG.007	SBSN Sarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari	1	0	Unit	22.008.199	02	10	10	01
018.HA.1785.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				191.512.846				
018.HA.1785.RBK.001	Prasarana Perbibitan Ternak	6	10	unit	106.178.846	02	10	10	01
018.HA.1785.RBK.007	SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari	1	0	unit	85.334.000	02	10	10	01



- 121 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1785.REB	Konservasi Jenis/Spesies				5.200.000				
018.HA.1785.REB.001	Pengelolaan SDGH	0	6	Jenis	5.200.000	02	10	18	03
018.HA.1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner				3.063.909.512				
018.HA.1786.PCA	Perizinan Produk				3.420.000				
018.HA.1786.PCA.002	Registrasi Produk Hewan	0	120	Produk	3.420.000	02	10	10	03
018.HA.1786.PDF	Sertifikasi Lembaga				23.385.000				
018.HA.1786.PDF.001	Sertifikasi NKV unit usaha produk hasil peternakan	0	350	Lembaga	19.000.000	02	10	10	03
018.HA.1786.PDF.002	Sertifikasi NKV unit usaha produk hewan	0	90	Lembaga	4.385.000	02	10	10	03
018.HA.1786.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				4.660.700				
018.HA.1786.QAH.002	Pelayanan Publik Penjaminan Keamanan Produk Hewan	0	3533	layanan	4.660.700	02	10	13	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1786.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				56.338.000				
018.HA.1786.QDB.001	Pembinaan penjaminan keamanan produk hasil peternakan pada unit usaha produk hasil peternakan	0	439	Lembaga	55.938.000	02	10	13	01
						02	10	13	03
018.HA.1786.QDB.003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Penanganan Hewan	0	5	Lembaga	400.000	02	10	10	04
018.HA.1786.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				34.986.150				
018.HA.1786.QDC.001	Pembinaan penjaminan keamanan produk hasil peternakan kepada masyarakat	0	2060	Orang	11.700.000	02	10	13	03
018.HA.1786.QDC.002	Pembinaan penjaminan keamanan produk hewan	0	600	Orang	6.000.000	02	10	13	03
018.HA.1786.QDC.003	Pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat dan komunikasi risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	0	1250	Orang	11.100.000	02	10	13	03
018.HA.1786.QDC.004	Pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan	0	185	Orang	6.186.150	02	10	10	04
018.HA.1786.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				20.520.000				
018.HA.1786.QIA.001	Pengawasan peredaran produk hasil peternakan	0	2850	Produk	13.680.000	02	10	10	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1786.QIA.002	Pengawasan peredaran produk hewan	0	1425	Produk	6.840.000	02	10	10	03
018.HA.1786.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				47.735.000				
018.HA.1786.QIC.001	Pengawasan unit usaha produk hasil peternakan	0	3105	Lembaga	32.890.000	02	10	10	03
018.HA.1786.QIC.002	Pengawasan unit usaha produk hewan	0	1290	Lembaga	14.445.000	02	10	10	03
018.HA.1786.QIC.003	Pengawasan penerapan kesejahteraan Hewan pada unit penanganan hewan	0	5	Lembaga	400.000	02	10	13	04
018.HA.1786.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk				37.935.842				
018.HA.1786.QJA.000	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	24550	0	Produk	15.527.342	02	10	13	02
018.HA.1786.QJA.001	Hasil uji keamanan produk hewan	0	14285	Produk	22.408.500	02	10	13	02
018.HA.1786.QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				11.200.000				
018.HA.1786.QKA.002	Pemantauan Dugaan Kejadian zoonosis dan penyimpangan keamanan pangan	0	40	laporan	11.200.000	02	10	13	04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1786.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				704.204.820				
018.HA.1786.RAG.001	Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	252	Unit	699.300.000	02	10	13	03
018.HA.1786.RAG.002	Sarana penjaminan keamanan produk hasil peternakan	0	0	Unit	-	02	10	13	03
018.HA.1786.RAG.003	Sarana penerapan kesejahteraan Hewan	0	3	Unit	4.904.820	02	10	10	04
018.HA.1786.RAG.004	Sarana penjaminan keamanan produk hewan	0	0	Unit	-	02	10	13	03
018.HA.1786.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				2.079.124.000				
018.HA.1786.RBK.001	Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	282	unit	2.077.600.000	02	10	13	03
018.HA.1786.RBK.003	Prasarana Penerapan Kesejahteraan Hewan	0	2	unit	1.524.000	02	10	13	03
						02	10	10	04
018.HA.1786.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				40.400.000				
018.HA.1786.UAC.001	Bimbingan Teknis Penjaminan Keamanan Produk Hewan	0	185	Orang	7.400.000	02	10	13	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1786.UAC.002	Bimbingan Teknis Zoonosis	0	930	Orang	31.000.000	02	10	13	03
018.HA.1786.UAC.003	Bimbingan Teknis penerapan kesejahteraan Hewan:	0	50	Orang	2.000.000	02	10	13	04
018.HA.1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian				23.392.912.400				
018.HA.1794.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				14.641.916.217				
018.HA.1794.RBK.001	Pembangunan Irigasi Perpipaan Pertanian	1000	1000	unit	400.000.000	06 08	03 03	02 03	02 02
018.HA.1794.RBK.001.5307	Pembangunan Irigasi Perpipaan Pertanian - Kab. Alor	2	2	unit	800.000	06	07	05	02
018.HA.1794.RBK.001.6108	Pembangunan Irigasi Perpipaan Pertanian - Kab. Kapuas Hulu	3	3	unit	1.200.000	06	07	05	02
018.HA.1794.RBK.002	Pembangunan Embung Pertanian	500	750	unit	499.800.000	02 02 08	12 10 03	04 18 03	02 01 01
018.HA.1794.RBK.003	Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	1000	1000	unit	530.691.000	08 02	03 12	03 04	01 02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						06	07	04	07
						02	10	18	01
018.HA.1794.RBK.004	Pembangunan irigasi perpompaan pertanian	2500	2500	unit	1.200.000.000	08	03	03	02
						06	03	02	02
						02	10	11	01
018.HA.1794.RBK.005	Pengembangan jaringan irigasi pertanian	0	0	unit		02	10	11	01
						08	03	03	06
018.HA.1794.RBK.006	Pembangunan jaringan irigasi pertanian (QW)	0	11643	unit	9.259.115.116	08	03	03	06
018.HA.1794.RBK.006.0000	Pembangunan jaringan irigasi pertanian (QW) - Pusat	0	1295	unit	1.073.004.655	02	10	07	01
018.HA.1794.RBK.006.1200	Pembangunan jaringan irigasi pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Utara	0	250	unit	10.355.793	02	10	02	01
018.HA.1794.RBK.006.1600	Pembangunan jaringan irigasi pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	3988	unit	3.303.947.686	02	10	03	01
018.HA.1794.RBK.006.5300	Pembangunan jaringan irigasi pertanian (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	348	unit	216.108.972	02	10	04	01
018.HA.1794.RBK.006.6200	Pembangunan jaringan irigasi pertanian (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	1671	unit	1.384.519.924	02	10	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1794.RBK.006.9400	Pembangunan jaringan irigasi pertanian (QW) - Provinsi Papua	0	150	unit	6.213.476	02	10	05	01
018.HA.1794.RBK.006.9500	Pembangunan jaringan irigasi pertanian (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	3941	unit	3.264.964.610	02	10	06	01
018.HA.1794.RBK.007	Pembangunan embung pertanian (QW)	0	0	unit	-	02	10	07	03
						02	12	04	02
018.HA.1794.RBK.007.1600	Pembangunan embung pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	0	unit	-	02	10	03	01
018.HA.1794.RBK.008	Jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi (QW)	0	0	unit	128.576.797	08	03	03	06
018.HA.1794.RBK.008.0000	Jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi (QW) - Pusat	0	0	unit	-	02	10	07	02
018.HA.1794.RBK.008.1600	Jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	0	unit	-	02	10	03	01
018.HA.1794.RBK.009	Pembangunan irigasi perpipaan pertanian (QW)	0	0	unit	-	08	03	03	02
018.HA.1794.RBK.009.0000	Pembangunan irigasi perpipaan pertanian (QW) - Pusat	0	0	unit	-	02	10	07	03
018.HA.1794.RBK.009.1600	Pembangunan irigasi perpipaan pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	0	unit	-	02	10	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1794.RBK.010	Pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (QW)	0	0	unit	-	02	12	04	02
018.HA.1794.RBK.010.0000	Pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (QW) - Pusat	0	0	unit	-	02	10	07	03
018.HA.1794.RBK.010.1600	Pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	0	unit	-	02	10	03	01
018.HA.1794.RBK.011	Irigasi Perpompaan (QW)	1	1936	unit	1.855.203.503	08	03	03	02
018.HA.1794.RBK.011.0000	Irigasi Perpompaan (QW) - Pusat	1	307	unit	345.783.198	02	10	07	02
018.HA.1794.RBK.011.1600	Irigasi Perpompaan (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	350	unit	602.289.612	02	10	03	01
018.HA.1794.RBK.011.5300	Irigasi Perpompaan (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	41	unit	29.330.043	02	10	04	01
018.HA.1794.RBK.011.6200	Irigasi Perpompaan (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	613	unit	434.683.680	02	10	01	01
018.HA.1794.RBK.011.9500	Irigasi Perpompaan (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	625	unit	443.116.970	02	10	06	01
018.HA.1794.RBK.012	Pembangunan Irigasi Perpompaan Subsektor Perkebunan	0	1283	unit	768.529.800	02	10	17	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1794.RDK	OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				8.750.996.183				
018.HA.1794.RDK.001	Jaringan Irigasi Pertanian Yang Direhabilitasi	18930	18930	unit	7.965.928.200	08	03	03	06
018.HA.1794.RDK.002.0000	Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi (QW) - Pusat	0	637	unit	116.340.600	02	10	07	02
018.HA.1794.RDK.002.1200	Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi (QW) - Provinsi Sumatera Utara	0	0	unit	-	02	10	03	01
018.HA.1794.RDK.002.1600	Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	1369	unit	250.109.393	02	10	02	01
018.HA.1794.RDK.002.5300	Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	unit	11.055.736	02	10	04	01
018.HA.1794.RDK.002.6200	Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	2195	unit	401.097.067	02	10	01	01
018.HA.1794.RDK.002.9400	Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi (QW) - Provinsi Papua	0	150	unit	6.465.187	02	10	05	01
018.HA.1795	Perlindungan dan Penyediaan Lahan				63.770.185.645				
018.HA.1795.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				141.735.652				
018.HA.1795.PBR.002		46	46		109.000.000	02	09	06	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian			Rekomendasi Kebijakan		02	10	18	03
018.HA.1795.PBR.003	Kebijakan terkait pelindungan dan penyediaan lahan pertanian	0	1	Rekomendasi Kebijakan	1.895.652	02	10	18	03
018.HA.1795.PBR.004	Survei investigasi dan desain terkait perlindungan dan penyediaan lahan pertanian	0	100	Rekomendasi Kebijakan	30.840.000	02	10	18	03
018.HA.1795.QMA	Data dan Informasi Publik				21.500.000				
018.HA.1795.QMA.001	Data Lahan Pertanian yang termutakhirkan	3	3	dokumen	21.500.000	02	10	16	04
						06	01	02	01
						06	07	04	02
018.HA.1795.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				13.048.590.654				
018.HA.1795.RBK.001	Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	0	62	unit	400.000.000	08	03	03	03
						02	10	18	03
018.HA.1795.RBK.002.0000	Jalan Usaha Tani (QW) - Pusat	0	36,796	unit	1.851.503.560	02	10	07	03
018.HA.1795.RBK.002.1200	Jalan Usaha Tani (QW) - Provinsi Sumatera Utara	0	200	unit	9.584.404	02	10	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1795.RBK.002.1600	Jalan Usaha Tani (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	102031	unit	5.134.017.031	02	10	03	01
018.HA.1795.RBK.002.5300	Jalan Usaha Tani (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	4969	unit	250.014.174	02	10	04	01
018.HA.1795.RBK.002.6200	Jalan Usaha Tani (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	73638	unit	3.705.316.130	02	10	01	01
018.HA.1795.RBK.002.9400	Jalan Usaha Tani (QW) - Provinsi Papua	0	95	unit	4.552.591	02	10	05	01
018.HA.1795.RBK.002.9500	Jalan Usaha Tani (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	75066	unit	2.764	02	10	06	01
018.HA.1795.RBK.003	Jalan Pertanian yang Terbangun	4000	4000	unit	1.693.600.000	02	10	11	01
						05	03	01	02
						06	07	04	02
018.HA.1795.RBK.003.1302	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Pesisir Selatan	3	0	unit	938.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.1304	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Sijunjung	3	0	unit	938.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.1905	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Bangka Selatan	3	0	unit	938.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.5305	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Timor Tengah Utara	5	0	unit	647.100	06	07	06	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1795.RBK.003.5306	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Belu	2	0	unit	633.600	06	07	06	01
						06	07	05	02
018.HA.1795.RBK.003.6201	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Kotawaringin Barat	3	0	unit	938.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.6203	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Kapuas	3	0	unit	938.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.6401	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Paser	2	0	unit	633.600	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.7210	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Sigi	1	0	unit	329.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.7314	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Sidenreng Rappang	5	0	unit	1.547.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.7403	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Konawe	2	0	unit	633.600	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.7601	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Majene	4	0	unit	1.242.600	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.7602	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Polewali Mandar	5	0	unit	1.547.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.7603	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Mamasa	5	0	unit	1.547.100	06	07	06	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1795.RBK.003.7606	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Mamuju Tengah	5	0	unit	1.547.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.8202	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Halmahera Tengah	2	0	unit	633.600	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.9420	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Keerom	7	0	unit	656.100	06	07	06	01
018.HA.1795.RBK.003.9801	Jalan Pertanian yang Terbangun - Kab. Sorong	2	0	unit	631.800	06	07	06	01
018.HA.1795.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan				49.134.728.406				
018.HA.1795.RBO.001	Pengembangan Lahan Pertanian Produktif	0	42	km2	211.050.000	02 08	10 03	18 03	01 03
018.HA.1795.RBO.002	Optimasi Lahan	3500	3500	km2	11.937.114.829	08 02 06 02	03 12 07 10	03 04 04 11	03 02 02 01
018.HA.1795.RBO.003	Rehabilitasi lahan pertanian	0	1000	km2	400.000	02 08 02	12 03 10	04 03 18	01 03 01



- 134 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1795.RBO.004	Pengembangan lahan pertanian produktif (QW)	0	0	km2	-	08	03	03	03
018.HA.1795.RBO.004.1600	Pengembangan lahan pertanian produktif (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	0	km2	-	02	10	03	01
018.HA.1795.RBO.005	Cetak Sawah (QW)	150000	212500	hektar	36.986.162.905	08	03	03	03
						02	12	04	01
018.HA.1795.RBO.005.0000	Cetak Sawah (QW) - Pusat	0	24670	hektar	3.337.360.068	02	10	07	01
018.HA.1795.RBO.005.1600	Cetak Sawah (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	75963	hektar	10.276.249.052	02	10	03	01
018.HA.1795.RBO.005.5300	Cetak Sawah (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	4969	hektar	672.162.464	02	10	04	01
018.HA.1795.RBO.005.6200	Cetak Sawah (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	150000	31832	hektar	12.545.391.099	02	10	01	01
018.HA.1795.RBO.005.9500	Cetak Sawah (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	75066	hektar	10.155.000.222	02	10	06	01
018.HA.1795.RBO.006.5300	Konservasi lahan pertanian - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	km2	672	02	10	04	01
018.HA.1795.RBR	Dukungan Teknis				1.423.630.933				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1795.RBR.001.0000	SID Cetak Sawah (QW) - Pusat	230000	24670		185.619.538	02	10	07	01
018.HA.1795.RBR.001.1600	SID Cetak Sawah (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	75963		500.542.574	02	10	03	01
018.HA.1795.RBR.001.5300	SID Cetak Sawah (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	4969		32.740.149	02	10	04	01
018.HA.1795.RBR.001.6200	SID Cetak Sawah (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	31832		210.091.969	02	10	01	01
018.HA.1795.RBR.001.9500	SID Cetak Sawah (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	75066		494.636.703	02	10	06	01
018.HA.1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian				28.671.788.652				
018.HA.1796.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				28.671.788.652				
018.HA.1796.RAG.001	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	79697	79892	Unit	11.190.622.280	06	07	04	02
						06	03	02	02
						02	10	11	02
018.HA.1796.RAG.002	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	0	2320	Unit	61.062.602	02	10	17	02
						06	03	02	02
018.HA.1796.RAG.003		0	20	Unit	31.803.648	06	07	04	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan					02	10	17	02
018.HA.1796.RAG.004	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan	0	250	Unit	19.432.000	02	10	10	01
018.HA.1796.RAG.005	Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian	15	15	Unit	18.000.000	02	10	11	02
018.HA.1796.RAG.006.0000	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) - Pusat	3	8632	Unit	8.028.902.109	02	10	07	02
018.HA.1796.RAG.006.1600	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	23937	Unit	3.701.949.005	02	10	03	02
018.HA.1796.RAG.006.5300	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	1166	Unit	180.275.934	02	10	04	02
018.HA.1796.RAG.006.6200	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	17276	Unit	2.671.930.848	02	10	01	02
018.HA.1796.RAG.006.9400	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) - Provinsi Papua	0	34	Unit	5.183.218	02	10	05	02
018.HA.1796.RAG.006.9500	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	17611	Unit	2.723.600.728	02	10	06	02



- 137 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1796.RAG.007	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura (QW)	0	525	Unit	13.432.074	02	10	02	02
018.HA.1796.RAG.007.0000	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura (QW) - Pusat	0	0	Unit	-	02	10	07	02
018.HA.1796.RAG.008.0000	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan (QW) - Pusat	0	0	Unit	-	02	10	07	02
018.HA.1796.RAG.009	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan (QW)	0	100	Unit	8.794.207	02	10	07	03
018.HA.1796.RAG.009.0000	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan (QW) - Pusat	0	100	Unit	8.794.207	02	10	07	02
018.HA.1796.RAG.010.0000	Perbengkelan alat dan mesin pertanian (QW) - Pusat	0	2	Unit	2.400.000	02	10	07	03
018.HA.1796.RAG.010.1200	Perbengkelan alat dan mesin pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Utara	0	2	Unit	2.400.000	02	10	02	02
018.HA.1796.RAG.010.1600	Perbengkelan alat dan mesin pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	2	Unit	2.400.000	02	10	03	02
018.HA.1796.RAG.010.5300	Perbengkelan alat dan mesin pertanian (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	2	Unit	2.400.000	02	10	04	02
018.HA.1796.RAG.010.6200	Perbengkelan alat dan mesin pertanian (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	2	Unit	2.400.000	02	10	01	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.1796.RAG.010.9400	Perbengkelan alat dan mesin pertanian (QW) - Provinsi Papua	0	2	Unit	2.400.000	02	10	05	02
018.HA.1796.RAG.010.9500	Perbengkelan alat dan mesin pertanian (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	2	Unit	2.400.000	02	10	06	02
018.HA.3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida				8.994.924.140				
018.HA.3993.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				345.792.188				
018.HA.3993.QAA.001	Layanan validasi dan verifikasi pupuk	11246965	11246965	Orang	345.792.188	02	10	16	05
						06	03	02	02
018.HA.3993.QAA.001.1408	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Bengkalis	3522	3522	Orang	574.400	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.2103	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Natuna	576	576	Orang	435.150	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.5305	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Timor Tengah Utara	3967	3967	Orang	905.900	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.5306	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Belu	5361	5361	Orang	678.900	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.5307	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Alor	157	157	Orang	260.900	06	07	05	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.3993.QAA.001.6101	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Sambas	38661	38661	Orang	764.650	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.6102	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Bengkayang	24789	24789	Orang	1.060.150	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.6105	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Sanggau	19302	19302	Orang	955.650	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.6108	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Kapuas Hulu	932	932	Orang	973.650	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.6501	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Malinau	375	375	Orang	365.400	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.6504	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Nunukan	4080	4080	Orang	731.150	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.7103	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Kepulauan Sangihe	130	130	Orang	642.150	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.7104	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Kepulauan Talaud	10	10	Orang	712.400	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.8101	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	Orang	172.920	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.8108	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Maluku Barat Daya	24	24	Orang	325.650	06	07	05	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.3993.QAA.001.8207	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Pulau Morotai	0	0	Orang	325.650	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.9409	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Biak Numfor	1425	1425	Orang	380.400	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.9471	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kota Jayapura	960	960	Orang	216.150	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.9501	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Merauke	16815	16815	Orang	654.150	06	07	05	02
018.HA.3993.QAA.001.9502	Layanan validasi dan verifikasi pupuk - Kab. Boven Digoel	216	216	Orang	161.400	06	07	05	02
018.HA.3993.QEA	Bantuan Masyarakat				40.291.680				
018.HA.3993.QEA.001	Bantuan Langsung Petani untuk pembelian pupuk	189137	189137	Orang	40.291.680	02	10	16	05
018.HA.3993.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				8.608.840.272				
018.HA.3993.RAG.001	Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)	150	150	Unit	76.000.000	02	10	18	01
						02	19	02	04
						06	07	04	02
						08	03	03	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.3993.RAG.002	Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	250000	250000	Unit	2.634.000.000	08 02	03 10	03 11	05 02
018.HA.3993.RAG.003.0000	Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (QW) - Pusat	1	24670	Unit	2.137.792.798	02	10	07	01
018.HA.3993.RAG.003.1200	Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Utara	0	500	Unit	4.759.097	02	10	02	02
018.HA.3993.RAG.003.1600	Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	75963	Unit	1.518.358.311	02	10	03	02
018.HA.3993.RAG.003.5300	Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	4969	Unit	99.314.784	02	10	04	02
018.HA.3993.RAG.003.6200	Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	31832	Unit	636.268.347	02	10	01	02
018.HA.3993.RAG.003.9400	Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (QW) - Provinsi Papua	0	150	Unit	1.903.639	02	10	05	02
018.HA.3993.RAG.003.9500	Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (QW) - Provinsi Papua Selatan	0	75066	Unit	1.500.443.296	02	10	06	02
018.HA.3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian				1.124.480.679				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.3994.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				1.124.480.679				
018.HA.3994.RBK.001	Asuransi tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan	414000	1251000	unit	792.000.000	02	10	16	03
						07	15	01	06
						08	03	05	03
						06	03	02	02
018.HA.3994.RBK.001.0000	Asuransi tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan - Pusat	14000	1000	unit	792.000.000	03	04	02	002
018.HA.3994.RBK.002	Asuransi Peternakan	50000	200000	unit	260.000.000	03	04	02	002
						02	10	16	03
						07	15	01	06
						06	03	02	02
018.HA.3994.RBK.003	Pelaku Usaha Yang Mendapat Akses Pembiayaan	316	316	unit	14.262.400	07	15	01	06
						03	04	01	002
						06	03	02	02
						02	10	16	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.3994.RBK.004.0000	Asuransi Pertanian (QW) - Pusat	0	12126	unit	8.451.156	02	10	07	02
018.HA.3994.RBK.004.1200	Asuransi Pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Utara	0	1000	unit	995.639	02	10	02	03
018.HA.3994.RBK.004.1600	Asuransi Pertanian (QW) - Provinsi Sumatera Selatan	0	26068	unit	18.168.323	02	10	03	03
018.HA.3994.RBK.004.5300	Asuransi Pertanian (QW) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	unit	803.105	02	10	04	03
018.HA.3994.RBK.004.6200	Asuransi Pertanian (QW) - Provinsi Kalimantan Tengah	0	41806	unit	29.136.297	02	10	01	03
018.HA.3994.RBK.004.9400	Asuransi Pertanian (QW) - Provinsi Papua	0	500	unit	663.759	02	10	05	03
018.HA.4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan				209.668.410				
018.HA.4579.PDC	Sertifikasi Produk				43.782.230				
018.HA.4579.PDC.001	Sertifikat Benih padi	10000	0	produk	26.545.677	02	10	11	02
						06	07	04	02
018.HA.4579.PDC.002	Sertifikat Benih jagung	3000	0	produk	6.463.707	06	07	04	02
						02	10	11	02



- 144 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.4579.PDC.003	Sertifikat Benih kedelai	2000	0	produk	4.309.136	02	10	11	02
						06	07	04	02
018.HA.4579.PDC.004	Sertifikat Benih aneka umbi	1000	0	produk	2.154.572	05	01	08	01
						06	07	04	02
						02	10	11	02
018.HA.4579.PDC.005	Sertifikat Benih Aneka Kacang	2000	0	produk	4.309.138	02	10	11	02
018.HA.4579.QKB	Pemantauan produk				53.024.571				
018.HA.4579.QKB.001	Peredaran Benih Tanaman Pangan yang Diawasi	32	0	laporan	53.024.571	02	10	11	01
						05	01	08	01
						06	07	04	02
018.HA.4579.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				-				
018.HA.4579.RAI.001	Area penyaluran benih padi	2267	0	Hektar	-	06	07	04	02
018.HA.4579.SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa				112.861.609				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.4579.SDB.004	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	5	0	Purwarupa	112.861.609	02	10	16	01
018.HA.4580	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan				194.401.554				
018.HA.4580.PDC	Sertifikasi Produk				11.857.527				
018.HA.4580.PDC.001	Sertifikasi Produk Mutu Pestisida, Pupuk dan Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	400	0	produk	11.857.527	02	10	17	01
						03	03	02	04
018.HA.4580.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				135.844.026				
018.HA.4580.RAI.001	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	7150	0	Hektar	124.175.377	05	01	08	01
						06	07	04	02
						08	03	03	04
						02	10	11	02
018.HA.4580.RAI.002	Areal Penanganan DPI	4276	0	Hektar	11.668.649	02	10	11	02
						05	01	08	01
						08	03	03	04
018.HA.4580.SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa				46.700.000				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.4580.SDB.001	Model Percontohan Pertanian Modern	1	0	Purwarupa	46.700.000	02	10	16	01
018.HA.4581	Perbenihan Hortikultura				157.050.000				
018.HA.4581.QKB	Pemantauan produk				22.000.000				
018.HA.4581.QKB.011	Laporan Pengawasan Peredaran benih Hortikultura	0	72	laporan	14.000.000	02	10	17	01
018.HA.4581.QKB.012	Peredaran Benih Hortikultura yang diawasi	0	38	laporan	8.000.000	02	10	17	01
018.HA.4581.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				135.050.000				
018.HA.4581.RAI.010	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	460	460	Unit	70.250.000	02	10	17	01
						06	07	04	02
018.HA.4581.RAI.011	Benih Sebar Batang Hortikultura	0	1100000	Unit	64.800.000	02	10	17	01
018.HA.5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura				66.540.400				
018.HA.5886.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				66.540.400				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
018.HA.5886.RAI.012	Kawasan Durian	0	300	Hektar	10.800.000	02	10	11	02
018.HA.5886.RAI.013	Kawasan Mangga	0	300	Hektar	10.200.000	02	10	11	02
018.HA.5886.RAI.014	Kawasan Kelengkeng	0	300	Hektar	12.000.000	02	10	11	02
018.HA.5886.RAI.015	Kawasan Alpukat	0	300	Hektar	10.800.000	02	10	11	02
018.HA.5886.RAI.016	Kawasan Manggis	0	300	Hektar	10.800.000	02	10	11	02
018.HA.5886.RAI.018	Kawasan Florikultura	0	72400	Unit	11.940.400	02	10	17	02
TOTAL					219.399.253.793				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 05.01 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	persen	4,64 (2023)	5,50	8,14
PP 05.02 - Rasio PDRB Industri Pengolahan di provinsi KI/KEK prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan	persen	47,92 (2023)	48,06	48,57
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 02.13.01 - Persentase peningkatan daya saing industri yang memproduksi produk halal	persen	- (indikator baru)	4,46	7,00
KP 02.14.002 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 <i>Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	perusahaan	73	87	156
KP 02.15.01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	perusahaan (akumulatif)	140	152	200
KP 02.15.01 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	persen	10	11	15
KP 02.19.04 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	juta ton CO ₂ -Eq	6,75 (2022)	6,75	6,93
KP 02.22.04 - Utilisasi industri pengolahan garam industri	persen	50	52,50	63,79
KP 02.22.04 - Utilisasi industri pengolahan hasil laut	persen	41,93	45	65



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.22.05 - Volume reparasi kapal	ribu DWT (kumulatif)	9,5 (Jan-Nov)	11,2	12,2
KP 02.22.05 - Volume produksi pembuatan kapal	ribu DWT (kumulatif)	0,98	1,1	1,5
KP 02.22.05 - Nilai ekspor industri perkapalan	ribu USD	830,89	858,02	1.315,25
KP 05.01.01 - Kapasitas produksi industri olahan nikel	juta ton/tahun	27,44	33,64	33,74
KP 05.01.02 - Kapasitas produksi industri olahan tembaga	ribu ton/tahun	375	1.195	1.195
KP 05.01.03 - Kapasitas produksi industri olahan Bauksit	juta ton/tahun	5,02	6,27	17,47
KP 05.01.04 - Kapasitas produksi industri olahan timah	ribu ton/tahun	136,9	142,1	257,3
KP 05.01.05 - Ragam produk hilir sawit	produk	193	208	250
KP 05.01.05 - Rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku	persen	92,0	92,3	93,7
KP 05.01.06 - Utilisasi industri pengolahan kelapa	persen	40	55	75
KP 05.01.07 - Utilisasi industri pengolahan rumput laut	persen	49,51	53,76	70,76
KP 05.01.08 - Kapasitas produksi pati sagu	ton/tahun	60.000	100.000	320.000
KP 05.01.09 - Kapasitas produksi industri kimia dasar Berbasis minyak, gas, dan batubara	ribu ton	59.783,45	60.234,97	79.668,38
KP 05.01.09 - Pertumbuhan PDB bahan kimia dan barang dari bahan kimia	persen	-0,98 (2023)	6,08	7.34



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 05.01.10 - Pertumbuhan PDB industri barang logam: komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik	persen	13,67 (2023)	7,50	11,42
KP 05.01.11 - Pertumbuhan PDB industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional	persen	1,85 (2023)	11,48	11,86
KP 05.01.12 - Persentase produksi kendaraan listrik roda empat terhadap total produksi kendaraan roda empat	persen	0,94 (2023)	1,00	1,4
KP 05.01.13 - Utilisasi industri pesawat terbang dan perlengkapannya	persen	50	60	70
KP 05.01.14 - Pertumbuhan PDB industri mesin dan perlengkapan	persen	-0,03 (2023)	4,00	8,70
KP 05.01.15 - Pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman	persen	4,47 (2023)	5,43	8,00
KP 05.01.16 - Pertumbuhan PDB industri tekstil dan pakaian jadi	persen	-1,98 (2023)	3,50	6,32
KP 05.01.16 - Produktivitas tenaga kerja industri TPT	persen	55,29	60,34	79,76
KP 05.01.16 - Penyerapan tenaga kerja industri TPT	orang	3.975.905	3.918.787	4.072.465
KP 05.01.17 - Pertumbuhan PDB industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	persen	-0,34 (2023)	3,80	6,20
KP 05.01.18 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar	persen	14,17 (2023)	11,49	14,90
KP 05.01.18 - Utilisasi industri logam dasar	persen	83,14 (2023)	77	85
KP 05.01.19 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	persen	2,72 (2016)	3,12	3,35
KP 05.02.06 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Bintan Inti Industrial Estate	triliun rupiah	1,65	1,73	4,99



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 05.02.07 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	triliun rupiah	5,99	5,99	6,22
KP 05.02.08 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KIT Wilmar	triliun rupiah	13,02	13,14	13,55
KP 05.02.09 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KIT Batang	triliun rupiah	3,77	4,14	5,32
KP 05.02.10 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Seafer	triliun rupiah	0,73	0,73	2,46
KP 05.02.11 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI iSentra @Lamongan	triliun rupiah	1,18	1,37	1,97
KP 05.02.12 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Ngawi	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,03
KP 05.02.13 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	triliun rupiah	2,22	2,31	2,59
KP 05.02.14 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	triliun rupiah	2,24	4,30	10,91
KP 05.02.15 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	triliun rupiah	1,05	1,05	7,29
KP 05.02.16 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Konawe	triliun rupiah	305,94	305,96	306,87
KP 05.02.17 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Stardust	triliun rupiah	0,33	0,48	0,98
KP 05.02.18 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	triliun rupiah	6,99	9,16	16,15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 05.02.19 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Morowali	triliun rupiah	466,71	467,46	469,89
KP 05.02.20 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Sumbawa Barat	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,23
KP 05.02.21 - Nilai Investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Pulau Obi	triliun rupiah	0,01	2,53	10,62
KP 05.02.22 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Weda Bay	triliun rupiah	346,33	349,49	359,67
KP 05.02.23 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Buli	triliun rupiah	0,01	0,21	0,83
KP 05.02.24 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Fakfak	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,01
KP 05.02.25 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Takalar	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,41
KP 05.05.02 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	persen	7,9	8,6	11,4
KP 05.05.04 - Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah		0,294 (2023)	0,286	0,269
KP 05.05.04 - Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing	produk	179 (2022)	208	212
KP 05.05.06 - Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	persen	42,00 (2022)	49,00	57,00
KP 05.05.06 - Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk <i>electric vehicle</i> (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	persen	23,00 (2022)	23,00	36,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				989.338.998				
019.DL.4957	Pelatihan Vokasi Industri				189.246.000				
019.DL.4957.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				36.000.000				
019.DL.4957.PBK.001	Rancangan SKKNI Sektor Industri	5	6	Rekomendasi Kebijakan	20.500.000	05 04	01 07	15 04	02 02
019.DL.4957.PBK.002	Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi	4	4	Rekomendasi Kebijakan	15.500.000	04	07	04	02
019.DL.4957.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM				16.550.000				
019.DL.4957.PDI.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	500	5000	Orang	16.550.000	02 04	22 07	05 03	03 03
019.DL.4957.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				28.000.000				
019.DL.4957.QDI.001	Industri yang terfasilitasi Menuju Industri 4.0	8	24	Industri	28.000.000	04	18	02	01
019.DL.4957.QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up				27.815.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.DL.4957.QDJ.001	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	19	85	Start Up	27.815.000	06	03	01	02
019.DL.4957.QDJ.001.1275	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri - Kota Medan	0	8	Start Up	2.900.000	05	02	02	07
019.DL.4957.QDJ.001.3471	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri - Kota Yogyakarta	0	4	Start Up	1.795.000	05	02	12	08
019.DL.4957.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan				26.000.000				
019.DL.4957.RBL.001	Bangunan/Gedung Pelatihan Vokasi Industri	0	7	unit	14.000.000	04	07	03	04
019.DL.4957.RBL.001.1275	Bangunan/Gedung Pelatihan Vokasi Industri - Kota Medan	0	1	unit	2.000.000	05	02	02	08
019.DL.4957.RBL.001.3471	Bangunan/Gedung Pelatihan Vokasi Industri - Kota Yogyakarta	0	1	unit	2.000.000	05	02	12	09
019.DL.4957.RBL.002	Peralatan Pelatihan Vokasi Industri	0	7	unit	12.000.000	04	07	03	04
019.DL.4957.RBL.002.1275	Peralatan Pelatihan Vokasi Industri - Kota Medan	0	1	unit	2.000.000	05	02	02	08
019.DL.4957.RBL.002.3471	Peralatan Pelatihan Vokasi Industri - Kota Yogyakarta	0	1	unit	2.000.000	05	02	12	09
019.DL.4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri				54.881.000				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.DL.4957.SCH.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	1070	100000	Orang	41.865.000	05	02	13	09
						04	07	03	01
						04	18	02	01
						05	02	07	05
019.DL.4957.SCH.001.1200	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) - Provinsi Sumatera Utara	0	0	Orang	0	05	02	01	05
						05	02	06	07
019.DL.4957.SCH.001.1275	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) - Kota Medan	0	0	Orang	1.541.970	05	02	02	08
						05	02	03	08
019.DL.4957.SCH.001.3471	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) - Kota Yogyakarta	0	0	Orang	1.295.783	05	02	12	09
019.DL.4957.SCH.001.3500	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) - Provinsi Jawa Timur	0	0	Orang	0	05	02	05	06
						05	02	11	06
019.DL.4957.SCH.006	Asessor Lisensi dan Asessor Kompetensi	70	145	Orang	13.016.000	04	07	03	05
019.DL.4958	Pendidikan Tinggi Vokasi Industri				449.406.200				
019.DL.4958.QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up				20.625.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.DL.4958.QDJ.001	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	13	41	Start Up	20.625.000	04	07	02	01
019.DL.4958.QDJ.001.1275	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri - Kota Medan	0	2	Start Up	1.670.000	05	02	02	07
019.DL.4958.QDJ.001.3204	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri - Kab. Bandung	0	10	Start Up	4.070.000	05	01	16	02
019.DL.4958.QDJ.001.3402	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri - Kab. Bantul	0	2	Start Up	1.675.000	05	02	12	08
019.DL.4958.QDJ.001.7203	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri - Kab. Morowali	0	1	Start Up	825.000	05	02	18	07
019.DL.4958.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi				24.000.000				
019.DL.4958.RBJ.001.1275	Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kota Medan	0	1	unit	2.000.000	05	02	02	08
019.DL.4958.RBJ.001.3273	Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kota Bandung	0	1	unit	2.000.000	05	01	16	02
019.DL.4958.RBJ.001.3372	Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kota Surakarta	0	1	unit	2.000.000	05	01	16	02
019.DL.4958.RBJ.001.3402	Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kab. Bantul	0	1	unit	2.000.000	05	02	12	09



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.DL.4958.RBJ.001.3672	Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kota Cilegon	0	1	unit	2.000.000	05	02	08	04
019.DL.4958.RBJ.001.7203	Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kab. Morowali	0	1	unit	2.000.000	05	02	18	08
019.DL.4958.RBJ.002.1275	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kota Medan	0	1	unit	2.000.000	05	02	02	08
019.DL.4958.RBJ.002.3273	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kota Bandung	0	1	unit	2.000.000	05	01	16	02
019.DL.4958.RBJ.002.3372	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kota Surakarta	0	1	unit	2.000.000	05	01	16	02
019.DL.4958.RBJ.002.3402	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kab. Bantul	0	1	unit	2.000.000	05	02	12	09
019.DL.4958.RBJ.002.3672	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kota Cilegon	0	1	unit	2.000.000	05	02	08	04
019.DL.4958.RBJ.002.7203	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri - Kab. Morowali	0	1	unit	2.000.000	05	02	18	08
019.DL.4958.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri				404.781.200				
019.DL.4958.SAG.001	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler	2537	10570	Orang	379.864.200	05	02	23	09
						05	02	22	09



- 158 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						05	02	21	10
						05	02	20	12
						05	02	18	08
						05	02	24	12
						04	07	02	05
						04	09	02	02
						04	19	03	01
019.DL.4958.SAG.001.1275	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler - Kota Medan	0	1410	Orang	6.750.000	05	02	02	08
019.DL.4958.SAG.001.3273	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler - Kota Bandung	0	1296	Orang	56.000.000	05	01	16	02
019.DL.4958.SAG.001.3324	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler - Kab. Kendal	0	470	Orang	28.442.000	05	02	10	05
019.DL.4958.SAG.001.3372	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler - Kota Surakarta	0	200	Orang	8.390.000	05	01	16	02
019.DL.4958.SAG.001.3402	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler - Kab. Bantul	0	760	Orang	36.000.000	05	02	12	09



- 159 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.DL.4958.SAG.001.3672	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler - Kota Cilegon	0	380	Orang	20.400.000	05	02	08	04
019.DL.4958.SAG.001.7203	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler - Kab. Morowali	0	576	Orang	24.500.000	05	02	17	10
019.DL.4958.SAG.002	Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerja Sama Industri	50	673	Orang	24.917.000	05	02	21	10
						05	02	22	09
						05	02	14	09
						05	02	23	09
						05	02	16	09
						05	02	20	12
						05	02	24	12
						05	02	15	10
019.DL.4958.SAG.002.1275	Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerja Sama Industri - Kota Medan	0	30	Orang	1.200.000	05	02	02	08
						04	07	02	05
019.DL.4958.SAG.002.3324	Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerja Sama Industri - Kab. Kendal	0	50	Orang	1.800.000	05	02	10	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.DL.4958.SAG.002.3372	Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerja Sama Industri - Kota Surakarta	0	25	Orang	800.000	05	01	16	02
019.DL.4958.SAG.002.3402	Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerja Sama Industri - Kab. Bantul	0	30	Orang	1.200.000	05	02	12	09
019.DL.4959	Pendidikan Menengah Kejuruan Industri				350.686.798				
019.DL.4959.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah				158.741.998				
019.DL.4959.RBI.001	Bangunan/Gedung Pendidikan Vokasi Industri	2	10	unit	136.741.998	05	02	19	09
						04	07	01	04
019.DL.4959.RBI.001.3471	Bangunan/Gedung Pendidikan Vokasi Industri - Kota Yogyakarta	0	1	unit	2.000.000	05	02	12	09
019.DL.4959.RBI.002	Peralatan Pendidikan Menengah Vokasi Industri	0	10	unit	22.000.000	04	07	01	04
019.DL.4959.RBI.002.3471	Peralatan Pendidikan Menengah Vokasi Industri - Kota Yogyakarta	0	1	unit	2.000.000	05	02	12	09
019.DL.4959.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri				169.444.800				
019.DL.4959.SAG.001	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	1712	8900	Orang	165.244.800	05	02	19	09
						04	07	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 161 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						04	09	02	02
019.DL.4959.SAG.001.3471	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri - Kota Yogyakarta	0	0	Orang	1.137.190	05	02	12	09
019.DL.4959.SAG.002	Program Kelas Industri	30	120	Orang	4.200.000	04	07	01	01
						05	02	07	05
019.DL.4959.SCH	Pelatihan Bidang Industri				22.500.000				
019.DL.4959.SCH.001	Fasilitasi Pendampingan SMK yang Link and Match dengan Industri	150	600	Orang	22.500.000	05	02	07	05
						04	07	01	01
019.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				18.026.029.209				
019.EC.6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro				61.500.000				
019.EC.6044.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				61.500.000				
019.EC.6044.PBK.002	Neraca Komoditas Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	5	5	Rekomendasi Kebijakan	12.000.000	05	01	07	02
						05	01	15	01
019.EC.6044.PBK.003.0000	Neraca Komoditas Rumput Laut dan Produk Turunannya - Pusat	0	1	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05	01	07	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 162 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6044.PBK.004	Rancangan Pembentukan Badan Karet Nasional	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000	02	10	17	01
						02	21	01	02
019.EC.6044.PBK.005	Analisis Kebutuhan Bahan Baku Industri di Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	0	5	Rekomendasi Kebijakan	12.000.000	05	01	15	01
019.EC.6044.PBK.006	Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Hulu-Hilir Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	0	1	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000	05	01	15	01
						05	01	06	07
019.EC.6044.PBK.007	Neraca komoditas kelapa dan produk turunannya	0	1	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05	01	06	02
						05	01	06	01
019.EC.6044.PBK.010.0000	Analisis kebutuhan bahan baku industri rumput laut - Pusat	0	1	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05	01	07	02
019.EC.6044.PBK.013.0000	Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Hulu-Hilir Industri Rumput Laut - Pusat	0	1	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000	05	01	07	02
019.EC.6045	Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro				10.642.500.000				
019.EC.6045.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				7.500.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 163 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6045.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pusat Flavor and Fragrance berbasis Minyak Atsiri Nasional	1	1		7.500.000	02	10	17	01
019.EC.6045.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				5.556.000.000				
019.EC.6045.QDH.001	Hilirisasi Industri Pengolahan Kakao dan Coklat	20	30	Badan usaha	20.000.000	02	10	17	03
						05	01	15	05
019.EC.6045.QDH.005	Identifikasi Penumbuhan Calon Wirausaha Baru Cokelat Artisan	0	25	Badan usaha	4.000.000	05	01	15	05
019.EC.6045.QDH.006	Penguatan Struktur dan Peningkatan Daya Saing Industri Pengolahan Susu	0	15	Badan usaha	12.000.000	05	01	15	05
						02	10	10	03
019.EC.6045.QDH.007	Hilirisasi Produk Berbasis Teh	0	10	Badan usaha	8.000.000	02	10	17	03
						05	01	15	05
019.EC.6045.QDH.008	Pengembangan dan Penguatan Struktur Industri Pengolahan Hasil Hortikultura	0	10	Badan usaha	12.000.000	05	01	15	01
						02	10	17	03
019.EC.6045.QDH.009	Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa	10	10	Badan usaha	5.500.000.000	05	01	06	04
019.EC.6045.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				5.070.000.000				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6045.QDI.001.0000	Peningkatan Kapasitas Produksi Rumput Laut Kering - Pusat	0	1	Industri	8.000.000	05	01	07	02
019.EC.6045.QDI.002	Branding Produk Olahan Cokelat	0	30	Industri	7.000.000	05	01	15	05
019.EC.6045.QDI.003	Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa	1	1	Industri	7.000.000	05	01	06	04
						05	01	06	05
						02	21	01	02
019.EC.6045.QDI.005.0000	Fasilitasi Investasi Industri Hilir Rumput Laut bernilai tinggi (karagenan, agar, kosmetik, biofuel,dan bioplastik) - Pusat	0	1	Industri	8.000.000	05	01	07	02
019.EC.6045.QDI.008	Fasilitasi Investasi Industri Hilir Kelapa Sawit (Carotene dan Tocopherol)	1	1	Industri	24.000.000	05	01	05	04
019.EC.6045.QDI.009	Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Produk Hilir (MCT dan SAF)	0	1	Industri	8.000.000	05	01	06	04
019.EC.6045.QDI.010	Fasilitas Pusat Penyediaan Bahan Baku Industri Tempurung dan Sabut Kelapa	0	1	Industri	8.000.000	05	01	06	04
019.EC.6045.QDI.011	Pengembangan Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	10	30	Industri	5.000.000.000	05	01	07	02
019.EC.6045.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				9.000.000				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6045.QEG.001	Pusat Flavor and Fragrance berbasis Minyak Atsiri Nasional	2	2	Titik	9.000.000	02	21	01	02
						05	01	11	01
019.EC.6046	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Agro				353.899.999				
019.EC.6046.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				345.999.999				
019.EC.6046.QDH.001	Perusahaan Industri Furnitur dan Atsiri yang difasilitasi dalam restrukturisasi Mesin dan Peralatan dalam rangka peningkatan teknologi	13	20	Badan usaha	85.999.999	02	21	02	01
						03	06	03	06
019.EC.6046.QDH.003	Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Minuman dan Bahan Penyegar	10	25	Badan usaha	50.000.000	05	01	06	05
019.EC.6046.QDH.004	Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	10	15	Badan usaha	90.000.000	05	01	06	05
						05	01	08	02
						02	22	04	03
019.EC.6046.QDH.005	Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri kelapa	0	20	Badan usaha	80.000.000	05	01	06	03
019.EC.6046.QDH.006.0000	Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Rumput Laut - Pusat	0	10	Badan usaha	40.000.000	05	01	07	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6046.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				7.900.000				
019.EC.6046.QDI.003	Fasilitasi Pengembangan Industri Food Ingredient	1	1	Industri	7.900.000	02 05	10 01	17 15	03 05
019.EC.6046.QDI.003.0000	Fasilitasi Pengembangan Industri Food Ingredient - Pusat	1	1	Industri	7.900.000	05	01	07	02
019.EC.6047	Pengembangan Standar Industri Agro				97.416.000				
019.EC.6047.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				41.660.000				
019.EC.6047.PBK.001	Kriteria Standard CPO untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Kelapa Sawit	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000	05	01	05	01
019.EC.6047.PBK.002	Perencanaan dan Pembinaan Standar di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	0	1	Rekomendasi Kebijakan	12.910.000	05	01	15	02
019.EC.6047.PBK.003	Pembinaan Industri Hijau dan Penurunan NZE di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	0	2	Rekomendasi Kebijakan	23.000.000	05 05 02	01 01 19	15 15 04	02 04 01
019.EC.6047.PBK.005	Pembinaan Industri Hijau dan Penurunan NZE di industri Sawit	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	05	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6047.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				41.756.000				
019.EC.6047.QDB.001	Fasilitasi Peningkatan Ketertelusuran Keberlanjutan Produk Hilir Kelapa Sawit Melalui Pembentukan Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO Hilir	1	1	Lembaga	23.756.000	05	01	05	02
019.EC.6047.QDB.002	Pembinaan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi di Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	0	3	Lembaga	18.000.000	05	01	06	08
						05	01	15	03
						05	01	15	02
019.EC.6047.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha				14.000.000				
019.EC.6047.QIH.001	Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan Dan Kepatuhan Kebijakan Di Bidang Perindustrian Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar	20	30	Badan Usaha	5.000.000	05	01	15	05
019.EC.6047.QIH.002	Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan Dan Kepatuhan Kebijakan Di Bidang Perindustrian Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	20	20	Badan Usaha	5.000.000	05	01	15	05
						05	01	15	02
019.EC.6047.QIH.005.0000	Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan Dan Kepatuhan Kebijakan Di	0	20	Badan Usaha	4.000.000	05	01	07	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 168 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Bidang Perindustrian Sektor Industri Rumput Laut - Pusat								
019.EC.6048	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Agro				16.600.000				
019.EC.6048.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				16.600.000				
019.EC.6048.QDH.001	Fasilitasi dan Pembinaan P3DN Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	0	2	Badan usaha	8.600.000	05	01	15	01
019.EC.6048.QDH.003.0000	Fasilitasi dan Pembinaan P3DN Industri Rumput Laut - Pusat	0	2	Badan usaha	8.000.000	05	01	07	02
019.EC.6049	Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri Agro				111.600.000				
019.EC.6049.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				12.600.000				
019.EC.6049.PBK.001	Penyusunan Posisi Runding dan Optimalisasi Kerja Sama Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	0	3	Rekomendasi Kebijakan	8.600.000	05	01	15	05
019.EC.6049.PBK.003	Rekomendasi Peningkatan Kerja Sama di Sektor Industri Agro	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	06	06
019.EC.6049.PEH	Promosi				84.000.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6049.PEH.001	Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala Internasional dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1	1	promosi	14.000.000	05	01	15	05
						05	01	08	03
019.EC.6049.PEH.001.0000	Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala Internasional dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Pusat	1	1	promosi	14.000.000	05	01	07	02
						05	01	07	05
019.EC.6049.PEH.002.0000	Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Rumput Laut - Pusat	0	1	promosi	28.000.000	05	01	07	02
						05	01	07	05
019.EC.6049.PEH.003	promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri	0	1	promosi	12.000.000	05	01	05	06
019.EC.6049.PEH.004	Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	1	3	promosi	30.000.000	05	01	15	05
019.EC.6049.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				15.000.000				
019.EC.6049.QDI.004	Pengembangan Industri Bahan Bakar Terbarukan generasi Kedua (HVO/SAF -	1	1	Industri	15.000.000	02	21	02	01
						05	01	05	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel) berbahan baku technical oil								
019.EC.6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro				28.250.000				
019.EC.6051.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				28.250.000				
019.EC.6051.QDI.001	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	10	10	Industri	10.800.000	05	01	15	05
						02	22	03	06
						02	22	04	03
019.EC.6051.QDI.002	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	9	10	Industri	10.400.000	05	01	15	05
019.EC.6051.QDI.003	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	5	10	Industri	7.050.000	05	01	15	05
						02	21	02	01
019.EC.6053	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil				635.643.756				
019.EC.6053.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				168.843.756				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6053.PBK.002	Akselerasi Dekarbonisasi Sektor Industri Semen, Keramik dan Kaca Nasional	0	3	Rekomendasi Kebijakan	12.000.000	02	19	04	02
						05	01	09	04
019.EC.6053.PBK.003	Pemanfaatan Teknologi Recycling Plastik Daur Ulang	1	1	Rekomendasi Kebijakan	3.941.708	05	01	09	04
						02	15	04	01
019.EC.6053.PBK.004	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Industri Keramik Maju (Advanced Ceramics)	1	3	Rekomendasi Kebijakan	13.000.000	05	01	09	07
019.EC.6053.PBK.005	Fasilitasi Percepatan Substitusi Bahan Bakar dan Bahan Baku Alternatif Rendah Karbon Bagi Industri Semen	0	2	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	09	04
019.EC.6053.PBK.006	Restrukturisasi Mesin Peralatan Pengolahan Aspal Buton	0	5	Rekomendasi Kebijakan	60.000.000	05	01	09	06
019.EC.6053.PBK.007	Rekomendasi Dekarbonisasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam Mendukung Net Zero Emission (NZE) 2050	1	1	Rekomendasi Kebijakan	40.750.000	05	01	09	04
						02	19	04	02
019.EC.6053.PBK.008	Analisis Sustainability Industri Asbestos Berbasis Chrysotile	1	1	Rekomendasi Kebijakan	12.500.000	05	01	09	04
019.EC.6053.PBK.009	Pemetaan Kemampuan Industri dan Hilirisasi Bahan Baku Komoditas Sektor Farmasi	1	1	Rekomendasi Kebijakan	7.750.719	05	01	11	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6053.PBK.010	Peningkatan Hilirisasi Produksi dan Promosi Obat Bahan Alam	1	1	Rekomendasi Kebijakan	6.550.719	05	01	11	04
019.EC.6053.PBK.011	Penyusunan Rencana Aksi Manajemen Pengelolaan Produk Karet Hilir dan End-of-life Tyre (ELT)	1	1	Rekomendasi Kebijakan	7.191.215	05	01	09	04
019.EC.6053.PBK.012	Kajian Pemanfaatan Teknologi Material Recovery Daur Ulang Pelumas Bekas	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.159.395	05	01	09	04
019.EC.6053.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				466.800.000				
019.EC.6053.QDI.001	Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	21	100	Industri	466.800.000	05	05	03	003
						02	15	01	01
						05	01	16	04
019.EC.6054	Pengembangan Standar Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil				98.900.612				
019.EC.6054.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				25.959.395				
019.EC.6054.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Sektor Industri Kimia Hulu	1	1	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000	05	01	09	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6054.PBK.002	Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Sektor Industri Kimia Hulu	1	1	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000	05	01	09	05
019.EC.6054.PBK.003	Implementasi Industri Halal Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	0	5	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05	01	09	06
019.EC.6054.PBK.004	Rekomendasi Kebijakan Mengenai Pembatasan Kadungan Timbal (Pb) dalam Produk Cat Dibawah 90 ppm	1	1	Rekomendasi Kebijakan	2.959.395	05	01	09	05
019.EC.6054.PBK.005	Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	09	06
019.EC.6054.PBK.006	Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	09	06
019.EC.6054.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				72.941.217				
019.EC.6054.QDI.001	Pendampingan Persiapan Penerapan Pedoman Tata Cara PET Daur Ulang Untuk Kemasan Pangan dan/atau Ban Vulkanisir Ban Komersial	5	10	Industri	8.941.217	05 02	01 15	09 04	04 02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6054.QDI.002	Penerapan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia	0	100	Industri	60.000.000	05	01	09	05
019.EC.6054.QDI.003	Pendampingan Penerapan Produksi Bersih dan Keselamatan Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	0	5	Industri	4.000.000	05	01	09	06
019.EC.6055	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil				93.400.000				
019.EC.6055.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				40.400.000				
019.EC.6055.PBK.001	Verifikasi Kemampuan Industri Kosmetik Dalam Rangka Pemetaan, Pengembangan, dan Hilirisasi Industri	1	1	Rekomendasi Kebijakan	4.400.000	05	01	11	05
019.EC.6055.PBK.004	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Prioritas Sektor IKFT	0	1	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	05	01	11	02
019.EC.6055.PBK.006	Rekomendasi kebijakan dalam rangka Peningkatan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Industri Tekstil, Kulit dan Alas kaki	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	16	09



- 175 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6055.PBK.007	Rekomendasi kebijakan dalam rangka Penyiapan Industri Halal sektor Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	16	08
019.EC.6055.PBK.008	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	0	1	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05	01	09	06
019.EC.6055.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				53.000.000				
019.EC.6055.QDI.002	Pendampingan Produk Prioritas Dalam Mendukung Percepatan ke Dalam e-katalog Sektoral	1	5	Industri	21.000.000	05	01	11	02
						05	01	16	09
019.EC.6055.QDI.003	Market Intelligence untuk Pengembangan pasar Lokal Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	0	10	Industri	12.000.000	05	01	16	08
019.EC.6055.QDI.004	Pengembangan Industri Halal Sektor TPT, Alas Kaki dan Kulit	0	5	Industri	8.000.000	05	01	16	08
019.EC.6055.QDI.005	Pendampingan Produk Dengan Nilai TKDN Tinggi Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	0	10	Industri	12.000.000	05	01	16	09
						05	01	11	02
019.EC.6056	Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil				1.452.816				



- 176 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6056.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				1.452.816				
019.EC.6056.PBK.002	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Kerja Sama dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi	2	0	Rekomendasi Kebijakan	1.452.816	05	01	11	01
019.EC.6057	Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil				507.717.816				
019.EC.6057.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				283.702.816				
019.EC.6057.PBK.002	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Bahan Baku Obat	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000	05	01	11	01
019.EC.6057.PBK.003	Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas kaki	0	2	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05	01	16	06
019.EC.6057.PBK.004	Rekomendasi Kebijakan Terkait Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri	0	1	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	05	01	16	03
						05	01	18	02
						05	01	09	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6057.PBK.005	Fasilitasi dalam rangka Percepatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pupuk dan Pestisida	0	1	Rekomendasi Kebijakan	40.000.000	05	01	09	02
019.EC.6057.PBK.006	Penyusunan Peta Jalan dalam Rangka Hilirisasi Industri Kimia Hulu	0	1	Rekomendasi Kebijakan	40.000.000	05	01	09	05
019.EC.6057.PBK.007	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Anorganik	0	1	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	05	01	09	05
019.EC.6057.PBK.008	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Organik	0	1	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	05	01	09	05
019.EC.6057.PBK.010	Pilot Project Inovasi Daur Ulang Pengolahan Pakaian Bekas Dalam Rangka Circular Economy	1	1	Rekomendasi Kebijakan	60.000.000	05	01	16	07
019.EC.6057.PBK.011	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Lainnya	0	1	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	05	01	16	01
						05	01	09	05
019.EC.6057.PBK.012	Fasilitasi Investor dalam Rangka Pembangunan Industri White Bio Plastik di Indonesia	1	1	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000	05	01	09	04
						02	15	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6057.PBK.013	Penyusunan Kerangka Insentif Dalam Rangka Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi	1	1	Rekomendasi Kebijakan	3.702.816	05	01	11	01
019.EC.6057.PBK.014	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Hidrogen Hijau serta Ammonia Hijau pada Industri Dalam Negeri	1	1	Rekomendasi Kebijakan	3.750.000	05	01	09	04
019.EC.6057.PBK.015	Rekomendasi Kebijakan Dampak Sosio-Ekonomi Daftar Pestisida dalam Annex III Prior Informed Concern (PIC) Konvensi Rotterdam	1	1	Rekomendasi Kebijakan	3.750.000	05	01	09	02
019.EC.6057.PBK.016	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000	05	01	16	01
						05	01	17	03
019.EC.6057.PBK.017	Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	0	1	Kajian	4.000.000	05	01	09	06
019.EC.6057.PBK.018	Rekomendasi Kebijakan Terkait Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	0	1	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05	01	09	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6057.PBK.020	Rekomendasi Kebijakan Terkait penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Kimia	0	1	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	05	01	09	05
019.EC.6057.PEA	Koordinasi				101.500.000				
019.EC.6057.PEA.001	Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	1	1	kegiatan	14.000.000	05	01	09	01
019.EC.6057.PEA.002	Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pembangunan Industri Petrokimia Berbasis Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim	1	1	kegiatan	4.500.000	05	01	09	03
019.EC.6057.PEA.003	Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur	1	1	kegiatan	5.000.000	05	01	09	03
019.EC.6057.PEA.004	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Industri Petrokimia berbasis Minyak Bumi	0	1	kegiatan	33.000.000	05	01	09	01
019.EC.6057.PEA.005	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Industri Petrokimia melalui Hilirisasi Gas Bumi	0	1	kegiatan	33.000.000	05	01	09	01
019.EC.6057.PEA.006	Fasilitasi Penyediaan Pasokan Bioetanol untuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi Nasional	0	1	kegiatan	12.000.000	05	01	05	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6057.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				122.515.000				
019.EC.6057.QDI.002	Implementasi Sustainability dan Circular Economy pada Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	4	8	Industri	57.515.000	02 05	15 01	01 16	01 07
019.EC.6057.QDI.004	Asistensi dan pendampingan Industri Dyeing, Printing dan Finishing dan industri penyamak kulit	0	200	Industri	40.000.000	05 05	01 01	16 17	01 02
019.EC.6057.QDI.005	Verifikasi Penyaluran dan Distribusi Garam Industri ke Industri	0	100	Industri	20.000.000	02	22	04	01
019.EC.6057.QDI.006	Pendampingan Industri Pengolahan Garam Dalam Negeri Dalam Pemenuhan Spesifikasi Industri Aneka Pangan, Farmasi dan Kosmetik	7	7	Industri	5.000.000	02 05	22 01	04 11	01 01
019.EC.6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil				183.650.000				
019.EC.6058.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				179.650.000				
019.EC.6058.QDI.001	Pendampingan Implementasi Industri 4.0, Industri Hijau dan Industri Halal sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	15	30	Industri	42.500.000	05	01	11	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6058.QDI.002	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	10	30	Industri	41.400.000	05	01	09	05
019.EC.6058.QDI.003	Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	15	100	Industri	41.500.000	05	01	16	04
						05	05	03	003
019.EC.6058.QDI.004	Pendampingan Implementasi 4.0 Sektor Industri Kimia Hulu	5	10	Industri	41.250.000	05	01	09	05
019.EC.6058.QDI.005	Sertifikasi Industri 4.0 Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	20	40	Industri	13.000.000	05	01	09	05
						05	01	16	04
019.EC.6058.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				4.000.000				
019.EC.6058.UAB.001	Pengembangan Mobile Sistem Indonesia Smart Textile Industry Hub (ISTIH)	0	1	Sistem Informasi	4.000.000	05	01	16	01
019.EC.6059	Perbaikan Rantai Pasok Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil				108.700.000				
019.EC.6059.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				108.700.000				
019.EC.6059.PBK.001	Neraca Komoditas Sektor Industri Kimia Hulu	0	1	Rekomendasi Kebijakan	50.000.000	05	01	09	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6059.PBK.002	Evaluasi Dampak Kebijakan Logistik Industri Sektor IKFT	0	1	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000	05	01	09	05
019.EC.6059.PBK.004	Neraca Komoditas industri sektor Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	0	1	Rekomendasi Kebijakan	32.000.000	05	01	16	01
019.EC.6059.PBK.005	Penyusunan Peta Kemampuan Industri Kimia Hilir dan Farmasi untuk Mendukung Pertumbuhan dan Penguasaan Pasar	1	1	Rekomendasi Kebijakan	6.700.000	05	01	11	02
019.EC.6059.PBK.007	Penyusunan Data Supply-Demand Sektor Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	3	3	Rekomendasi Kebijakan	9.500.000	05	01	16	01
						05	01	17	01
019.EC.6059.PBK.008	Penguatan Rantai Pasok Industri Dalam Negeri Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	1	1	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000	05	01	16	01
						05	01	11	01
						05	01	09	01
019.EC.6060	Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil				99.050.000				
019.EC.6060.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				96.750.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6060.PBK.001	Penguatan Rantai Pasok Industri Dalam Negeri Dalam Negeri Menuju Substitusi Impor Produk IKFT	0	1	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	05	01	11	01
019.EC.6060.PBK.002	Hilirisasi Industri Bahan Galian Nonlogam	1	1	Rekomendasi Kebijakan	23.750.000	05	01	09	05
						05	01	04	05
019.EC.6060.PBK.005	Pengembangan Serat Alam untuk Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagai langkah strategis substitusi impor 35%	0	1	Kajian	12.000.000	05	01	16	05
019.EC.6060.PBK.006	Hilirisasi Silika Menjadi Wafer Silikon Dalam Rangka Kemandirian Industri Photovoltaic (PV) Module dan Semikonduktor Dalam Negeri	1	2	Rekomendasi Kebijakan	8.500.000	05	01	10	01
019.EC.6060.PBK.007	Hilirisasi Grafit untuk mendukung Ekosistem Industri Electric Vehicle (EV) Nasional	1	2	Rekomendasi Kebijakan	8.500.000	05	01	12	01
019.EC.6060.PBK.008	Optimalisasi Penggunaan Aspal Buton sebagai Upaya Swasembada Aspal Nasional	0	3	Rekomendasi Kebijakan	24.000.000	05	01	09	06
019.EC.6060.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				2.300.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6060.QDH.001	Substitusi Impor Bahan Baku Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	0	6	Badan usaha	2.300.000	05	01	09	05
019.EC.6061	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika				29.000.000				
019.EC.6061.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				4.000.000				
019.EC.6061.PFA.002	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Industri (RSKKNI) Industri Logam	0	3	NSPK	4.000.000	05	01	18	06
019.EC.6061.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				25.000.000				
019.EC.6061.QDI.001	Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Tembaga	5	5	Industri	25.000.000	05	01	02	02
019.EC.6062	Perbaikan Rantai Pasok Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika				549.328.973				
019.EC.6062.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				184.782.173				
019.EC.6062.PBK.004	Kebijakan Hilirisasi Industri Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam	4	4	Rekomendasi Kebijakan	24.000.000	05	01	01	06
						05	01	18	04
						05	01	04	05



- 185 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6062.PBK.005	Kebijakan Peningkatan Utilisasi Industri Baja Nasional	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	18	03
019.EC.6062.PBK.009	Kebijakan Penyusunan Peta Jalan Nol Emisi Karbon Pada Industri Maritim	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	02	22	05	01
019.EC.6062.PBK.010	Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	11.000.000	02	22	05	01
						02	22	05	02
						02	22	05	03
019.EC.6062.PBK.011	Evaluasi Kebijakan Peningkatan Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.400.000	02	22	05	02
						05	01	18	03
019.EC.6062.PBK.012	Rekomendasi Kebijakan Sektor Industri Permesinan dalam rangka mendukung Menuju Indonesia Emas 2045	2	2	Rekomendasi Kebijakan	13.800.000	05	01	14	04
019.EC.6062.PBK.013	Neraca Komoditas Sektor Industri Elektronika dan Telematika	0	2	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	05	01	10	01
019.EC.6062.PBK.014	Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas dan Strategis Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	1	0	Rekomendasi Kebijakan	9.000.000	02	22	05	01
						05	01	01	06
						05	01	04	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6062.PBK.015	Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Nasional	1	1	Rekomendasi Kebijakan	14.182.173	02	22	05	02
						05	01	18	01
019.EC.6062.PBK.018	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Struktur Bahan Baku Komoditas Industri Elektronika dan Telematika	1	1	Rekomendasi Kebijakan	8.500.000	05	01	10	01
019.EC.6062.PBK.019	Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Nikel	1	1	Rekomendasi Kebijakan	6.250.000	05	01	01	02
019.EC.6062.PBK.021	Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Bauksit	1	1	Rekomendasi Kebijakan	6.250.000	05	01	03	02
						05	01	03	04
019.EC.6062.PBK.022	Kebijakan pengembangan industri baja nasional berbasis industri hijau	1	0	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05	01	18	05
019.EC.6062.PBK.023	Kebijakan Pemanfaatan Secondary Source (Skrap) untuk Mendukung Ekonomi Sirkular	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000	05	01	18	01
						02	15	04	01
019.EC.6062.PBK.024	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Alat Mesin Pertanian yang menunjang Mekanisasi Pertanian	2	2	Rekomendasi Kebijakan	13.800.000	05	01	14	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6062.PBK.025	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Alat Kesehatan sebagai pemenuhan Ketahanan Kesehatan Nasional	1	2	Rekomendasi Kebijakan	13.800.000	05	01	14	02
019.EC.6062.PBK.026	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Penunjang EBT	2	2	Rekomendasi Kebijakan	13.800.000	05	01	14	01
019.EC.6062.PBK.029	Kebijakan Hilirisasi Industri Logam Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam Bukan Besi	0	1	Kajian	4.000.000	05	01	04	05
						05	01	01	06
019.EC.6062.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				364.546.800				
019.EC.6062.QDI.001	Industri Komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur	2	4	Industri	29.500.000	02	14	002	001
						05	01	10	01
019.EC.6062.QDI.003	Industri Drone yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing	0	1	Industri	4.000.000	05	01	13	01
019.EC.6062.QDI.004	Industri MRO Pesawat yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing	0	1	Industri	12.000.000	05	01	13	04
019.EC.6062.QDI.005	Industri Smelter/Pemurnian/Pengolahan Logam Dasar Beserta Turunannya yang	25	25	Industri	16.666.666	05	01	01	01
						05	01	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Termonitor dan Terevaluasi Perkembangannya					05	01	03	02
						05	01	04	01
019.EC.6062.QDI.007	Industri Telekomunikasi dan Informasi yang Terfasilitasi	0	2	Industri	8.000.000	05	01	10	01
						02	14	002	001
019.EC.6062.QDI.008	Industri maritim yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing	0	1	Industri	4.000.000	02	22	05	03
019.EC.6062.QDI.009	Industri yang terfasilitasi melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Program Nasional IMEI Control	4	4	Industri	44.000.000	02	14	002	001
						05	01	10	01
019.EC.6062.QDI.010	Industri kedirgantaraan yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing	3	3	Industri	15.500.000	05	01	13	01
019.EC.6062.QDI.011	Industri Komponen Kereta Api yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing	2	5	Industri	19.037.634	05	01	14	04
019.EC.6062.QDI.012	Industri Kendaraan Bermotor yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing	2	5	Industri	15.500.000	05	01	14	04
						05	01	12	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6062.QDI.013	Industri Komponen Alat Pertahanan yang Terfasilitasi dalam rangka meningkatkan daya saing	0	1	Industri	4.000.000	05	01	14	04
019.EC.6062.QDI.014	Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN	5	5	Industri	5.000.000	05	01	18	03
019.EC.6062.QDI.015	Industri Semikonduktor Nasional yang terfasilitasi Dalam Rangka Pendalaman Struktur Industri Elektronika	1	2	Industri	47.000.000	05	01	10	02
019.EC.6062.QDI.016	Industri Mold And Dies yang Terfasilitasi dalam mendukung Fokus Industri RPJMN 2025—2029	2	2	Industri	13.000.000	05	01	14	04
						05	01	04	05
019.EC.6062.QDI.017	Industri Baterai Nasional yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan Struktur Industri Dalam Negeri	2	2	Industri	17.641.652	05	01	12	01
						02	11	03	03
						03	02	05	02
						05	01	01	03
019.EC.6062.QDI.018	Industri Energi Baru Terbarukan yang terfasilitasi dalam mendukung Pengembangan Rantai Nilai Sektor Ketenagalistrikan	2	2	Industri	16.000.000	02	11	03	03
						05	01	14	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 190 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6062.QDI.019	Industri Remanufaktur yang Terfasilitasi dalam rangka Ekonomi Sirkular Industri	2	2	Industri	10.000.000	05	01	14	04
						02	15	01	01
019.EC.6062.QDI.022	Industri yang Terverifikasi Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Supply Demand Sektor Industri Permesinan dalam rangka Mendukung Fokus Industri RPJMN 2025—2029	20	120	Industri	23.000.000	05	01	14	05
019.EC.6062.QDI.024	Industri Alat Kesehatan yang Terfasilitasi dalam rangka Pemenuhan dan Kemandirian Ketersediaan Alat Kesehatan	4	10	Industri	15.700.848	05	01	14	02
019.EC.6062.QDI.025	Industri Alat Mesin Pertanian yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan Mekanisasi Pertanian Nasional	2	2	Industri	17.500.000	05	01	14	03
						02	10	16	01
019.EC.6062.QDI.026	Industri Alat Berat yang Terfasilitasi dalam rangka Pengembangan Hilirisasi Berbasis SDA Unggulan	2	2	Industri	13.500.000	05	01	14	04
019.EC.6062.QDI.027	Industri Mesin Perkakas yang Terfasilitasi dalam menunjang Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Kemampuan Kerja hasil Pendidikan Berkualitas yang merata	5	5	Industri	14.000.000	05	01	14	04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6063	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika				231.000.000				
019.EC.6063.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				231.000.000				
019.EC.6063.QDI.001	Industri Elektronika yang Terfasilitasi melalui Perluasan Akses Technopark	0	2	Industri	12.000.000	05	01	10	03
019.EC.6063.QDI.002	Pengembangan Center Of Excellence Industri Alat Kesehatan	2	2	Industri	4.000.000	05	01	14	02
019.EC.6063.QDI.003	Industri Animasi dan Games yang Terfasilitasi Melalui Pusat Inovasi	0	1	Industri	8.000.000	02	14	002	001
019.EC.6063.QDI.004	Industri yang Terfasilitasi melalui Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (One Stop Solution Manufacture)	2	2	Industri	38.000.000	05	01	14	04
019.EC.6063.QDI.005	Industri yang Terfasilitasi melalui Pengembangan Pusat Industri Gim dan Animasi Nasional	3	3	Industri	22.000.000	03	06	04	04
019.EC.6063.QDI.006	Industri yang Terfasilitasi melalui Engineering Center TIK Untuk IP Lokal	1	1	Industri	4.000.000	02	14	002	001
						05	01	10	03
019.EC.6063.QDI.007	Industri Terfasilitasi Melalui Penguatan Alat Uji EMC	0	1	Industri	120.000.000	05	01	12	03



- 192 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6063.QDI.010	Fasilitasi Industri Pengolahan Sisa Hasil Produksi Industri Smelter Logam Bukan Besi dan Turunannya	3	3	Industri	11.000.000	05	01	03	03
						05	01	04	04
						05	01	01	05
						05	01	02	03
019.EC.6063.QDI.011	Industri yang terfasilitasi melalui pengembangan pusat industri software nasional	1	1	Industri	12.000.000	02	14	002	001
						05	01	10	01
019.EC.6065	Pengembangan Standar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika				24.000.000				
019.EC.6065.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				16.000.000				
019.EC.6065.PFA.001	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Industri Elektronika dan Telematika	0	3	NSPK	4.000.000	05	01	10	03
019.EC.6065.PFA.004	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam	0	3	NSPK	4.000.000	05	01	18	06
019.EC.6065.PFA.005	Draft RPerMenperin SNI Wajib Produk Industri Logam	0	3	NSPK	4.000.000	05	01	18	06



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6065.PFA.007	Draft Permenperin Pemberlakuan SNI Wajib Produk Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	0	1	NSPK	4.000.000	05	01	14	04
019.EC.6065.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				8.000.000				
019.EC.6065.QIA.001	Produk Industri Logam yang diawasi dalam rangka Pemberlakuan SNI Wajib	0	2	Produk	4.000.000	05	01	18	06
019.EC.6065.QIA.002	Produk sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang diawasi guna pemberlakuan SNI Wajib	0	2	Produk	4.000.000	05	01	14	04
019.EC.6067	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika				9.000.000				
019.EC.6067.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				9.000.000				
019.EC.6067.PBK.001	Evaluasi Kebijakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000	05	01	18	03
						05	01	13	03
019.EC.6067.PBK.002	Penyusunan Draft Peraturan Menteri terkait TKDN Produk Software dan Konten	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	02	14	002	001



- 194 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6068	Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika				133.956.027				
019.EC.6068.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				133.956.027				
019.EC.6068.QDI.001	Industri yang Terfasilitasi Melalui Pendampingan dalam rangka Peningkatan Investasi dan/atau Ekspor	2	0	Industri	12.000.000	05	01	01	02
019.EC.6068.QDI.002	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	4	4	Industri	10.000.000	05	01	14	04
019.EC.6068.QDI.003	Industri yang Terfasilitasi Melalui Kerja Sama Internasional Sektor Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	2	2	Industri	13.000.000	05	01	10	01
019.EC.6068.QDI.004	Industri yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	5	10	Industri	43.056.027	05 05	05 01	06 01	004 03
019.EC.6068.QDI.005	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	5	20	Industri	18.900.000	05	01	12	03



- 195 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6068.QDI.007	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Elektronika dan Telematika	5	5	Industri	16.000.000	05	01	10	01
019.EC.6068.QDI.008	Industri yang terfasilitasi Dalam Rangka Kerja Sama Industri Internasional Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	0	1	Industri	16.000.000	05	01	12	03
019.EC.6068.QDI.009	Industri yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Investasi dan Ekspor Sektor Industri Logam	2	2	Industri	5.000.000	05	01	18	04
						05	01	01	02
						05	04	02	03
						05	01	04	05
019.EC.6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika				41.000.000				
019.EC.6070.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				41.000.000				
019.EC.6070.QDI.001	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	4	10	Industri	16.000.000	05	01	10	02
019.EC.6070.QDI.002	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	2	15	Industri	12.000.000	05	01	12	03



- 196 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6070.QDI.003	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	2	10	Industri	13.000.000	05	01	14	05
019.EC.6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka				1.408.670.876				
019.EC.6071.PEC	Kerja sama				8.500.000				
019.EC.6071.PEC.001	Kerja Sama Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	4	4	Kesepakatan	8.500.000	05	02	17	09
019.EC.6071.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				54.440.985				
019.EC.6071.QDD.001	Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitasi	4	15	Kelompok Masyarakat	29.550.985	05	02	18	07
						05	01	15	05
019.EC.6071.QDD.003	Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitasi	3	8	Kelompok Masyarakat	16.890.000	05	01	12	01
						05	02	05	05
019.EC.6071.QDD.015	Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa	2	2	Kelompok Masyarakat	8.000.000	05	01	06	05
019.EC.6071.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				1.232.588.201				
019.EC.6071.QDI.010		587	1400	IKM	172.976.334	05	02	02	07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Wirausaha Industri Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan					03	03	03	04
						06	03	01	02
						05	01	15	05
019.EC.6071.QDI.011	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi Produk/Penguatan Mesin/Peralatan	85	116	IKM	47.569.501	05	01	15	03
						03	03	02	04
						05	02	06	06
019.EC.6071.QDI.012	Penerapan Making Indonesia 4.0 pada IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan	500	1003	IKM	9.450.000	05	01	15	03
019.EC.6071.QDI.013	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Perluasan Akses Pasar	15	77	Industri	21.081.515	05	01	15	05
						05	02	07	04
						05	02	12	08
019.EC.6071.QDI.014	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	17	48	IKM	51.427.999	05	01	15	05
						03	03	02	01
019.EC.6071.QDI.015	Wirausaha Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	587	1404	Industri	172.976.333	03	03	03	04
						05	01	16	04
						06	03	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Dan Teknis Produksi, Serta Fasilitas Mesin/Peralatan								
019.EC.6071.QDI.016	Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi Produk/Penguatan Mesin/Peralatan	85	131	Industri	39.625.000	03	03	02	04
						05	02	08	03
						05	01	16	04
019.EC.6071.QDI.017	Penerapan Making Indonesia 4.0 pada IKM Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan	350	1003	Industri	12.825.000	05	01	16	04
019.EC.6071.QDI.018	Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitas Perluasan Akses Pasar	52	133	Industri	51.168.481	05	01	16	07
						05	02	09	04
019.EC.6071.QDI.019	IKM Aneka, Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	9	42	Industri	53.391.000	03	03	02	01
						05	01	16	04
019.EC.6071.QDI.021	Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Serta Fasilitas Mesin/Peralatan	587	1404	IKM	172.976.333	05	01	14	05
						06	03	01	02
						03	03	03	04
019.EC.6071.QDI.022		89	133	IKM	60.330.000	03	03	02	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 199 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi Produk/Penguatan Mesin/Peralatan					05	01	14	05
						05	02	16	08
						05	02	13	08
						05	01	18	06
019.EC.6071.QDI.023	Penerapan Making Indonesia 4.0 pada IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut	667	1003	IKM	11.580.000	05	01	12	01
						05	01	14	05
019.EC.6071.QDI.024	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Perluasan Akses Pasar	3	52	IKM	14.087.224	05	01	14	05
						05	01	18	03
						05	02	14	08
019.EC.6071.QDI.025	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	6	33	IKM	46.000.000	03	03	02	01
						05	01	12	01
						05	01	14	05
019.EC.6071.QDI.026	Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	375	375	Industri	12.500.000	05	01	16	08
019.EC.6071.QDI.028	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan Making Indonesia 4.0	100	101	Industri	34.752.411	03	03	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6071.QDI.033	Layanan Desain dan Kemasan	175	200	Industri	11.700.000	05	01	16	07
019.EC.6071.QDI.034	IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi/Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	1800	2777	Industri	83.649.505	03	03	02	04
019.EC.6071.QDI.036	Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya BPIFK	170	231	IKM	35.200.000	03	06	03	05
						04	19	03	01
						05	01	16	07
019.EC.6071.QDI.037	Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri - Industri Kecil	1650	1650	IKM	30.660.065	05	01	17	01
019.EC.6071.QDI.038	Penguatan Ekosistem IKM Alas Kaki Melalui Penumbuhan Wirausaha Industri, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Industri 4.0 dan Kemitraan	100	167	IKM	16.100.000	05	01	17	02
						05	01	17	03
019.EC.6071.QDI.039	Pengembangan Produk, Pendampingan IKM, Peningkatan Kreativitas, dan Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran	150	150	IKM	22.000.000	05	01	17	04
						05	01	17	03
019.EC.6071.QDI.118	IKM Pangan Intermediate yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan	0	15	IKM	4.000.000	05	01	15	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 201 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6071.QDI.119	IKM Tekstil dan Produk Tekstil Budaya Lokal yang Mendapatkan Fasilitasi	0	30	IKM	6.961.500	05	01	16	07
019.EC.6071.QDI.120	IKM Fesyen yang Mendapatkan Peningkatan Akses Pembiayaan	0	35	IKM	4.400.000	05	01	16	06
019.EC.6071.QDI.127	IKM Pangan yang Mendapatkan Fasilitasi dalam rangka Hilirisasi Sagu/Singkong	0	100	IKM	4.000.000	05	01	08	02
019.EC.6071.QDI.128	IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitasi dalam rangka penguatan rantai pasok industri KBLBB	0	10	IKM	16.000.000	05	01	12	01
019.EC.6071.QDI.129	IKM Pangan yang Mengikuti Program IFI (Indonesia Food Innovation)	0	20	IKM	10.800.000	05	01	15	05
019.EC.6071.QDI.130	IKM yang Mengikuti Program Inkubator Bisnis Alas Kaki	0	5	IKM	2.400.000	05	01	17	03
019.EC.6071.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan				113.141.690				
019.EC.6071.RBL.001	Prasarana Pembangunan Gedung Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia	1	1	unit	49.604.053	05	01	17	02
019.EC.6071.RBL.002	Prasarana Pembangunan Gedung Bali Creative Industrial Center	1	0	unit	63.537.637	05	01	16	07
019.EC.6072	Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal				64.300.000				



- 202 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6072.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				44.000.000				
019.EC.6072.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	8	2	Rekomendasi Kebijakan	44.000.000	05	01	16	10
						05	01	09	05
						05	01	01	06
019.EC.6072.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				20.300.000				
019.EC.6072.QDI.001	Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan Industri	10	30	Industri	20.300.000	05	01	16	10
						05	01	18	03
						05	01	09	05
019.EC.6073	Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri				225.932.000				
019.EC.6073.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				91.932.000				
019.EC.6073.PBK.001	Perencanaan dan Pengembangan Jejaring Kerja Promosi Investasi	1	1	Rekomendasi Kebijakan	3.700.000	05	01	04	05
						05	01	09	01
						05	01	01	02
						05	01	18	04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6073.PBK.002	Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Perundingan Internasional di Bidang Industri (PTA/FTA/CEPA)	6	12	Rekomendasi Kebijakan	26.500.000	05	01	10	01
						05	01	11	01
						05	01	18	03
						05	01	10	02
						05	01	11	06
						05	01	12	03
019.EC.6073.PBK.004	Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri	3	3	Rekomendasi Kebijakan	34.400.000	05	01	01	06
						02	09	04	02
						05	01	01	06
						05	01	18	04
						05	01	10	01
						05	01	11	03
019.EC.6073.PBK.005		1	1		4.800.000	05	01	12	01
						05	01	09	05
						05	01	17	04
						05	01	18	06



- 204 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional			Rekomendasi Kebijakan		05	01	10	01
						05	01	11	03
019.EC.6073.PBK.006	Pemanfaatan Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri	1	1	Rekomendasi Kebijakan	18.032.000	05	01	18	04
						05	01	10	01
						05	01	12	01
						05	01	09	03
019.EC.6073.PBK.007	Analisa Kebutuhan SDI dan Potensi Pemenuhan SDI dari Negara Mitra	1	1	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000	05	01	09	03
						05	01	18	01
						05	01	10	01
019.EC.6073.PEC	Kerja sama				18.725.000				
019.EC.6073.PEC.001	Fasilitasi dan Penjajagan Kerja Sama SDI dengan Negara Mitra	2	2	Kesepakatan	4.975.000	05	01	18	01
						05	01	10	01
						05	01	12	01
						05	01	17	04
						02	09	04	02
						05	01	09	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6073.PEC.002	Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Forum Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral	2	2	Kesepakatan	4.750.000	05	01	17	04
						05	01	11	06
						02	09	04	02
019.EC.6073.PEC.003	Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular di bidang Industri	1	2	Kegiatan	9.000.000	02	09	03	01
						05	01	18	03
						05	01	11	06
						05	05	06	004
019.EC.6073.PEH	Promosi				96.300.000				
019.EC.6073.PEH.001	Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri	1	1	promosi	9.000.000	05	04	02	03
						05	01	06	06
019.EC.6073.PEH.002	Partisipasi Indonesia pada Hannover Messe	1	1	promosi	55.300.000	05	01	12	03
						05	01	10	01
						05	01	11	06
019.EC.6073.PEH.003	Promosi Industri Internasional di Sektor Kimia, Farmasi, Tekstil	0	1	promosi	32.000.000	05	01	16	08
019.EC.6073.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				18.975.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 206 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6073.QDH.001	Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional	2	2	Badan usaha	6.975.000	05	04	02	01
019.EC.6073.QDH.002	Peningkatan Partisipasi dalam Global Value Chain	3	3	Badan usaha	7.000.000	05	05	06	004
						05	01	16	08
						05	01	18	04
019.EC.6073.QDH.003	Pendampingan Industri dalam Akses Industri Internasional	5	5	Badan usaha	5.000.000	05	01	18	01
019.EC.6074	Pengembangan Perwilayahan Industri				135.325.000				
019.EC.6074.PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah				14.000.000				
019.EC.6074.PBP.001	Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri	2	3	Rekomendasi Kebijakan	7.000.000	05	02	03	02
019.EC.6074.PBP.002	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan	2	5	Rekomendasi Kebijakan	7.000.000	05	02	16	01
019.EC.6074.PEA	Koordinasi				25.000.000				
019.EC.6074.PEA.001	Koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)	3	6	kegiatan	25.000.000	05	02	05	01
019.EC.6074.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				93.075.000				
019.EC.6074.QDH.001		5	5	Badan usaha	11.000.000	05	02	06	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.002	Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri	29	29	Badan usaha	16.600.000	05	02	09	03
						05	02	16	07
						05	02	24	03
						05	02	20	03
						05	02	18	06
						05	02	16	07
						05	02	06	05
						05	02	07	01
						05	02	08	02
						05	02	09	03
019.EC.6074.QDH.003	Fasilitasi Kawasan Industri dengan Zona Tematik	3	3	Badan usaha	6.850.000	05	02	09	03
						05	02	12	02
019.EC.6074.QDH.004	Pembentukan Eco Industrial Park (KI Berwawasan Lingkungan)	1	0	Badan usaha	9.000.000	05	02	14	07
						02	15	01	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.005	Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku	20	40	Badan usaha	4.500.000	05	02	03	02
						05	02	06	05
						05	02	08	02
						05	02	09	03
						05	02	12	07
						05	02	18	06
						05	02	16	07
019.EC.6074.QDH.006.1174	Pembinaan Perizinan Kawasan Industri - Kota Lhokseumawe	0	0	Badan usaha	300.000	05	02	01	02
019.EC.6074.QDH.006.3324	Pembinaan Perizinan Kawasan Industri - Kab. Kendal	1	0	Badan usaha	0	05	02	10	06
019.EC.6074.QDH.006.3521	Pembinaan Perizinan Kawasan Industri - Kab. Ngawi	0	0	Badan usaha	300.000	05	02	12	01
019.EC.6074.QDH.006.3524	Pembinaan Perizinan Kawasan Industri - Kab. Lamongan	1	0	Badan usaha	0	05	02	11	01
019.EC.6074.QDH.006.5207	Pembinaan Perizinan Kawasan Industri - Kab. Sumbawa Barat	0	0	Badan usaha	300.000	05	02	20	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 209 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.006.7404	Pembinaan Perizinan Kawasan Industri - Kab. Kolaka	0	0	Badan usaha	300.000	05	02	15	01
019.EC.6074.QDH.006.9101	Pembinaan Perizinan Kawasan Industri - Kab. Fak Fak	0	0	Badan usaha	300.000	05	02	24	02
019.EC.6074.QDH.007	Fasilitasi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri	24	24	Badan usaha	15.625.000	05	02	20	10
019.EC.6074.QDH.007.8202	Fasilitasi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri - Kab. Halmahera Tengah	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	22	07
019.EC.6074.QDH.007.8204	Fasilitasi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri - Kab. Halmahera Selatan	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	21	08
019.EC.6074.QDH.007.8206	Fasilitasi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri - Kab. Halmahera Timur	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	23	07
019.EC.6074.QDH.007.9101	Fasilitasi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri - Kab. Fak Fak	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	24	10
019.EC.6074.QDH.008.1174	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kota Lhokseumawe	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	01	04
019.EC.6074.QDH.008.1209	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Simalungun	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	02	07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.008.2102	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Bintan	2	2	Badan usaha	1.300.000	05	02	03	07
						05	02	06	06
019.EC.6074.QDH.008.3325	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Batang	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	09	04
019.EC.6074.QDH.008.3521	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Ngawi	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	12	08
019.EC.6074.QDH.008.3524	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Lamongan	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	11	05
019.EC.6074.QDH.008.3525	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Gresik	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	05	05
019.EC.6074.QDH.008.3604	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Serang	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	08	03
019.EC.6074.QDH.008.3672	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kota Cilegon	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	07	04
019.EC.6074.QDH.008.5207	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Sumbawa Barat	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	20	11



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 211 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.008.6106	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Ketapang	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	13	08
019.EC.6074.QDH.008.6502	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Bulungan	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	14	08
019.EC.6074.QDH.008.7203	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Morowali	2	2	Badan usaha	1.300.000	05	02	18	07
						05	02	19	08
019.EC.6074.QDH.008.7212	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Morowali Utara	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	17	09
019.EC.6074.QDH.008.7403	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Konawe	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	16	08
019.EC.6074.QDH.008.7404	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Kolaka	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	15	09
019.EC.6074.QDH.008.8202	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Halmahera Tengah	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	22	08



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 212 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.008.8204	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Halmahera Selatan	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	21	09
019.EC.6074.QDH.008.8206	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Halmahera Timur	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	23	08
019.EC.6074.QDH.008.9101	Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri - Kab. Fak Fak	1	1	Badan usaha	650.000	05	02	24	11
019.EC.6074.QDH.009	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri	3	5	Badan usaha	2.700.000	05	02	19	03
019.EC.6074.QDH.009.3324	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Kendal	0	0	Badan usaha	300.000	05	02	10	02
019.EC.6074.QDH.009.3325	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Batang	0	0	Badan usaha	300.000	05	02	09	02
019.EC.6074.QDH.009.3521	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Ngawi	0	1	Badan usaha	500.000	05	02	12	05
019.EC.6074.QDH.009.3524	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Lamongan	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	11	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 213 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.009.5207	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Sumbawa Barat	0	0	Badan usaha	0	05	02	20	06
019.EC.6074.QDH.009.6106	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Ketapang	0	0	Badan usaha	0	05	02	13	03
019.EC.6074.QDH.009.6502	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Bulungan	0	1	Badan usaha	0	05	02	14	03
019.EC.6074.QDH.009.7203	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Morowali	1	1	Badan usaha	0	05	02	18	03
019.EC.6074.QDH.009.7403	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Konawe	0	1	Badan usaha	0	05	02	16	04
019.EC.6074.QDH.009.7404	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Kolaka	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	15	04
019.EC.6074.QDH.009.8202	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Halmahera Tengah	1	0	Badan usaha	0	05	02	22	03
019.EC.6074.QDH.009.8204	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Halmahera Selatan	0	0	Badan usaha	0	05	02	21	04
019.EC.6074.QDH.009.9101	Fasilitasi Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Industri - Kab. Fak Fak	0	1	Badan usaha	0	05	02	24	06



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 214 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.010.1174	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kota Lhokseumawe	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	01	01
019.EC.6074.QDH.010.1209	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Simalungun	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	02	02
019.EC.6074.QDH.010.2102	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Bintan	1	0	Badan usaha	1.000.000	05	02	03	04
						05	02	06	02
019.EC.6074.QDH.010.3325	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Batang	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	09	01
019.EC.6074.QDH.010.3521	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Ngawi	0	1	Badan usaha	500.000	05	02	12	04
019.EC.6074.QDH.010.3524	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Lamongan	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	11	02
019.EC.6074.QDH.010.3525	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Gresik	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	05	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.010.3604	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Serang	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	08	01
019.EC.6074.QDH.010.3672	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kota Cilegon	1	0	Badan usaha	500.000	05	02	07	02
019.EC.6074.QDH.010.5207	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Sumbawa Barat	0	1	Badan usaha	500.000	05	02	20	05
019.EC.6074.QDH.010.6106	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Ketapang	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	13	02
019.EC.6074.QDH.010.6502	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Bulungan	0	1	Badan usaha	500.000	05	02	14	02
019.EC.6074.QDH.010.7203	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Morowali	1	0	Badan usaha	1.000.000	05	02	18	01
019.EC.6074.QDH.010.7212	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Morowali Utara	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	17	01
						05	02	19	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QDH.010.7403	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Konawe	0	1	Badan usaha	500.000	05	02	16	03
						05	02	15	03
019.EC.6074.QDH.010.7404	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Kolaka	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	20	05
019.EC.6074.QDH.010.8202	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Halmahera Tengah	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	21	03
019.EC.6074.QDH.010.8204	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Halmahera Selatan	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	22	02
019.EC.6074.QDH.010.8206	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Halmahera Timur	0	0	Badan usaha	500.000	05	02	23	02
						05	02	23	01
019.EC.6074.QDH.010.9101	Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi - Kab. Fak Fak	0	1	Badan usaha	500.000	05	02	24	05
019.EC.6074.QMA	Data dan Informasi Publik				3.250.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 217 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6074.QMA.001	Pengelolaan Data dan Informasi Perwilayahan Industri	5	5	Data	3.250.000	05	02	16	01
019.EC.6076	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				212.769.000				
019.EC.6076.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				4.600.000				
019.EC.6076.PBK.001	Pengawasan dan Pengendalian Implementasi P3DN	3	5	Rekomendasi Kebijakan	4.600.000	05	01	18	03
						05	01	11	02
019.EC.6076.PDC	Sertifikasi Produk				129.819.000				
019.EC.6076.PDC.001	Sertifikasi Produk	910	3000	Sertifikat	129.819.000	05	01	18	03
						05	01	11	02
019.EC.6076.PEC	Kerja sama				75.000.000				
019.EC.6076.PEC.001	Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri	600	1000	Kesepakatan	75.000.000	05	01	18	03
						05	01	11	02
						05	01	16	09
019.EC.6076.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				3.350.000				
019.EC.6076.QIA.001	Pengawasan dan Pengendalian P4DN	2	2	Laporan	3.350.000	05	01	11	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri				593.616.334				
019.EC.6077.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				58.000.000				
019.EC.6077.PBK.001	Perumusan Regulasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	19	01
						05	01	04	03
						05	01	15	03
019.EC.6077.PBK.002	Penyusunan Kebijakan Teknis Untuk Mendukung Akselerasi Implementasi Making Indonesia 4.0	2	1	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000	05	01	15	03
						05	01	19	01
						05	01	04	03
019.EC.6077.PBK.003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengaturan Jasa Industri	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000	05	01	19	01
019.EC.6077.PBK.004	Kajian penyusunan dokumen Indonesia Strategy on Smart Manufacturing and Cyber Security Manufacturing	0	1	Kajian	3.200.000	05	01	19	01
019.EC.6077.PBK.005	Kajian penyusunan dokumen skema insentif implementasi digitalisasi manufaktur	0	1	Kajian	3.200.000	05	01	19	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 219 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077.PBK.006	Peningkatan Kontribusi PDB Sektor Jasa Industri melalui pembinaan Industri	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.400.000	05	01	19	01
019.EC.6077.PBK.007	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000	05	01	19	01
						05	01	15	05
						05	01	16	02
019.EC.6077.PBK.008	Peraturan Kebijakan Teknis Jasa Industri	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	19	01
019.EC.6077.PBK.009	Kebijakan Teknis Jasa Industri	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	19	01
019.EC.6077.PBK.010	Analisis, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	19	01
						05	01	18	06
						05	01	11	03
						05	01	04	02
019.EC.6077.PBK.011	Penyusunan Regulasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pusat OPTIKJI	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	19	01
019.EC.6077.PBK.012	Kajian Ilmiah Pemanfaatan Teknologi Industri Pusat OPTIKJI	0	1	Rekomendasi Kebijakan	3.200.000	05	01	19	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 220 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077.PBK.015	Perumusan Kebijakan Untuk Mendukung Implementasi Making Indonesia 4.0 pada Pusat OPTIKJI	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	19	01
019.EC.6077.PBK.023	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pusat OPTIKJI	0	1	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000	05	01	19	01
019.EC.6077.PDA	Standardisasi Produk				2.300.000				
019.EC.6077.PDA.001	Pengembangan Bahan acuan standar	0	2	produk	1.150.000	05	01	04	02
						05	01	15	02
						05	01	18	06
						05	01	11	03
019.EC.6077.PDA.002	Pengembangan Standardisasi dan Layanan Pengujian Bahan Baku Plastik dan Kemasan Barang Berbahaya	0	2	produk	1.150.000	05	01	09	04
019.EC.6077.PEB	Forum				6.000.000				
019.EC.6077.PEB.001	Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri	0	1	forum	6.000.000	05	01	19	01
019.EC.6077.PEC	Kerja sama				5.012.202				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 221 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077.PEC.001	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Tekstil	3	3	Dokumen	320.000	05	01	19	03
019.EC.6077.PEC.002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	16	19	Dokumen	3.102.122	05	01	19	03
019.EC.6077.PEC.003	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	88	95	Dokumen	136.000	05	01	19	03
019.EC.6077.PEC.004	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	3	4	Dokumen	246.000	05	01	19	03
019.EC.6077.PEC.005	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	0	3	Dokumen	360.000	05	01	19	03
019.EC.6077.PEC.006	Kerja Sama Pemanfaatan teknologi dan layanan Teknis Industri Kerajinan dan Batik	5	5	Dokumen	94.000	05	01	19	03
019.EC.6077.PEC.007	Kerja Sama Pemanfaatan teknologi dan layanan teknis industri Logam dan Mesin	2	2	Dokumen	280.000	05	01	19	03
019.EC.6077.PEC.008	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan	1	0	Dokumen	174.080	05	01	19	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 222 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077.PEC.009	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Bahan dan Barang Teknik	1	0	Dokumen	300.000	05	01	19	03
019.EC.6077.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				28.422.852				
019.EC.6077.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	1535	1755	orang	12.725.000	05	01	19	02
019.EC.6077.PEF.003	Promosi, Sosialisasi, dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	110	130	orang	2.480.000	05	01	09	06
019.EC.6077.PEF.004	Promosi dan Publikasi atau Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan	200	200	orang	558.891	05	01	09	01
019.EC.6077.PEF.005	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	70	70	orang	830.000	05	01	17	04
019.EC.6077.PEF.006	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis Industri Tekstil	150	150	orang	916.000	05	01	16	01
019.EC.6077.PEF.007	Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Jasa Industri Pusat OPTIKJI	0	70	orang	1.000.000	05	01	19	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 223 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077.PEF.008	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Layanan Teknis industri Logam dan mesin	0	80	orang	1.200.000	05	01	14	05
019.EC.6077.PEF.009	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Bahan dan Barang Teknik	100	100	orang	4.000.000	05	01	12	03
019.EC.6077.PEF.011	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Selulosa	100	100	orang	329.000	05	01	05	04
019.EC.6077.PEF.012	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Layanan Teknis industri Agro	0	100	orang	2.000.000	05	01	05	04
						05	01	06	04
019.EC.6077.PEF.013	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	150	150	orang	2.383.961	05	01	19	02
019.EC.6077.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				6.000.000				
019.EC.6077.PFA.001	NSPK Jasa Industri Pusat OPTIKJI	0	1	NSPK	6.000.000	05	01	19	01
019.EC.6077.QAD	Pelayanan Publik kepada industri				14.800.000				
019.EC.6077.QAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian dan sertifikasi	0	1	Industri	400.000	05	01	19	02
019.EC.6077.QAD.083	Jasa pelayanan inspeksi teknik	0	500	Industri	8.400.000	05	01	19	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 224 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077.QAD.095	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri	0	50	Industri	6.000.000	05	01	19	02
019.EC.6077.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				2.000.000				
019.EC.6077.QDB.001	Fasilitasi Pengembangan Layanan Jasa Industri Balai Kementerian Perindustrian	0	1	Unit Kerja	2.000.000	05	01	19	02
019.EC.6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				166.450.000				
019.EC.6077.QDI.001	Perusahaan Industri yang memanfaatkan Teknologi Industri	32	50	Industri	27.450.000	05	01	19	02
019.EC.6077.QDI.002	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi	0	1	Industri	2.000.000	05	01	19	02
						05	01	04	03
						05	01	15	03
019.EC.6077.QDI.003	Perusahaan Industri yang bertransformasi menuju Industri 4.0	5	25	Industri	42.500.000	05	01	15	03
						05	01	19	02
						05	01	04	03
019.EC.6077.QDI.004	Audit Teknologi Industri	0	35	Industri	4.000.000	05	01	04	03
						05	01	15	03
						05	01	19	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077.QDI.005	Perusahaan Industri yang mendapatkan pembinaan TKDN pada Ekosistem Jasa Industri EPC Nasional	0	35	Industri	26.000.000	05	01	19	02
019.EC.6077.QDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik	2	2	Industri	12.500.000	05	01	15	04
						05	01	16	01
						05	01	16	05
019.EC.6077.QDI.007	Pemanfaatan Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri	0	2	Industri	1.400.000	05	01	15	04
						05	01	09	04
						05	01	18	05
						05	01	19	02
019.EC.6077.QDI.008	Pendampingan di Bidang Pencegahan Pencemaran Untuk Pemenuhan Regulasi Sektor Industri	0	2	Industri	1.400.000	05	01	19	02
						05	01	09	04
						05	01	18	05
019.EC.6077.QDI.009	Pemanfaatan Teknologi Industri BSPJI	0	4	Industri	1.600.000	05	01	19	02
019.EC.6077.QDI.010	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	0	2	Industri	2.400.000	05	01	19	02
						05	01	18	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 226 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						05	01	04	04
						05	01	09	04
019.EC.6077.QDI.011	Perusahaan Industri yang memanfaatkan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik	0	20	Industri	17.000.000	05	01	17	04
019.EC.6077.QDI.012	Verifikasi dan pembinaan usaha Jasa Industri Pusat OPTIKJI	0	1	Industri	12.000.000	05	01	19	02
019.EC.6077.QDI.013	Pemanfaatan Teknologi Industri industri agro	0	2	Industri	8.000.000	05	01	15	03
						05	01	15	01
						05	01	06	04
						05	01	11	05
019.EC.6077.QDI.014	Pemanfaatan Teknologi Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan	0	2	Industri	1.400.000	05	01	09	01
019.EC.6077.QDI.015	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pusat OPTIKJI	0	1	Industri	4.000.000	05	01	04	03
						05	01	15	03
						05	01	19	02
019.EC.6077.QDI.016	Audit Teknologi Industri Pusat OPTIKJI	0	20	Industri	2.800.000	05	01	19	02
						05	01	15	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 227 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						05	01	04	03
019.EC.6077.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan				284.231.280				
019.EC.6077.RAH.001	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan	0	40	Unit	110.000.000	05	01	19	02
019.EC.6077.RAH.002	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri agro	0	21	Unit	48.000.000	05	01	06	04
019.EC.6077.RAH.002.0000	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri agro - Pusat	0	21	Unit	48.000.000	05	01	05	04
019.EC.6077.RAH.003	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri barang dan bahan teknik	0	3	Unit	3.000.000	05	01	12	03
						05	01	14	05
019.EC.6077.RAH.004	Peralatan fasilitas laboratorium/workshp/layanan industri kimia, farmasi dan kemasan	3	16	Unit	29.656.280	05	01	09	01
019.EC.6077.RAH.005	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri kulit, karet dan plastik	2	4	Unit	2.575.000	05	01	09	01
						05	01	17	02
						05	01	17	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 228 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077.RAH.006	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan Jasa Industri	0	0	Unit	45.000.000	05	01	19	01
						05	01	19	02
019.EC.6077.RAH.007	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri hasil perkebunan, mineral logam, dan maritim	5	6	Unit	26.000.000	05	01	05	01
						05	01	06	08
						05	01	18	06
019.EC.6077.RAH.025	Sarana pengembangan teknologi proses dan material tekstil maju	0	5	Unit	20.000.000	05	01	16	01
						05	01	16	05
019.EC.6077.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				15.600.000				
019.EC.6077.RAN.001	Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	2	Unit	6.000.000	05	01	19	02
019.EC.6077.RAN.002	Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Bahan dan Barang Teknik	0	1	Unit	9.600.000	05	01	19	02
019.EC.6077.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan				4.800.000				
019.EC.6077.RBL.001	Gedung Layanan Publik/Laboratorium yang direnovasi	0	4	unit	4.000.000	05	01	19	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 229 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6077.RBL.002	Gedung Laboratorium/Layanan Jasa Teknis yang Dibangun/Direnovasi Industri Bahan dan Barang Teknik	0	1	unit	800.000	05	01	19	02
019.EC.6078	Pengembangan Industri Hijau				234.300.000				
019.EC.6078.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				114.500.000				
019.EC.6078.PBK.002	Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri	1	2	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000	02 05	19 01	04 03	02 03
019.EC.6078.PBK.002.0001	Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri - Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	2	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000	05	01	05	05
019.EC.6078.PBK.003	Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkuler di Sektor Industri	1	3	Rekomendasi Kebijakan	9.000.000	05 05 05 05 02	01 01 01 01 15	04 11 12 16 01	04 07 04 07 01
019.EC.6078.PBK.004	Kebijakan Pengembangan Industri Hijau untuk Industri Kelapa Sawit	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	02 02	15 19	01 04	02 01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6078.PBK.005	Percepatan Dekarbonisasi dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri untuk Pemenuhan Enhanced NDC dan Menuju Net Zero Economy	1	3	Rekomendasi Kebijakan	13.000.000	05	01	05	05
						05	01	05	05
						05	01	09	04
						02	19	04	02
						05	01	18	05
019.EC.6078.PBK.006	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Fiskal dan Nonfiskal untuk Industri Hijau	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	02	15	01	02
						05	01	05	05
019.EC.6078.PBK.007	Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Industri Sawit	1	2	Rekomendasi Kebijakan	32.000.000	05	01	03	03
						05	01	04	04
						05	01	05	05
						05	01	09	04
						02	19	04	02
						05	01	01	05
						05	01	02	03
						05	01	18	05



- 231 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6078.PBK.008	Kajian Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	19	01
019.EC.6078.PBK.009	Kajian Peluang Kerja Sama dan Harmonisasi Standardisasi Industri Hijau dalam rangka upaya pengakuan international	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	19	01
						05	01	18	03
						05	01	11	03
019.EC.6078.PBK.012	Kajian Peningkatan penerapan manajemen energi, manajemen air, dan pemanfaatan EBT sektor industri sawit	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	11	07
						05	01	04	04
						05	01	05	05
						05	01	09	04
						05	01	12	04
						05	01	15	04
019.EC.6078.PBK.013	Pra Implementasi Pemberlakuan SIH secara Wajib	0	1	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	05	01	12	04
						05	01	15	04
						05	01	11	07
						02	15	01	02
						05	01	04	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 232 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6078.PBK.014	Kajian Kebutuhan Standar Industri Hijau untuk Industri Sawit	0	1	Kajian	4.000.000	05	01	05	05
						05	01	09	04
						05	01	04	04
						05	01	05	05
						05	01	09	04
						05	01	11	07
						05	01	12	04
019.EC.6078.PBK.016	Transisi Energi, Mitigasi GRK dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri	0	1	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	05	01	15	02
						05	01	03	03
						05	01	04	04
						05	01	05	05
						05	01	09	04
						02	19	04	02
019.EC.6078.PBK.018	Kebijakan insentif Industri Hijau	0	1		8.000.000	05	01	01	05
						05	01	02	03
019.EC.6078.PBK.018	Kebijakan insentif Industri Hijau	0	1		8.000.000	02	15	01	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
Rekomendasi Kebijakan						02	19	04	01
						05	01	05	05
019.EC.6078.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				10.000.000				
019.EC.6078.PFA.001	Rancangan Standar Industri Hijau	3	7	NSPK	10.000.000	02	15	01	02
019.EC.6078.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				109.800.000				
019.EC.6078.QDI.001	Perusahaan Industri yang terfasilitasi Sertifikasi Industri Hijau	5	11	Industri	33.700.000	02	15	01	02
						02	19	04	01
						05	01	01	05
						05	01	02	03
						05	01	12	04
						05	01	18	05
						05	01	11	07
						05	01	03	03
						05	01	04	04
						05	01	09	04
019.EC.6078.QDI.002		0	12	Industri	32.000.000	05	01	03	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pendampingan teknis Implementasi pemenuhan Persyaratan Standar Industri Hijau sektor industri					05	01	04	04
						05	01	09	04
						05	01	12	04
						02	15	01	02
						05	01	01	05
						05	01	02	03
						05	01	18	05
						05	01	11	07
019.EC.6078.QDI.004	Peningkatan Manajemen Energi dan Air serta Pemanfaatan EBT (Renewable Energy) Dalam Rangka Efisiensi Sumberdaya Industri	0	4	Industri	2.600.000	05	01	18	05
						05	01	11	07
						05	01	12	04
						05	01	03	03
						05	01	04	04
						05	01	09	04
						02	11	03	05
						05	01	01	05



- 235 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						05	01	02	03
019.EC.6078.QDI.006	Pengembangan National Lighthouse Ekonomi Sirkular Sektor Industri dan Penguatan Ekosistem Industri Daur Ulang	0	2	Industri	1.400.000	05	01	12	04
						05	01	16	07
						05	01	11	07
						05	01	09	04
019.EC.6078.QDI.007	Lembaga jasa Industri dan IKM Hijau yang terfasilitasi	3	35	Industri	32.100.000	02	15	01	01
						03	03	02	05
						05	01	19	02
019.EC.6078.QDI.008	Pendampingan Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) untuk Industri	0	20	Industri	8.000.000	02	15	01	01
019.EC.6079	Pengembangan Standar Industri				859.100.000				
019.EC.6079.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				33.000.000				
019.EC.6079.PBK.001	Regulasi Teknis Pemberlakuan Standardisasi Industri	15	35	Rekomendasi Kebijakan	25.000.000	05	01	01	06
						05	01	04	02
						05	01	15	02



- 236 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						05	01	18	06
						05	01	11	03
019.EC.6079.PBK.002	Pengembangan Standardisasi Industri Prioritas	0	3	Kajian	4.000.000	05	01	18	06
						05	01	11	03
						05	01	04	02
						05	01	01	06
						05	01	15	02
019.EC.6079.PBK.003	Penyusunan kajian ekosistem penguatan standardisasi dalam pengendalian produk impor dan peningkatan industri dalam negeri	0	2	Kajian	4.000.000	05	01	18	06
						05	01	01	06
019.EC.6079.PEC	Kerja sama				2.400.000				
019.EC.6079.PEC.001	Kerja Sama Regulasi Teknis Pemberlakuan Standardisasi Industri	0	2	Kegiatan	2.400.000	05	01	01	06
						05	01	15	02
						05	01	04	02
						05	01	18	06
						05	01	11	03



- 237 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6079.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				23.400.000				
019.EC.6079.PFA.001	Rancangan SNI, ST dan/atau PTC	30	50	NSPK	20.000.000	05	01	18	06
						05	01	11	03
						05	01	15	02
						05	01	01	06
						05	01	04	02
019.EC.6079.PFA.002	Evaluasi/Review Standar Bidang Industri	0	10	Standar	3.400.000	05	01	04	02
						05	01	15	02
						05	01	11	03
						05	01	01	06
019.EC.6079.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				6.300.000				
019.EC.6079.QDI.001	Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi Industri	0	8	Industri	2.300.000	05	01	01	06
						05	01	15	02
						05	01	04	02
						05	01	18	06
						05	01	11	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 238 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6079.QDI.002	Diseminasi standardisasi di Industri	0	10	Industri	4.000.000	05	01	18	06
						05	01	11	03
						05	01	15	02
						05	01	04	02
019.EC.6079.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				25.000.000				
019.EC.6079.QIA.001	Hasil Pengawasan Produk SNI	25	80	Produk	25.000.000	05	01	04	02
						05	01	18	06
						05	01	11	03
						05	01	15	02
019.EC.6079.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				23.000.000				
019.EC.6079.QIC.001	Hasil Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian	71	150	Lembaga	23.000.000	05	01	18	06
019.EC.6079.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan				740.000.000				
019.EC.6079.RAH.001	Peralatan fasilitas laboratorium pengujian untuk menunjang SNI wajib	0	100	Unit	740.000.000	05	01	18	06
019.EC.6079.SCH	Pelatihan Bidang Industri				6.000.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 239 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6079.SCH.001	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Rangka Pemberlakuan SNI/ST/PTC Secara Wajib	0	100	Orang	4.000.000	05	01	18	06
019.EC.6079.SCH.002	Pelatihan Penguatan Pengawasan Standardisasi Industri	0	50	Orang	2.000.000	05	01	18	06
019.EC.6699	Pengembangan Industri Produk Halal				167.950.000				
019.EC.6699.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				9.350.000				
019.EC.6699.PBK.001	Kebijakan Pemberdayaan Industri Halal	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.300.000	05	01	11	06
						02	13	01	05
019.EC.6699.PBK.002	Peningkatan Rantai Nilai, Rantai Pasok Halal, dan Halal Hub	2	0	Rekomendasi Kebijakan	8.050.000	02	13	01	05
						05	01	11	06
019.EC.6699.PEC	Kerja sama				14.000.000				
019.EC.6699.PEC.001	Kerja Sama Pemberdayaan Industri Halal	2	2	Kegiatan	14.000.000	05	01	11	06
						02	13	02	01
						05	01	15	05
019.EC.6699.PEH	Promosi				113.100.000				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6699.PEH.001	Promosi Industri Halal	4	5	Kegiatan	10.100.000	05	01	11	06
						02	13	01	06
019.EC.6699.PEH.002	Indonesia Halal Industry Award	1	1	Kegiatan	22.000.000	02	13	01	06
						05	01	11	06
019.EC.6699.PEH.003	Pameran Internasional Industri Halal	1	1	Kegiatan	81.000.000	05	01	11	06
						02	13	02	01
019.EC.6699.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				19.000.000				
019.EC.6699.QDI.001	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal	1000	0	Industri	19.000.000	02	13	01	05
						05	01	11	06
019.EC.6699.QMA	Data dan Informasi Publik				6.500.000				
019.EC.6699.QMA.001	Pengolahan dan Penyajian Data Informasi Industri Halal	1	1	layanan	6.500.000	05	01	11	06
						05	01	15	05
019.EC.6699.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				6.000.000				
019.EC.6699.RAN.001	Pengembangan Infrastruktur Digital	1	1	Unit	6.000.000	05	01	11	06



- 241 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
019.EC.6966	Peningkatan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)				66.500.000				
019.EC.6966.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				8.000.000				
019.EC.6966.PBK.001	Kebijakan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	0	1	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05 02	01 19	12 01	01 03
019.EC.6966.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				58.500.000				
019.EC.6966.QDI.001	Industri KBLBB yang terfasilitasi melalui pengembangan ekosistem	2	0	Industri	58.500.000	02 02 05	11 19 01	03 01 12	03 03 02
TOTAL					19.015.368.207				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 242 -

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 02.11 - Pasokan energi primer	MTOE	273	312	356,8
PP 02.11 - Konsumsi energi final per kapita	TOE per kapita	0,64	0,75	0,83
PP 02.11 - Porsi EBT dalam bauran energi primer	persen	13,2 (2023)	20,0	23
PP 02.11 - Intensitas energi primer	SBM/miliar rupiah	149,1	147,7	137,6
PP 03.02 - Konsumsi listrik per kapita	kWh	1.337 (2023)	1.464	1.720
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 02.11.01 - Jumlah <i>lifting</i> minyak bumi	ribu BOPD	605,5	605	642 -792
KP 02.11.01 - Jumlah <i>lifting</i> gas bumi	ribu BOEPD	964	1.005	1.271 - 1.617
KP 02.11.01 - Jumlah produksi batu bara	juta ton	775,20	717	743
KP 02.11.01 - Realisasi kebutuhan batu bara dalam negeri	persen	120	100	100



- 243 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.11.02 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	kumulatif, sambungan rumah	947.995	100.000	350.000
KP 02.11.02 - Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi	km	22.478	22.550	22.750
KP 02.11.02 - Jumlah volume penyaluran BBM bersubsidi	juta KL	17	19,41	20,48
KP 02.11.02 - Jumlah volume penyaluran BBM nonsubsidi	juta KL	- (indikator baru)	35,16	38,64
KP 02.11.02 - Jumlah pelanggan listrik (kumulatif)	ribu pelanggan	91.800	95.256	110.934
KP 02.11.02 - Deviasi harga jual eceran BBM	persen	0	0	0
KP 02.11.03 - Konsumsi biofuel	juta KL	11,30	13,50	17,11
KP 02.11.03 - Produksi listrik energi terbarukan	GWH	47.657,46 (2023)	50.739	62.063
KP 02.11.03 - Penurunan intensitas energi final	SBM/miliar rupiah	0,98	0,97	1,84
KP 02.16.01 - Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark	unit (kumulatif)	10	12	17
KP 02.19.01 - Reduksi emisi GRK sektor energi	juta ton CO2-Eq	142	164	272
KP 03.02.03 - Kapasitas pembangkit listrik (kumulatif angka dasar tahun 2023)	GW, kumulatif	91 (2023)	93,9	100
KP 03.02.03 - Penurunan emisi pembangkitan listrik	juta ton CO2	15,32 (2023)	16,41	21,11
KP 03.02.03 - Produksi tenaga listrik	GWh	323.320 (2023)	363.044	451.364



- 244 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 03.02.04 - Panjang jaringan transmisi tenaga listrik	kms	2.806 (2023)	2.152	15.206
KP 03.02.04 - Kapasitas gardu induk	MVA	5.360 (2023)	1.510	25.320
KP 03.02.04 - Panjang jaringan distribusi tenaga listrik	kms	22.898 (2023)	11.714	10.761
KP 03.02.04 - Kapasitas gardu distribusi	MVA	1.277 (2023)	1.949	1.873
KP 03.02.04 - Rasio elektrifikasi nasional	persen	99,79 (2023)	~100	~100
KP 03.02.04 - SAIDI / SAIFI nasional	(jam / pelanggan / tahun) / (kali / pelanggan / tahun)	5,64 / 4,27 (2023)	5,38 / 4,07	4,96 / 3,76
KP 03.02.04 - Susut jaringan	persen	8,73	8,72	8,43
KP 03.02.05 - SPKLU dan <i>private charging station</i> terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	932 (2023)	2.060	7.557
KP 03.02.05 - SPBKLU terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	1.772 (2023)	2.070	3.031
KP 03.02.05 - Koneksi tenaga listrik tambahan yang berkualitas	unit	131.600 (2023)	100.000	100.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				565.100.597				
020.DL.6344	Pendidikan Vokasi Sektor ESDM				175.836.779				
020.DL.6344.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri				175.836.779				
020.DL.6344.SAG.060	Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa PEM Akamigas	200	200	Orang	9.079.924	02 04	20 07	02 02	06 03
020.DL.6344.SAG.501	Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEM AKAMIGAS	1100	1100	Orang	138.024.669	02 04	20 07	02 02	05 05
020.DL.6344.SAG.801	Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEP Bandung	300	300	Orang	21.652.186	04 02	07 20	02 02	05 05
020.DL.6344.SAG.803	Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa PEP Bandung	72	72	Orang	7.080.000	02 04	20 07	02 02	06 03
020.DL.6345	Pelatihan Vokasi Sektor ESDM				389.263.819				
020.DL.6345.SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur				68.127.363				
020.DL.6345.SCB.401	Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE	270	280	Orang	19.085.731	04 06	07 03	03 01	01 02



- 246 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.DL.6345.SCB.402	Diklat Industri Bidang KEBTKE	3650	3800	Orang	19.049.174	02	11	03	03
						02	20	02	05
						02	11	03	03
						02	20	02	05
						04	07	03	01
020.DL.6345.SCB.403	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTKE	4250	4450	Orang	29.992.458	06	03	01	02
						04	07	03	03
						06	03	01	02
						02	11	03	03
						02	20	02	06
020.DL.6345.SCH	Pelatihan Bidang Industri				321.136.456				
020.DL.6345.SCH.201	Diklat Masyarakat Bidang Minyak dan Gas Bumi	700	700	Orang	44.456.985	02	20	02	05
						04	07	03	01
						06	03	01	02
020.DL.6345.SCH.202	Diklat Industri Bidang Minyak dan Gas Bumi	17000	19000	Orang	69.414.501	04	07	03	01
						06	03	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 247 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.DL.6345.SCH.203	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Minyak dan Gas Bumi	16000	17000	Orang	33.464.904	02	20	02	05
						02	20	02	06
						04	07	03	03
020.DL.6345.SCH.301	Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	400	400	Orang	19.619.185	06	03	01	02
						04	07	03	01
						06	03	01	02
020.DL.6345.SCH.302	Diklat Industri Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	5850	6000	Orang	114.269.999	02	20	02	05
						04	07	03	01
						06	03	01	02
020.DL.6345.SCH.303	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geologi, Mineral dan Batubara	2070	2070	Orang	15.000.000	04	07	03	03
						06	03	01	02
						02	20	02	06
020.DL.6345.SCH.701	Diklat Masyarakat Bidang Tambang Bawah Tanah	300	300	Orang	21.759.230	04	07	03	01
						06	03	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 248 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.DL.6345.SCH.702	Diklat Industri sub bidang Tambang Bawah Tanah	150	260	Orang	2.186.010	04	07	03	01
020.DL.6345.SCH.703	Sertifikasi Kompetensi Teknik sub sektor Tambang Bawah Tanah	50	175	Orang	965.642	04	07	03	03
020.FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi				1.257.290.720				
020.FE.6346	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi				632.596.838				
020.FE.6346.PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan, bencana dan perubahan iklim				18.877.440				
020.FE.6346.PBS.413	Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur	3	3	Rekomendasi	15.836.010	06	04	01	07
						06	04	01	08
						08	04	05	03
020.FE.6346.PBS.413.3201	Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur - Kab. Bogor	0	0	Rekomendasi	0	06	04	01	03
020.FE.6346.PBS.413.3576	Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur - Kota Mojokerto	0	0	Rekomendasi	0	06	04	01	06



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 249 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.FE.6346.PBS.416	Rekomendasi Geologi Lingkungan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Rawan Bencana	3	3	Rekomendasi	3.041.430	08	04	01	02
020.FE.6346.QMA	Data dan Informasi Publik				106.562.441				
020.FE.6346.QMA.201	Peta Geologi Gunung Api	4	4	Peta	4.375.945	08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.202	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	3	3	Peta	2.566.040	08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.203	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	4	4	Peta	6.006.535	08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.204	Peta Tapak Lokal	4	4	Peta	4.783.035	08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.205	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami	4	4	Peta	4.180.885	08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.206	Peta Geologi Gunung Api dan Kawasan Rawan Bencana Geologi	0	0	Peta	0	08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.207	Peta Geologi Zona Kerentanan Gerakan Tanah	10	10	Peta	8.896.840	08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.208	Peta Geologi Teknik	0	3	Peta	16.293.116	08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.401	Peta Zona Kerentanan Likuifaksi	4	4	Peta	8.780.475	08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.403	Peta Penurunan Muka Tanah	0	6	Peta	16.794.700	08	04	01	03
						02	12	09	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 250 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.FE.6346.QMA.514	Peta Perubahan Muka Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya	2	2	Peta	3.635.265	02	12	09	04
						06	04	01	03
						08	04	01	03
020.FE.6346.QMA.901	Peta Geologi Gunung Bawah Laut	2	2	Peta	30.249.605	08	04	01	03
020.FE.6346.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				48.960.000				
020.FE.6346.RAN.201	Jaringan Komunikasi Data Pemantauan Gunung Api	64	64	Unit	48.960.000	08	04	02	02
020.FE.6346.RAN.201.0000	Jaringan Komunikasi Data Pemantauan Gunung Api - Pusat	64	64	Unit	48.960.000	06	07	04	06
020.FE.6346.RAP	Sarana Bidang Penanggulangan Bencana				309.758.680				
020.FE.6346.RAP.201	Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan	0	270	Unit	309.758.680	08	04	02	02
020.FE.6346.RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi				34.657.209				
020.FE.6346.RBG.401	Pembangunan Stasiun Pemantauan Penurunan Muka Tanah	10	10	unit	34.657.209	06	04	01	04
						08	04	02	02
020.FE.6346.RCM	OP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana				10.724.672				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 251 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.FE.6346.RCM.202	Optimalisasi Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi	0	24	Unit	10.724.672	08	04	05	03
020.FE.6346.RDH	OP Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana				103.056.396				
020.FE.6346.RDH.202	Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan	0	25	unit	103.056.396	08	04	05	03
020.FE.6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi				624.693.882				
020.FE.6347.PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam				521.052.306				
020.FE.6347.PBI.401	Rekomendasi Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah	0	15	Rekomendasi	112.434.860	02	12	02	08
020.FE.6347.PBI.402	Rekomendasi Penyelidikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Cagar Alam Geologi	0	7	Rekomendasi	19.914.200	02	16	01	04
020.FE.6347.PBI.403	Rekomendasi Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah	7	7	Rekomendasi	19.182.980	02	12	02	08
020.FE.6347.PBI.406	Rekomendasi Perizinan Air Tanah	5000	5000	Rekomendasi	13.588.570	02	12	02	08
020.FE.6347.PBI.407	Rekomendasi pengawasan pra dan pasca perizinan air tanah	0	2	Rekomendasi	17.132.672	02	12	02	08



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 252 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.FE.6347.PBI.408	Rekomendasi penataan sumur air tanah yang belum berizin	0	2	Rekomendasi	22.918.480	02	12	02	08
020.FE.6347.PBI.502	Rekomendasi Pelayanan perizinan air tanah di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta	1.000	1.000	Rekomendasi	3.184.510	02	12	02	08
020.FE.6347.PBI.502.3100	Rekomendasi Pelayanan perizinan air tanah di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta - Provinsi DKI Jakarta	0	0	Rekomendasi	64.900	06	04	01	03
020.FE.6347.PBI.503	Rekomendasi Hasil Pemantauan Air Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang dan Sekitarnya	8	8	Rekomendasi	5.742.590	02	12	02	08
020.FE.6347.PBI.503.3100	Rekomendasi Hasil Pemantauan Air Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang dan Sekitarnya - Provinsi DKI Jakarta	8	8	Rekomendasi	3.564.088	06	04	01	03
020.FE.6347.PBI.503.3200	Rekomendasi Hasil Pemantauan Air Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang dan Sekitarnya - Provinsi Jawa Barat	0	0	Rekomendasi	1.588.268	06	04	01	03
020.FE.6347.PBI.503.3600	Rekomendasi Hasil Pemantauan Air Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang dan Sekitarnya - Provinsi Banten	0	0	Rekomendasi	590.234	06	04	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 253 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.FE.6347.PBI.504	Rekomendasi Pengawasan Perizinan Air Tanah di Wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta	1	1	Rekomendasi	2.502.960	02	12	02	08
020.FE.6347.PBI.505	Rekomendasi Penataan Sumur Air Tanah yang Belum Berizin di Wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta	1	1	Rekomendasi	2.787.280	02	12	02	08
020.FE.6347.PBI.603	Rekomendasi Keprospekan Migas	4	4	Rekomendasi	17.503.228	02	11	01	01
020.FE.6347.PBI.604	Rekomendasi Potensi Penyimpanan Karbon (CCS Saline Water Formation)	1	1	Rekomendasi	11.724.920	02	11	03	01
020.FE.6347.PBI.606	Rekomendasi Warisan Geologi yang Ditetapkan	4	4	Rekomendasi	8.782.166	02	16	01	04
020.FE.6347.PBI.606.0000	Rekomendasi Warisan Geologi yang Ditetapkan - Pusat	4	4	Rekomendasi	8.782.166	03	05	07	002
						03	05	11	002
020.FE.6347.PBI.607	Rekomendasi Penetapan Status Geopark Nasional	2	2	Rekomendasi	5.524.730	02	16	01	04
020.FE.6347.PBI.607.0000	Rekomendasi Penetapan Status Geopark Nasional - Pusat	2	2	Rekomendasi	5.524.730	03	05	01	002
020.FE.6347.PBI.720	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Hasil Survei Pendahuluan	1	1	Rekomendasi	2.542.195	02	11	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 254 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.FE.6347.PBI.721	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Hasil Survei Rinci	6	6	Rekomendasi	46.655.180	02	11	03	01
020.FE.6347.PBI.722	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Hasil Pengeboran dan Survei Landaian Suhu	0	1	Rekomendasi	47.485.664	02	11	03	01
020.FE.6347.PBI.723	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Batubara	3	3	Rekomendasi	30.181.462	02	11	01	01
020.FE.6347.PBI.724	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Gambut	3	3	Rekomendasi	6.727.231	02	11	01	01
020.FE.6347.PBI.725	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Bitumen Padat/Aspal	0	2	Rekomendasi	13.841.260	02	11	01	01
020.FE.6347.PBI.726	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Logam Tanah Jarang	2	2	Rekomendasi	4.394.875	05	01	10	01
020.FE.6347.PBI.728	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Bauksit	4	4	Rekomendasi	10.342.266	05	01	03	01
020.FE.6347.PBI.729	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Emas dan Tembaga	10	10	Rekomendasi	24.803.984	05	01	02	01
020.FE.6347.PBI.730	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Lithium	1	1	Rekomendasi	1.732.280	05	01	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 255 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.FE.6347.PBI.731	Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Mineral	1	1	Rekomendasi	2.245.820	05	01	18	01
020.FE.6347.PBI.732	Rekomendasi Penyelidikan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3	3	Rekomendasi	5.698.738	05	01	09	05
020.FE.6347.PBI.733	Keprospekan Sumber Daya Nikel, Kromit dan Mineral Ikutan Lainnya	0	4	Rekomendasi	7.629.200	05	01	01	04
020.FE.6347.PBI.901	Rekomendasi Teknis Wilayah Keprospekan Migas Kelautan	1	1	Rekomendasi	30.500.060	02	11	01	01
020.FE.6347.PBI.902	Rekomendasi Teknis Wilayah Keprospekan Mineral Kelautan	4	4	Rekomendasi	23.347.945	05	01	02	01
						05	01	04	01
020.FE.6347.QMA	Data dan Informasi Publik				103.641.576				
020.FE.6347.QMA.601	Peta Bersistem dan Bertema	0	48	Peta	42.306.356	08	04	01	03
020.FE.6347.QMA.602	Pusat Informasi Geologi	2	2	Lokasi	39.500.000	02	16	01	04
020.FE.6347.QMA.603	Pemetaan Sistematis Geologi Skala 1:50.000	0	1	Peta	924.840	08	04	01	03
020.FE.6347.QMA.604	Pemetaan Tematik Patahan Aktif	0	1	Peta	924.840	08	04	01	03
020.FE.6347.QMA.801	Museum Site	0	1	Lokasi	6.984.940	02	16	01	04
020.FE.6347.QMA.901		4	4	Peta	13.000.600	02	11	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 256 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Peta Tematik Geologi dan Geofisika Kelautan					08	04	01	03
020.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan				11.893.907.388				
020.JA.6348	Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi				64.565.529				
020.JA.6348.PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam				58.987.009				
020.JA.6348.PBI.001	Penyediaan Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	4	4	Rekomendasi Kebijakan	14.650.000	06	02	01	02
						07	13	01	01
						02	11	02	04
020.JA.6348.PBI.002	Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	10	10	Rekomendasi Kebijakan	27.286.790	02	11	01	01
020.JA.6348.PBI.003	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Penyimpanan Karbon	1	1	Rekomendasi Kebijakan	12.050.219	02	11	03	03
						02	19	01	01
020.JA.6348.PBI.004	Fasilitasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Offshore	1	1	Rekomendasi	5.000.000	02	11	01	01
020.JA.6348.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha				5.578.520				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 257 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6348.QIH.001	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	2	2	Laporan	3.856.100	02	11	02	02
020.JA.6348.QIH.002	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Regasifikasi Gas Bumi dan LNG Terminal	1	1	Laporan	1.722.420	02 03	11 02	02 03	01 02
020.JA.6349	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				7.936.862.477				
020.JA.6349.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				6.050.000.000				
020.JA.6349.QEG.001	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	5000	0	Paket	50.000.000	02	11	02	01
020.JA.6349.QEG.002	Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	0	0	Paket	0	02	11	02	01
020.JA.6349.QEG.003	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	0	150000	SR	6.000.000.000	02	11	02	01
020.JA.6349.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan				1.857.862.477				
020.JA.6349.RBL.001	Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang	0	0	Ruas	257.862.477	02 05	11 01	02 16	01 03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 258 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6349.RBL.002	Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai - Sei Mangkei	0	0	Ruas	1.600.000.000	05	02	02	03
						02	11	02	01
020.JA.6349.UAG	Pengawasan Pembangunan				29.000.000				
020.JA.6349.UAG.001	Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN	3	3	Laporan	29.000.000	02	11	02	01
020.JA.6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan				1.579.741.093				
020.JA.6350.PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam				59.591.170				
020.JA.6350.PBI.001	Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik	13	13	Rekomendasi Kebijakan	7.698.300	02	11	02	04
						02	11	03	03
						03	02	05	01
						06	02	01	02
020.JA.6350.PBI.005	Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	6	6	Rekomendasi Kebijakan	7.963.800	02	11	02	03
						03	02	03	01
020.JA.6350.PBI.006	Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	6	6	Rekomendasi Kebijakan	7.963.800	02	11	02	03
						03	02	04	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 259 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6350.PBI.007	Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	6	6	Rekomendasi Kebijakan	4.252.592	02	11	02	03
						03	02	04	02
						06	07	01	02
020.JA.6350.PBI.008	Penguatan Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat	4	4	Rekomendasi Kebijakan	3.711.108	02	11	02	03
						03	02	05	01
						04	02	01	02
020.JA.6350.PBI.009	Monitoring Realisasi Investasi Ketenagalistrikan	4	4	Rekomendasi Kebijakan	3.373.600	03	02	03	01
020.JA.6350.PBI.010	Rekomendasi Dukungan Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Sektor Transportasi dalam rangka mendukung target NZE	2	2	Rekomendasi Kebijakan	3.430.670	02	11	03	03
						02	19	01	02
						03	02	05	02
						05	01	12	02
020.JA.6350.PBI.011	Pengendalian Peningkatan Pembangunan SPKLU dan SPBKLU	0	4	Rekomendasi Kebijakan	3.012.100	02	11	03	05
						03	05	03	007
						03	05	04	003
						03	02	05	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 260 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6350.PBI.012	Pengendalian Pembangunan Interkoneksi Antar Pulau (<i>Super Grid</i>)	0	3	Rekomendasi Kebijakan	3.137.700	03	02	04	01
020.JA.6350.PBI.013	Pengendalian Peningkatan Fleksibilitas Pembangkitan dan Pengembangan Sistem Penyimpanan Energi (ESS)	0	3	Rekomendasi Kebijakan	3.137.700	02	11	03	03
						03	02	03	01
020.JA.6350.PBI.014	Pengendalian Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika	0	2	Rekomendasi Kebijakan	2.956.600	03	02	04	03
020.JA.6350.PBI.015	Pengawasan dan Evaluasi Pengembangan <i>Smart Grid</i>	0	3	Rekomendasi Kebijakan	3.137.700	03	02	04	03
020.JA.6350.PBI.016	Pengendalian Harga Tenaga Listrik	0	2	Rekomendasi Kebijakan	1.506.100	03	02	05	01
020.JA.6350.PBI.017	Penyusunan Revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan	0	1	Rekomendasi Kebijakan	2.154.700	03	02	03	01
020.JA.6350.PBI.018	Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik Terintegrasi dengan Industri dan Ekonomi	0	1	Rekomendasi Kebijakan	2.154.700	03	02	03	01
020.JA.6350.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup				4.809.400				
020.JA.6350.PBJ.001	Rekomendasi Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target	1	1	Rekomendasi Kebijakan	2.654.700	02	11	03	05
						02	19	01	02



- 261 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi Sub Sektor Pembangkitan					03	02	03	02
020.JA.6350.PBJ.002	Penyusunan Pemanfaatan Sertifikat Listrik Terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC)	0	1	Rekomendasi Kebijakan	2.154.700	02 03	11 02	03 03	03 01
020.JA.6350.PEC	Kerja sama				3.807.220				
020.JA.6350.PEC.001	Monitoring dan Pelaksanaan Kerja Sama Sektor Ketenagalistrikan	4	4	Kesepakatan	3.807.220	03	02	03	01
020.JA.6350.PEG	Konferensi dan Event				5.309.100				
020.JA.6350.PEG.001	Penyelenggaraan Konferensi dan Event	1	1	Kegiatan	5.309.100	03	02	03	01
020.JA.6350.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				1.486.421.003				
020.JA.6350.QEG.001	Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T	130000	100000	Unit	1.486.421.003	03	02	05	01
020.JA.6350.QIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah				1.720.900				
020.JA.6350.QIE.001	Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Listrik per Kapita	4	4	Pemerintah Daerah	1.720.900	03	02	04	02



- 262 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6350.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha				18.082.300				
020.JA.6350.QIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik	8	8	Laporan	5.309.100	02 03	11 02	03 04	05 01
020.JA.6350.QIH.002	Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 jam/hari	4	4	Laporan	2.654.700	03	02	04	02
020.JA.6350.QIH.004	Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik	6	6	Laporan	7.963.800	02 02 03	11 11 02	03 03 03	02 03 01
020.JA.6350.QIH.005	Pengawasan Program Dedieselisasi	0	4	Laporan	2.154.700	03	02	03	02
020.JA.6351	Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa				88.488.712				
020.JA.6351.PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam				7.409.260				
020.JA.6351.PBI.037	Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	1	1	Rekomendasi Kebijakan	7.409.260	02 05	11 01	02 16	01 03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 263 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6351.QAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha				12.500.000				
020.JA.6351.QAC.019	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga	583	583	Penyalur	12.500.000	06 02	02 11	01 02	02 02
020.JA.6351.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				48.099.122				
020.JA.6351.QIA.014	Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBKP	12	12	Laporan	18.664.622	02	11	02	04
020.JA.6351.QIA.015	Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	12	12	Laporan	29.434.500	02	11	02	04
020.JA.6351.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				20.480.330				
020.JA.6351.QIC.020	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga	583	583	Penyalur	20.480.330	02	11	02	02
020.JA.6351.QIC.020.0020	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Sintang	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0021	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Kapuas Hulu	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0023	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Bengkayang	0	0	Penyalur	92.847	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0033	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Berau	0	0	Penyalur	124.347	06	07	05	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 264 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6351.QIC.020.0034	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Mahakam Ulu	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0035	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Kepulauan Talaud	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0045	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Maluku Tenggara	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0046	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0048	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Kepulauan Aru	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0060	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Belu	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0061	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0062	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Alor	0	0	Penyalur	128.685	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0067	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Sumba Timur	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0069	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Rote Ndao	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 265 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6351.QIC.020.0072	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Sumba Barat Daya	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0074	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Sabu Raijua	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0075	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Malaka	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0077	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Merauke	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0080	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Asmat	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0081	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Boven Digoel	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0083	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Pegunungan Bintang	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0084	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Mamberamo Raya	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0086	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Supiori	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0095	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Halmahera Tengah	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01



- 266 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6351.QIC.020.0099	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Halmahera Timur	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0101	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Pulau Morotai	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0103	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Gorontalo Utara	0	0	Penyalur	133.575	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0104	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Bintan	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0106	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Kepulauan Anambas	0	0	Penyalur	103.062	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0108	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Raja Ampat	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0110	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Tambrau	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0114	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Nunukan	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6351.QIC.020.0115	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga - Kab. Malinau	0	0	Penyalur	0	06	07	05	01
020.JA.6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi				170.717.881				



- 267 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6352.PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam				50.003.933				
020.JA.6352.PBI.001	Volume Biofuel untuk Domestik	1	0	Rekomendasi Kebijakan	5.103.235	05	01	05	03
						02	11	03	04
						02	19	01	01
						02	21	02	01
020.JA.6352.PBI.002	Penurunan Intensitas Energi Final	1	0	Rekomendasi Kebijakan	14.329.940	02	19	01	02
020.JA.6352.PBI.005	Penawaran Wilayah Panas Bumi	3	0	Rekomendasi Kebijakan	10.400.000	02	11	03	02
020.JA.6352.PBI.006	Penetapan Wilayah Panas Bumi	2	0	Rekomendasi Kebijakan	5.170.758	02	11	03	02
020.JA.6352.PBI.007	Pengembangan Ekosistem Energi Nuklir untuk Penyediaan Listrik	1	1	Rekomendasi	5.000.000	02	11	03	01
020.JA.6352.PBI.008	Pengembangan Ekosistem Energi Hidrogen dan Amonia Rendah Karbon	2	1	Rekomendasi	5.000.000	02	11	03	01
						03	02	03	02
020.JA.6352.PBI.009	Pengembangan Ekosistem Pemanfaatan Langsung Wilayah Panas Bumi	2	2	Rekomendasi	5.000.000	02	11	03	01



- 268 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6352.PDA	Standardisasi Produk				1.996.066				
020.JA.6352.PDA.001	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	1	0	Peralatan	1.996.066	02	11	03	05
						02	15	03	01
						02	19	01	02
020.JA.6352.PEA	Koordinasi				4.230.360				
020.JA.6352.PEA.001	Koordinasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) bidang Aneka Energi Baru dan Terbarukan	1	1	kegiatan	4.230.360	02	09	03	01
						02	11	03	03
020.JA.6352.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				65.795.908				
020.JA.6352.PFA.001	Rancangan Standar dan Panduan bidang Aneka Energi Baru dan Terbarukan	12	12	NSPK	60.795.908	02	11	03	03
020.JA.6352.PFA.002	Monitoring dan Evalausi Pelaksanaan Implementasi SNI Wajib Bidang Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	5	5	Standar	5.000.000	02	11	03	03
020.JA.6352.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				12.435.102				
020.JA.6352.QIA.001	Monitoring Tingkat Komponen Dalam Negeri Bidang Bioenergi	1	0	Produk	1.938.347	02	11	03	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 269 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6352.QIA.002	Monitoring Tingkat Komponen Dalam Negeri Bidang Aneka Energi Baru dan Terbarukan	2	0	Produk	1.822.504	02	11	03	03
020.JA.6352.QIA.003	Monitoring Tingkat Komponen Dalam Negeri Bidang Panas Bumi	3	0	Produk	8.674.251	02	11	03	03
020.JA.6352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				12.807.560				
020.JA.6352.QIC.001	Monitoring dan Evaluasi Reduksi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	Lembaga	2.807.560	02	11	03	05
						02	19	01	02
020.JA.6352.QIC.003	Fasilitasi Debottlenecking Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Aneka Energi Baru dan Terbarukan	2	2	Badan Usaha	5.000.000	02	11	03	02
020.JA.6352.QIC.005	Pelaksanaan Manajemen Energi pada Penyediaan dan Pemanfaatan Energi	150	210	Badan Usaha	5.000.000	02	11	03	05
020.JA.6352.QMA	Data dan Informasi Publik				23.448.952				
020.JA.6352.QMA.001	Peta Potensi Energi Baru dan Terbarukan	4	0	Peta	18.448.952	02	11	03	02
						02	22	07	03
020.JA.6352.QMA.002	Penambahan Data Panas Bumi melalui Government Drilling	1	1	Data	5.000.000	02	11	03	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi				2.053.531.696				
020.JA.6353.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				2.053.531.696				
020.JA.6353.QEG.003	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)	10000	10000	Unit	700.000.000	02	11	03	02
020.JA.6353.QEG.004	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	3	4	Unit	379.109.070	02	11	03	02
						02	19	01	01
						03	02	04	02
020.JA.6353.QEG.004.9112	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) - Kab. Pegunungan Arfak	1	1	Unit	163.419.085	06	07	04	04
020.JA.6353.QEG.004.9702	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) - Kab. Pegunungan Bintang	0	1	Unit	62.912.000	06	07	04	04
						06	07	05	01
020.JA.6353.QEG.005	PLTS Atap	38	38	Unit	367.000.000	02	11	03	02
020.JA.6353.QEG.006	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	5	10	Unit	387.024.572	02	11	03	02
						02	19	01	01
						03	02	04	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 271 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JA.6353.QEG.006.6405	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - Kab. Berau	1	1	Unit	31.736.795	06	07	05	01
020.JA.6353.QEG.006.6504	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - Kab. Nunukan	1	1	Unit	54.398.617	06	07	05	01
020.JA.6353.QEG.006.8105	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - Kab. Kepulauan Aru	1	1	Unit	51.770.340	06	07	05	01
020.JA.6353.QEG.006.9428	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - Kab. Mamberamo Raya	0	1	Unit	21.774.768	06	07	04	04
						06	07	05	01
020.JA.6353.QEG.006.9606	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - Kab. Dogiyai	0	1	Unit	56.371.500	06	07	04	04
020.JA.6353.QEG.006.9702	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - Kab. Pegunungan Bintang	0	1	Unit	52.613.448	06	07	04	04
						06	07	05	01
020.JA.6353.QEG.007	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM)	1	1	Unit	220.398.054	02	11	03	02
						02	19	01	01
						03	02	03	01
020.JA.6353.QEG.007.9427	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) - Kab. Supiori	1	1	Unit	220.398.054	06	07	04	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 272 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara				52.398.548				
020.JB.6355	Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara				52.398.548				
020.JB.6355.PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam				32.204.384				
020.JB.6355.PBI.001	Rekomendasi Kebijakan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral Logam dan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri	0	2	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000	05	01	01	04
						05	01	02	01
						05	01	03	01
						05	01	04	01
						02	11	01	02
						03	02	03	02
020.JB.6355.PBI.002	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara	0	2	Rekomendasi Kebijakan	5.400.000	02	11	03	01
020.JB.6355.PBI.010	Rekomendasi Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Batubara	0	2	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	02	11	01	02
020.JB.6355.PBI.014		0	2		13.804.384	05	01	01	04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Rekomendasi Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral			Rekomendasi Kebijakan		05	01	02	01
						05	01	03	01
						05	01	04	01
020.JB.6355.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				12.000.000				
020.JB.6355.QDH.001	Hasil Monitoring Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri	0	14	Badan usaha	6.000.000	05	01	01	04
						05	01	02	01
						05	01	03	01
						05	01	04	01
020.JB.6355.QDH.002	Hasil Monitoring Pembangunan Fasilitas Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara Dalam Negeri	0	6	Badan usaha	6.000.000	02	11	01	02
020.JB.6355.QII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan				8.194.164				
020.JB.6355.QII.001	Luasan Reklamasi dan Pascatambang	0	7135	Hektar	8.194.164	02	17	04	01
						02	16	01	05
020.WA	Program Dukungan Manajemen				2.749.086				
020.WA.1896	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi				2.749.086				



- 274 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
020.WA.1896.PAH	Peraturan lainnya				2.749.086				
020.WA.1896.PAH.001	Draft Rancangan Regulasi Pendukung Kemudahan Berusaha	1	1	Rancangan Peraturan	1.527.270	02	11	01	01
020.WA.1896.PAH.002	Draft Revisi Undang-Undang Migas	0	1	Rancangan Peraturan	1.221.816	02	11	01	01
TOTAL					13.771.446.340				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 275 -

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 03.01 - Jumlah perjalanan kereta api	juta perjalanan	0,86	0,92	1,03
PP 03.01 - <i>On time performance</i> penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85
PP 03.01 - Peningkatan volume angkutan laut (kumulatif angka dasar tahun 2022)	persen, kumulatif	5,6.(2023)	10	24
PP 03.01 - Jumlah penumpang angkutan kereta api	juta penumpang	501	519	601
PP 03.01 - Volume angkutan penyeberangan	juta kendaraan	11,5 (2023)	11,6	12,2
PP 03.01 - Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	850	950
PP 03.01 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan	persen	53,68 (2023)	65	73
PP 03.01 - Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten	persen	85,5 (2023)	85,5	87,5
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 03.01.02 - Panjang jalur KA yang beroperasi	km (Kumulatif)	6.880 (2023)	6.928	6.985
KP 03.01.02 - Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	persen	63 (2023)	65	70
KP 03.01.02 - Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	94	98



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 276 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 03.01.03 - Pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi, kumulatif	72	86	142
KP 03.01.03 - Penumpang angkutan laut nonkomersil	ribu penumpang	1.444 (2023)	1.637	2.022
KP 03.01.03 - Muatan barang angkutan laut nonkomersil	ton	660.664 (2023)	720.124	839.043
KP 03.01.03 - Tingkat keandalan kenavigasian	persen	92,33 (2023)	94,84	95,57
KP 03.01.04 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi, kumulatif	100 (2023)	116	121
KP 03.01.04 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408
KP 03.01.04 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81
KP 03.01.05 - Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi	lokasi, kumulatif	230 (2023)	235	242
KP 03.01.05 - Terminal penumpang yang beroperasi	lokasi, kumulatif	113 (2023)	115	119
KP 03.01.05 - Lokasi rawan kecelakaan yang ditangani	lokasi	179 (2023)	534	574
KP 03.01.06 - Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	kota, kumulatif	6 (2023)	10	20
KP 03.01.06 - Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	juta penumpang/hari	1,4 (2023)	1,42	1,56
KP 03.01.06 - Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	juta penumpang/hari	2,989 (2023)	2,825	2,836
KP 03.01.07 - Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	persen	92 (2023)	92	94



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 277 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 03.01.07 - Tingkat penyerapan lulusan pembentukan SDM transportasi	persen	85,1 (2023)	70	70
KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan darat selain angkutan rel terhadap PDB	persen	2,66	2,50	2,29
KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB	persen	1,02	0,96	0,87
KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84	0,77
KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan rel terhadap PDB	persen	0,04	0,03	0,03
KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan sungai danau dan penyeberangan terhadap PDB	persen	0,10	0,09	0,08
KP 05.03.01 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	lokasi (kumulatif)	6	7	12
KP 05.03.01 - Kinerja bongkar muat pada pelabuhan utama petikemas	box/ ship/jam	21 (2023)	31	50
KP 05.03.01 - Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5
KP 05.03.01 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama	juta ton	1.391	1.419	1.536
KP 05.03.03 - Indeks peningkatan SDM transportasi		110,10	85,5	87,5



- 278 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				6.276.143.038				
022.DL.3996	Pendidikan Transportasi				6.276.143.038				
022.DL.3996.RAA	Sarana Bidang Pendidikan				4.344.729.914				
022.DL.3996.RAA.001	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	4	12	Paket	1.193.191.370	05	03	03	01
						03	01	07	02
						04	07	03	04
022.DL.3996.RAA.002	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	0	4	Paket	1.144.814.016	03	01	07	02
						04	07	03	04
						05	03	03	01
022.DL.3996.RAA.003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	2	10	Paket	2.006.724.528	05	03	03	01
						03	01	07	02
						04	07	03	04
022.DL.3996.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi				3.952.000				
022.DL.3996.RBJ.001	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	1	11	unit	3.952.000	03	01	07	02
						04	07	03	04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.DL.3996.RBJ.002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	0	0	unit	0	03 04	01 07	07 03	02 04
022.DL.3996.RBJ.003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	0	0	unit	0	03 04	01 07	07 03	02 04
022.DL.3996.SAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur				1.507.399.199				
022.DL.3996.SAB.002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	2477	2000	Orang	113.628.889	03 04 05	01 07 03	07 03 03	01 01 01
022.DL.3996.SAB.003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	5414	1809	Orang	237.971.385	05 03	03 01	03 07	01 01
022.DL.3996.SAB.004	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	1120	285	Orang	72.206.965	03 04 05	01 07 03	07 03 03	01 01 01
022.DL.3996.SAB.005	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	11736	16548	Orang	773.310.985	05 03	03 01	03 07	01 01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 280 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						04	07	03	01
022.DL.3996.SAB.006	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	0	0	Orang	0	04	07	03	01
						05	03	03	01
022.DL.3996.SAB.007	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	0	0	Orang	0	05	03	03	01
022.DL.3996.SAB.008	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	1467	1795	Orang	227.978.220	05	03	03	01
						03	01	07	01
						04	07	03	01
022.DL.3996.SAB.009	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	486	486	Orang	82.302.755	03	01	07	01
						04	07	03	01
022.DL.3996.SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur				420.061.925				
022.DL.3996.SCB.003	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	0	780	Orang	12.967.000	03	01	07	01
022.DL.3996.SCB.004	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	6180	9621	Orang	116.151.960	03	01	07	03
						04	07	03	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						05	03	03	01
022.DL.3996.SCB.005	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	14420	31506	Orang	180.164.935	05	03	03	01
						03	01	07	03
						04	07	03	01
022.DL.3996.SCB.006	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	6000	4300	Orang	110.778.030	03	01	07	03
						04	07	03	01
						05	03	03	01
022.GA	Program Infrastruktur Konektivitas				99.363.249.547				
022.GA.1960	Pelayanan Transportasi Udara				3.084.446.838				
022.GA.1960.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				3.084.446.838				
022.GA.1960.QAH.001	Angkutan Udara Perintis Penumpang	266	85	layanan	2.265.534.501	05	03	01	03
						07	15	01	09
						03	01	04	04
022.GA.1960.QAH.001.9401	Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Merauke	11	0	layanan	146.333.252	06	07	05	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 282 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.1960.QAH.001.9402	Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Jayawijaya	18	0	layanan	102.511.616	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.001.9413	Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Boven Digoel	8	0	layanan	166.419.372	06	07	04	03
						06	07	05	02
022.GA.1960.QAH.001.9416	Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Yahukimo	37	0	layanan	114.465.284	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.001.9432	Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Yalimo	16	0	layanan	131.932.676	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.001.9702	Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Pegunungan Bintang	6	0	layanan	42.486.560	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.002	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang	9933	13122	layanan	125.944.789	05	03	01	03
						03	01	04	04
						07	15	01	09
022.GA.1960.QAH.002.9401	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Merauke	593	0	layanan	6.081.952	06	07	05	02
022.GA.1960.QAH.002.9402	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Jayawijaya	1934	0	layanan	29.563.824	06	07	04	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.1960.QAH.002.9413	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Boven Digoel	1194	0	layanan	12.055.068	06	07	04	03
						06	07	05	02
022.GA.1960.QAH.002.9432	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Yalimo	0	0	layanan	3.104.808	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.002.9702	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Pegunungan Bintang	1	1	layanan	25.102.347	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.002.9703	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Yahukimo	1559	0	layanan	4.643.097	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.003	Angkutan Udara Perintis Kargo	7	7	layanan	91.647.574	05	03	01	03
						03	01	04	05
022.GA.1960.QAH.004	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo	275	330	layanan	2.813.720	03	01	04	05
						07	15	01	09
						05	03	01	03
022.GA.1960.QAH.005	Layanan Operasi Angkutan Udara Kargo (MP)	0	0	layanan	0	05	03	01	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.1960.QAH.005.9703	Layanan Operasi Angkutan Udara Kargo (MP) - Kab. Yahukimo	0	0	layanan	0	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.006	Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)	40	34	layanan	572.748.732	05	03	01	03
						03	01	04	05
						07	15	01	09
022.GA.1960.QAH.006.9413	Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Boven Digoel	4	1	layanan	19.122.869	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.006.9702	Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Pegunungan Bintang	14	17	layanan	217.707.687	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.006.9703	Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Yahukimo	11	15	layanan	46.674.380	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.007	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)	1086	1	layanan	25.757.521	05	03	01	03
						07	15	01	09
						03	01	04	05
022.GA.1960.QAH.007.9413	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Boven Digoel	1	1	layanan	3.983.025	06	07	04	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 285 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.1960.QAH.007.9416	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Yahukimo	444	0	layanan	3.626.160	06	07	04	03
022.GA.1960.QAH.007.9417	Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Pegunungan Bintang	641	0	layanan	18.148.336	06	07	04	03
022.GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat				11.439.528.261				
022.GA.4637.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				10.679.393.733				
022.GA.4637.QAH.001	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	158	349	layanan	1.868.355.587	03 07	01 15	05 01	03 09
022.GA.4637.QAH.002	Layanan Angkutan Pemasu Moda/ Antarmoda (Prioritas Nasional)	33	71	layanan	480.194.765	07 03	15 01	01 05	09 03
022.GA.4637.QAH.003	Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional)	7	21	layanan	784.210.935	03 05	01 03	05 01	03 03
022.GA.4637.QAH.004	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional)	2	0	layanan	32.003.496	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.008	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	68	288	layanan	4.134.054.619	03	01	05	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 286 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4637.QAH.177	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Medan (Prioritas Nasional)	1	1	layanan	160.000.000	03	01	06	01
						02	19	01	03
022.GA.4637.QAH.177.1275	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Medan (Prioritas Nasional) - Kota Medan	1	1	layanan	160.000.000	06	04	01	01
022.GA.4637.QAH.178	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Palembang (Prioritas Nasional)	1	1	layanan	174.797.257	03	01	06	01
						02	19	01	03
022.GA.4637.QAH.178.1671	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Palembang (Prioritas Nasional) - Kota Palembang	0	0	layanan	0	06	04	01	02
022.GA.4637.QAH.179	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta (Prioritas Nasional)	1	1	layanan	183.704.959	06	04	02	01
						02	19	01	03
						03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.180	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Semarang (Prioritas Nasional)	0	1	layanan	160.000.000	03	01	06	01
						06	04	02	01
						02	19	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 287 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4637.QAH.180.3374	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Semarang (Prioritas Nasional) - Kota Semarang	0	1	layanan	160.000.000	06	04	01	05
022.GA.4637.QAH.181	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Denpasar (Prioritas Nasional)	0	1	layanan	160.000.000	03	01	06	01
						03	05	02	002
						02	19	01	03
022.GA.4637.QAH.181.5171	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Denpasar (Prioritas Nasional) - Kota Denpasar	0	1	layanan	160.000.000	06	04	01	07
022.GA.4637.QAH.182	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bandung (Prioritas Nasional)	0	1	layanan	160.000.000	02	19	01	03
						03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.182.3273	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bandung (Prioritas Nasional) - Kota Bandung	0	1	layanan	160.000.000	06	04	01	04
022.GA.4637.QAH.183	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surabaya (Prioritas Nasional)	1	1	layanan	186.268.295	03	01	06	01
						02	19	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 288 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4637.QAH.183.3578	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surabaya (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya	1	1	layanan	160.000.000	06	04	01	06
022.GA.4637.QAH.184	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banjarmasin (Prioritas Nasional)	0	1	layanan	160.000.000	02	19	01	03
						03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.184.6371	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banjarmasin (Prioritas Nasional) - Kota Banjarmasin	0	1	layanan	160.000.000	06	04	01	08
022.GA.4637.QAH.185	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Makassar (Prioritas Nasional)	3	1	layanan	171.770.407	03	01	06	01
						02	19	01	03
022.GA.4637.QAH.185.7371	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Makassar (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	3	1	layanan	171.770.407	06	04	01	09
022.GA.4637.QAH.186	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banyumas (Prioritas Nasional)	1	0	layanan	38.819.897	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.186.1471	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banyumas (Prioritas Nasional) - Kota Pekanbaru	0	0	layanan	0	06	04	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 289 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4637.QAH.187	Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (<i>Buy The Service</i>) di KIPP IKN (layanan)	4	1	layanan	150.126.668	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.188	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Manado (Prioritas Nasional)	0	1	layanan	160.000.000	03 02	01 19	06 01	01 03
022.GA.4637.QAH.188.7171	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Manado (Prioritas Nasional) - Kota Manado	0	1	layanan	160.000.000	06	04	01	10
022.GA.4637.QAH.189	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Pontianak (Prioritas Nasional)	0	1	layanan	160.000.000	03 02	01 19	06 01	01 03
022.GA.4637.QAH.190	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Pekanbaru (Prioritas Nasional)	0	1	layanan	160.000.000	02 03	19 01	01 06	03 01
022.GA.4637.QAH.191	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Jabodetabek	0	1	layanan	153.583.836	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.192	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Batam	0	1	layanan	153.583.836	03	01	06	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 290 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4637.QAH.193	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Samarinda	0	1	layanan	153.583.836	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.194	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bandar Lampung	0	1	layanan	153.583.836	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.195	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Padang	0	1	layanan	153.583.836	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.196	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Malang	0	1	layanan	153.583.832	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.197	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Yogyakarta	0	1	layanan	153.583.836	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.268	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Denpasar (Prioritas Nasional)	0	0	layanan	0	03	05	02	002
022.GA.4637.QAH.270.3273	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Bandung (Prioritas Nasional) - Kota Bandung	0	0	layanan	0	06	04	01	04
022.GA.4637.QAH.274	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Semarang (Prioritas Nasional)	0	0	layanan	0	06	04	01	05
022.GA.4637.QAH.276.7171	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Manado (Prioritas Nasional) - Kota Manado	0	0	layanan	0	06	04	02	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4637.QAH.278	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Balikpapan (Prioritas Nasional)	0	1	layanan	120.000.000	03	01	06	01
022.GA.4637.QAH.278.6471	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Balikpapan (Prioritas Nasional) - Kota Balikpapan	0	1	layanan	120.000.000	06	04	02	02
022.GA.4637.RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat				40.000.000				
022.GA.4637.RAC.243	Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang 300 GT Lintas Bakit - Belinyu (termasuk Supervisi)	0	0	Unit	40.000.000	03 05	01 03	05 01	02 03
022.GA.4637.RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat				720.134.529				
022.GA.4637.RBP.007	Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda (Prioritas Nasional)	0	3	Paket	39.000.000	03	01	05	05
022.GA.4637.RBP.019	Terminal Barang Internasional (Prioritas Nasional)	1	0	Unit	20.000.000	03	01	05	05
022.GA.4637.RBP.019.5300	Terminal Barang Internasional (Prioritas Nasional) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	0	Unit	20.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.022	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	2	0	Unit	17.000.000	03 05	01 03	05 01	01 01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 292 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4637.RBP.024	Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional)	2	0	Unit	26.279.820	05 03	03 01	01 05	01 01
022.GA.4637.RBP.094	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	15.000.000	03	01	05	05
022.GA.4637.RBP.094.5371	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT (Prioritas Nasional) - Kota Kupang	0	0	Unit	15.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.095	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	0	05	03	01	01
022.GA.4637.RBP.095.5300	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain (Prioritas Nasional) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	Unit	0	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.096	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motamasin (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	50.000.000	05 03	03 01	01 05	01 05
022.GA.4637.RBP.096.5300	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motamasin (Prioritas Nasional) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	Unit	50.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.097	Pembangunan Terminal Barang Internasional Wini (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	50.000.000	05 03	03 01	01 05	01 05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4637.RBP.097.5300	Pembangunan Terminal Barang Internasional Wini (Prioritas Nasional) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	Unit	50.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.098	Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	35.000.000	05	03	01	01
						03	01	05	05
022.GA.4637.RBP.098.6100	Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk (Prioritas Nasional) - Provinsi Kalimantan Barat	0	0	Unit	35.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.110	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Daruba Baru (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	10.000.000	05	03	01	01
						03	01	05	01
022.GA.4637.RBP.110.8207	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Daruba Baru (Prioritas Nasional) - Kab. Pulau Morotai	0	0	Unit	10.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.115.8207	Pembangunan Prasarana Sandar Bus Air Daruba (Perpres Kspn Dan Kek Pulau Morotai) - Kab. Pulau Morotai	0	0	Unit	0	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.117.9400	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade Kab. Mappi Tahap II - Provinsi Papua	0	0	Unit	0	06	07	04	03
022.GA.4637.RBP.222		0	1	Unit	30.000.000	06	04	01	09



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Mandai (Prioritas Nasional)					03	01	05	05
022.GA.4637.RBP.223	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakit, Bangka Belitung (Prioritas Nasional)	1	0	Unit	50.916.300	05	03	01	01
						03	01	05	01
022.GA.4637.RBP.224	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Belinyu, Bangka Belitung (Prioritas Nasional)	1	0	Unit	59.194.360	03	01	05	01
						05	03	01	01
022.GA.4637.RBP.253	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Burung Tahap II (Prioritas Nasional)	1	0	Unit	12.744.049	05	03	01	01
						03	01	05	01
022.GA.4637.RBP.302	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Singkawang (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	30.000.000	03	01	05	05
022.GA.4637.RBP.303	Pembangunan Terminal Barang Internasional Sei Kelik (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	30.000.000	03	01	05	05
						05	03	01	01
022.GA.4637.RBP.303.6100	Pembangunan Terminal Barang Internasional Sei Kelik (Prioritas Nasional) - Provinsi Kalimantan Barat	0	0	Unit	30.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.304	Pembangunan Terminal Barang Internasional Jagoibabang (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	30.000.000	05	03	01	01
						03	01	05	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4637.RBP.304.6100	Pembangunan Terminal Barang Internasional Jagoibabang (Prioritas Nasional) - Provinsi Kalimantan Barat	0	0	Unit	30.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.305	Pembangunan Terminal Barang Internasional Napan (Prioritas Nasional)	0	1	Unit	50.000.000	05 03	03 01	01 05	01 05
022.GA.4637.RBP.305.5300	Pembangunan Terminal Barang Internasional Napan (Prioritas Nasional) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	1	Unit	50.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.306	Pembangunan Terminal Barang Internasional Oepoli (Prioritas Nasional)	0	1	Unit	30.000.000	05 03	03 01	01 05	01 05
022.GA.4637.RBP.306.5300	Pembangunan Terminal Barang Internasional Oepoli (Prioritas Nasional) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	1	Unit	30.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.307	Pembangunan Terminal Barang Internasional Sota (Prioritas Nasional)	0	1	Unit	30.000.000	05 03	03 01	01 05	01 05
022.GA.4637.RBP.307.9400	Pembangunan Terminal Barang Internasional Sota (Prioritas Nasional) - Provinsi Papua	0	1	Unit	30.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.308		0	1	Unit	30.000.000	05	03	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 296 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pembangunan Terminal Barang Internasional Yetetkun (Prioritas Nasional)					03	01	05	05
022.GA.4637.RBP.308.9400	Pembangunan Terminal Barang Internasional Yetetkun (Prioritas Nasional) - Provinsi Papua	0	1	Unit	30.000.000	06	07	05	02
022.GA.4637.RBP.309	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Luhu (Prioritas Nasional)	0	0	Unit	75.000.000	03	01	05	01
						05	03	01	01
022.GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat				4.174.376.266				
022.GA.4638.RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat				4.174.376.266				
022.GA.4638.RBP.032	Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional)	4	0	Unit	15.000.000	03	01	05	05
022.GA.4638.RBP.176	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional)	2	0	Unit	4.153.182.355	06	04	01	04
						03	01	06	01
						02	19	01	03
022.GA.4638.RBP.176.0000	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional) - Pusat	2	0	Unit	4.153.182.355	06	04	01	01
022.GA.4638.RBP.258	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa	0	0	Unit	4.187.676	05	03	01	01
						03	01	05	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 297 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4638.RBP.259	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Tomia	0	0	Unit	768.435	03	01	05	01
						05	03	01	01
022.GA.4638.RBP.260	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Binongko	0	0	Unit	1.237.800	05	03	01	01
						03	01	05	01
022.GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat				6.271.456.288				
022.GA.4639.PEH	Promosi				99.141.429				
022.GA.4639.PEH.049	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	34	34	Kegiatan	70.914.286	03	01	05	04
022.GA.4639.PEH.213	Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	27	31	Kegiatan	28.227.143	03	01	05	04
022.GA.4639.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				1.699.965.000				
022.GA.4639.QAH.220	Pembayaran Available Payment Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Proving Ground Bekasi (Prioritas Nasional)	1	1	layanan	1.699.965.000	03	01	05	04
022.GA.4639.RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat				4.386.301.618				
022.GA.4639.RAC.053	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	83	602	Unit	4.386.301.618	03	01	05	04
022.GA.4639.RCC	OP Sarana Bidang Konektivitas Darat				86.048.241				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4639.RCC.212	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	27	0	Unit	81.548.241	03	01	05	04
022.GA.4639.RCC.232	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar (Prioritas Nasional)	7	0	Unit	4.500.000	03	01	05	04
022.GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat				5.000.000				
022.GA.4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				5.000.000				
022.GA.4640.PBF.209	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	1	0	Kajian	2.500.000	06 03	04 01	01 05	06 06
022.GA.4640.PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional)	1	0	Kajian	2.500.000	03	01	05	06
022.GA.4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian				5.656.283.948				
022.GA.4641.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				21.521.195				
022.GA.4641.PBF.008	Studi Penyusunan Dokumen Identifikasi Untuk Jalur Kereta Api Perkotaan Yang	1	0	Rekomendasi Kebijakan	1.521.195	03 03	01 01	06 02	03 04



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Menghubungkan Wilayah Perencanaan KIPP - IKN Barat - IKN Timur 1 - IKN Timur 2 - IKN Utara dan yang Menghubungkan Wilayah Perencanaan IKN Barat - IKN Timur 2					06	05	01	05
022.GA.4641.PBF.009	Studi Penyiapan Pembangunan Jalur Kereta Api	0	5	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	03	01	02	04
022.GA.4641.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				1.253.479.951				
022.GA.4641.QAH.001	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu-Kutablang	1	1	layanan	127.089.520	03	01	02	03
022.GA.4641.QAH.003	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai - Besitang - Sei Liput	1	1	layanan	154.717.675	03	01	02	03
022.GA.4641.QAH.004	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam	1	1	layanan	82.884.469	03	01	02	03
022.GA.4641.QAH.007	Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan	1	1	layanan	548.761.414	02	19	01	03
						03	01	06	02
						06	04	01	02
022.GA.4641.QAH.008	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare	1	1	layanan	186.398.030	06	04	01	09
						03	01	02	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 300 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4641.QAH.009	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri	1	1	layanan	62.455.927	03	01	02	03
022.GA.4641.QAH.010	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok S5	1	1	layanan	91.172.916	03	01	02	03
022.GA.4641.RBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian				4.381.282.803				
022.GA.4641.RBA.006	Pembangunan Jalur Ganda KA Sepanjang - Wonokromo	0	0	km	350.000.000	03	01	02	01
022.GA.4641.RBA.025	Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro	1	0	km	23.136.967	03	01	02	01
022.GA.4641.RBA.025.3300	Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro - Provinsi Jawa Tengah	1	0	km	23.136.967	06	04	02	01
022.GA.4641.RBA.035	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	1	0	Paket	193.279.568	06	04	01	03
						03	01	06	02
022.GA.4641.RBA.040	Peningkatan Jalur KA Segmen Lampegan - Cianjur	0	0	Paket	175.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.078	Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I	1	0	Unit	2.450.480	03	01	06	02
						06	04	01	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4641.RBA.079	Peningkatan Underpass BH 421 Jatibarang	0	0	Unit	62.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.088	Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 Km.303+680 dan BH 1164 Km.314+769 Lintas Cirebon - Kroya	1	0	Paket	106.609.122	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.089	Penggantian Jembatan Pada BH 46 Km 21+918 dan BH 59 Km 27+920 Antara Brumbung - Gubug	2	0	Paket	201.806.666	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.102	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Rangkasbitung - Merak	0	16	km	300.000.000	03	01	02	01
						05	03	01	02
022.GA.4641.RBA.104	Peningkatan Elektrifikasi antara Citayam - Nambo	0	0	Paket	200.000.000	03	01	06	02
022.GA.4641.RBA.107	Peningkatan Stasiun Tenjo	0	0	Unit	56.000.000	03	01	06	02
						06	04	01	03
022.GA.4641.RBA.111	Peningkatan Stasiun Duri	0	0	Unit	50.000.000	06	04	01	03
						03	01	06	02
022.GA.4641.RBA.112	Peningkatan Stasiun Karawang, Lemah Abang, Kedung Gede	0	3	Unit	150.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.113		0	30	km	400.000.000	03	01	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 302 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Cicurug - Sukabumi					05	03	01	02
022.GA.4641.RBA.116	Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 355 di Km. 110+532 antara Ciganea - Sukatani lintas Cikampek - Padalarang	0	0	Unit	41.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.122	Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api Solo – Semarang Fase I (Solo Balapan – Kadipiro – Kalioso)	0	0	Paket	150.000.000	03	01	02	02
						06	04	02	01
022.GA.4641.RBA.125	Penggantian Jembatan KA Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY	0	1	Unit	350.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.133	Peningkatan Jembatan Kereta BH 397 Antara Stasiun Kesamben - Stasiun Wlingi	0	0	Unit	75.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.134	Peningkatan Jembatan Kereta BH 537 KM 133+723 Antara Stasiun Blitar - Stasiun Rejotangan	0	0	Unit	60.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.135	Revitalisasi/Pembangunan Terowongan Mrawan (690 m) dan Garahan (113 m)	0	0	Unit	300.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.136	Peningkatan Telekomunikasi Lintas Kertosono - Ketapang antara Talun - Bangil	0	0	Paket	160.000.000	03	01	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 303 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4641.RBA.137	Peningkatan Telekomunikasi Lintas Kertosono - Ketapang antara Bangil - Garahan	0	0	Paket	175.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.138	Peningkatan Fasilitas Operasi Kereta Api antara Garahan - Ketapang	0	0	Paket	120.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.142	Peningkatan Persinyalan Elektrik Depo Kereta Api Maros	0	0	Paket	100.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.143	Perbaikan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Barru - Palanro	0	0	Paket	100.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.144	Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Mandai	0	0	Paket	100.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.145	Pembangunan Fasilitas Stabling Stasiun KA Makassar - Pare Pare	0	0	Paket	150.000.000	03	01	02	02
022.GA.4641.RBA.151	Peningkatan Jembatan Jalur KA Lintas Medan-Binjai	0	0	Unit	150.000.000	06	04	01	01
						03	01	06	02
022.GA.4641.RBA.152	Peningkatan dan Penanganan Jembatan KA BH 313 dan BH 322 Lintas Perlanaan - Kisaran	0	0	Unit	80.000.000	03	01	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 304 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian				15.762.801.378				
022.GA.4642.RDA	OP Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian				15.762.801.378				
022.GA.4642.RDA.001	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	7	7	Paket	14.600.000.000	03	01	02	02
022.GA.4642.RDA.003	Penanganan Rintang Jalan KM 299 + 900 Antara Prupuk - Linggapura Lintas Cirebon - Kroya	1	0	Paket	72.738.184	03	01	02	02
022.GA.4642.RDA.007	Penanganan Amblesan / Longsoran Badan Jalan KA Kawungaten - Kroya Lintas Banjar - Kroya	1	0	Paket	128.587.765	03	01	02	02
022.GA.4642.RDA.010	Penanganan Rawan Bencana di Jalur KA Lintas Gilas - Sepancar KM 212+725 - 213+000	0	0	Paket	6.475.429	03	01	02	02
022.GA.4642.RDA.011	Penanganan Perlintasan Sebidang	0	50	Paket	800.000.000	03	01	02	02
022.GA.4642.RDA.016	Penanganan Rintang Jalan KA di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	1	Paket	100.000.000	03	01	02	02



- 305 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4642.RDA.019	Penanganan Longsor dan Perkuatan Lereng antara Sumberpucung - Wlingi Km. 81+000 s.d. Km. 104+000	0	0	Paket	55.000.000	03	01	02	02
022.GA.4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian				10.098.646.284				
022.GA.4643.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				50.850.000				
022.GA.4643.PBF.001	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	1	0	Rekomendasi Kebijakan	49.950.000	03	01	06	03
						06	04	01	03
022.GA.4643.PBF.002	Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II	0	1	Rekomendasi Kebijakan	900.000	06	04	01	03
022.GA.4643.RBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian				10.047.796.284				
022.GA.4643.RBA.018	Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/ Pendamping KPBU)	1	1	Paket	1.248.253.994	07	15	01	09
						06	04	01	09
						03	01	02	02
022.GA.4643.RBA.019	Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	1	1	Paket	5.267.547.825	06	04	01	06
						07	15	01	09



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 306 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						03	01	06	02
022.GA.4643.RBA.031	Reaktivasi Jalur KA Rangkasbitung- Pandeglang	0	18	km	600.000.000	03	01	02	01
022.GA.4643.RBA.032	Pembangunan Shortcut Bahlias - Tanjung Gading	0	0	km	85.000.000	03	01	02	01
						05	03	01	02
022.GA.4643.RBA.033	Optimalisasi KA Makassar - Pare Pare	0	14	km	300.000.000	05	03	01	02
						03	01	02	01
022.GA.4643.RBA.033.7300	Optimalisasi KA Makassar - Pare Pare - Provinsi Sulawesi Selatan	0	14	km	300.000.000	06	04	01	09
022.GA.4643.RBA.093	Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Araskabu-Tebing Tinggi	0	1	Paket	240.000.000	03	01	02	02
022.GA.4643.RBA.094	Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Perlanaan-Kisaran	0	1	Paket	200.000.000	03	01	02	02
022.GA.4643.RBA.095	Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Padang - Naras	0	1	Paket	200.000.000	03	01	02	02
022.GA.4643.RBA.096	Pembangunan Stasiun Sintuk Toboh Gadang dan Parit Malintang	0	0	Unit	10.000.000	03	01	02	02
022.GA.4643.RBA.103		0	0	km	272.000.000	06	04	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 307 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pembangunan Double-Double Track (DDT) Lintas Bekasi - Cikarang					03	01	06	02
022.GA.4643.RBA.107	Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase 1	0	1	Paket	863.670.000	03	01	06	02
						06	04	01	03
022.GA.4643.RBA.111	Peningkatan Transportasi Berbasis Rel di Jabodetabek	0	1	Paket	161.324.466	06	04	01	03
						03	01	06	02
022.GA.4643.RBA.115	Pembangunan Elektrifikasi Lintas Padalarang - Cicalengka	0	41	km	600.000.000	03	01	06	02
						06	04	01	04
						02	19	01	03
022.GA.4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara				2.536.224.342				
022.GA.4645.RBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara				2.536.224.342				
022.GA.4645.RBE.002	Pengembangan Bandar Udara Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan	1	0	unit	220.000.001	03	01	04	01
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.002.0001	Pengembangan Bandar Udara Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan - Kab. Jayawijaya	1	0	unit	220.000.001	06	07	04	03



- 308 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4645.RBE.003.0001	Pengembangan Bandar Udara Ilaga, Puncak, Papua Tengah - Kab. Puncak	0	0	unit	0	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.004.0001	Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah, Boven Diegoel, Papua Selatan - Kab. Boven Diegoel	0	0	unit	0	06	07	04	03
						06	07	05	02
022.GA.4645.RBE.005	Bandar Udara	0	1	unit	400.000	03	01	04	01
022.GA.4645.RBE.006	Bandar Udara Perairan	0	0	unit	30.000.000	03	01	04	02
022.GA.4645.RBE.007	Pengembangan Bandara Bandar Udara Mutiaras SIS Al-Jufrie, Palu, Sulawesi Tengah	1	0	unit	8.000.000	03	01	04	01
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.011	Pengembangan Bandar Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat	1	1	unit	204.013.705	05	03	01	01
						03	01	04	03
022.GA.4645.RBE.014.9414	Pengembangan Bandar Udara Kepi, Mappi, Papua Selatan - Kab. Mappi	0	0	unit	0	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.015.6501	Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III, Malinau, Kalimantan Utara - Kab. Malinau	0	0	unit	0	06	07	05	02
022.GA.4645.RBE.017	Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur	1	0	unit	30.000.000	05	03	01	01
						03	01	04	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 309 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4645.RBE.023	Pengembangan Bandar Udara Sinak	0	0	unit	30.000.000	03	01	04	03
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.023.9605	Pengembangan Bandar Udara Sinak - Kab. Puncak	0	0	unit	30.000.000	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.024.9706	Pengembangan Bandar Udara Elelim, Yalimo, Papua Pegunungan - Kab. Yalimo	0	0	unit	0	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.025	Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin, Mimika, Papua Tengah	1	0	unit	15.000.001	05	03	01	01
						03	01	04	03
022.GA.4645.RBE.026.9417	Pengembangan Bandar Udara Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan - Kab. Pegunungan Bintang	0	0	unit	0	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.027	Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan	1	1	unit	107.074.724	05	03	01	01
						03	01	04	03
022.GA.4645.RBE.027.9703	Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan - Kab. Yahukimo	1	1	unit	107.074.724	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.030	Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah-Karimun, Kepulauan Riau	1	0	unit	71.833.751	05	03	01	01
						03	05	03	001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						03	01	04	02
022.GA.4645.RBE.030.2101	Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah-Karimun, Kepulauan Riau - Kab. Karimun	1	0	unit	71.833.751	06	07	05	01
022.GA.4645.RBE.031	Pengembangan Bandar Udara Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat	1	0	unit	52.639.996	05	03	01	01
						03	01	04	03
022.GA.4645.RBE.033	Pengembangan Bandar Udara K.S.Tubun, Maluku Tenggara, Maluku	0	1	unit	91.957.100	03	01	04	01
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.033.8102	Pengembangan Bandar Udara K.S.Tubun, Maluku Tenggara, Maluku - Kab. Maluku Tenggara	0	1	unit	91.957.100	06	07	05	01
022.GA.4645.RBE.034	Pengembangan Bandar Udara Matahora, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	0	0	unit	30.000.000	05	03	01	01
						03	01	04	02
022.GA.4645.RBE.036.9112	Pengembangan Bandar Udara Anggi - Kab. Pegunungan Arfak	0	0	unit	0	06	04	02	04
						06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.037	Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua	1	0	unit	104.999.999	05	03	01	01
						03	01	04	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 311 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4645.RBE.037.9415	Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua - Kab. Asmat	1	0	unit	104.999.999	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.038	Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya	0	0	unit	48.000.000	03	01	04	01
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.040.9433	Pengembangan Bandar Udara Agandugume - Kab. Puncak	0	0	unit	0	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.041.9416	Pengembangan Bandar Udara Sobaham, Yahukimo, Papua Pegunungan - Kab. Yahukimo	0	0	unit	0	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.043.9401	Pengembangan Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan - Kab. Merauke	0	0	unit	100.000.000	06	07	05	02
022.GA.4645.RBE.044	Pengembangan Bandar Udara Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat	1	0	unit	112.000.000	05	03	01	01
						03	01	04	02
022.GA.4645.RBE.044.9104	Pengembangan Bandar Udara Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat - Kab. Teluk Bintuni	1	0	unit	112.000.000	06	07	04	03
022.GA.4645.RBE.045	Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto, Way Kanan, Lampung	0	0	unit	30.000.000	03	01	04	01
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.046		0	0	unit	60.000.000	05	03	01	01



- 312 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pengembangan Bandar Udara Taufik Keimas, Pesisir Barat, Lampung					03	01	04	01
022.GA.4645.RBE.047	Pembangunan Bandar Udara Baru Singkawang, Kalimantan Barat	0	0	unit	60.000.000	03	01	04	01
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.049	Pengembangan Bandar Udara Pitu, Morotai, Maluku Utara	1	0	unit	75.796.710	03	01	04	02
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.049.8207	Pengembangan Bandar Udara Pitu, Morotai, Maluku Utara - Kab. Pulau Morotai	1	0	unit	75.796.710	06	07	05	02
						06	04	02	04
022.GA.4645.RBE.054	Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan	0	0	unit	45.000.000	03	01	04	01
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.056.6504	Pengembangan Bandar Udara Yuvai Semaring, Nunukan, Kalimantan Utara - Kab. Nunukan	0	0	unit	0	06	07	05	02
022.GA.4645.RBE.058	Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh, Aceh Utara, Aceh	0	0	unit	30.000.000	03	01	04	01
						05	02	01	01
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.062		0	0	unit	65.807.100	05	03	01	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 313 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat					03	01	04	01
022.GA.4645.RBE.065.6504	Pengembangan Bandar Udara Nunukan, Kalimantan Utara - Kab. Nunukan	0	0	unit	0	06	07	05	02
022.GA.4645.RBE.067.6501	Pengembangan Bandar Udara Seluwing, Malinau, Kalimantan Utara - Kab. Malinau	0	0	unit	0	06	07	05	02
022.GA.4645.RBE.076	Pengembangan Bandar Udara Morowali, Sulawesi Tengah	0	0	unit	84.000.000	05	03	01	01
						05	02	19	01
						03	01	04	02
022.GA.4645.RBE.076.7203	Pengembangan Bandar Udara Morowali, Sulawesi Tengah - Kab. Morowali	0	0	unit	84.000.000	06	04	02	04
022.GA.4645.RBE.077	Pengembangan Bandar Udara Arung Palakka-Bone, Sulawesi Selatan	0	0	unit	73.779.000	03	01	04	01
						05	03	01	01
022.GA.4645.RBE.078	Pengembangan Bandar Udara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur	0	0	unit	60.000.000	05	03	01	01
						03	01	04	01
022.GA.4645.RBE.078.6405	Pengembangan Bandar Udara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur - Kab. Berau	0	0	unit	60.000.000	06	07	05	01
022.GA.4645.RBE.083		0	0	unit	90.000.000	05	03	01	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pengembangan Bandar Udara H.Asan, Sampit, Kalimantan Tengah					03	01	04	01
022.GA.4645.RBE.084	Pengembangan Bandar Udara Buli Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara	0	0	unit	45.000.000	03	01	04	02
						05	03	01	01
						05	02	23	01
022.GA.4645.RBE.088	Pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang	1	0	unit	1.500.000	03	01	04	07
						05	03	01	04
022.GA.4645.RBE.090	Pendampingan KPBU lokasi Bandara Bintan	1	0	unit	1.500.000	05	03	01	04
						05	02	06	02
						03	01	04	07
022.GA.4645.RBE.090.3173	Pendampingan KPBU lokasi Bandara Bintan - Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	0	unit	1.500.000	06	04	02	04
022.GA.4645.RBE.091.6472	Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda (Tambahan IKN SBPA) - Kota Samarinda	0	0	unit	12.611.000	06	04	02	02
022.GA.4645.RBE.093	Pengembangan Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat, NTT	0	0	unit	60.000.000	03	01	04	02
						05	03	01	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4645.RBE.093.5315	Pengembangan Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat, NTT - Kab. Manggarai Barat	0	0	unit	60.000.000	06	04	02	04
022.GA.4645.RBE.096	Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara	0	0	unit	45.000.000	05 03	03 01	01 04	01 01
022.GA.4645.RBE.098.3603	Pengembangan Bandar Udara Budiarto, Tangerang, Banten - Kab. Tangerang	0	0	unit	0	06	04	01	03
022.GA.4645.RBE.100	Pengembangan Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, Kalimantan Utara	0	0	unit	64.477.740	03 05	01 03	04 01	01 01
022.GA.4645.RBE.101	Pengembangan Bandar Udara Silampari, Lubuklinggau, Sumatera Selatan	0	0	unit	84.000.000	05 03	03 01	01 04	01 01
022.GA.4645.RBE.102.5306	Pengembangan Bandar Udara A.A Beretalo, Belu, NTT - Kab. Belu	0	0	unit	0	06	07	05	02
022.GA.4645.RBE.103.9409	Pengembangan Bandar Udara Numfor, Biak Numfor, Papua - Kab. Biak Numfor	0	0	unit	0	06	07	05	02
022.GA.4645.RBE.104.9502	Pengembangan Bandara Mindiptanah, Boven Digoel, Papua Selatan - Kab. Boven Digoel	0	0	unit	0	06 06	07 07	04 05	03 02
022.GA.4645.RBE.105	Pembangunan Bandar Udara VVIP	1	0	unit	154.999.996	05	03	01	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						03	01	04	02
022.GA.4645.RBE.105.6409	Pembangunan Bandar Udara VVIP - Kab. Penajam Paser Utara	1	0	unit	154.999.996	06	05	01	05
022.GA.4645.RBE.107	Pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka, Sulawesi Tenggara	0	0	unit	30.000.000	05	03	01	01
						03	01	04	01
						05	02	15	02
022.GA.4645.RBE.108	Pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	1	1	unit	67.833.518	05	03	01	01
						03	01	04	03
022.GA.4645.RBE.108.6108	Pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Kab. Kapuas Hulu	1	1	unit	67.833.518	06	07	05	02
022.GA.4645.RBE.109	Pengembangan Bandar Udara Rembele, Bener Meriah, Aceh	0	0	unit	39.000.000	05	03	01	01
						03	01	04	01
022.GA.4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara				239.638.678				
022.GA.4646.QIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan				86.295.865				
022.GA.4646.QIF.001	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	0	0	Layanan	86.295.865	05	01	13	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 317 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4646.RAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara				153.342.813				
022.GA.4646.RAD.004	Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	1	1	Unit	153.342.813	03	01	04	06
022.GA.4648	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek				1.357.617.131				
022.GA.4648.RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat				1.357.617.131				
022.GA.4648.RBP.001	Pembangunan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Wilayah Metropolitan	0	2	Unit	429.612.176	03	01	06	01
022.GA.4648.RBP.017	Pembangunan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Simpul Utama	0	1	Unit	250.717.570	03	01	05	05
						03	01	03	02
022.GA.4648.RBP.018	Pembangunan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata	0	4	Unit	170.000.000	03	01	04	02
022.GA.4648.RBP.019	Pembangunan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Kawasan 3TP	0	2	Unit	67.000.000	03	01	03	03
022.GA.4648.RBP.020	Pembangunan Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda di Simpul Utama dan Kawasan Prioritas	0	5	Unit	260.287.385	03	01	03	02



- 318 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4648.RBP.021	Pembangunan Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda di Kawasan 3TP	0	2	Unit	80.000.000	03	01	03	03
022.GA.4648.RBP.022	Pembangunan Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	0	1	Unit	100.000.000	03	01	05	05
022.GA.4649	Pelayanan Transportasi Jabodetabek				1.126.621.238				
022.GA.4649.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				738.771.712				
022.GA.4649.QAH.001	Subsidi Angkutan Penumpang (Buy The Service) Jabodetabek	4	0	layanan	18.771.712	03	01	06	01
						06	04	01	03
						02	19	01	03
022.GA.4649.QAH.002	Subsidi Angkutan Pemandu Moda (Buy the Service) di Wilayah Metropolitan	0	6	layanan	720.000.000	03	01	06	01
022.GA.4649.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				2.400.000				
022.GA.4649.RAN.001	Pembangunan Integrasi Sistem Informasi Transportasi Multimoda di Simpul Utama dan Kawasan Prioritas	0	0	Unit	2.400.000	03	01	03	02
022.GA.4649.RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat				385.449.526				



- 319 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4649.RBP.003	Pembangunan Integrasi Layanan Transportasi Antarmoda di Simpul Utama	0	1	Unit	36.000.000	03	01	05	05
022.GA.4649.RBP.004	Pembangunan Integrasi Sistem Informasi Transportasi di Simpul Utama	0	1	Unit	30.000.000	03	01	05	05
022.GA.4649.RBP.005	Pembangunan Integrasi Layanan Transportasi Antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata	0	4	Unit	30.000.000	03	01	04	02
022.GA.4649.RBP.006	Pembangunan Integrasi Sistem Informasi Transportasi di Daerah Prioritas Pariwisata	0	4	Unit	30.000.000	03	01	04	02
022.GA.4649.RBP.007	Pembangunan Integrasi Layanan Transportasi Antarmoda di Kawasan 3TP	0	1	Unit	9.000.000	03	01	03	03
022.GA.4649.RBP.008	Pembangunan Integrasi Layanan Transportasi Multimoda di Simpul Utama dan Kawasan Prioritas	0	5	Unit	65.000.000	03	01	03	02
022.GA.4649.RBP.009	Pembangunan Integrasi Layanan Transportasi Multimoda di Kawasan 3TP	0	2	Unit	20.000.000	03	01	03	03
022.GA.4649.RBP.010	Pembangunan Integrasi Layanan Transportasi Multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	0	2	Unit	25.449.526	03	01	05	05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4649.RBP.011	Pembangunan Integrasi Layanan Transportasi Antarmoda di Wilayah Metropolitan	0	2	Unit	70.000.000	03	01	06	01
022.GA.4649.RBP.012	Pembangunan Integrasi Sistem Informasi Transportasi Antarmoda di Wilayah Metropolitan	0	2	Unit	70.000.000	03	01	06	01
022.GA.4651	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek				264.000.000				
022.GA.4651.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				256.000.000				
022.GA.4651.PBF.004	Perencanaan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Wilayah Metropolitan	0	0	Rekomendasi Kebijakan	24.500.000	03	01	06	03
022.GA.4651.PBF.005	Perencanaan Integrasi Layanan Transportasi Antarmoda di Wilayah Metropolitan	0	0	Rekomendasi Kebijakan	21.000.000	03	01	06	03
022.GA.4651.PBF.006	Perencanaan Integrasi Sistem Informasi Transportasi Antarmoda di Wilayah Metropolitan	0	0	Rekomendasi Kebijakan	19.500.000	03	01	06	03
022.GA.4651.PBF.007	Perencanaan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Simpul Utama	0	0	Rekomendasi Kebijakan	16.500.000	03	01	05	06
022.GA.4651.PBF.008	Perencanaan Integrasi Layanan Transportasi Antarmoda di Simpul Utama	0	0	Rekomendasi Kebijakan	15.000.000	03	01	05	06



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 321 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4651.PBF.009	Perencanaan Integrasi Sistem Informasi Transportasi Antarmoda di Simpul Utama	0	0	Rekomendasi Kebijakan	13.500.000	03	01	05	06
022.GA.4651.PBF.010	Perencanaan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata	0	0	Rekomendasi Kebijakan	16.500.000	03	01	04	07
022.GA.4651.PBF.011	Perencanaan Integrasi Layanan Transportasi Antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata	0	0	Rekomendasi Kebijakan	18.000.000	03	01	04	07
022.GA.4651.PBF.012	Perencanaan Integrasi Sistem Informasi Transportasi Antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata	0	0	Rekomendasi Kebijakan	16.500.000	03	01	04	07
022.GA.4651.PBF.013	Perencanaan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Kawasan 3TP	0	0	Rekomendasi Kebijakan	7.500.000	03	01	03	08
022.GA.4651.PBF.014	Perencanaan Integrasi Layanan Transportasi Antarmoda di Kawasan 3TP	0	0	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000	03	01	03	08
022.GA.4651.PBF.015	Perencanaan Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda di Simpul Utama dan Kawasan Prioritas	0	0	Rekomendasi Kebijakan	19.500.000	03	01	03	08
022.GA.4651.PBF.016	Perencanaan Integrasi Layanan Transportasi Multimoda di Simpul Utama dan Kawasan Prioritas	0	0	Rekomendasi Kebijakan	24.500.000	03	01	03	08



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 322 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4651.PBF.017	Perencanaan Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda di Kawasan 3TP	0	0	Rekomendasi Kebijakan	7.500.000	03	01	03	08
022.GA.4651.PBF.018	Perencanaan Integrasi LayananTransportasi Multimoda di Kawasan 3TP	0	0	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000	03	01	03	08
022.GA.4651.PBF.019	Perencanaan Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	0	0	Rekomendasi Kebijakan	7.500.000	03	01	05	06
022.GA.4651.PBF.020	Perencanaan Integrasi Layanan Transportasi Multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	0	0	Rekomendasi Kebijakan	7.500.000	03	01	05	06
022.GA.4651.PBF.021	Perencanaan Pengembangan Integrasi Layanan Transportasi Multimoda	0	0	Rekomendasi Kebijakan	7.000.000	03	01	05	06
022.GA.4651.PBF.022	Pengembangan Kelembagaan Pengelola Integrasi Transportasi Antarmoda	0	0	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000	03	01	07	04
022.GA.4651.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				8.000.000				
022.GA.4651.PFA.001	Penyusunan NSPK Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	0	0	Pedoman	1.000.000	03	01	05	06
022.GA.4651.PFA.002	Penyusunan NSPK Integrasi Layanan Transportasi Antarmoda	0	0	Pedoman	1.000.000	03	01	05	06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4651.PFA.003	Penyusunan NSPK Integrasi Sistem Informasi Transportasi Antarmoda	0	0	Pedoman	0	03	01	05	06
022.GA.4651.PFA.004	Penyusunan NSPK Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda	0	0	Pedoman	2.000.000	03	01	05	06
022.GA.4651.PFA.005	Penyusunan NSPK Integrasi Layanan Transportasi Multimoda	0	0	Pedoman	2.000.000	03	01	05	06
022.GA.4651.PFA.006	Penyusunan NSPK Integrasi Sistem Informasi Transportasi Multimoda	0	0	Pedoman	2.000.000	03	01	05	06
022.GA.4658	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut				6.076.570.102				
022.GA.4658.RAE	Sarana Bidang Konektivitas Laut				6.076.570.102				
022.GA.4658.RAE.001	Pembangunan Kapal Patroli Kelas I (80 Meter)	0	1	Unit	1.430.000.000	03	01	03	06
022.GA.4658.RAE.002	Pembangunan Kapal Patroli Kelas I (60 meter)	0	2	Unit	1.940.000.000	03	01	03	06
022.GA.4658.RAE.004	Pembangunan Kapal Kenavigasian	0	3	Unit	900.000.000	03	01	03	06
022.GA.4658.RAE.005	Pembangunan Kapal Patroli Kelas II (48 m)	0	3	Unit	1.170.000.000	03	01	03	06
022.GA.4658.RAE.007		72	0	Unit	636.570.102	03	01	03	06



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 324 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Development and Improvement of Indonesia Aids to Navigation					08	03	01	04
022.GA.4659	Pelayanan Transportasi Laut				11.998.215.645				
022.GA.4659.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				11.998.215.645				
022.GA.4659.QAH.001	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional	107	107	layanan	7.800.112.979	07	15	01	09
						03	01	03	05
						05	03	01	03
022.GA.4659.QAH.001.2102	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Bintan	1	1	layanan	76.657.301	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.5302	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Sumba Timur	2	2	layanan	232.538.249	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.5307	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Alor	1	1	layanan	62.102.359	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.5371	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Kupang	2	2	layanan	127.963.166	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.6101	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Sambas	1	1	layanan	52.343.182	06	07	05	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 325 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4659.QAH.001.7103	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Kepulauan Sangihe	2	2	layanan	156.207.972	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.7172	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Bitung	1	1	layanan	71.179.652	06	04	01	10
022.GA.4659.QAH.001.8101	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Kepulauan Tanimbar	3	3	layanan	279.959.074	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.8105	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Kepulauan Aru	1	1	layanan	76.353.789	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.8172	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Tual	4	4	layanan	280.927.453	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.9409	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Biak Numfor	1	1	layanan	54.538.803	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.9471	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Jayapura	2	2	layanan	92.461.590	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.001.9501	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Merauke	6	6	layanan	234.783.368	06	07	05	02
022.GA.4659.QAH.002	Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional	39	39	layanan	3.350.673.001	05	03	01	03
						07	15	01	09
						03	01	03	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 326 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4659.QAH.003	Layanan Angkutan Ternak Prioritas Nasional	6	6	layanan	468.147.664	03	01	03	05
						05	03	01	03
						07	15	01	09
022.GA.4659.QAH.004	Layanan Angkutan Rede Prioritas Nasional	16	16	layanan	235.532.000	07	15	01	09
						03	01	03	05
						05	03	01	03
022.GA.4659.QAH.005	Layanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Prioritas Nasional	2	2	layanan	143.750.001	07	15	01	09
022.GA.4659.QAH.005.0000	Layanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Prioritas Nasional - Pusat	2	2	layanan	132.750.000	03	01	03	05
022.GA.4660	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut				19.166.039.114				
022.GA.4660.RBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut				19.166.039.114				
022.GA.4660.RBD.001	Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)	1	0	unit	1.042.701.615	02	12	09	06
						03	01	03	01
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.031	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Dobo	1	0	unit	86.232.097	05	03	01	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.034	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk	1	1	unit	192.992.945	03	01	03	03
						05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.034.6504	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan	1	1	unit	192.992.945	06	07	05	02
022.GA.4660.RBD.045	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Batu	0	1	unit	100.000.000	05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.046	Pengembangan Pelabuhan Pelabuhanratu	1	0	unit	90.000.000	05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.054	Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Patimban	2	1	unit	6.231.900	05	03	01	04
						03	01	03	08
022.GA.4660.RBD.057	Patimban Port Development Project (II)	1	1	unit	3.242.181.819	05	03	01	01
						02	12	09	06
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.062	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana	0	0		17.961.224	03	01	03	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 328 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.070	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sungai Guntung	1	0	unit	20.493.648	03	01	03	01
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.071	Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Anggrek	1	1	unit	6.141.700	05	03	01	04
						03	01	03	08
022.GA.4660.RBD.074	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kilo (MYC 2025-2026)	1	0	unit	98.000.000	03	01	03	01
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.080	Replacement Fasilitas Pelabuhan Sarmi	1	0	unit	41.836.360	05	03	01	01
						03	01	03	01
						03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.081	Replacement Fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai (MYC 2025-2026)	1	0	unit	91.999.999	03	01	03	01
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.083	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Raha	1	0	unit	38.555.296	05	03	01	01
						03	01	03	01
						03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.084	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026)	1	0	unit	99.000.000	03	01	03	01
						05	03	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 329 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.085	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Bungin	1	0	unit	66.287.002	05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.086	Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Salakan (MYC 2025-2026)	1	0	unit	99.999.999	03	01	03	01
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.088	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tapa	0	0	unit	68.044.452	05	03	01	01
						03	01	03	01
						03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.088.8108	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tapa - Kab. Maluku Barat Daya	0	0	unit	68.044.452	06	07	05	02
022.GA.4660.RBD.089	Replacement Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026)	1	0	unit	70.870.347	03	01	03	03
						03	01	03	01
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.089.7103	Replacement Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026) - Kab. Kepulauan Sangihe	1	0	unit	70.870.347	06	07	05	02
022.GA.4660.RBD.090	Replacement Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan	1	0	unit	49.913.532	05	03	01	01
						03	01	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 330 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.092	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lampia	1	0	unit	49.239.699	03	01	03	01
						05	03	01	01
						03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.095	Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi (MYC 2025-2026)	1	0	unit	84.999.999	05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.097	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lapuko	1	0	unit	34.118.435	03	01	03	01
						05	03	01	01
						03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.098	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Mahaleta	1	0	unit	51.538.362	03	01	03	03
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.098.8108	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Mahaleta - Kab. Maluku Barat Daya	1	0	unit	51.538.362	06	07	05	02
022.GA.4660.RBD.102	Replacement Fasilitas Pelabuhan Marapokot (MYC 2025-2026)	1	0	unit	99.969.502	05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.103	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Matui	0	0	unit	91.024.650	03	01	03	01
						05	03	01	01



- 331 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.105	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Midai	1	0	unit	30.000.001	05	03	01	01
						03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.105.2103	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Midai - Kab. Natuna	1	0	unit	30.000.001	06	07	05	02
022.GA.4660.RBD.106	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Ndao	1	0	unit	12.350.000	03	01	03	03
						03	01	03	01
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.107	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Eray	1	0	unit	16.191.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.107.8108	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Eray - Kab. Maluku Barat Daya	1	0	unit	16.191.000	06	07	05	02
022.GA.4660.RBD.108	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mangga dua	1	0	unit	32.320.000	05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.109	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Mamuju	1	0	unit	44.999.999	03	01	03	01
						05	03	01	01
						03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.110	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Panarukan	1	0	unit	25.315.584	05	03	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 332 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.111	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Keramaian	1	0	unit	19.000.001	03	01	03	01
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.112	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan laut Sikeli	1	0	unit	15.140.000	05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.113	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalatoa	1	0	unit	24.999.999	03	01	03	01
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.114	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Jinato	1	0	unit	35.000.001	05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.115	Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Tanjung Batu	1	0	unit	11.500.000	03	05	07	001
						05	03	01	01
022.GA.4660.RBD.117	Pembangunan Terminal Pelabuhan Nusa Penida	1	0	unit	12.251.896	05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.118	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida	1	0	unit	13.668.563	05	03	01	01
						03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.119		1	0	unit	10.000.000	03	01	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 333 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan P. Bangka-Kahuku						03	05	06	003
						05	03	01	01
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.120	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Terminal Wae Kelambu	1	0	unit	10.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.120.5315	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Terminal Wae Kelambu - Kab. Manggarai Barat	1	0	unit	10.000.000	06	04	02	04
022.GA.4660.RBD.121	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Lebiti	1	0	unit	47.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.122	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Kalianget	1	0	unit	25.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.123	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Waikelo	1	0	unit	5.950.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.124	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Marsela	1	0	unit	2.947.316	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.125	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Salura	1	0	unit	68.500.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.126	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Agats	1	1	unit	241.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.127	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bajau	0	0	unit	90.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.128	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benete	0	0	unit	9.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.129	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tahuna	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 334 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.130	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Parigi	0	0	unit	40.270.174	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.131	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang	0	0	unit	50.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.132	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Maumbawa	0	0	unit	32.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.133	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Moor	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.134	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Saumlaki	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.135	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Belang-Belang	0	0	unit	98.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.136	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Nunbau Sabu	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.137	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pasipalele	0	0	unit	59.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.138	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Wae Kelambu	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.139	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Boepinang	0	0	unit	85.600.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.140	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Weda	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 335 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.140.8202	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Weda - Kab. Halmahera Tengah	0	0	unit	55.000.000	06	04	02	04
022.GA.4660.RBD.141	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kolaka	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.142	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Fakfak	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.143	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kolonedale	0	1	unit	53.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.144	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Mamboro	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.145	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Awerange	0	0	unit	44.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.146	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Sape	0	0	unit	37.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.147	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Sofifi	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.148	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Lirung	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.149	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Babo	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.150	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Benete	0	0	unit	30.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.151	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Kalianget	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.152	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Sailus	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.153	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Calang	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 336 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.154	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Kobisadar	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.155	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Serwaru	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.156	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Bunta	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.157	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Pasipalele	0	0	unit	22.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.158	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Belang- Belang	0	0	unit	83.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.159	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Sausapor	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.160	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Saketa	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.161	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Daruba	0	1	unit	329.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.161.8207	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Daruba - Kab. Pulau Morotai	0	1	unit	329.000.000	06	04	02	04
022.GA.4660.RBD.162	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Namrole	0	1	unit	156.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.163	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Maradapan	0	0	unit	90.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.164	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Molu	0	0	unit	54.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.165	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Teluk Patipi	0	0	unit	90.000.000	03	01	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 337 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.166	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Saero	0	0	unit	90.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.167	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sirombu	0	0	unit	76.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.168	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lewoleba	0	0	unit	19.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.169	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Luwuk	0	0	unit	23.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.170	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ende	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.172	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tua Pejat	0	0	unit	55.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.173	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tanah Ampo	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.174	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Wini	0	0	unit	19.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.175	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Pulau Owi	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.176	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Lakor	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.177	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Bintuni	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.178	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Melonguane	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.179	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tulehu	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.180	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Haria	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.181	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Selat Lampa	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.182	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Oransbari	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 338 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.183	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Jikohai	0	1	unit	90.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.184	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pulau Misol	0	1	unit	90.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.185	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sofyanin	0	1	unit	90.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.186	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Maurole	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.187	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Padaido	0	1	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.188	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Seba	0	0	unit	35.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.189	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Lelamo	0	1	unit	54.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.190	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Marsram	0	1	unit	54.000.000	03 06	01 07	03 04	03 03
022.GA.4660.RBD.191	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Wunlah	0	1	unit	54.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.192	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Wowi	0	1	unit	54.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.193	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Banda Eli	0	1	unit	54.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.194	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pamantauang	0	1	unit	54.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.195	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kambani	0	1	unit	54.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.196	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Atapupu	0	1	unit	55.000.000	03	01	03	02
022.GA.4660.RBD.197	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penajam Paser	0	1	unit	55.000.000	03	01	03	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 339 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.4660.RBD.198	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pelaihari	0	1	unit	55.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.199	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Rajjua	0	1	unit	55.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.200	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Lipang	0	1	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.201	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Gita	0	1	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.202	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Serui	0	1	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.203	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Batutua	0	1	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.204	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Borong	0	1	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.205	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Susoh	0	1	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.206	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tanjung Beringin	0	1	unit	35.000.000	03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.207	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Baranusa	0	1	unit	35.000.000	03	01	03	03
022.GA.4660.RBD.208	Patimban Port Development Project (III)	0	1	unit	8.305.000.000	02	12	09	06
						03	01	03	01
022.GA.4660.RBD.209	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Makbon	1	0	unit	700.000	03	01	03	01
022.GA.6891	Formulasi Kebijakan Transportasi				105.784.033				
022.GA.6891.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				105.784.033				
022.GA.6891.PBF.051	Sistem Transportasi Ibukota Nusantara	1	0	Rekomendasi Kebijakan	413.337	03	01	06	03
						06	05	01	05



- 340 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
022.GA.6891.PBF.052	Transportasi Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang Dikembangkan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	7.817.534	03	01	05	06
022.GA.6891.PBF.053	Transportasi Di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan (3TP) yang Dikembangkan	0	1	Rekomendasi Kebijakan	8.391.668	03 05	01 03	05 01	06 04
022.GA.6891.PBF.054	Efisiensi dan Konektivitas Logistik	0	17	Rekomendasi Kebijakan	45.105.226	05 03	03 01	01 05	04 06
022.GA.6891.PBF.055	Angkutan Umum Massal & Transportasi Perkotaan	0	17	Rekomendasi Kebijakan	44.056.268	03	01	06	03
022.GA.6891.PBF.056.0000	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan - Pusat	0	0	Rekomendasi Kebijakan	0	06	04	01	04
TOTAL					105.639.392.585				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 341 -

KEMENTERIAN KESEHATAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 02.12 - Rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	persen	4,2 (2023)	2,5	0
PP 04.11 - Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	189 (2020)	122	77
PP 04.11 - Angka kematian balita	per 1.000 kelahiran hidup	19,83 (2020)	15,00	11,90
PP 04.11 - Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	persen	21,50 (2023)	18,8	14,2
PP 04.11 - Prevalensi remaja putri anemia	persen	- (indikator baru)	25	15
PP 04.11 - Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja	persen	- (indikator baru)	10	50
PP 04.11 - Persentase lanjut usia yang mandiri	persen	74,30 (2023)	75	83
PP 04.11 - Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	- (indikator baru)	36	70
PP 04.13 - Insidensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	per 100.000 penduduk	387 (2023)	329	190



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 342 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
PP 04.13 - Kab/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	6	11	42
PP 04.13 - Desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	desa	16 (2023)	18	28
PP 04.13 - Insidensi HIV	per 100.000 penduduk	0,10 (2023)	0,09	0,06
PP 04.13 - Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	kab/kota	389 (2023)	425	500
PP 04.13 - Persentase Diabetes dalam Pengendalian	persen	- (indikator baru)	15	25
PP 04.13 - Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	persen	18,9	20	40
PP 04.13 - Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim	kab/kota	- (indikator baru)	30	125
PP 04.13 - Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun	persen	1,4 (2023)	1,4	1,4
PP 04.13 - Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	kab/kota	- (indikator baru)	50	250
PP 04.13 - Prevalensi obesitas >18 tahun	persen	23,4 (2023)	23,4	23,4
PP 04.13 - Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	persen	12,4 (2023)	12,4	8,4
PP 04.14 - Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah	persen	37,16 (2023)	40	70
PP 04.14 - Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	persen	90 (2023)	94	100
PP 04.14 - Jumlah KLB keracunan pangan	kejadian	291	250	50
PP 04.14 - Jumlah kab/kota eliminasi rabies	kab/kota	418	430	514



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
PP 04.14 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	persen	62	65	90
PP 04.14 - Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar	persen	- (indikator baru)	10	60
PP 04.15 - Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	persen	1,17 (2023)	20	75
PP 04.15 - Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	persen	28	28	70
PP 04.15 - Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	persen	37	38	85
PP 04.15 - Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	persen	12	17	50
PP 04.15 - Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	persen	63	67	86
PP 04.15 - Persentase belanja kesehatan <i>out of pocket</i> masyarakat berpengeluaran 40% terbawah	persen	4,0 (2023)	3,98	3,87
PP 04.15 - Pengeluaran kesehatan total per kapita	juta	2,1 (2023)	2,2	3
PP 04.15 - Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	persen	- (indikator baru)	20	75
PP 04.15 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	46,72	50	70
PP 04.19 - Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	persen	0,126 (2023)	0,103	0,067



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 344 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 02.12.05 - Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat (RIBK, Renstra)	kab/kota	65 (2023)	100	300
KP 02.12.05 - Kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat (RIBK, Renstra)	persen	65 (2023)	50	250
KP 02.12.08 - Kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM	kab/kota	4 (2023)	30	200
KP 02.18.01 - Jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	kab/kota	4 (2023)	30	200
KP 04.11.01 - Persentase persalinan di fasyankes	persen	87,2 (2023)	88	95
KP 04.11.01 - Persentase kab/kota dengan RS PONEK sesuai standar	persen	19,45 (2023)	25	85
KP 04.11.01 - Persentase kab/kota dengan puskesmas PONED sesuai standar	persen	- (indikator baru)	20	80
KP 04.11.01 - Persentase kab/kota dengan CFR <i>direct obstetric</i> (eklamsi & pendarahan <i>postpartum</i>) < 1%	persen	- (indikator baru)	25	80
KP 04.11.01 - Persentase <i>antenatal care</i> (ANC) 6 kali (K6)	persen	- (indikator baru)	80	90
KP 04.11.01 - Cakupan <i>antenatal care</i> (ANC) sesuai standar (12T)	persen	- (indikator baru)	63	75
KP 04.11.01 - Persentase anemia pada ibu hamil	persen	27,7 (2023)	26	20
KP 04.11.01 - Persentase calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan	persen	49,2 (2023)	50	70



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 345 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.11.01 - Cakupan KF lengkap sesuai standar	persen	26,8 (2023)	35	85
KP 04.11.01 - Angka kematian neonatal	per 1.000 kelahiran hidup	9,30 (2020)	9,2	7,2
KP 04.11.01 - Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	16,85 (2020)	12,62	9,96
KP 04.11.01 - Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar	persen	90,77 (2023)	91	95
KP 04.11.01 - Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	75 (2023)	80	95
KP 04.11.02 - Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	persen	8,5 (2023)	8	5
KP 04.11.02 - Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)	persen	11,1 (2023)	11	9
KP 04.11.02 - Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	persen	- (indikator baru)	15	10
KP 04.11.02 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	persen	68,6 (2023)	73	85
KP 04.11.02 - Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	persen	55,5 (2023)	61	73
KP 04.11.02 - Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	persen	60,9 (2023)	73	85
KP 04.11.02 - Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	persen	24 (2023)	50	70
KP 04.11.03 - Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD	persen	61,3 (2023)	65	80
KP 04.11.03 - Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	persen	- (indikator baru)	25	70



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 346 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE 2024</i>	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.11.03 - Jumlah pos upaya kesehatan kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	pos	10.200 (2023)	15.000	60.000
KP 04.11.03 - Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	persen	- (indikator baru)	10	50
KP 04.11.03 - Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	47,22 (2022)	50	70
KP 04.11.03 - Persentase puskesmas santun lansia	persen	69	70	90
KP 04.11.03 - Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu	persen	11,01 (2023)	20	50
KP 04.11.03 - Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP)	persen	- (indikator baru)	10	50
KP 04.11.03 - Persentase puskesmas mampu pelayanan KB MKJP	persen	- (indikator baru)	30	50
KP 04.11.04 - Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	persen	- (indikator baru)	40	90
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	persen	- (indikator baru)	65	80
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	persen	- (indikator baru)	50	70
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	persen	- (indikator baru)	20	70



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 347 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	persen	- (indikator baru)	35	70
KP 04.11.04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	persen	- (indikator baru)	50	70
KP 04.13.01 - Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	persen	74 (2022)	90	90
KP 04.13.01 - Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate)	persen	87 (2023)	90	90
KP 04.13.01 - Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	persen	2,6 (2023)	72	80
KP 04.13.01 - Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (<i>Enrollment</i> TBC)	persen	86 (2022)	95	95
KP 04.13.02 - Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	persen	84,36	86	89
KP 04.13.02 - Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	persen	84,97 (2023)	90	90
KP 04.13.02 - Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	persen	9,60	<5	<5
KP 04.13.02 - Cakupan pemberian obat pencegahan masal (POPM) untuk <i>schistosomiasis</i>	persen	83,6 (2023)	87,2	100
KP 04.13.03 - ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	persen	70 (2023)	90	90
KP 04.13.03 - Jumlah kab/kota yang mencapai <i>positivity rate</i> (PR) malaria <5%	kab/kota	333 (2023)	405	500
KP 04.13.04 - Jumlah kab/kota yang melakukan skrining DM > 60%	kab/kota	32	52	175



- 348 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.13.04 - Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	- (indikator baru)	5	38
KP 04.13.04 - Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	persen	- (indikator baru)	30	90
KP 04.13.04 - Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	persen	- (indikator baru)	20	70
KP 04.13.04 - Cakupan imunisasi HPV	persen	6	90	90
KP 04.13.04 - Cakupan skrining kesehatan jiwa	persen	6 (2023)	10	30
KP 04.13.05 - Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	persen	62,6 (2023)	65	80
KP 04.13.05 - Persentase penduduk dengan literasi kesehatan	persen	36,3 (2023)	38,3	46,3
KP 04.13.05 - Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	persen	15 (2023)	15	25
KP 04.13.05 - Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR	kab/kota	367	397	514
KP 04.13.05 - Jumlah kab/kota yang melakukan pelayanan UBM	kab/kota	228 (2023)	276	472
KP 04.13.05 - Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	persen	- (indikator baru)	3	15
KP 04.13.06 - Kab/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	100	300
KP 04.13.06 - Kab/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (Kab/Kota)	kab/kota	- (indikator baru)	50	250



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 349 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.13.06 - Kab/kota sanitasi total berbasis masyarakat	kab/kota	4 (2023)	30	200
KP 04.13.06 - Kab/kota sehat	kab/kota	136	182	330
KP 04.14.01 - Kab/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	kab/kota	452 (2023)	462	514
KP 04.14.01 - Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	laboratorium	- (indikator baru)	30	100
KP 04.14.01 - Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	persen	70 (2023)	73	85
KP 04.14.01 - Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah	persen	40 (2023)	47	75
KP 04.14.01 - Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies	kab/kota	- (indikator baru)	110	321
KP 04.14.02 - Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	persen	61,96	65	90
KP 04.14.02 - Persentase penurunan kekosongan (<i>stock out</i>) obat dan vaksin di fasyankes	persen	- (indikator baru)	10	30
KP 04.14.02 - Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	- (indikator baru)	91	98
KP 04.14.02 - Persentase RS yang mengimplementasikan program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA)	persen	- (indikator baru)	30	80



- 350 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.14.02 - Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	persen	- (indikator baru)	30	80
KP 04.14.03 - Kab/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	kab/kota	- (indikator baru)	50	360
KP 04.14.03 - kab/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	kab/kota	- (indikator baru)	50	360
KP 04.14.03 - Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan	persen	- (indikator baru)	94	98
KP 04.15.01 - Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar	persen	<30	30	80
KP 04.15.01 - Persentase kab/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif	persen	18	25	80
KP 04.15.01 - Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	- (indikator baru)	10	50
KP 04.15.01 - Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar	persen	18,5	40	90
KP 04.15.01 - Persentase puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	30	50	90
KP 04.15.01 - Persentase puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	persen	30	35	75
KP 04.15.02 - Persentase provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar	persen	31,5	40	90



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 351 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE 2024</i>	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.15.02 - Persentase kab/kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar	persen	7,8	20	80
KP 04.15.02 - Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	- (indikator baru)	8	40
KP 04.15.02 - Kab/kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar	kab/kota	26 (2023)	27	40
KP 04.15.02 - Jumlah kab/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas	kab/Kota	65	75	150
KP 04.15.02 - Persentase RS pemerintah daerah yang memenuhi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	persen	40	45	80
KP 04.15.02 - Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	kab/Kota	- (indikator baru)	22	66
KP 04.15.02 - Jumlah RS pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	RS	3	5	30
KP 04.15.03 - Jumlah kab/kota dengan SDM kesehatan puskesmas sesuai standar	kab/kota	6	19	175
KP 04.15.03 - Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	kab/kota	250	270	345
KP 04.15.03 - Rasio dokter spesialis	per 1.000 penduduk	0,18	0,19	0,24
KP 04.15.03 - Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	persen	11,38	15	35
KP 04.15.04 - Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	persen	11,9 (2023)	5	5
KP 04.15.05 - Persentase provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah	persen	- (indikator baru)	70	90



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 352 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.15.05 - Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	persen	- (indikator baru)	10	50
KP 04.15.05 - Persentase sistem informasi data kesehatan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	- (indikator baru)	20	100
KP 04.15.05 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	persen	15	20	80
KP 04.15.05 - Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi	persen	2	4	15
KP 05.01.11 - Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	43	50	80
KP 05.01.14 - Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	56	60	75
KP 08.03.04 - Persentase penurunan kejadian penyakit sensitif iklim	persen	- (indikator baru)	10	14



- 353 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD	Program Kesehatan Masyarakat				29.890.285.388				
024.DD.5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				175.580.848				
024.DD.5833.PEE	Kemitraan				7.045.630				
024.DD.5833.PEE.001	Kemitraan Potensial dalam mendukung Germas dan Kesehatan Prioritas (LP-3)	17	17	Kesepakatan	7.045.630	04	13	05	01
024.DD.5833.PEH	Promosi				114.276.128				
024.DD.5833.PEH.001	Produksi dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Germas Melalui Berbagai Media (LP-3)	35	35	promosi	111.370.907	04	13	05	01
024.DD.5833.PEH.003	Kampanye Posyandu Aktif	10	50	promosi	2.905.221	04	15	01	02
024.DD.5833.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				790.550				
024.DD.5833.PFA.001	NSPK Germas, Posyandu, Stunting (LP-3)	1	1	NSPK	790.550	04	13	05	01
024.DD.5833.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				50.960.540				
024.DD.5833.QDD.001	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Germas Di Berbagai Tatanan (LP-3)	252	252	Kelompok Masyarakat	45.072.996	04	13	05	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 354 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD.5833.QDD.003	Peningkatan Ketrampilan Kader Kesehatan	10	50	Kelompok Masyarakat	5.836.445	04	15	01	02
						06	07	01	01
024.DD.5833.QDD.004	Pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar	100	100	Kelompok Masyarakat	51.099	06	07	01	01
						04	15	01	02
024.DD.5833.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				2.508.000				
024.DD.5833.UBA.001	Pendampingan, Asistensi, penilaian, evaluasi, dan implementasi program kesmas di daerah (LP-3)	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.508.000	04	13	05	01
024.DD.6799	Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak				6.158.961.106				
024.DD.6799.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				4.235.525				
024.DD.6799.PFA.001	NSPK Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	4	4	NSPK	3.235.525	04	11	02	01
024.DD.6799.PFA.004	NSPK terkait pelayanan kesehatan usia sekolah & remaja	1	1	NSPK	1.000.000	04	11	03	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD.6799.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				3.321.000				
024.DD.6799.QDB.001	Pembinaan sekolah oleh puskesmas	8170	9190	Lembaga	3.321.000	04	11	03	01
024.DD.6799.QEA	Bantuan Masyarakat				5.852.728.205				
024.DD.6799.QEA.002	Sasaran prioritas yang mendapatkan intervensi gizi darurat	124000	124000	Orang	91.948.894	04	11	02	01
024.DD.6799.QEA.016	Sampel skrining bayi baru lahir yang diperiksa	2974700	3661200	Orang	5.744.050.039	04	11	04	01
024.DD.6799.QEA.017	Sampel tes konfirmasi skrining bayi baru lahir	95	160	Orang	16.729.272	04	11	04	01
024.DD.6799.QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				27.810.165				
024.DD.6799.QKA.005	Kegiatan Surveilans Gizi dan KIA [LP - 7]	61	61	laporan	27.810.165	04	11	01	03
						04	11	02	01
024.DD.6799.RAB	Sarana Bidang Kesehatan				106.892.595				
024.DD.6799.RAB.001	Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	2780840	2780840	Paket	106.892.595	04	11	01	01
						04	11	01	02
024.DD.6799.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				32.619.838				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 356 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD.6799.SCM.001	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	1592	1592	Orang	4.233.020	04	11	01	01
						04	11	01	02
						04	11	02	01
024.DD.6799.SCM.002	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita [LP - 4]	239	239	Orang	17.820.143	04	11	01	01
						04	11	02	01
024.DD.6799.SCM.003	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja [LP - 4]	2309	1356	Orang	10.566.675	04	11	03	01
024.DD.6799.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				131.353.777				
024.DD.6799.UBA.001	Daerah yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	134	134	Daerah (Prov/Kab/Kota)	31.813.800	04	11	01	01
						04	11	01	02
						04	11	01	03
						04	11	02	01



- 357 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						04	19	01	01
024.DD.6799.UBA.002	Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita [LP - 4]	78	78	Daerah (Prov/Kab/Kota)	96.714.256	04	02	02	03
						04	11	02	01
024.DD.6799.UBA.003	Daerah yang dilakukan fasilitasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja [LP - 4]	11	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.825.721	04	11	03	01
						04	16	01	01
024.DD.6800	Pembinaan Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia				116.790.620				
024.DD.6800.PEA	Koordinasi				814.125				
024.DD.6800.PEA.002	Penggalangan Komitmen dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia (LP-10)	1	1	kegiatan	814.125	04	20	02	02
024.DD.6800.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				2.170.950				
024.DD.6800.PEF.005	Sosialisasi Pelayanan Kespro Bagi Kelompok Rentan (LP-7)	900	500	orang	800.000	04	19	01	01
024.DD.6800.PEF.007	Sosialisasi Kesehatan Lansia (LP-10)	700	700	orang	1.370.950	04	20	02	02
024.DD.6800.PEH	Promosi				1.623.093				



- 358 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD.6800.PEH.001	Produksi dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Usia Produktif dan Lansia Melalui Berbagai Media (LP-3)	1	4	promosi	1.623.093	04	19	01	01
024.DD.6800.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				6.342.678				
024.DD.6800.PFA.001	NSPK Kesehatan Usia Produktif dan Lansia (LP-3)	10	8	NSPK	4.694.710	04	11	03	03
024.DD.6800.PFA.002	NSPK terkait Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	5	1	NSPK	1.027.000	04	11	03	04
024.DD.6800.PFA.006	NSPK Kesehatan Usia Produktif	2	2	NSPK	620.968	04	11	03	02
024.DD.6800.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				9.189.388				
024.DD.6800.QDB.004	Pembinaan dan penguatan Puskesmas ramah penyandang disabilitas	3600	7700	Lembaga	2.766.361	04	15	01	03
024.DD.6800.QDB.006	Pembinaan Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	5100	9200	Lembaga	2.766.361	04	15	01	03
						04	19	04	02
024.DD.6800.QDB.009	Pembinaan tempat kerja formal (perkantoran, industri dan fasyankes) menerapkan kesehatan kerja	6850	54800	Lembaga	3.656.666	04	11	03	02
024.DD.6800.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				9.365.180				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 359 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD.6800.QDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kebugaran Jasmani (LP-10)	2114	2114	Kelompok Masyarakat	9.365.180	04	13	05	03
						04	22	02	01
						06	02	03	01
						04	20	01	02
024.DD.6800.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				28.321.116				
024.DD.6800.SCM.001	Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi (LP-7)	360	310	Orang	5.667.528	04	11	03	04
						08	01	01	03
024.DD.6800.SCM.002	Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Lansia (LP- 10)	1130	1130	Orang	4.237.840	04	20	02	02
						04	11	03	03
024.DD.6800.SCM.003	Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitas terkait Kesehatan Kerja (LP-10)	1150	1150	Orang	4.767.000	04	11	03	02
024.DD.6800.SCM.005	Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitas terkait Kesehatan Olahraga (LP- 10)	2050	2050	Orang	1.124.418	04	13	05	03
						04	22	02	01
024.DD.6800.SCM.006	Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitas Pelayanan KB	120	120	Orang	12.524.330	04	11	03	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 360 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD.6800.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				58.964.090				
024.DD.6800.UBA.002	Kab/Kota yang melakukan fasilitasi dan pembinaan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin	514	514	Kab/Kota	2.727.220	04	11	01	02
024.DD.6800.UBA.003	Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB	514	514	Kab/Kota	4.418.533	04	11	03	04
024.DD.6800.UBA.004	Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Reproduksi	514	514	Kab/Kota	6.528.105	04	11	03	04
024.DD.6800.UBA.005	Fasilitasi dan Pembinaan Daerah dalam Pelaksanaan Upaya Kesehatan Produktif Dan Lansia	38	38	Provinsi	40.431.806	04	11	03	03
024.DD.6800.UBA.010	Fasilitasi kabupaten/kota dalam pembinaan kesehatan kerja sektor Informal	300	411	Kab/Kota	2.552.174	04	11	03	02
024.DD.6800.UBA.011	Fasilitasi dan Pembinaan Daerah dalam Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja	38	38	Provinsi	2.306.252	04	11	03	02
024.DD.6801	Pembinaan Kesehatan Jiwa				20.078.771				
024.DD.6801.PEH	Promosi				16.912.417				



- 361 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD.6801.PEH.001	Promosi, Kampanye, Produksi dan Penyebarluasan Informasi Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA (LP-3)	8	7	promosi	16.912.417	04	13	04	03
024.DD.6801.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				3.166.354				
024.DD.6801.SCM.001	Tenaga Kesehatan/non Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Tatakelola terkait Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA (LP-1)	5281	0	Orang	3.166.354	04	13	04	03
024.DD.6802	Pembinaan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat				23.418.874.043				
024.DD.6802.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				8.341.384				
024.DD.6802.PEF.002	sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis	3800	3800	orang	8.341.384	04	11	04	02
024.DD.6802.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				4.170.693				
024.DD.6802.PFA.011	NSPK pemeriksaan kesehatan gratis	1	1	NSPK	4.170.693	04	11	04	02
024.DD.6802.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				5.464.000				
024.DD.6802.QDB.002	Pemenuhan alkes di Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	0	0	Lembaga	0	06	07	01	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 362 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD.6802.QDB.003	Pembinaan Pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan	1	6	Lembaga	5.464.000	04	15	02	03
024.DD.6802.QDB.003.0000	Pembinaan Pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan - Pusat	1	6	Lembaga	5.464.000	06	07	04	01
024.DD.6802.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				23.349.972.726				
024.DD.6802.QEG.001	Sarana Puskesmas, Pustu dan Posyandu (SOPHI)	1	0	Paket	23.349.972.726	06	07	01	01
						04	15	01	01
024.DD.6802.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				6.673.107				
024.DD.6802.SCM.005	SDMK yang ditingkatkan kapasitasnya untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis	380	380	Orang	6.673.107	04	11	04	02
024.DD.6802.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				14.732.207				
024.DD.6802.UAE.002	Pemantauan dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Layanan Primer (LP-1)	25	25	Laporan	5.787.207	04	15	01	01
024.DD.6802.UAE.005	Pemantauan dan Monev Pelayanan Kesehatan di DTPK dan Kawasan Khusus (LP-1)	10	50	Laporan	3.945.000	04	15	02	03



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 363 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DD.6802.UAE.005.0000	Pemantauan dan Monev Pelayanan Kesehatan di DTPK dan Kawasan Khusus (LP-1) - Pusat	10	50	Laporan	3.945.000	06	07	04	01
024.DD.6802.UAE.010	Telaah kebijakan insentif pelayanan UKM di Puskesmas	1	1	Rekomendasi	5.000.000	04	15	04	03
024.DD.6802.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				29.519.926				
024.DD.6802.UBA.001	Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Manajemen dan Tata Kelola Puskesmas (LP-1)	38	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16.969.687	04	15	01	01
024.DD.6802.UBA.004	Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional (LP-1)	480	1000	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.711.270	04	15	01	01
024.DD.6802.UBA.007	Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.838.969	04	11	04	02
024.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN				339.885.021.175				
024.DG.2051	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				37.727.006.472				
024.DG.2051.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				39.662.758				
024.DG.2051.PEF.001	Sosialisasi dan edukasi pelayanan kedokteran presisi kepada masyarakat	1000	5000	orang	39.662.758	04	15	05	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 364 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.2051.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				47.247.439				
024.DG.2051.QDB.003	Pembinaan RS dalam layanan kedokteran presisi	5	40	Lembaga	38.947.196	04	15	05	03
024.DG.2051.QDB.004	Optimalisasi Pelaksanaan Uji Klinis	22	30	Lembaga	1.300.000	04	15	05	03
024.DG.2051.QDB.005	RS yang diberikan bimbingan teknis ASPAK terkait ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan	179	974	Lembaga	3.065.505	04	15	05	02
024.DG.2051.QDB.013	Pemenuhan Unit Transfusi Darah (UTD) dengan Sarana Prasarana dan (SPA) sesuai standar	45	100	Lembaga	3.934.738	04	11	01	01
024.DG.2051.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				9.370.224.620				
024.DG.2051.QEG.001	RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)	10	0	Paket	9.370.224.620	04	15	02	01
024.DG.2051.RAB	Sarana Bidang Kesehatan				27.596.708.383				
024.DG.2051.RAB.008	Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Riau	1	0	Unit	566.870.000	04	15	02	01
024.DG.2051.RAB.009	Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11)	4077	0	Unit	27.029.838.383	04	15	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 365 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.2051.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan				663.879.008				
024.DG.2051.RBV.002	Pembangunan dan Pengembangan Gedung GeneBank Indonesia	0	0	Unit	663.879.008	02	16	05	01
024.DG.2051.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				9.284.264				
024.DG.2051.UAE.004	Sarana Prasarana Alat UTD yang dilakukan monitoring dan evaluasi	37	55	Laporan	4.492.404	04	11	01	01
024.DG.2051.UAE.011	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan bantuan alat kesehatan dan penunjang BMN SIHREN	11	0	Laporan	4.791.860	04	15	02	02
024.DG.2067	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian				19.605.275				
024.DG.2067.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				4.605.275				
024.DG.2067.QDI.001	Pembinaan sarana produksi dalam rangka peningkatan produksi sediaan farmasi dan vaksin halal	0	0	Industri	0	02	13	01	02
024.DG.2067.QDI.519	Industri farmasi yang dibina dalam rangka pemenuhan ketersediaan obat esensial dalam JKN	115	175	Industri	4.605.275	04	14	02	01
024.DG.2067.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				15.000.000				



- 366 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.2067.UAE.001	Review implementasi pengadaan obat melalui e-purchasing	2	2	Rekomendasi	15.000.000	04	14	02	01
024.DG.2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer				23.563.165				
024.DG.2087.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				23.563.165				
024.DG.2087.UBA.004	Pembinaan Klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan puskesmas untuk pelayanan program prioritas	20	60	Daerah (Prov/Kab/Kota)	23.563.165	04	15	01	01
024.DG.2090	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				4.650.324.885				
024.DG.2090.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				4.136.799.750				
024.DG.2090.QDB.001	Pembinaan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) di Rumah Sakit	570	770	Lembaga	2.056.082	04	19	01	01
						04	11	01	01
024.DG.2090.QDB.006	Layanan prioritas kardiovaskuler di rumah sakit	320	320	Lembaga	1.340.984	04	15	02	02
024.DG.2090.QDB.007	Layanan prioritas kanker di rumah sakit	321	321	Lembaga	1.438.585	04	15	02	02
024.DG.2090.QDB.008	Layanan prioritas stroke di rumah sakit	314	314	Lembaga	1.629.395	04	15	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 367 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.2090.QDB.010	Layanan prioritas diabetes mellitus di rumah sakit	177	177	Lembaga	9.198.644	04	15	02	02
024.DG.2090.QDB.011	Layanan prioritas uronefrologi di rumah sakit	318	318	Lembaga	1.303.682	04	15	02	02
024.DG.2090.QDB.012	RS yang Ditingkatkan Kompetensi Dalam Layanan Penyakit Infeksi Emerging	50	70	Lembaga	6.196.000	04	14	01	01
024.DG.2090.QDB.013	RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan kesehatan jiwa	15	75	Lembaga	7.513.765	04	13	04	03
024.DG.2090.QDB.015	Layanan prioritas Kesehatan Ibu dan Anak di rumah sakit	318	318	Lembaga	1.302.853	04	15	02	02
024.DG.2090.QDB.028	Fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas RS Pratama	0	0	Lembaga	0	06	07	04	01
024.DG.2090.QDB.038	Pemenuhan SPA untuk pelayanan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal di RS sesuai standar	20	100	Lembaga	4.095.662.760	04	15	02	02
024.DG.2090.QDB.039	Pembinaan RS Kapal di wilayah kepulauan	9	13	Lembaga	4.157.000	04	15	02	03
						06	07	04	01
024.DG.2090.QDB.050	Pembinaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit	36	36	Lembaga	5.000.000	04	15	04	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 368 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.2090.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				502.585.000				
024.DG.2090.QEG.001	Bantuan Operasional RS Kapal (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)	9	9	Paket	502.585.000	04	15	02	03
024.DG.2090.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				2.275.135				
024.DG.2090.UAE.004	Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi di RS Rujukan	1056	2980	Laporan	1.915.135	04	15	05	03
024.DG.2090.UAE.006	Monitoring RS kelas D yang ditingkatkan menjadi kelas C	1	1	Laporan	360.000	04	15	02	01
024.DG.2090.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				8.665.000				
024.DG.2090.UBA.001	Provinsi yang tersedia RS layanan geriatri dan dibina sesuai standar	3	30	Provinsi	1.865.000	04	11	03	03
024.DG.2090.UBA.002	Kabupaten/ kota yg diberikan pembinaan pelayanan darah	102	514	Kab/Kota	6.800.000	04	11	01	01
024.DG.5610	Pembiayaan JKN/KIS				244.820.000.547				
024.DG.5610.QEA	Bantuan Masyarakat				244.820.000.547				
024.DG.5610.QEA.001	Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN	96800000	96800000	Orang	232.320.000.590	04 06	15 02	04 01	01 01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 369 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						08	03	05	03
024.DG.5610.QEA.002	Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU) dan Bukan Pekerja (BP) penerima kontribusi bantuan iuran	49603175	49603175	Orang	12.499.999.957	08	03	05	03
						06	02	01	01
						04	15	04	01
024.DG.5836	Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan				90.585.789				
024.DG.5836.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				65.585.789				
024.DG.5836.QDB.002	Fasilitasi Peningkatan Mutu Rumah sakit	3080	3080	Lembaga	9.290.000	04	15	02	01
024.DG.5836.QDB.009	Penyelenggara akreditasi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	13	13	Lembaga	3.588.089	04	15	01	01
024.DG.5836.QDB.011	Pengukuran dan pelaporan mutu Puskesmas	20	100	Lembaga	12.707.700	04	15	01	01
024.DG.5836.QDB.012	RS pemerintah dan swasta yang dibina dalam mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba	627	630	Lembaga	20.000.000	04	14	02	03
024.DG.5836.QDB.013	FKTP yang dibina dalam mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	800	800	Lembaga	20.000.000	04	14	02	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 370 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.5836.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				25.000.000				
024.DG.5836.UBA.001	Kab/kota yang difasilitasi dalam pengendalian resistensi antimikroba	100	114	Daerah (Prov/Kab/Kota)	25.000.000	04	14	02	03
024.DG.5839	Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)				58.500.000				
024.DG.5839.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				58.500.000				
024.DG.5839.QIA.001	Sertifikasi dan Penilaian Kepatuhan Penerapan CPAKB (Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik)	275	295	Keputusan	10.000.000	04	14	03	02
024.DG.5839.QIA.002	Sertifikasi dan Penilaian Kepatuhan Penerapan CDAKB	1	1	Laporan	15.000.000	04	14	03	02
024.DG.5839.QIA.004	Kalibrasi Alat Kesehatan di RS dan Puskesmas yang diawasi	68	80	Laporan	25.000.000	04	14	03	02
024.DG.5839.QIA.005	SDM pengawasan alat kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	64	100	Laporan	5.000.000	04	14	03	02
024.DG.5839.QIA.006	Jejaring Laboratorium Pengujian Alat Kesehatan	1	1	Laporan	3.500.000	04	14	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 371 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan				5.000.360.000				
024.DG.6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan				5.000.360.000				
024.DG.6388.RAB.006	Pemenuhan gedung dan pengadaan alat kesehatan Pelayanan Kanker Terpadu	1	0	Paket	5.000.360.000	04	15	02	02
024.DG.6806	Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA				101.918.940				
024.DG.6806.QEA	Bantuan Masyarakat				101.918.940				
024.DG.6806.QEA.001	Pelayanan Klaim IPWL (PK-20)	2100	2100	Orang	101.918.940	07	06	02	01
024.DG.6807	Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan				20.300.000				
024.DG.6807.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				20.300.000				
024.DG.6807.QDB.005	Fasyankes ditetapkan sebagai pelaksana pelayanan telemedisin (LR-11)	350	350	Lembaga	5.000.000	02	14	002	008
024.DG.6807.QDB.008	BLU RS Pemerintah yang ditingkatkan kemandiriannya (LR-12)	50	50	Lembaga	7.500.000	04	15	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 372 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.6807.QDB.016	Pembinaan RS Pemerintah dengan kinerja keuangannya bernilai baik	40	40	Lembaga	6.500.000	04	15	02	01
024.DG.6808	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian				46.290.273.520				
024.DG.6808.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				40.000.000				
024.DG.6808.QDB.001	RS yang dibina dalam penggunaan obat sesuai Fornas	91	95	Lembaga	10.000.000	04	14	02	02
024.DG.6808.QDB.002	Fasyankes yang dibina dalam pelayanan kefarmasian	10485	11471	Lembaga	30.000.000	04	14	02	02
024.DG.6808.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				25.000.000				
024.DG.6808.QDC.001	Tenaga Kefarmasian Yang Kompeten Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	151544	202344	Orang	25.000.000	04	14	02	02
024.DG.6808.QEC	Bantuan Produk				46.140.902.392				
024.DG.6808.QEC.039	Obat Hepatitis	3	3	Paket	2.226.206.398	04	14	02	01
024.DG.6808.QEC.530	Obat dan Perbekalan Kesehatan program Penyakit Tropis Terabaikan	2	2	Paket	251.726.697	04	14	02	01
						04	13	02	01
024.DG.6808.QEC.531	Vaksin Imunisasi Program	12	12	Paket	10.571.763.585	04	02	04	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 373 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						04	14	02	01
024.DG.6808.QEC.532	Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB	1	1	Paket	10.396.033.655	04	14	02	01
						04	13	01	03
024.DG.6808.QEC.533	Obat dan Perbekalan Kesehatan program Pengendalian Malaria	1	1	Paket	204.796.766	08	03	04	02
						04	14	02	01
024.DG.6808.QEC.534	Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	1	1	Paket	1.736.782.681	04	14	02	01
						04	13	03	01
024.DG.6808.QEC.535	Vaksin Lainnya dan Logistik Penunjang Vaksinasi	3	3	Paket	545.548.925	04	14	02	01
024.DG.6808.QEC.536	Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	2	Paket	326.557.428	04	14	02	01
024.DG.6808.QEC.537	Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Lainnya	4	4	Paket	482.132.248	04	14	02	01
024.DG.6808.QEC.538	Obat dan Perbekkes Haji (LP-10)	1	1	Paket	416.407.385	08	01	06	02
024.DG.6808.QEC.540	Obat Kesehatan Jiwa	1	1	Paket	36.975.718	04	14	02	01
024.DG.6808.QEC.542	BMHP untuk Skrining Kesehatan	1	1	Paket	18.945.970.906	04	11	04	01
024.DG.6808.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				84.371.128				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 374 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.6808.UBA.001	Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Menerapkan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	37.431.875	04	14	02	01
024.DG.6808.UBA.003	Kab/Kota yang dibina dalam penyusunan perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan perbekkes	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.939.253	04	14	02	01
024.DG.6808.UBA.019	Kab/kota yang dipantau ketersediaan obat dan vaksin secara rutin	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15.000.000	04	14	02	01
024.DG.6808.UBA.024	Kab/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelayanan kefarmasian	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	25.000.000	04	14	02	02
024.DG.6809	Peningkatan Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan				686.392.468				
024.DG.6809.PEH	Promosi				21.396.025				
024.DG.6809.PEH.507	Promosi pengembangan, produksi, dan pemanfaatan alkes dalam negeri	11	15	promosi	21.396.025	05	01	14	02
024.DG.6809.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				641.800.552				
024.DG.6809.QDB.523	Lembaga yang melakukan Kerja Sama hilirisasi penelitian Obat Bahan Alam	20	20	Lembaga	4.423.668	05	01	11	04
024.DG.6809.QDB.524	Lembaga yang melakukan uji praklinik dan uji klinik pengembangan obat bahan alam	6	6	Lembaga	3.044.222	05	01	11	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 375 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.6809.QDB.602	Lembaga yang dilakukan pembinaan pengembangan inovasi alkes dalam negeri	8	8	Lembaga	10.794.752	05	01	14	02
024.DG.6809.QDB.603	Lembaga yang melakukan pengembangan inovasi dan produksi bahan baku obat kimia prioritas dalam negeri	25	25	Lembaga	3.205.524	05	01	11	05
024.DG.6809.QDB.604	Lembaga yang melakukan transfer teknologi atau pengembangan teknologi baru untuk memproduksi vaksin	4	8	Lembaga	6.369.954	05	01	11	05
024.DG.6809.QDB.605	Lembaga yang melakukan transfer teknologi atau pengembangan teknologi baru untuk memproduksi produk biologi	5	9	Lembaga	4.934.853	05	01	11	05
024.DG.6809.QDB.606	Lembaga yang didampingi dalam pelaksanaan uji klinis obat, vaksin, alkes di Indonesia	48	48	Lembaga	9.027.581	05	01	11	05
024.DG.6809.QDB.607	Lembaga yang didampingi dalam pelaksanaan uji klinis TB	1	2	Lembaga	599.999.998	04	13	01	01
024.DG.6809.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				23.195.891	-			
024.DG.6809.QDI.523	Industri farmasi yang memenuhi syarat melakukan pengembangan atau produksi menggunakan bahan baku dalam negeri	42	125	Industri	23.195.891	05	01	11	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 376 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan				396.190.114				
024.DG.6812.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan				503.765				
024.DG.6812.PBG.001	Penyusunan Kebijakan Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	503.765	04	15	03	02
024.DG.6812.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				395.686.349				
024.DG.6812.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Puskesmas	2228	2369	Orang	205.629.012	04	15	03	02
024.DG.6812.QAA.001.0000	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Puskesmas - Pusat	2228	2369	Orang	205.629.012	06	07	04	01
024.DG.6812.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Puskesmas di wilayah Papua	61	65	Orang	17.585.162	04	15	03	02
024.DG.6812.QAA.002.0000	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Puskesmas di wilayah Papua - Pusat	61	65	Orang	17.585.162	06	07	04	01
024.DG.6812.QAA.003	Pendayagunaan Dokter Spesialis	670	670	Orang	42.592.902	04	15	03	02
024.DG.6812.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua	20	20	Orang	3.158.583	04	15	03	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DG.6812.QAA.005	Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri	55	55	Orang	126.720.690	02	09	05	02
024.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				1.492.112.086				
024.DL.6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan				320.727.401				
024.DL.6822.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				320.727.401				
024.DL.6822.SCM.100	Pelatihan Surveilans Epidemiology	630	540	Orang	24.167.046	06	07	07	05
024.DL.6822.SCM.101	Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	2325	2325	Orang	79.047.838	06	07	07	05
024.DL.6822.SCM.102	Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional	2649	2649	Orang	88.853.225	06	07	07	05
024.DL.6822.SCM.103	Pelatihan Stunting	820	820	Orang	32.984.529	06	07	07	05
024.DL.6822.SCM.104	Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan	7896	7896	Orang	23.719.772	06	07	07	05
024.DL.6822.SCM.105	Peningkatan Kompetensi Dokter Spesialis Melalui Program Fellowship	100	100	Orang	71.954.991	04	15	03	03
024.DL.6822.SCM.106	Pelatihan Terkait Layanan Primer dan Rujukan	0	0	Orang	0	06	07	07	05
024.DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan				1.171.384.685				
024.DL.6823.QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi				1.171.384.685				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 378 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DL.6823.QEJ.002	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Wilayah Papua	83	90	Orang	73.570.295	04	15	03	01
024.DL.6823.QEJ.013	Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) dengan Wajib Penempatan	185	900	Orang	1.097.814.390	04	15	03	01
024.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				60.283.201.915				
024.DO.2058	Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan				418.232.281				
024.DO.2058.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				122.147.942				
024.DO.2058.QAH.001	Layanan Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Potensi KLB/Wabah (HS-29)	257	411	layanan	16.191.142	08	03	04	05
						04	14	01	01
024.DO.2058.QAH.002	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	4864	10176	layanan	4.867.110	04	14	01	03
024.DO.2058.QAH.003	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN	974	2304	layanan	749.760	04	14	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 379 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.2058.QAH.004	Layanan Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emerging (HS-29)	14	29	layanan	15.232.567	04	14	01	01
024.DO.2058.QAH.007	Layanan Surveilans Berbasis Laboratorium (HS-29)	26	26	layanan	14.859.370	04	14	01	01
024.DO.2058.QAH.013	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah (HS-29)	135	235	layanan	36.506.075	04	14	01	01
024.DO.2058.QAH.014	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (HS-29)	334	436	layanan	25.625.213	04	14	01	01
						08	03	04	05
						02	16	02	04
024.DO.2058.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	822	1065	layanan	8.116.705	04	14	01	03
						08	03	04	05
024.DO.2058.QMA	Data dan Informasi Publik				19.343.295				
024.DO.2058.QMA.001	Data dan Informasi Kesiapsiagaan dan Respon Penyakit Berpotensi KLB/Wabah	3	3	layanan	19.343.295	04	14	01	01
024.DO.2058.RAB	Sarana Bidang Kesehatan				226.852.334				



- 380 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.2058.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	37295	204	Paket	2.567.985	04	14	01	03
024.DO.2058.RAB.002	Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah	2	2	Paket	2.500.000	04	14	01	01
024.DO.2058.RAB.003	Alat dan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	6	6	Paket	151.555.938	04	14	01	03
024.DO.2058.RAB.004	Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (HS-29)	2	2	Paket	1.047.243	04	14	01	01
024.DO.2058.RAB.007	Alat dan Bahan Kesehatan Pengendalian Vektor (HS-29)	10	10	Paket	38.773.767	04	14	01	01
						02	16	02	04
024.DO.2058.RAB.008	Alat dan Bahan Kesehatan Surveilans Berbasis Laboratorium (HS-29)	2	2	Paket	30.407.401	04	14	01	01
024.DO.2058.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				29.573.418				
024.DO.2058.SCM.003	Tenaga Terlatih Bidang Kekarantinaan Kesehatan	60	60	Orang	17.454.231	04	14	01	03
024.DO.2058.SCM.004	Tenaga Terlatih Bidang Surveilans (HS-29)	30	30	Orang	1.844.287	04	14	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 381 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.2058.SCM.005	Tenaga Terlatih Bidang Infeksi Emerging (HS-29)	418	480	Orang	6.271.383	04	14	01	01
024.DO.2058.SCM.010	Tenaga Terlatih Bidang Surveilans Berbasis Laboratorium (HS-29)	60	210	Orang	3.336.049	04	14	01	01
024.DO.2058.SCM.011	Tenaga Terlatih Pengendalian Vektor/Entomolog Kesehatan (HS-29)	12	12	Orang	667.468	04	14	01	01
						02	16	02	04
024.DO.2058.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				20.315.292				
024.DO.2058.UBA.001	Daerah Mendapat Monitoring dan Supervisi Surveilans Kewaspadaan Dini dan Respon KLB/Wabah (HS-29)	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.669.385	04	14	01	01
024.DO.2058.UBA.003	Daerah Mendapat Monitoring dan Supervisi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (HS-29)	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.746.126	04	14	01	01
024.DO.2058.UBA.004	Daerah Mendapat Monitoring dan Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (HS-29)	58	58	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.255.815	04	14	01	01
024.DO.2058.UBA.010	Daerah Mendapat Monitoring dan Supervisi Surveilans Berbasis Laboratorium (HS-29)	20	20	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.739.273	04	14	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 382 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.2058.UBA.011	Daerah Mendapat Monitoring dan Supervisi Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (HS-29)	30	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.904.693	04	14	01	01
024.DO.2061	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular				2.728.281.585				
024.DO.2061.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				9.353.700				
024.DO.2061.PFA.U02	NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Kategori II)	16	16	NSPK	9.353.700	04	13	05	02
024.DO.2061.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				2.517.726.746				
024.DO.2061.QAA.001	Orang yang mendapatkan Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok	150000	150000	Orang	25.630.910	04	13	05	02
024.DO.2061.QAA.002	Orang yang Mendapatkan Deteksi Dini FR Diabetes Melitus	36275610	60459350	Orang	19.179.158	04	13	04	01
024.DO.2061.QAA.004	Orang yang mendapatkan Deteksi Dini Kanker dan kelainan Darah	10000	10000	Orang	372.125.441	04	13	04	01
024.DO.2061.QAA.024	Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher Rahim dengan HPV DNA	2040000	6000000	Orang	2.100.791.237	04	11	04	01
024.DO.2061.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				12.805.567				
024.DO.2061.QAH.002	Deteksi Dini Faktor Risiko Diabetes Melitus	10	10	layanan	6.620.581	04	13	04	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 383 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.2061.QAH.003	Layanan Deteksi Dini Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	4	4	layanan	6.184.986	04	13	04	01
024.DO.2061.QMA	Data dan Informasi Publik				8.762.300				
024.DO.2061.QMA.001	Penyediaan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Penyelenggaraan Layanan Upaya Berhenti Merokok (LP-10)	1	3	layanan	4.814.300	04	13	05	02
024.DO.2061.QMA.006	Penyediaan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Kawasan Tanpa Rokok (LP-10)	1	2	layanan	3.750.000	04	13	05	02
024.DO.2061.QMA.012	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pengendalian Pembatasan Konsumsi Gula Garam Lemak (LP-10)	1	1	layanan	198.000	04	13	05	04
024.DO.2061.RAB	Sarana Bidang Kesehatan				89.517.763				
024.DO.2061.RAB.002	Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik (LP-10)	150	200	Paket	29.164.898	04	13	04	01
024.DO.2061.RAB.004	Alat dan Bahan Kesehatan Tindak Lanjut Lesi Prakanker Leher Rahim (LP-10)	2000	500	Paket	60.352.865	04	13	04	01
024.DO.2061.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				61.370.040				
024.DO.2061.SCM.001	Pelatihan Konseling Upaya Berhenti Merokok	30	240	Orang	18.375.215	04	13	05	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 384 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.2061.SCM.002	Pelatihan Edukator Diabetes Nasional Tingkat Dasar Bagi Tenaga Kesehatan	420	420	Orang	2.310.219	04	13	04	01
024.DO.2061.SCM.004	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kanker dan Kelainan Darah (LP-10)	500	500	Orang	18.255.478	04	13	04	01
024.DO.2061.SCM.006	Pelatihan Penerapan dan Penegakan KTR (LP-10)	50	350	Orang	11.321.090	04	13	05	02
024.DO.2061.SCM.011	Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM (LP-10)	600	1350	Orang	7.994.166	04	13	04	01
024.DO.2061.SCM.012	Tenaga Kesehatan Terlatih Pengendalian Konsumsi Gula Garam Lemak	200	300	Orang	3.113.872	04	13	05	04
024.DO.2061.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				28.745.470				
024.DO.2061.UBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Layanan Upaya Berhenti Merokok (LP)	18	76	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.790.000	04	13	05	02
024.DO.2061.UBA.002	Daerah yang mendapatkan Fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik	52	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.212.800	04	13	04	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 385 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.2061.UBA.004	Monev Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah (LP-10)	54	54	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.195.750	04	13	04	01
024.DO.2061.UBA.006	Pembinaan Penerapan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di 7 Tatanan (LP-10)	83	88	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.680.860	04	13	05	02
024.DO.2061.UBA.011	Daerah yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Terpadu PTM (LP-10)	15	26	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.076.440	04	13	04	01
024.DO.2061.UBA.012	Daerah yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Pembatasan Konsumsi Gula Garam Lemak (GGL) (LP-10)	2	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	789.620	04	13	05	04
024.DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah				12.364.116				
024.DO.4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				12.364.116				
024.DO.4249.QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS-29)	3822	3822	layanan	12.364.116	08	03	04	01
024.DO.6816	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji				275.924.286				
024.DO.6816.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				275.924.286				
024.DO.6816.QAH.001	Penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Haji (HS-29)	1	1	layanan	275.924.286	08	01	06	02



- 386 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6817	Pengelolaan Krisis Kesehatan				33.913.197				
024.DO.6817.QHC	Operasi Bidang Penanggulangan Bencana				21.272.968				
024.DO.6817.QHC.001	Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan (HS)	36	36	operasi	21.272.968	04	14	01	01
024.DO.6817.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				12.640.229				
024.DO.6817.SCM.001	Pelatihan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	76	192	Orang	4.421.025	04	14	01	01
						08	03	05	02
024.DO.6817.SCM.002	Kesiapsiagaan dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan	206	206	Orang	8.219.204	08	03	05	02
						04	14	01	01
024.DO.6818	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular				47.518.922.714				
024.DO.6818.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				257.741				
024.DO.6818.PFA.061	NSPK Percepatan Target Eliminasi TBC (LP-6)	1	1	NSPK	257.741	04	13	01	01
024.DO.6818.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				23.535.259.560				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 387 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6818.QAA.051	Orang yang mendapatkan layanan skrining HIV AIDS dan IMS (LP-8)	2	2	Orang	1.850	04	13	03	01
024.DO.6818.QAA.052	Orang dengan HIV AIDS (ODHIV) yang mendapatkan layanan dukungan HIV AIDS	70	90	Orang	200	04	13	03	01
024.DO.6818.QAA.053	Orang dengan HIV AIDS yang mendapatkan layanan pengobatan HIV AIDS dan PIMS	67	95	Orang	100	04	13	03	01
024.DO.6818.QAA.061	Masyarakat mendapatkan layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC(LP-6)	105	105	Orang	10.412.686.810	04	13	01	01
024.DO.6818.QAA.062	Masyarakat yang mendapatkan layanan skrining TBC di fasyankes (LP-6) [Orang]	384754	384754	Orang	1.185.520.812	04	13	01	02
024.DO.6818.QAA.063	Masyarakat yang mendapatkan layanan skrining mobile TBC (LP-6)	10900000	7063200	Orang	6.085.323.570	04	13	01	01
024.DO.6818.QAA.064	Masyarakat yang mendapatkan layanan pengobatan TBC (LP-6)	85	95	Orang	5.851.726.218	04	13	01	03
024.DO.6818.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				1.336.467.238				
024.DO.6818.QAH.003	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	500	514	layanan	56.441	04	13	03	02
024.DO.6818.QAH.011	Layanan Intensifikasi Penemuan Kasus dalam Rangka Eliminasi Malaria (LP-9)	390	514	layanan	5.322.254	04	13	03	02
						08	03	04	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 388 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6818.QAH.012	Layanan Surveilans Penemuan Kasus dalam Percepatan Eliminasi Malaria di Papua (LP-9)	42	42	layanan	1.168.000	08	03	04	02
						04	13	03	02
024.DO.6818.QAH.013	Layanan Mitigasi Penemuan Kasus dalam Upaya Percepatan Eliminasi Malaria di IKN	2	10	layanan	978.758	04	13	03	02
						06	05	02	05
024.DO.6818.QAH.014	Layanan Surveilans dan Penapisan Malaria pada Populasi Khusus	2	38	layanan	740.840	08	03	04	02
						04	13	03	02
024.DO.6818.QAH.019	Layanan Surveilans penemuan kasus kusta	1	1	layanan	25.480.872	04	13	02	01
024.DO.6818.QAH.021	Layanan Intensifikasi Pencegahan dan Pengendalian Dengue dan Arbovirosis lainnya (LP-26)	113	113	layanan	38.758.053	08	03	04	01
024.DO.6818.QAH.032	Layanan Surveilans dan Deteksi Dini Pencegahan Schistosomiasis	23	23	layanan	2.893.206	04	13	02	02
024.DO.6818.QAH.041	Layanan Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis (LP-26)	30	50	layanan	19.538.920	02	16	02	04
						04	14	01	04
024.DO.6818.QAH.042	Layanan Penilaian Rabies Center	26	26	layanan	6.082.800	04	14	01	04
024.DO.6818.QAH.061	Layanan Penemuan Aktif TBC (LP-6)	514	514	layanan	1.200.276.443	04	13	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 389 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6818.QAH.072	Layanan Respon Peningkatan Kasus Penyakit Diare dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan Lainnya (LP-26)	36	36	layanan	2.621.915	08	03	04	04
024.DO.6818.QAH.081	Layanan Intensifikasi Penemuan Kasus dan Deteksi Dini Pneumonia (LP-26)	50	50	layanan	24.938.836	08	03	04	03
024.DO.6818.QAH.082	Layanan Surveilans Pencegahan dan Pengendalian ISPA (LP-26)	15	30	layanan	7.609.900	08	03	04	03
024.DO.6818.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit				14.000.000				
024.DO.6818.QJC.001	Riset vaksin TBC yang dihasilkan	1	2	Sampel	14.000.000	04	13	01	01
024.DO.6818.QMA	Data dan Informasi Publik				168.104.007				
024.DO.6818.QMA.011	Data dan Informasi Malaria	2	2	dokumen	122.760	04	13	03	02
						08	03	05	01
024.DO.6818.QMA.013	Penyediaan informasi pelaksanaan deteksi dini , penemuan dan pengobatan	18	18	publikasi	130.639.940	04	13	01	01
024.DO.6818.QMA.021	Data dan Informasi Dengue dan Arbovirosis Lainnya (LP-26)	1	1	dokumen	2.239.920	08	03	05	01
024.DO.6818.QMA.033	Data dan Informasi Kusta dan Frambusia (LP-26)	2	2	dokumen	358.790	04	13	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 390 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6818.QMA.041	Data dan Informasi Program Zoonosis	1	1	dokumen	3.598.007	02	16	02	04
						04	14	01	04
024.DO.6818.QMA.051	Data dan Informasi HIV AIDS dan PIMS (LP-8)	10	6	dokumen	13.368.632	04	13	03	01
024.DO.6818.QMA.061	Data dan Informasi TBC (LP-6)	2	1	dokumen	13.063.994	04	13	01	01
024.DO.6818.QMA.072	Data dan Informasi Diare (LP-26)	3	3	dokumen	2.274.964	08	03	05	01
024.DO.6818.QMA.081	Data dan Informasi ISPA (LP-26)	2	2	dokumen	2.437.000	08	03	05	01
024.DO.6818.RAB	Sarana Bidang Kesehatan				22.301.258.236				
024.DO.6818.RAB.011	Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Malaria (LP-9)	6	6	Paket	21.666.340	08	03	04	02
						04	13	03	02
024.DO.6818.RAB.021	Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian DBD dan Arbovirosis lainnya (LP-26)	5	5	Paket	82.142.700	08	03	04	01
024.DO.6818.RAB.033	Alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian Kusta dan Frambusia (LP-26)	2	2	Paket	11.844.600	04	13	02	01
024.DO.6818.RAB.041	Bahan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis	1	1	Paket	4.640.000	04	14	01	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 391 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6818.RAB.051	Bahan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS (LP-8)	13	23	Paket	19.410.000	04	13	03	01
024.DO.6818.RAB.061	Alat Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6)	2	2	Paket	4.000	04	13	01	01
024.DO.6818.RAB.062	Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6)	16	16	Paket	22.151.402.596	04	13	01	01
024.DO.6818.RAB.081	Alat dan Bahan Kesehatan untuk Deteksi Dini dan Pencegahan Pneumonia (LP-26)	2	2	Paket	10.148.000	08	03	04	03
024.DO.6818.RCB	OP Sarana Bidang Kesehatan				520.030				
024.DO.6818.RCB.011	Pemeliharaan Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL) (LP-9)	1	1	Paket	520.030	04	13	03	02
024.DO.6818.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				128.051.471				
024.DO.6818.SCM.011	Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian Malaria	40	50	Orang	5.590	04 08	13 03	03 05	02 02
024.DO.6818.SCM.021	Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian Dengue dan Arbovirus Lainnya (LP-26)	230	230	Orang	9.076.000	08 08	03 03	05 05	04 02
024.DO.6818.SCM.033	Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia (LP-26)	30	30	Orang	3.346.721	04	13	02	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 392 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6818.SCM.051	Pelatihan pencegahan dan pengendalian HIV	55	75	Orang	800	04	13	03	01
024.DO.6818.SCM.061	Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6)	1400	1400	Orang	112.870.884	04	13	01	02
024.DO.6818.SCM.081	Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian ISPA (LP-26)	38	114	Orang	2.751.476	08	03	05	02
024.DO.6818.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1.034.600				
024.DO.6818.UAE.001	Pelaporan kasus TBC oleh fasyankes swasta	80	98	Laporan	520	04	13	01	02
024.DO.6818.UAE.042	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Rabies Center	3	3	Laporan	1.034.080	04	14	01	04
024.DO.6818.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				33.969.831				
024.DO.6818.UBA.011	Daerah mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Malaria (LP-9)	390	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.108.580	08 04	03 13	05 03	04 02
024.DO.6818.UBA.021	Daerah mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Program Dengue dan Arbovirosis Lainnya (LP-26)	10	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.354.940	08	03	05	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 393 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6818.UBA.032	Daerah mendapat Pembinaan Program Schistosomiasis (LP-26)	2	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	332.892	04	13	02	02
024.DO.6818.UBA.033	Daerah mendapat Pembinaan Program Kusta dan Frambusia di Daerah (LP-26)	20	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.540.100	04	13	02	01
024.DO.6818.UBA.041	Daerah mendapat Pendampingan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Rabies	9	9	Daerah (Prov/Kab/Kota)	511.000	04	14	01	04
024.DO.6818.UBA.051	Daerah Mendapat Pembinaan Program HIV AIDS dan PIMS di Daerah (LP-8)	80	98	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.298.000	04	13	03	01
024.DO.6818.UBA.061	Daerah Mendapat Pembinaan Program P2 TBC di Daerah (LP-6)	117	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)	26.312.569	04	13	01	01
024.DO.6818.UBA.081	Daerah Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Program Infeksi Saluran Pernapasan Akut (LP-26)	5	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	511.750	08	03	05	04
024.DO.6820	Pengelolaan Imunisasi				83.848.184				
024.DO.6820.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				83.848.184				
024.DO.6820.QAH.001	Layanan Imunisasi dan Surveilans PD3I (LP-5)	59	59	layanan	61.836.098	04	13	04	01
024.DO.6820.QAH.002	Layanan Imunisasi Lengkap Bayi dan Baduta	8	8	layanan	22.012.086	04	11	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 394 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6821	Penyehatan Lingkungan				402.690.870				
024.DO.6821.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				139.990.520				
024.DO.6821.QAH.005	Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Lingkungan	38	38	layanan	87.900.520	04	13	06	01
						04	13	06	02
024.DO.6821.QAH.008	Pemicuan Desa/kelurahan 5 Pilar STBM	11000	41500	layanan	0	02	18	01	06
024.DO.6821.QAH.009	Implementasi Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	30	200	layanan	52.090.000	02	12	08	001
						04	13	06	02
024.DO.6821.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat				179.600.000				
024.DO.6821.QEH.001	Kelompok Masyarakat Mendapat Bantuan Implementasi dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan (HS-29)	196	400	Kelompok Masyarakat	179.600.000	04	13	06	04
						04	14	03	01
						02	12	08	001
024.DO.6821.QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				12.838.700				
024.DO.6821.QKA.001	Jumlah laporan Pemantauan Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan	38	38	laporan	12.838.700	04	13	06	04



- 395 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6821.QMA	Data dan Informasi Publik				50.000				
024.DO.6821.QMA.001	Media KIE Implementasi 5 Pilar STBM (HS-29)	1	1	dokumen	0	02 08	18 03	01 05	06 01
024.DO.6821.QMA.008	Media KIE Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Lingkungan (HS-29)	5	5	dokumen	0	08	03	05	01
024.DO.6821.QMA.010	Kampanye Nasional dan Daerah Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Aman	1	1	publikasi	50.000	02	12	08	001
024.DO.6821.RAB	Sarana Bidang Kesehatan				3.450.195				
024.DO.6821.RAB.002	Paket Sarana Kesehatan Lingkungan (HS-29)	3	2	Paket	3.450.195	04	13	06	01
024.DO.6821.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				2.244.154				
024.DO.6821.SCM.001	Tenaga Terlatih Pengawasan Kualitas Air Minum	30	500	Orang	665.195	04 02	13 12	06 05	01 03
024.DO.6821.SCM.002	Tenaga Terlatih Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (HS-29)	500	500	Orang	172.574	04	13	06	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 396 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6821.SCM.003	Tenaga Terlatih Implementasi Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (HS-29)	30	30	Orang	1.122.140	04	13	06	01
024.DO.6821.SCM.004	Tenaga Terlatih Implementasi TPP Memenuhi Syarat (HS-29)	500	500	Orang	137.025	04	14	03	01
024.DO.6821.SCM.005	Tenaga Terlatih Implementasi TFU Memenuhi Syarat (HS-29)	500	500	Orang	147.220	04	13	06	01
024.DO.6821.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				64.517.301				
024.DO.6821.UBA.001	Daerah Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Implementasi 5 Pilar STBM	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	21.257.813	02	12	08	001
						02	18	01	06
						04	11	02	02
						04	13	06	01
						08	03	05	04
024.DO.6821.UBA.002	Daerah Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Implementasi Kualitas Air Minum	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.579.545	02	12	05	03
						02	12	04	03
						04	13	06	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 397 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DO.6821.UBA.003	Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi Kabupaten Kota Sehat (HS-29)	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.607.935	04	13	06	01
024.DO.6821.UBA.004	Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (HS-29)	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.010.020	04	13	06	01
024.DO.6821.UBA.005	Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan terkait Pengawasan TPP (HS-29)	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.336.050	04	14	03	01
024.DO.6821.UBA.006	Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Capaian Target Pengawasan TFU (HS-29)	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.536.427	04	13	06	01
024.DO.6821.UBA.007	Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Penyehatan Kualitas Udara Dalam Ruang	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	801.020	04	13	06	01
024.DO.6821.UBA.008	Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan dan Kebencanaan Lingkungan (HS-29)	38	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	12.372.491	08	03	05	04
024.DO.6821.UBA.017		20	20	Kab/Kota	16.000	02	12	06	004



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 398 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pendampingan Studi EHRA dan Inspeksi Kualitas Sanitasi					02	12	07	001
024.DO.6993	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat				8.809.024.682				
024.DO.6993.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				8.778.338.050				
024.DO.6993.QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Labkesmas (InPULS)	184	0	Lembaga	15.427.015	04	14	01	02
024.DO.6993.QDB.003	Pemenuhan labkesmas dengan SPA sesuai standar	20	100	Lembaga	8.762.911.035	04	14	01	02
024.DO.6993.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				30.686.632				
024.DO.6993.SCM.001	Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Manajemen dan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP-2)	1070	661	Orang	30.686.632	04	14	01	02
024.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan				124.871.999				
024.DS.6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan				81.953.109				
024.DS.6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan				81.953.109				
024.DS.6833.PBG.004	Survei Konsumsi Makanan Individu (LP-4)	1	0	Kajian	75.280.002	04	13	05	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 399 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.DS.6833.PBG.015	rekomendasi kebijakan hasil pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis	1	1	Rekomendasi Kebijakan	6.673.107	04	11	04	02
024.DS.6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan				42.918.890				
024.DS.6835.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan				42.918.890				
024.DS.6835.PBG.001	Rekomendasi kebijakan pendanaan kesehatan	1	2	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	04	15	04	03
024.DS.6835.PBG.002	Skema pendanaan kesehatan inovatif yang dikembangkan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000	04	15	04	03
024.DS.6835.PBG.012	Rekomendasi Kebijakan Penataan Ulang Manfaat dalam Program JKN	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000	04	15	04	02
024.DS.6835.PBG.014	Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assesment	6	9	Rekomendasi Kebijakan	24.918.890	04	15	04	02
024.WA	Program Dukungan Manajemen				2.579.802.996				
024.WA.2036	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan				588.807.466				
024.WA.2036.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				588.807.466				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 400 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.WA.2036.UBA.003	Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Dinkes Prov/Kab/Kota	24	100	Daerah (Prov/Kab/Kota)	245.544.768	04	15	05	01
024.WA.2036.UBA.004	Peningkatan kapasitas tim perencanaan Dinkes di daerah	50	210	Daerah (Prov/Kab/Kota)	196.762.698	04	15	05	01
024.WA.2036.UBA.008	Pembinaan Kab/Kota untuk memenuhi nilai standar minimal dalam kualitas data di profil Kesehatan daerah	100	500	Kab/Kota	146.500.000	04	15	05	02
024.WA.2038	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1.930.973.710				
024.WA.2038.QMA	Data dan Informasi Publik				24.724.700				
024.WA.2038.QMA.003	Penguatan sistem integrasi pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian dalam mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)	20	32	Lokasi	24.724.700	04	15	05	02
024.WA.2038.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				1.906.249.010				
024.WA.2038.UAB.003	Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan	6	6	Sistem Informasi	1.327.778.913	04	15	05	02
024.WA.2038.UAB.004	Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan	5	5	Sistem Informasi	8.459.511	04	15	05	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 401 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.WA.2038.UAB.005	Sistem data rutin yang terintegrasi untuk semua sasaran pemeriksaan kesehatan gratis	1	1	Sistem Informasi	8.341.384	04	11	04	02
024.WA.2038.UAB.007	Transformasi Digital (TK)	1	1	Sistem Informasi	561.669.202	04	15	05	02
024.WA.2052	Peningkatan Pengawasan Internal atas Penerapan Tata Kelola - Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal				15.000.000				
024.WA.2052.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				5.000.000				
024.WA.2052.UAE.001	Reviu atas pengelolaan penyaluran dana bantuan iuran peserta JKN	1	1	Laporan	5.000.000	04	15	04	02
024.WA.2052.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				10.000.000				
024.WA.2052.UBA.001	Tim pencegahan kecurangan kab/kota sesuai standar	514	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.000.000	04	15	04	02
024.WA.4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat				9.004.364				
024.WA.4812.QMA	Data dan Informasi Publik				9.004.364				
024.WA.4812.QMA.001	Peningkatan kualitas data rutin yang dikumpulkan dan dikelola di lingkup unit	1	1	dokumen	9.004.364	04	15	05	02



- 402 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	kerja yang tugas dan fungsinya di bidang Kesehatan Masyarakat								
024.WA.4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan				9.004.364				
024.WA.4813.QMA	Data dan Informasi Publik				9.004.364				
024.WA.4813.QMA.001	Peningkatan kualitas data rutin yang dikumpulkan dan dikelola di lingkup unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan	1	1	dokumen	9.004.364	04	15	05	02
024.WA.4814	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan				9.004.364				
024.WA.4814.QMA	Data dan Informasi Publik				9.004.364				
024.WA.4814.QMA.001	Peningkatan kualitas data rutin yang dikumpulkan dan dikelola di lingkup unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan	1	1	dokumen	9.004.364	04	15	05	02
024.WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				9.004.364				
024.WA.4815.QMA	Data dan Informasi Publik				9.004.364				



- 403 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
024.WA.4815.QMA.001	Peningkatan kualitas data rutin yang dikumpulkan dan dikelola di lingkup unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	1	dokumen	9.004.364	04	15	05	02
024.WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan				9.004.364				
024.WA.6798.QMA	Data dan Informasi Publik				9.004.364				
024.WA.6798.QMA.001	Peningkatan kualitas data rutin yang dikumpulkan dan dikelola di lingkup unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang Ketersediaan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan	1	1	dokumen	9.004.364	04	15	05	02
TOTAL					434.255.295.559				

Keterangan:
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 404 -

KEMENTERIAN AGAMA

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 04.03 - Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	persen	56,00	65,00	100,00
PP 04.03 - Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	persen	- (indikator baru)	10,00	30,00
PP 08.01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		76,47	76,77	78,25
PP 08.01 - Indeks Layanan Keagamaan		86,51	87,11	88,62
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 04.01.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	42,09	46,08	62,04
KP 04.01.03 - Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha	persen	68,63	70,48	77,85
KP 04.01.04 - Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	anak	261.197	261.297	261.697



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 405 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.02.01 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	30,50	32,24	39,18
KP 04.02.02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	persen	10,08	20,05	59,93
KP 04.02.03 - Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	(a) 58,07; (b) 50,91 (2023)	(a) 59,30; (b) 52,55	(a) 60,15; (b) 54,21
KP 04.02.05 - Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	persen	41,96	54,93	98,84
KP 04.02.05 - Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan	persen	54,67	62,08	90,40
KP 04.02.06 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	50,21	53,52	60,33
KP 04.03.01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	persen	- (indikator baru)	30,00	70,00
KP 04.03.02 - Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi	persen	32	55	75
KP 04.03.03 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	persen	- (indikator baru)	10,00	30,00



- 406 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.04.01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan	persen	38,91 (2023)	51,17	98,00
KP 04.04.02 - Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik	persen	80,00	80,85	84,22
KP 04.05.01 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	41,79	42,50	55,90
KP 04.05.03 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP	persen	30,48	33,81	51,71
KP 08.01.01 - Nilai Layanan Penyuluhan Agama		84,52	84,63	85,07
KP 08.01.01 - Nilai Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (Agama dan Etnis)		61,78 (2021)	64,39	74,81
KP 08.01.01 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	persen	27	35	85
KP 08.01.01 - Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga	persen	0,5 (2022)	0,7	1,1
KP 08.01.02 - Persentase rekomendasi <i>early warning system</i> (keagamaan) yang ditindaklanjuti	persen	10	25	85
KP 08.01.02 - Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	persen	24	30	50
KP 08.01.03 - Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	persen	40	43	55
KP 08.01.04 - Persentase sarana prasarana peribadatan yang memenuhi standar	persen	66,69	67,35	70,00
KP 08.01.05 - Indeks Kepuasan Layanan KUA		85,53	85,64	86,07



- 407 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 08.01.06 - Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): (a) Layanan haji dalam negeri; (b) Layanan haji luar negeri		(a) 90,45 (2022); (b) 88,20	(a) 91,00; (b) 88,25	(a)92,00; (b) 90,25
KP 08.01.06 - Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): (a) Lembaga penyelenggara haji khusus; (b) Lembaga penyelenggara umrah	persen	(a) 82; (b) 96	(a) 82,05; (b) 96,01	(a) 82,25; (b) 96,03
KP 08.01.08 - Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan	persen	1	2	6
KP 08.01.08 - Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional	persen	78	81	95



- 408 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama				27.979.106.971				
025.DC.2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah				10.789.285.319				
025.DC.2104.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				3.390.092.464				
025.DC.2104.QAA.002	Layanan Nikah dan Rujuk	0	0	Orang	3.390.092.464	08	01	05	02
025.DC.2104.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				104.080.803				
025.DC.2104.QDC.001	Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya	0	0	Orang	104.080.803	08	01	05	02
025.DC.2104.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga				2.109.650.770				
025.DC.2104.QDE.001	Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan	1700000	3978000	Keluarga	574.041.036	04	11	01	02
						04	16	01	01
						04	19	01	01
						08	01	01	03
025.DC.2104.QDE.002	Bimbingan Keluarga Sakinah - Maslahat	2500	2500	Keluarga	1.535.609.734	04	16	02	02
						08	01	01	02



- 409 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2104.UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan				5.185.461.282				
025.DC.2104.UAI.001	KUA yang direvitalisasi	1000	1400	Lembaga	780.500.000	08	01	05	02
025.DC.2104.UAI.002	KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	1918	486	Lembaga	2.564.800.000	08	01	05	01
025.DC.2104.UAI.003	KUA yang Dibangun (SBSN)	160	170	Lembaga	1.528.620.000	08	01	05	01
025.DC.2104.UAI.004	KUA Rusak Sedang dan Berat Direhabilitasi	0	0	Lembaga	259.500.880	08	01	05	01
025.DC.2104.UAI.005	KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)	0	0	Lembaga	52.040.402	08	01	02	01
025.DC.2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf				727.492.353				
025.DC.2122.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				244.961.221				
025.DC.2122.QDB.001	Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Progam Pengentasan Kemiskinan	9193	9193	Lembaga	244.961.221	08	01	08	01
025.DC.2122.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				124.896.964				
025.DC.2122.QDD.001	Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF	2298	2298	Kelompok Masyarakat	124.896.964	08	01	08	01



- 410 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2122.QEA	Bantuan Masyarakat				130.621.408				
025.DC.2122.QEA.001	Mustahiq yang diselaraskan dengan Data Kemiskinan Regsosek	25000000	25000000	Orang	130.621.408	08 06	01 01	08 02	01 01
025.DC.2122.QEI	Bantuan Lembaga				129.580.600				
025.DC.2122.QEI.001	Bantuan Operasional BWI	180	180	Lembaga	111.366.459	08	01	08	02
025.DC.2122.QEI.004	Bantuan Operasional BAZNAS	110	110	Lembaga	18.214.141	08	01	08	02
025.DC.2122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				97.432.160				
025.DC.2122.QIC.001	Lembaga Amil Zakat yang Diaudit Syariah dan Keuangannya	739	1000	Lembaga	97.432.160	08 02	01 13	08 05	02 02
025.DC.2122.QIC.002	Lembaga Zakat Yang Terakreditasi	0	0	Lembaga	0	08	01	08	02
025.DC.2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam				716.834.383				
025.DC.2123.PEG	Konferensi dan Event				357.762.304				
025.DC.2123.PEG.001	Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)	1826	1826	Kegiatan	357.762.304	04 08	09 01	01 02	02 03
025.DC.2123.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				260.920.308				



- 411 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2123.QDC.002	Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya	47691	47691	Orang	193.424.722	04	19	04	02
						08	01	01	01
025.DC.2123.QDC.003	Penyuluh Agama Islam Aktif dalam Konten Digital Inklusif Transformatif	11923	11923	Orang	67.495.586	08	01	01	01
025.DC.2123.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				76.483.778				
025.DC.2123.QDD.001	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam	4400	4400	Kelompok Masyarakat	76.483.778	08	01	02	02
025.DC.2123.QEI	Bantuan Lembaga				21.667.993				
025.DC.2123.QEI.001	Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapatkan Bantuan Pembinaan	104	104	Lembaga	21.667.993	08	01	03	01
025.DC.2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah				4.254.306.404				
025.DC.2124.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga				52.040.402				
025.DC.2124.QAB.001	Perpustakaan Masjid yang dibina	3684	3684	Lembaga	52.040.402	08	01	01	01
025.DC.2124.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				31.224.241				
025.DC.2124.QAH.001	Layanan Literasi Keagamaan Islam Digital	1194	1194	layanan	31.224.241	08	01	01	01



- 412 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2124.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				70.717.500				
025.DC.2124.QDD.001	Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam	83.800	83.800	Kelompok Masyarakat	70.717.500	08	01	02	01
025.DC.2124.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				42.639.680				
025.DC.2124.QEG.U01	Kitab Suci Agama Islam dan Sarana Peribadatan Agama Islam yang Disediakan	110.899	110.899	Unit	42.639.680	08	01	04	02
025.DC.2124.QEI	Bantuan Lembaga				3.899.481.760				
025.DC.2124.QEI.001	Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	5.293	11.662	Lembaga	3.899.481.760	08	01	04	01
025.DC.2124.QMB	Komunikasi Publik				150.917.165				
025.DC.2124.QMB.001	Layanan Syariah dan Hisab Rukyat	2.979	2.979	Layanan	150.917.165	08	01	04	01
025.DC.2124.UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan				7.285.656				
025.DC.2124.UAI.002	Pusat Literasi Keagamaan Islam Yang Dikembangkan	1	1	Lembaga	7.285.656	08	01	01	01
025.DC.2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus				33.536.547				
025.DC.2126.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				33.536.547				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 413 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2126.QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	2679	2679	Lembaga	24.005.456	08	01	06	03
025.DC.2126.QDB.002	Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang Terbina	437	437	Lembaga	9.531.091	08	01	06	03
025.DC.2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu				14.794.040				
025.DC.2130.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				13.305.720				
025.DC.2130.QDC.015	Penyuluh Agama Khonghucu yang ditingkatkan Kompetensinya dan Literasi Digitalnya	42	42	Orang	13.305.720	08	01	01	01
025.DC.2130.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				1.488.320				
025.DC.2130.QEG.001	Kitab Suci Agama Konghucu dan Sarana Peribadatan Agama Konghucu yang Disediakan	1000	1000	Paket	1.488.320	08	01	04	01
025.DC.2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen				1.262.223.610				
025.DC.2137.PEG	Konferensi dan Event				227.719.139				
025.DC.2137.PEG.001	Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (Pesparawi)	77	77	Kegiatan	227.719.139	04 08	09 01	01 02	02 03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 414 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2137.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				3.122.424				
025.DC.2137.QDB.002	Lembaga Amal Sosial Kristiani yang diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	31	31	Lembaga	3.122.424	08	01	08	01
025.DC.2137.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				79.312.026				
025.DC.2137.QDC.002	Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya	9889	9889	Orang	63.653.498	08	01	01	01
025.DC.2137.QDC.003	Penyuluh Agama Kristen yang aktif dalam Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif	2066	2066	Orang	15.658.528	08	01	01	01
025.DC.2137.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				40.229.145				
025.DC.2137.QDD.001	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Kristen	10069	18069	Kelompok Masyarakat	40.229.145	08	01	02	02
025.DC.2137.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga				92.794.411				
025.DC.2137.QDE.001	Bimbingan Keluarga Kristiani	11517	11517	Keluarga	79.065.828	04 08	16 01	02 01	02 02
025.DC.2137.QDE.002		1390	1390	Keluarga	13.728.583	04	11	01	02



- 415 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Calon Pengantin Kristen memperoleh Bimbingan Perkawinan					04	16	01	01
						04	19	01	01
						08	01	01	03
025.DC.2137.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				74.590.878				
025.DC.2137.QEG.001	Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan	43372	43372	Unit	74.590.878	08	01	04	02
025.DC.2137.QEI	Bantuan Lembaga				744.455.587				
025.DC.2137.QEI.001	Bantuan Lembaga Agama Kristen	185	185	Lembaga	114.879.187	08	01	03	01
025.DC.2137.QEI.002	Rumah Ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	782	2027	Lembaga	626.576.400	08	01	04	01
025.DC.2137.QEI.003	Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Amal Kristiani	31	31	Lembaga	3.000.000	08	01	08	02
025.DC.2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik				901.607.066				
025.DC.2140.PEG	Konferensi dan Event				273.900.000				
025.DC.2140.PEG.001	Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)	39	39	Kegiatan	273.900.000	04	09	01	02
						08	01	02	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 416 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2140.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				2.602.020				
025.DC.2140.QDB.001	Lembaga Pengelola Dana Amal Kasih Katolik diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	38	38	Lembaga	2.602.020	08	01	08	01
025.DC.2140.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				56.114.581				
025.DC.2140.QDC.002	Penyuluh Agama Katolik yang ditingkatkan kompetensinya	3488	4118	Orang	51.031.000	08	01	01	01
025.DC.2140.QDC.003	Penyuluh Agama Katolik yang aktif dalam Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif	1030	1030	Orang	5.083.581	08	01	01	01
025.DC.2140.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				43.045.852				
025.DC.2140.QDD.001	Kelompok Kategorial Katolik yang diberikan Fasilitasi dan Pembinaan	848	848	Kelompok Masyarakat	17.002.676	08	01	03	01
025.DC.2140.QDD.002	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan moderasi beragama Katolik	4977	4977	Kelompok Masyarakat	26.043.176	08	01	02	02
025.DC.2140.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga				112.742.681				
025.DC.2140.QDE.001	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	9792	9792	Keluarga	68.960.181	04 08	16 01	02 01	02 02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 417 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2140.QDE.002	Calon Pengantin Katolik memperoleh Bimbingan Perkawinan	3580	3580	Keluarga	43.782.500	04	11	01	02
						04	16	01	01
						04	19	01	01
						08	01	01	03
025.DC.2140.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				28.991.945				
025.DC.2140.QEG.002	Kitab suci dan sarana peribadatan Agama Katolik yang disediakan	20538	20538	Unit	28.991.945	08	01	04	02
025.DC.2140.QEI	Bantuan Lembaga				384.209.987				
025.DC.2140.QEI.009	Rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	112	164	Lembaga	363.862.108	08	01	04	01
025.DC.2140.QEI.010	Bantuan Operasional Lembaga Agama Katolik (KWI)	51	51	Lembaga	10.147.879	08	01	03	01
025.DC.2140.QEI.011	Bantuan Operasional Pembinaan BAKKAT	11	30	Lembaga	10.200.000	08	01	08	02
025.DC.2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu				821.365.067				
025.DC.2143.PEG	Konferensi dan Event				174.295.000				
025.DC.2143.PEG.001		22	22	Kegiatan	174.295.000	04	09	01	02



- 418 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Event seni budaya Keagamaan Hindu (Utsawa Dharma Gita)					08	01	02	03
025.DC.2143.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				101.103.186				
025.DC.2143.QDB.001	Lembaga Sosial Keagamaan Hindu Yang Dibina	622	622	Lembaga	94.890.056	08	01	03	01
025.DC.2143.QDB.002	Lembaga Dana Punia dibina dan diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	39	60	Lembaga	6.213.130	08	01	08	01
025.DC.2143.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				27.621.168				
025.DC.2143.QDC.002	Penyuluh Agama Hindu yang ditingkatkan kompetensinya	1259	1730	Orang	20.643.953	08	01	01	01
025.DC.2143.QDC.003	Penyuluh Agama Hindu yang aktif dalam Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif	433	433	Orang	6.977.215	08	01	01	01
025.DC.2143.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				40.293.821				
025.DC.2143.QDD.002	Dialog Kerukunan Internal Umat Beragama dan Moderasi Beragama Hindu	2116	2116	Kelompok Masyarakat	40.293.821	08	01	02	02
025.DC.2143.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga				83.707.643				
025.DC.2143.QDE.001	Bimbingan Keluarga Sukinah	3210	3210	Keluarga	76.840.371	04	16	02	02



- 419 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						08	01	01	02
025.DC.2143.QDE.002	Calon Pengantin Hindu memperoleh Bimbingan Perkawinan	405	405	Keluarga	6.867.272	04	11	01	02
						04	16	01	01
						04	19	01	01
						08	01	01	03
025.DC.2143.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				89.511.651				
025.DC.2143.QEG.001	Kitab suci dan sarana peribadatan agama Hindu yang disediakan	22961	22961	Unit	89.511.651	08	01	04	02
025.DC.2143.QEI	Bantuan Lembaga				304.832.598				
025.DC.2143.QEI.001	Lembaga Agama Hindu yang dibantu	63	63	Lembaga	9.639.184	08	01	03	01
025.DC.2143.QEI.003	Rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	990	744	Lembaga	292.193.414	08	01	04	01
025.DC.2143.QEI.004	Bantuan Operasional Badan Dharma Dana Nasional (BDDN)	1	1	Lembaga	3.000.000	08	01	08	02
025.DC.2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha				610.462.772				
025.DC.2145.PEG	Konferensi dan Event				263.010.000				



- 420 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2145.PEG.001	Event Seni Budaya Keagamaan Buddha (Swayamvara Tripitaka Gatha)	1	1	Kegiatan	263.010.000	04 08	09 01	01 02	02 03
025.DC.2145.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				10.572.314				
025.DC.2145.QDB.001	Lembaga Pengelolaan Dana Paramita yang Dibina dan Diperkuat Literasi Program Pengentasan Kemiskinan	9	9	Lembaga	4.683.636	08	01	08	01
025.DC.2145.QDB.002	Lembaga Sosial Keagamaan Buddha yang Dibina	364	364	Lembaga	5.888.678	08	01	03	01
025.DC.2145.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				44.696.345				
025.DC.2145.QDC.002	Penyuluh Agama Buddha yang Ditingkatkan Kompetensinya	1208	0	Orang	35.167.400	08	01	01	01
025.DC.2145.QDC.003	Penyuluh Agama Buddha yang Aktif dalam Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif	305	305	Orang	9.528.945	08	01	01	01
025.DC.2145.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				41.079.985				
025.DC.2145.QDD.001	Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha dan Moderasi Beragama Buddha	272	272	Kelompok Masyarakat	41.079.985	08	01	02	02
025.DC.2145.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga				21.986.201				



- 421 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2145.QDE.001	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	1765	1765	Keluarga	11.897.763	04	16	02	02
						08	01	01	02
025.DC.2145.QDE.002	Calon Pengantin Buddha yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan	765	765	Keluarga	10.088.438	04	11	01	02
						04	16	01	01
						04	19	01	01
						08	01	01	03
025.DC.2145.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				10.666.491				
025.DC.2145.QEG.001	Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Buddha yang Disediakan	13952	13952	Unit	10.666.491	08	01	04	02
025.DC.2145.QEI	Bantuan Lembaga				218.451.436				
025.DC.2145.QEI.001	Bantuan Lembaga Agama Buddha	82	82	Lembaga	34.252.374	08	01	03	01
025.DC.2145.QEI.002	Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Dana Paramita	8	12	Lembaga	2.500.000	08	01	08	02
025.DC.2145.QEI.003	Rumah Ibadah Agama Buddha yang Difasilitasi untuk Meningkatkan Layanan	212	550	Lembaga	181.699.062	08	01	04	01
025.DC.2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri				5.444.511.207				
025.DC.2147.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				167.768.714				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 422 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	473614442	157595206	Orang	167.768.714	08	01	06	02
025.DC.2147.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				5.276.742.493				
025.DC.2147.QAH.001	Asrama Haji yang Profesional Melayani	17	17	layanan	848.286.990	08	01	06	01
025.DC.2147.QAH.002	Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang Profesional Melayani - SBSN	0	0	layanan	908.275.973	08	01	06	01
025.DC.2147.QAH.003	Revitalisasi Asrama Haji - SBSN	0	0	layanan	3.520.179.530	08	01	06	01
025.DC.2148	Pembinaan Haji				863.191.168				
025.DC.2148.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				79.934				
025.DC.2148.QAH.001	Advokasi Haji	1	1	layanan	79.934	08	01	06	03
025.DC.2148.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				863.111.234				
025.DC.2148.QDC.001	Petugas Haji yang Profesional	25190326	25190326	Orang	809.706.705	08	01	06	02
025.DC.2148.QDC.002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina	232127	241000	Orang	53.404.529	08	01	06	02
025.DC.2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji				189.412.642				
025.DC.2149.QMA	Data dan Informasi Publik				171.233.716				
025.DC.2149.QMA.001	Sistem Informasi Haji yang Handal	15	15	layanan	171.233.716	08	01	06	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 423 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.2149.UAH	Pengelolaan Keuangan Negara				18.178.926				
025.DC.2149.UAH.001	Laporan Keuangan Haji yang Akuntabel	2	2	Laporan	18.178.926	08	01	06	02
025.DC.5310	Pelayanan Haji Luar Negeri				688.323.510				
025.DC.5310.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				670.732.100				
025.DC.5310.QAH.001	Revitalisasi Sarpras Layanan Haji dan Umrah di Luar Negeri	1	3	layanan	670.732.100	08	01	06	01
025.DC.5310.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				17.591.410				
025.DC.5310.QDC.001	Layanan Administrasi Haji Luar Negeri	214000	214000	Orang	17.591.410	08	01	06	02
025.DC.5310.QDC.002	Jemaah Haji yang terlayani penyaluran Daging Qurban	0	0	Orang	0	08	01	06	02
025.DC.5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama				661.760.883				
025.DC.5620.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				329.037.610				
025.DC.5620.QDB.001	FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik	552	552	Lembaga	329.037.610	08	01	02	01
025.DC.5620.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				332.723.273				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 424 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DC.5620.QDC.002	Tokoh Masyarakat terlibat dalam Kerja Sama Kerukunan Umat Agama Nasional dan Internasional	10079	10079	Orang	332.723.273	08	01	03	02
025.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun				100.755.789.278				
025.DF.2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam				4.379.105.623				
025.DF.2128.QEI	Bantuan Lembaga				632.000.000				
025.DF.2128.QEI.001	Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	15174	4929	Lembaga	632.000.000	04	03	01	01
025.DF.2128.QEI.002	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	0	0	Lembaga	0	04	03	01	03
025.DF.2128.QEI.003	Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren	0	0	Lembaga	0	04	03	02	01
025.DF.2128.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				3.747.105.623				
025.DF.2128.QEK.001	Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	23487	23487	Orang	52.845.750	06 04	02 01	01 03	01 02
025.DF.2128.QEK.002		92533	92533	Orang	361.159.086	04	01	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 425 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP					06	02	01	01
025.DF.2128.QEK.003	Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	45571	45571	Orang	426.875.966	06	02	01	01
						04	01	03	02
025.DF.2128.QEK.005	Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	36621	61150	Orang	228.697.171	04	01	03	01
025.DF.2128.QEK.006	Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	205024	342349	Orang	1.456.412.508	04	01	03	01
025.DF.2128.QEK.007	Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	127545	212975	Orang	1.221.115.142	04	01	03	01
025.DF.2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah				95.157.578.956				
025.DF.2129.QEI	Bantuan Lembaga				7.806.060				
025.DF.2129.QEI.004	Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M	0	0	Lembaga	7.806.060	04	02	02	03
						04	11	03	01
025.DF.2129.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				83.930.721.472				
025.DF.2129.QEK.001	Siswa Madrasah MI Penerima PIP	1028209	1028209	Orang	2.313.470.250	06	02	01	01
						04	01	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 426 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DF.2129.QEK.002	Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	907961	0	Orang	3.404.853.750	04	01	03	02
						06	02	01	01
025.DF.2129.QEK.003	Siswa Madrasah MA Penerima PIP	393493	393493	Orang	3.448.126.037	06	02	01	01
						04	01	03	02
025.DF.2129.QEK.005	Siswa MI Penerima BOS	0	0	Orang	27.025.456.481	04	01	03	01
025.DF.2129.QEK.006	Siswa MTs Penerima BOS	0	0	Orang	24.965.666.144	04	01	03	01
025.DF.2129.QEK.007	Siswa MA Penerima BOS	0	0	Orang	17.037.840.867	04	01	03	01
025.DF.2129.QEK.008	Siswa RA Penerima BOP	0	0	Orang	5.735.307.943	04	01	01	01
025.DF.2129.RAA	Sarana Bidang Pendidikan				2.541.730.943				
025.DF.2129.RAA.001	Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran	0	0	Paket	2.541.730.943	04	01	02	02
025.DF.2129.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah				8.026.208.200				
025.DF.2129.RBI.002	Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)	177	227	unit	8.026.208.200	04	01	02	01
025.DF.2129.SBB	Pendidikan Menengah				651.112.281				
025.DF.2129.SBB.001	Penyelenggaraan Madrasah Unggulan	12188	12188	Orang	651.112.281	04	01	03	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 427 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						04	19	01	02
025.DF.2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen				652.664.407				
025.DF.2136.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				50.364.690				
025.DF.2136.QEG.001	Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah	208	208	Unit	50.364.690	04	03	01	03
025.DF.2136.QEI	Bantuan Lembaga				89.415.983				
025.DF.2136.QEI.001	Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah. Swasta	36	36	Lembaga	89.415.983	04	03	01	03
025.DF.2136.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				369.953.474				
025.DF.2136.QEK.001	Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	11825	11825	Orang	106.425.400	06	02	01	01
						04	01	03	02
025.DF.2136.QEK.002	Siswa SMPK Penerima PIP	5729	5729	Orang	21.483.750	04	01	03	02
						06	02	01	01
025.DF.2136.QEK.003	Siswa SDTK Penerima PIP	3053	3053	Orang	6.869.250	06	02	01	01
						04	01	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 428 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DF.2136.QEK.004	Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS	13333	22263	Orang	123.705.752	04	01	03	01
025.DF.2136.QEK.005	Siswa SMPTK Penerima BOS	6627	11066	Orang	74.520.589	04	01	03	01
025.DF.2136.QEK.006	Siswa SDTK Penerima BOS	5490	9167	Orang	36.948.733	04	01	03	01
025.DF.2136.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah				142.930.260				
025.DF.2136.RBI.001	Prasarana Lembaga Pendidikan Kristen Dasar dan Menengah Negeri	154	154	unit	142.930.260	04	01	02	01
						04	03	01	03
025.DF.2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik				384.463.244				
025.DF.2139.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				28.499.578				
025.DF.2139.QEG.001	Sarana Lembaga pendidikan keagamaan	84	84	Unit	28.499.578	04	03	01	03
025.DF.2139.QEI	Bantuan Lembaga				12.468.609				
025.DF.2139.QEI.007	Lembaga Pendidikan Keagamaan yang diberikan bantuan	282	282	Lembaga	12.468.609	04	03	01	01
025.DF.2139.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				111.716.257				
025.DF.2139.QEK.008	Siswa SMAK Penerima BOS	6396	10680	Orang	75.230.257	04	01	03	01
025.DF.2139.QEK.009	Siswa SMAK Penerima PIP	4054	4054	Orang	36.486.000	04	01	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 429 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						06	02	01	01
025.DF.2139.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah				231.778.800				
025.DF.2139.RBI.001	Prasarana SMAKN	18	18	unit	231.778.800	04	01	02	01
025.DF.2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu				29.261.537				
025.DF.2142.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				29.261.537				
025.DF.2142.QEK.001	Siswa penerima BOS Tk Adi	944	1576	Orang	5.889.204	04	01	03	01
025.DF.2142.QEK.002	Siswa penerima BOS Tk Madya	339	566	Orang	2.161.275	04	01	03	01
025.DF.2142.QEK.003	Siswa penerima BOS Tk Utama	467	780	Orang	4.752.274	04	01	03	01
025.DF.2142.QEK.004	Siswa penerima PIP Tk Adi	736	736	Orang	1.656.000	04	01	03	02
						06	02	01	01
025.DF.2142.QEK.005	Siswa penerima PIP Tk Madya	322	322	Orang	1.179.750	06	02	01	01
						04	01	03	02
025.DF.2142.QEK.006	Siswa penerima PIP Tk Utama	423	423	Orang	3.807.000	04	01	03	02
						06	02	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 430 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DF.2142.QEK.007	Siswa penerima BOS Tk Pratama	2317	3869	Orang	9.816.034	04	01	01	01
025.DF.4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha				152.715.511				
025.DF.4012.QEI	Bantuan Lembaga				44.611.635				
025.DF.4012.QEI.001	Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Operasional	817	817	Lembaga	44.611.635	04	03	01	01
025.DF.4012.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				5.372.073				
025.DF.4012.QEK.001	Siswa Nava Dhammasekha penerima BOP	1157	1932	Orang	4.870.783	04	01	01	01
025.DF.4012.QEK.002	Siswa Mula Dhammasekha penerima BOS	85	142	Orang	501.290	04	01	03	01
025.DF.4012.RAA	Sarana Bidang Pendidikan				102.731.803				
025.DF.4012.RAA.001	Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha	506	506	Paket	102.731.803	04	03	01	03
025.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				89.935.950.369				
025.DI.2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam				9.086.406.076				
025.DI.2127.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan				5.204.040				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 431 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.2127.PBH.001	Model Kurikulum dan Pembelajaran PAI yang Dikembangkan	2	2	Rekomendasi Kebijakan	5.204.040	04	02	05	03
025.DI.2127.PDG	Standardisasi Profesi dan SDM				174.725.649				
025.DI.2127.PDG.001	Guru PAI yang Tersertifikasi	5000	5000	Orang	174.725.649	04	04	01	02
025.DI.2127.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				6.154.412				
025.DI.2127.QAA.001	Pendidik dan Tenaga kependidikan PAI yang mendapat Pembinaan Karir	400	400	Orang	6.154.412	04	02	02	02
025.DI.2127.QEI	Bantuan Lembaga				15.612.120				
025.DI.2127.QEI.001	Sekolah yang Menerima Bantuan Sarana Penguatan Pendidikan Agama Islam	160	160	Lembaga	15.612.120	04	02	05	03
025.DI.2127.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				8.667.009.407				
025.DI.2127.QEK.001	Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS	27619	126362	Orang	7.983.744.955	04	04	02	05
025.DI.2127.QEK.002	Insentif Guru PAI Non PNS	32765	32765	Orang	683.264.452	04	04	02	05
025.DI.2127.SBA	Pendidikan Tinggi				18.214.140				
025.DI.2127.SBA.002	Mahasiswa PTU yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	250	250	Orang	13.010.100	04	03	02	02
025.DI.2127.SBA.003	Dosen PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	400	400	Orang	5.204.040	04	03	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 432 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.2127.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				199.486.308				
025.DI.2127.SCI.001	Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	35	35	Orang	175.894.875	04 04	02 04	05 02	01 04
025.DI.2127.SCI.002	Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	200	200	Orang	22.550.625	04	02	05	01
025.DI.2127.SCI.004	Guru dan Pengawas PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	200	200	Orang	1.040.808	08	02	01	01
025.DI.2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah				76.794.342.916				
025.DI.2133.PDG	Standardisasi Profesi dan SDM				447.527.950				
025.DI.2133.PDG.001	Guru Madrasah yang Tersertifikasi	9101	9101	Orang	447.527.950	04	04	01	02
025.DI.2133.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				13.010.100				
025.DI.2133.QAA.001	Pendidik dan Tenaga kependidikan Madrasah yg mendapat Pembinaan Karir	1300	1300	Orang	13.010.100	04	02	02	02
025.DI.2133.QEI	Bantuan Lembaga				41.111.917				
025.DI.2133.QEI.001	Lembaga Profesi/ Mitra yang mendapatkan bantuan pemberdayaan kualitas Guru	550	550	Lembaga	41.111.917	04	04	02	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 433 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.2133.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				76.287.488.909				
025.DI.2133.QEK.004	Guru Non-PNS Penerima Insentif	607780	607780	Orang	3.804.189.785	04	04	02	06
025.DI.2133.QEK.005	Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	195551	195551	Orang	71.825.288.245	04	04	02	06
025.DI.2133.QEK.006	Guru Non-PNS dan Tendik penerima Tunjangan Khusus	9043	9043	Orang	658.010.879	04	04	02	02
025.DI.2133.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				5.204.040				
025.DI.2133.SCI.003	Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	500	500	Orang	5.204.040	04	02	02	01
025.DI.4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah				172.639.797				
025.DI.4422.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan				34.113.993				
025.DI.4422.PBH.001	Model Pembelajaran Madrasah yang Dikembangkan	4	4	Rekomendasi Kebijakan	34.113.993	04 04	02 02	06 06	01 02
025.DI.4422.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				38.633.284				
025.DI.4422.QDB.001	Madrasah yang dibina dalam Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran	5600	5600	Lembaga	38.633.284	04	02	03	02



- 434 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.4422.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				78.060.602				
025.DI.4422.QDC.001	Siswa Madrasah Berprestasi	2000	2000	Orang	78.060.602	04	01	03	03
						04	09	04	02
						04	19	01	02
025.DI.4422.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				1.015.757				
025.DI.4422.QIC.001	Madrasah yang mendapat Supervisi Pembelajaran	190	190	Lembaga	1.015.757	04	05	03	01
025.DI.4422.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				20.816.161				
025.DI.4422.SCI.001	Siswa Madrasah mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1500	1500	Orang	20.816.161	04	03	02	02
						08	02	01	01
025.DI.4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam				1.994.280.212				
025.DI.4433.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan				5.204.040				
025.DI.4433.PBH.001	Model Pembelajaran Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dikembangkan	5	5	Kajian	5.204.040	04	03	02	01
025.DI.4433.PDG	Standardisasi Profesi dan SDM				90.000.000				



- 435 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.4433.PDG.003	Ustadz yang Tersertifikasi	1100	1100	Orang	90.000.000	04	03	01	02
						04	04	01	02
025.DI.4433.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				10.408.080				
025.DI.4433.QDB.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1000	1000	Lembaga	10.408.080	04	03	02	01
						08	02	01	01
025.DI.4433.QEI	Bantuan Lembaga				173.214.141				
025.DI.4433.QEI.001	Lembaga Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas	35	35	Lembaga	18.214.141	04	03	01	03
						04	03	02	01
025.DI.4433.QEI.002	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren	1	1	Lembaga	155.000.000	04	03	03	01
025.DI.4433.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				1.670.352.701				
025.DI.4433.QEK.001	Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif	35700	35700	Orang	557.352.701	04	03	01	02
025.DI.4433.QEK.002	Guru pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Penerima TPG	500	500	Orang	1.113.000.000	04	04	02	06
025.DI.4433.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				45.101.250				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 436 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.4433.SCI.001	Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya	200	200	Orang	45.101.250	04	02	05	01
						04	03	01	02
025.DI.4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen				527.987.588				
025.DI.4434.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan				17.173.114				
025.DI.4434.PBH.001	Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Dikembangkan	117	117	Kajian	17.173.114	04	02	05	03
025.DI.4434.PDG	Standardisasi Profesi dan SDM				10.677.025				
025.DI.4434.PDG.001	Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi	600	600	Orang	10.677.025	04	04	01	02
025.DI.4434.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				12.581.746				
025.DI.4434.PEF.001	Siswa Pendidikan Keagamaan Kristen Yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	2125	2125	orang	12.581.746	08	02	01	01
025.DI.4434.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				41.250.417				



- 437 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.4434.QDB.001	Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya	150	150	Lembaga	41.250.417	04	03	03	02
025.DI.4434.QEI	Bantuan Lembaga				17.953.939				
025.DI.4434.QEI.001	Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen Penerima Bantuan	248	248	Lembaga	17.953.939	04	02	05	02
025.DI.4434.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				209.816.826				
025.DI.4434.QEK.001	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Insentif	3825	3825	Orang	60.054.623	04	04	02	05
025.DI.4434.QEK.002	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	1298	1298	Orang	149.762.203	04	04	02	05
025.DI.4434.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				218.534.521				
025.DI.4434.SCI.001	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya	14654	14654	Orang	218.534.521	04	02	05	01
						04	09	02	02
						04	03	01	02
025.DI.4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik				783.221.275				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 438 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.4435.PDE	Akreditasi Lembaga				780.606				
025.DI.4435.PDE.002	Akreditasi SMAKN	3	3	Lembaga	780.606	04 04	03 05	03 03	01 03
025.DI.4435.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				5.351.834				
025.DI.4435.PEF.002	Siswa SMAKN yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	892	892	orang	5.351.834	04 08	02 02	02 01	01 01
025.DI.4435.QEI	Bantuan Lembaga				74.441.776				
025.DI.4435.QEI.005	POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP penerima bantuan	575	575	Lembaga	49.875.521	04	02	05	02
025.DI.4435.QEI.006	SMAK yang mendapat Bantuan pendidikan karakter dan kewarganegaraan	37	37	Lembaga	23.473.406	04 08	02 02	02 01	01 01
025.DI.4435.QEI.007	Lembaga Pendidikan Keagamaan yang Ditingkatkan Mutunya	12	12	Lembaga	1.092.849	04 04	03 03	02 03	01 02
025.DI.4435.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				336.191.443				
025.DI.4435.QEK.001	Guru Agama Non ASN Penerima Insentif	2373	2373	Orang	37.060.573	04	04	02	05
025.DI.4435.QEK.002	Guru SMAK Non ASN Penerima Insentif	652	0	Orang	2.220.000	04	04	02	06



- 439 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.4435.QEK.003	Guru Agama Non ASN penerima Tunjangan Profesi	1094	1094	Orang	178.557.691	04	04	02	05
025.DI.4435.QEK.004	Guru SMAK Non ASN penerima Tunjangan Profesi	4	4	Orang	471.000	04	04	02	06
025.DI.4435.QEK.005	Siswa beragama katolik pada sekolah umum yang mendapat pembinaan keagamaan	14644	14644	Orang	22.701.325	04	03	02	02
025.DI.4435.QEK.006	Guru Agama Non ASN penerima Tunjangan Khusus (3T)	884	884	Orang	74.526.018	04	04	02	02
025.DI.4435.QEK.007	Guru SMAK Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T)	245	245	Orang	20.654.836	04	04	02	02
025.DI.4435.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				366.455.616				
025.DI.4435.SCI.001	Pendidik dan Tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	16960	16960	Orang	366.455.616	04	03	01	02
025.DI.4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu				263.967.497				
025.DI.4436.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan				6.012.269				
025.DI.4436.PBH.001	Kurikulum dan Bahan Ajar Agama Hindu yang dikembangkan	12	12	Rekomendasi Kebijakan	6.012.269	04	02	05	03



- 440 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.4436.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				22.684.412				
025.DI.4436.PEF.001	Siswa yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	4098	4098	orang	22.684.412	04 08	02 02	02 01	01 01
025.DI.4436.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				44.837.771				
025.DI.4436.QDB.001	Lembaga Pendidikan Widyalya, Pasraman dan Sekolah Minggu yang ditingkatkan mutunya	1174	1174	Lembaga	44.837.771	04	03	03	02
025.DI.4436.QEI	Bantuan Lembaga				32.322.813				
025.DI.4436.QEI.001	POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP penerima bantuan	231	231	Lembaga	32.322.813	04	02	05	02
025.DI.4436.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				28.449.595				
025.DI.4436.QEK.001	Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi	165	165	Orang	28.449.595	04	04	02	05
025.DI.4436.QEK.002	Guru Non ASN Penerima Insentif	0	0	Orang	0	04	04	02	05
025.DI.4436.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				129.660.637				
025.DI.4436.SCI.001	Guru Agama Hindu dan Guru pada Satuan Pendidikan Widyalya yang ditingkatkan kompetensinya	3912	3912	Orang	129.660.637	04	02	05	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 441 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha				167.188.235				
025.DI.4437.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan				3.144.083				
025.DI.4437.PBH.001	Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Dikembangkan	7	7	Kajian	3.144.083	04	02	05	03
025.DI.4437.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				56.712.246				
025.DI.4437.PEF.001	Siswa Agama Buddha yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	11012	11012	orang	56.712.246	04 08	02 02	02 01	01 01
025.DI.4437.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				7.499.074				
025.DI.4437.QDB.001	Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Ditingkatkan Mutunya	2293	2293	Lembaga	7.499.074	04	03	03	02
025.DI.4437.QEI	Bantuan Lembaga				12.312.758				
025.DI.4437.QEI.001	POKJAWAS/ KKM/ KKG/ MGMP Agama Buddha Penerima Bantuan	141	141	Lembaga	12.312.758	04	02	05	02
025.DI.4437.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				45.463.159				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 442 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DI.4437.QEK.002	Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	236	236	Orang	41.247.887	04	04	02	05
025.DI.4437.QEK.003	Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T)	45	45	Orang	4.215.272	04	04	02	02
025.DI.4437.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				42.056.915				
025.DI.4437.SCI.001	Guru Pendidikan Agama Buddha yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	Orang	19.826.036	04	02	05	01
025.DI.4437.SCI.002	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan Kompetensinya	197	197	Orang	22.230.879	04	03	01	02
025.DI.5621	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu				145.916.773				
025.DI.5621.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				143.262.713				
025.DI.5621.QDC.001	Lembaga Pendidikan Khonghucu yang Berkualitas	1	1	Orang	143.262.713	04	03	02	01
025.DI.5621.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah				2.654.060				
025.DI.5621.QEK.001	Guru Agama Khonghucu Non PNS Penerima Insentif	178	178	Orang	2.654.060	04	04	02	05
025.DK	Program Pendidikan Tinggi				13.252.614.567				



- 443 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik				216.066.156				
025.DK.2131.PDD	Standardisasi Lembaga				42.000.000				
025.DK.2131.PDD.001	Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran di PTK Katolik	0	5	Lembaga	10.000.000	04	06	01	04
025.DK.2131.PDD.002	Pembinaan Standar Mutu Prodi PTK Katolik	0	25	Lembaga	16.000.000	04	06	03	02
025.DK.2131.PDD.003	Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi Katolik	0	2	Lembaga	8.000.000	04	06	03	03
025.DK.2131.PDD.004	Pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Katolik	0	2	Lembaga	8.000.000	04	06	03	03
025.DK.2131.PDE	Akreditasi Lembaga				7.750.000				
025.DK.2131.PDE.001	Akreditasi Prodi/lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik	11	11	Lembaga	7.750.000	04	06	02	01
						04	06	03	01
025.DK.2131.PDG	Standardisasi Profesi dan SDM				22.711.876				
025.DK.2131.PDG.001	Dosen PTK Katolik yang tersertifikasi	20	22	Orang	353.000	04	06	04	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 444 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.2131.PDG.002	Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Katolik yang mengikuti peningkatan Kompetensi	200	120	Orang	22.358.876	04	06	04	03
025.DK.2131.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				12.100.000				
025.DK.2131.PEF.001	Mahasiswa Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	500	1200	orang	12.100.000	04 08	06 02	01 01	05 01
025.DK.2131.QEI	Bantuan Lembaga				2.700.000				
025.DK.2131.QEI.001	BOPTN Penelitian PTK Katolik	0	1	Lembaga	2.700.000	04	08	04	01
025.DK.2131.QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi				108.804.280				
025.DK.2131.QEJ.002	Dosen PTK Katolik penerima Beasiswa gelar S3	65	77	Orang	14.105.054	04 07 04	09 07 06	02 03 04	02 03 01
025.DK.2131.QEJ.004	Mahasiswa penerima KIP Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik	2769	1870	Orang	94.699.226	04 06 06	06 02 02	01 01 01	01 01 01
025.DK.2131.SBA	Pendidikan Tinggi				20.000.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 445 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.2131.SBA.001	Pengembangan Kapasitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik	0	250	Mahasiswa	20.000.000	04	06	01	05
025.DK.2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam				11.796.374.214				
025.DK.2132.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan				4.000.000				
025.DK.2132.PBH.001	Pemetaan Keunggulan dan Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Keagamaan	0	0	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	04	06	03	04
025.DK.2132.PDD	Standardisasi Lembaga				222.000.000				
025.DK.2132.PDD.001	Penguatan RPL di PTK Islam	0	5	Lembaga	10.000.000	04	06	01	03
025.DK.2132.PDD.002	Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran di PTK Islam	0	10	Lembaga	20.000.000	04	06	01	04
025.DK.2132.PDD.003	Penyelenggaraan pembelajaran digital/daring di PTK Islam	0	20	Lembaga	40.000.000	04	06	01	03
025.DK.2132.PDD.004	Mata Kuliah Kolaborasi Interdisiplin	0	5	Lembaga	20.000.000	04	06	02	02
025.DK.2132.PDD.005	Pembentukan prodi interdisipliner kolaboratif di PTK Islam	0	1	Lembaga	40.000.000	04	06	02	01
025.DK.2132.PDD.006	Pembinaan Standar Mutu Prodi PTK Islam	0	200	Lembaga	60.000.000	04	06	03	02



- 446 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.2132.PDD.007	Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi Islam	0	4	Lembaga	16.000.000	04	06	03	03
025.DK.2132.PDD.008	Pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Islam	0	4	Lembaga	16.000.000	04	06	03	03
025.DK.2132.PDE	Akreditasi Lembaga				43.726.435				
025.DK.2132.PDE.001	Akreditasi Prodi/Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	523	723	Lembaga	43.726.435	04	06	02	01
						04	06	03	01
025.DK.2132.PDG	Standardisasi Profesi dan SDM				5.600.000				
025.DK.2132.PDG.001	Tenaga Pendidik dan Kependidikan PTK Islam yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	50	50	Orang	5.600.000	04	06	04	03
025.DK.2132.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM				10.000.000				
025.DK.2132.PDI.001	Dosen PTK Islam yang Tersertifikasi	1000	1000	Orang	10.000.000	04	06	04	02
025.DK.2132.PEC	Kerja sama				4.000.000				
025.DK.2132.PEC.001	Kerja Sama Pengembangan PT	4	4	Kesepakatan	4.000.000	04	08	04	01
025.DK.2132.QEI	Bantuan Lembaga				655.189.164				
025.DK.2132.QEI.001	BOPTN Penelitian PTKI	0	58	Lembaga	635.189.164	04	08	04	01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 447 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.2132.QEI.002	Revitalisasi LPTK di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	0	5	Lembaga	20.000.000	04	04	01	01
025.DK.2132.QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi				6.814.696.000				
025.DK.2132.QEJ.004	Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Penerima Beasiswa Afirmasi	200	200	Orang	12.000.000	04	06	01	01
						06	02	01	01
025.DK.2132.QEJ.007	Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Penerima KIP Kuliah	112393	133700	Orang	6.802.696.000	06	02	01	01
						06	02	01	01
						04	06	01	01
025.DK.2132.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi				3.907.162.615				
025.DK.2132.RBJ.002	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui SBSN	14	13	unit	3.907.162.615	04	06	01	02
025.DK.2132.RBJ.002.3373	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui SBSN - Kota Salatiga	0	0	unit	0	06	04	01	05
025.DK.2132.RBJ.002.3374	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui SBSN - Kota Semarang	0	0	unit	0	06	04	01	05
025.DK.2132.RBJ.002.7371	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui SBSN - Kota Makassar	0	0	unit	0	06	04	01	09
025.DK.2132.SBA	Pendidikan Tinggi				110.000.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 448 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.2132.SBA.001	Pengembangan Kapasitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	0	2500	Mahasiswa	40.000.000	04	06	01	05
025.DK.2132.SBA.002	Program mobilitas internasional mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	0	50	Mahasiswa	20.000.000	04	06	01	05
025.DK.2132.SBA.003	Mahasiswa yg Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1000	1000	Orang	50.000.000	04 08	06 02	03 01	03 01
025.DK.2132.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				20.000.000				
025.DK.2132.UAB.001	Tracer study terpadu lintas Perguruan Tinggi Keagamaan	0	1	Sistem Informasi	20.000.000	04 04	06 09	01 02	04 01
025.DK.4438	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Ali				9.992.000				
025.DK.4438.SBA	Pendidikan Tinggi				9.992.000				
025.DK.4438.SBA.002	Mahasantri yang mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	1000	1000	Orang	9.992.000	08 04	02 06	01 03	01 03
025.DK.5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen				717.112.732				
025.DK.5101.PDD	Standardisasi Lembaga				42.000.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 449 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.5101.PDD.001	Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran di PTK Kristen	0	5	Lembaga	10.000.000	04	06	01	04
025.DK.5101.PDD.002	Pembinaan Standar Mutu Prodi PTK Kristen	0	25	Lembaga	16.000.000	04	06	03	02
025.DK.5101.PDD.003	Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi Kristen	0	2	Lembaga	8.000.000	04	06	03	03
025.DK.5101.PDD.004	Pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Kristen	0	2	Lembaga	8.000.000	04	06	03	03
025.DK.5101.PDE	Akreditasi Lembaga				10.850.767				
025.DK.5101.PDE.001	Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Yang Terakreditasi	3	151	Lembaga	10.850.767	04	06	02	01
						04	06	03	01
025.DK.5101.PDG	Standardisasi Profesi dan SDM				4.500.000				
025.DK.5101.PDG.001	Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi	300	300	Orang	4.500.000	04	06	04	02
025.DK.5101.QEI	Bantuan Lembaga				47.538.000				
025.DK.5101.QEI.001	BOPTN Penelitian PTK Kristen	0	7	Lembaga	47.538.000	04	08	04	01
025.DK.5101.QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi				552.919.937				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 450 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.5101.QEJ.001	Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen penerima KIP Kuliah	9819	8711	Orang	440.840.400	06	02	01	01
						06	02	01	01
						04	06	01	01
025.DK.5101.QEJ.003	Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3	36	59	Orang	112.079.537	04	06	04	01
						04	09	02	02
						07	07	03	03
025.DK.5101.SBA	Pendidikan Tinggi				20.000.000				
025.DK.5101.SBA.001	Pengembangan Kapasitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	0	250	Mahasiswa	20.000.000	04	06	01	05
025.DK.5101.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				39.304.028				
025.DK.5101.SCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi	1580	3700	Orang	39.304.028	04	06	04	03
025.DK.5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu				325.800.306				
025.DK.5104.PDD	Standardisasi Lembaga				42.000.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 451 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.5104.PDD.001	Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran di PTK Hindu	0	5	Lembaga	10.000.000	04	06	01	04
025.DK.5104.PDD.002	Pembinaan Standar Mutu Prodi PTK Hindu	0	25	Lembaga	16.000.000	04	06	03	02
025.DK.5104.PDD.003	Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi Hindu	0	2	Lembaga	8.000.000	04	06	03	03
025.DK.5104.PDD.004	Pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Hindu	0	2	Lembaga	8.000.000	04	06	03	03
025.DK.5104.PDE	Akreditasi Lembaga				17.721.013				
025.DK.5104.PDE.001	Akreditasi Prodi/lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri	29	11		17.721.013	04	06	02	01
						04	06	03	01
025.DK.5104.QEI	Bantuan Lembaga				18.510.000				
025.DK.5104.QEI.001	BOPTN Penelitian PTK Hindu	0	5	Lembaga	18.510.000	04	08	04	01
025.DK.5104.QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi				220.137.013				
025.DK.5104.QEJ.001	Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu penerima KIP Kuliah	4003	4110	Orang	208.543.600	06	02	01	01
						06	02	01	01
						04	06	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 452 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.5104.QEJ.006	Dosen PTKH penerima Beasiswa gelar S3	58	50	Orang	11.593.413	04	06	04	01
						04	09	02	02
						07	07	03	03
025.DK.5104.SBA	Pendidikan Tinggi				20.000.000				
025.DK.5104.SBA.001	Pengembangan Kapasitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu	0	250	Mahasiswa	20.000.000	04	06	01	05
025.DK.5104.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				7.432.280				
025.DK.5104.SCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan PTKH yang di tingkatkan kompetensi	99	370	Orang	7.432.280	04	06	04	03
025.DK.5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha				187.269.159				
025.DK.5106.PDD	Standardisasi Lembaga				42.000.000				
025.DK.5106.PDD.001	Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran di PTK Buddha	0	5	Lembaga	10.000.000	04	06	01	04
025.DK.5106.PDD.002	Pembinaan Standar Mutu Prodi PTK Buddha	0	25	Lembaga	16.000.000	04	06	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 453 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.DK.5106.PDD.003	Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi Buddha	0	2	Lembaga	8.000.000	04	06	03	03
025.DK.5106.PDD.004	Pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Buddha	0	2	Lembaga	8.000.000	04	06	03	03
025.DK.5106.PDE	Akreditasi Lembaga				17.226.147				
025.DK.5106.PDE.001	Akreditasi Prodi/ Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha	128	50	Lembaga	17.226.147	04	06	02	01
						04	06	03	01
025.DK.5106.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				20.451.280				
025.DK.5106.PEF.001	Mahasiswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	1140	515	orang	20.451.280	01	01	02	03
						04	06	01	05
						08	02	01	01
025.DK.5106.QEI	Bantuan Lembaga				4.309.788				
025.DK.5106.QEI.001	BOPTN Penelitian PTK Buddha	0	2	Lembaga	4.309.788	04	08	04	01
025.DK.5106.QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi				76.005.680				
025.DK.5106.QEJ.001	Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Penerima KIP Kuliah	1273	1251	Orang	65.716.200	06	02	01	01
						06	02	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 454 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						04	06	01	01
025.DK.5106.QEJ.002	Dosen PTK Buddha yang ditingkatkan Kualifikasinya	19	57	Orang	10.289.480	04	06	04	01
						04	09	02	02
						07	07	03	03
025.DK.5106.SBA	Pendidikan Tinggi				20.000.000				
025.DK.5106.SBA.001	Pengembangan Kapasitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha	250	250	Mahasiswa	20.000.000	04	06	01	05
025.DK.5106.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				7.276.264				
025.DK.5106.SCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Buddha yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	381	811	Orang	7.276.264	04	06	04	03
025.WA	Program Dukungan Manajemen				629.306.971				
025.WA.2153	Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan				487.304.880				
025.WA.2153.PBN	Kebijakan Bidang Sosial				354.724.956				
025.WA.2153.PBN.002	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1	1	Rekomendasi Kebijakan	354.724.956	08	01	02	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 455 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.WA.2153.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				122.469.161				
025.WA.2153.QDC.001	Sarasehan Tokoh Agama dan Tokoh Budaya	10000	18000	Orang	48.547.200	08	01	03	02
025.WA.2153.QDC.002	Forum Internasional Tokoh Lintas Agama	500	1000	Orang	73.921.961	08	01	03	02
025.WA.2153.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				10.110.763				
025.WA.2153.QDD.001	Kelompok masyarakat yang memperoleh wawasan penguatan moderasi beragama	12	12	Kelompok Masyarakat	10.110.763	08	01	01	01
025.WA.2154	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi				12.375.936				
025.WA.2154.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				12.375.936				
025.WA.2154.QDD.001	Kelompok Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan Melalui Bahan Bacaan Penguatan Moderasi Beragama yang Dikembangkan	10	10	Kelompok Masyarakat	12.375.936	08	01	01	01
025.WA.2155	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan				89.191.237				



- 456 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
025.WA.2155.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan				89.191.237				
025.WA.2155.PBH.001	Naskah Kebijakan Strategis Pembangunan Pendidikan	29	29	Rekomendasi Kebijakan	89.191.237	04	05	02	02
025.WA.5109	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan				40.434.918				
025.WA.5109.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				15.380.925				
025.WA.5109.PFA.001	Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan	256	256	NSPK	15.380.925	04	02	05	01
025.WA.5109.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				25.053.993				
025.WA.5109.SCI.002	Tenaga Teknis Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui Platform Pembelajaran Digital	938577	938577	Orang	25.053.993	04 04	02 02	01 05	01 01
TOTAL					232.552.768.156				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 457 -

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional				
PN 06 - Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	persen	9,07 (2023)	10	12
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 02.20 - Proporsi tenaga kerja hijau	persen	2,62 (2023)	2,70 - 2,73	2,96 – 3,14
PP 04.07 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	persen	1,63 (2023)	3,30	3,90
PP 04.19 - Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	56,42	56,30 - 58,80	56,70 - 60,89
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 02.20.01 - Jumlah kebijakan yang spesifik mendukung pekerjaan hijau/ <i>green jobs</i>	kebijakan	- (indikator baru)	1	1
KP 02.20.01 - Jumlah kerja sama yang melibatkan asosiasi dan DUDIKA dalam pengembangan pekerjaan hijau/ <i>green jobs</i>	kerja sama	- (indikator baru)	1	1
KP 02.20.02 - Jumlah tenaga kerja yang dikembangkan kompetensi hijaunya	orang	120.000 (2023)	300.000	1.100.000
KP 02.20.02 - Jumlah standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) pekerjaan hijau/ <i>green jobs</i> yang ditetapkan	dokumen	- (indikator baru)	1	1
KP 04.07.03 - Persentase lulusan pelatihan vokasi setahun terakhir yang bekerja atau berwirausaha	persen	41,86 (2023)	44	48



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 458 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.07.04 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi	persen	62,13 (2023)	62,97	65,53
KP 04.07.04 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	7.120.907 (2023)	13.289.510	22.289.510
KP 04.07.04 - Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan	perusahaan	530.809 (2023)	447.352	1.996.979
KP 04.17.02 - Angka pekerja anak usia 5-17 tahun	persen	1,72 (2023)	1,67	1,61
KP 06.02.02 - Persentase cakupan kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional	persen	10,63 (Semester I)	14,01	29,02
KP 06.02.02 - Persentase cakupan kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) jaminan sosial ketenagakerjaan Nasional	persen	52,39 (Semester I)	54,18	62,14



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 459 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				7.046.544.154				
026.DL.2238	Pelayanan Politeknik Ketenagakerjaan				16.454.816				
026.DL.2238.SBA	Pendidikan Tinggi				16.454.816				
026.DL.2238.SBA.001	Pendidikan Tinggi Politeknik Ketenagakerjaan	420	720	Orang	16.454.816	04	07	02	05
026.DL.4053	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas				582.527.178				
026.DL.4053.PDF	Sertifikasi Lembaga				6.816.889				
026.DL.4053.PDF.001	Pembinaan LSP	50	61	Lembaga	6.816.889	02	20	02	01
						04	07	03	04
026.DL.4053.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM				568.922.814				
026.DL.4053.PDI.001	SDM Bidang Sertifikasi	840	1021	Orang	28.698.802	02	20	02	06
						04	07	03	01
026.DL.4053.PDI.002	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	73782	162321	Orang	534.887.630	02	20	02	06
						04	07	03	03



- 460 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						06	03	01	02
026.DL.4053.PDI.003	Sertifikasi Kompetensi Kerja Pekerjaan Hijau	1500	1823	Orang	5.336.382	02	20	02	06
026.DL.4053.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				6.787.475				
026.DL.4053.PFA.061	Skema sertifikasi kompetensi profesi	68	83	NSPK	3.856.475	02	20	02	01
						04	07	03	03
026.DL.4053.PFA.062	Skema sertifikasi kompetensi pekerjaan hijau	0	10	NSPK	2.931.000	02	20	02	01
026.DL.4055	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Binalavotas				338.129.576				
026.DL.4055.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan				338.129.576				
026.DL.4055.SCI.002	Jabatan Fungsional Instruktur Berkompetensi Dasar	205	249	Orang	142.376.218	02	20	01	01
						04	07	03	05
026.DL.4055.SCI.003	Instruktur berkompetensi tinggi	2960	6660	Orang	184.112.840	02	20	01	01
						04	07	03	05
026.DL.4055.SCI.004	Tenaga pelatihan berkompetensi tinggi	160	352	Orang	9.153.984	02	20	02	04
						04	07	03	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 461 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DL.4055.SCI.006	Instruktur Berkinerja Tinggi	500	608	Orang	2.486.534	02 04	20 07	02 03	04 05
026.DL.4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas				5.939.157.703				
026.DL.4057.SCO	Pelatihan Vokasi				5.939.157.703				
026.DL.4057.SCO.001	Peserta magang dalam negeri	15400	33000	Orang	19.494.904	02 04	20 07	01 03	05 02
026.DL.4057.SCO.002	Peserta magang luar negeri	3000	3647	Orang	64.885.256	02 02 04	09 20 07	05 01 03	02 05 02
026.DL.4057.SCO.003	Peserta Pelatihan Vokasi Bidang Industri dan Jasa	31329	97252	Orang	2.295.320.678	02 03 05 05 06	20 03 01 05 03	02 03 16 05 01	05 03 02 004 02
026.DL.4057.SCO.004		1440	4285	Orang	99.319.043	06	03	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 462 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Peserta Pelatihan Vokasi Bidang Infrastruktur					03	03	03	03
026.DL.4057.SCO.005	Peserta Pelatihan Vokasi Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif	4032	11998	Orang	279.695.874	03	03	03	03
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.006	Peserta Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	1560	14448	Orang	99.241.145	06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.007	Peserta Pelatihan Vokasi UPTP Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2144	6380	Orang	125.595.141	03	03	03	03
						04	07	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.008	Peserta Pelatihan Vokasi pada Lapangan Kerja Hijau	2064	7018	Orang	116.554.077	06	03	01	02
						02	11	03	03
						02	20	02	05
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.009	Peserta Bantuan Program Pelatihan Vokasi	22704	67559	Orang	818.560.973	02	09	05	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 463 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DL.4057.SCO.010	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Barat	3152	9379	Orang	198.334.549	04	07	03	04
						03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
026.DL.4057.SCO.010.3200	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Barat	3152	9379	Orang	12.204.675	06	03	01	02
						06	04	01	03
						06	04	01	04
						06	04	01	04
026.DL.4057.SCO.011	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Tengah	5760	17140	Orang	364.252.673	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.011.3300	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Jawa Tengah	5760	17140	Orang	364.252.673	06	04	01	05
026.DL.4057.SCO.012	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi D.I Yogyakarta	448	1333	Orang	30.847.484	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 464 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.012.3471	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi D.I Yogyakarta - Kota Yogyakarta	448	1333	Orang	30.847.484	03	05	01	004
026.DL.4057.SCO.013	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Timur	3584	10665	Orang	234.360.826	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.013.3500	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Timur - Provinsi Jawa Timur	3584	10665	Orang	168.446.848	06	04	01	06
						03	05	11	004
026.DL.4057.SCO.014	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Aceh	704	2095	Orang	44.736.557	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.015	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sumatera Utara	784	2333	Orang	47.829.859	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03



- 465 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.015.1200	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Sumatera Utara	784	2333	Orang	47.829.859	03	05	08	004
						06	04	01	01
026.DL.4057.SCO.016	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sumatera Barat	1584	4713	Orang	100.591.551	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.017	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Riau	416	1238	Orang	27.395.340	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.018	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Jambi	624	1857	Orang	38.977.138	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.019		1280	3809	Orang	72.025.822	03	03	03	03



- 466 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sumatera Selatan					04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.019.1600	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Sumatera Selatan	1280	3809	Orang	0	06	04	01	02
026.DL.4057.SCO.020	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Lampung	608	1809	Orang	32.878.568	06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.021	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Barat	736	2190	Orang	41.990.026	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.022	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Tengah	800	2381	Orang	53.172.810	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 467 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DL.4057.SCO.023	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Selatan	704	2095	Orang	48.582.313	04	07	03	01
						03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
026.DL.4057.SCO.023.6300	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Selatan - Provinsi Kalimantan Selatan	704	2095	Orang	0	06	03	01	02
						06	04	01	08
						06	04	01	08
						06	04	01	08
026.DL.4057.SCO.024	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Timur	304	905	Orang	22.256.369	04	19	03	01
						06	05	02	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
026.DL.4057.SCO.025	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Utara	448	1333	Orang	37.256.501	04	07	03	01
						03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 468 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.025.7100	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Utara - Provinsi Sulawesi Utara	448	1333	Orang	0	06	04	01	10
						03	05	06	004
026.DL.4057.SCO.026	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Tengah	624	1857	Orang	40.685.520	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.027	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Selatan	1456	4333	Orang	101.906.097	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.027.7300	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Selatan - Provinsi Sulawesi Selatan	1456	4333	Orang	0	06	04	01	09
026.DL.4057.SCO.028	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	816	2428	Orang	67.197.169	04	19	03	01
						06	03	01	02



- 469 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.028.7400	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara - Provinsi Sulawesi Tenggara	816	2428	Orang	0	03	05	12	004
026.DL.4057.SCO.029	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Maluku	112	333	Orang	8.607.370	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.030	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Bali	1056	3142	Orang	68.832.074	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.030.5100	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Bali - Provinsi Bali	1056	3142	Orang	0	03	05	02	005
						06	04	01	07
026.DL.4057.SCO.031		1712	5094	Orang	120.958.852	04	19	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 470 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.031.5200	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat	1712	5094	Orang	22.485.921	03	05	05	004
026.DL.4057.SCO.032 Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur						03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.032.5300	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur - Provinsi Nusa Tenggara Timur	352	1047	Orang	0	03	05	10	004
026.DL.4057.SCO.033 Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Papua						03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 471 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DL.4057.SCO.034	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Bengkulu	608	1809	Orang	36.361.247	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.035	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Banten	208	619	Orang	12.109.067	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.035.3600	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Banten - Provinsi Banten	208	619	Orang	0	06	04	01	03
026.DL.4057.SCO.036	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Bangka Belitung	128	381	Orang	8.904.083	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.036.1900	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Bangka Belitung - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	128	381	Orang	8.904.083	03	05	07	004



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 472 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DL.4057.SCO.037	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Gorontalo	272	809	Orang	19.077.951	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.038	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Kepulauan Riau	224	667	Orang	15.853.488	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.038.2100	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Kepulauan Riau - Provinsi Kepulauan Riau	224	667	Orang	15.853.488	03	05	03	006
026.DL.4057.SCO.039	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Barat	0	0	Orang	0	03	03	03	03
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.040	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Utara	192	571	Orang	14.350.525	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03



- 473 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DL.4057.SCO.041	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Maluku Utara	64	190	Orang	5.115.450	04	07	03	01
						03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
026.DL.4057.SCO.041.8200	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Maluku Utara - Provinsi Maluku Utara	0	0	Orang	0	06	03	01	02
						03	05	13	004
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.042	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Papua Barat	192	571	Orang	13.978.880	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	05	09	004
						04	07	03	03
026.DL.4057.SCO.042.9100	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Papua Barat - Provinsi Papua Barat	192	571	Orang	0	03	05	09	004
						04	07	03	03
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.043	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi DKI Jakarta	80	238	Orang	4.730.989	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02



- 474 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.043.3100	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi DKI Jakarta - Provinsi DKI Jakarta	80	238	Orang	0	06	04	01	03
						03	05	04	006
026.DL.4057.SCO.044	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Papua Selatan	96	286	Orang	4.810.165	03	03	03	03
						04	07	03	01
						04	19	03	01
						06	03	01	02
026.DL.4057.SCO.045	Peserta Pelatihan Vokasi di Provinsi Papua Barat Daya	32	95	Orang	1.988.626	04	19	03	01
						06	03	01	02
						03	03	03	03
						04	07	03	01
026.DL.4057.SCO.046	Peserta Pelatihan Kerja Sama Pihak Ketiga (PFLK)	454	1351	Orang	23.144.270	02	20	02	05
						03	03	03	03
026.DL.4057.SCO.047	Pembinaan Penyelenggaraan Pemagangan	0	1	Kegiatan	4.000.000	03	03	03	03
026.DL.4057.SCO.048	Forum Kemitraan dengan Perusahaan/Industri/Institusi	21	35	Kegiatan	15.600.000	02	20	01	05



- 475 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DL.4059	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas				43.669.241				
026.DL.4059.SCO	Pelatihan Vokasi				43.669.241				
026.DL.4059.SCO.001	Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	1796	2196	Orang	43.669.241	04	07	03	01
026.DL.4060	Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas				126.605.640				
026.DL.4060.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				126.605.640				
026.DL.4060.PFA.001	Penyusunan Program dan Modul PBK	65	65		115.941.558	04	07	04	02
026.DL.4060.PFA.002	Standar Kompetensi Kerja (SKK) yang Ditetapkan	80	80		10.664.082	04	07	04	02
026.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan				2.969.804.396				
026.DN.2173	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				486.862.871				
026.DN.2173.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				11.051.262				
026.DN.2173.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Analisis Pasar Kerja	2	2	Rekomendasi Kebijakan	11.051.262	02	20	01	02
026.DN.2173.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				9.946.134				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 476 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DN.2173.PFA.001	Pedoman Kamus Jabatan Green Jobs	2	2	NSPK	9.946.134	02	20	01	02
026.DN.2173.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				465.865.475				
026.DN.2173.QDC.002	Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	850	1050	Orang	352.390.344	04 06	20 02	02 03	01 01
026.DN.2173.QDC.004	Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita Rentan	100	300	Orang	28.301.453	04	19	03	01
026.DN.2173.QDC.005	Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda Rentan	100	300	Orang	22.641.163	04	18	02	01
026.DN.2173.QDC.006	Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Lanjut Usia Produktif	100	300	Orang	28.301.453	04 06	20 02	02 03	02 01
026.DN.2173.QDC.007	Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Kerja di Pekerjaan Hijau	1000	5000	Orang	34.231.063	02	20	01	04
026.DN.2175	Perluasan Kesempatan Kerja				1.457.313.749				
026.DN.2175.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				83.352.683				
026.DN.2175.QDC.001		5000	5000	Orang	83.352.683	03	03	03	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 477 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan					06	03	01	02
026.DN.2175.QEA	Bantuan Masyarakat				1.373.961.066				
026.DN.2175.QEA.001	Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula	37600	40000	Orang	1.093.126.250	04	18	02	01
						06	03	02	02
						03	03	03	03
026.DN.2175.QEA.002	Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tematik (Kemiskinan Ekstrem)	2400	2917	Orang	73.623.645	03	03	03	03
						06	03	02	02
026.DN.2175.QEA.003	Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan	5000	5000	Orang	207.211.171	06	03	01	02
						03	03	03	03
026.DN.2179	Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial				95.487.559				
026.DN.2179.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				40.693.950				
026.DN.2179.QDC.001	Pembinaan Tenaga Kerja Terampil Berdialog dalam Membangun Kerja Sama di Perusahaan	1700	4855	Orang	40.693.950	04	07	04	03
026.DN.2179.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha				54.793.609				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 478 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DN.2179.QIH.001	Pemetaan Kerawanan Hubungan Industrial	1225	3499	Badan Usaha	54.793.609	04	07	04	03
026.DN.2181	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				75.853.523				
026.DN.2181.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				75.853.523				
026.DN.2181.QDC.001	Penguatan Keahlian Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial	1200	3427	Orang	75.853.523	02 04	20 07	01 04	06 03
026.DN.5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				124.694.737				
026.DN.5586.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi				36.172.400				
026.DN.5586.PEF.001	Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pelaku Hubungan Industrial	1000	2856	orang	36.172.400	02 06	20 02	01 02	06 01
026.DN.5586.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				21.703.440				
026.DN.5586.QDB.001	Pembinaan Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	600	1714	Lembaga	21.703.440	06 04	02 09	02 04	01 02
026.DN.5586.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				66.818.897				
026.DN.5586.QDC.001	Fasilitasi Dialog Regulasi Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1770	5055	Orang	66.818.897	06	02	02	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 479 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DN.6586	Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial				176.311.422				
026.DN.6586.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				176.311.422				
026.DN.6586.UAC.001	Pelatihan dalam Peningkatan Kapasitas Mediator Hubungan Industrial	2090	2500	Orang	176.311.422	04	07	04	03
026.DN.6587	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan				97.439.945				
026.DN.6587.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				8.274.979				
026.DN.6587.QDC.001	Fasilitasi Penyiapan Pedoman Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan	310	885	Orang	8.274.979	04 07	19 02	03 04	02 02
026.DN.6587.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				89.164.966				
026.DN.6587.QDH.001	Pembinaan Perlindungan Pekerja/Buruh melalui Pembuatan Peraturan Perusahaan	1200	3427	Badan usaha	30.384.816	04	07	04	03
026.DN.6587.QDH.002	Pembinaan Penyusunan Struktur dan Skala Upah bagi Perusahaan	1560	4456	Badan usaha	58.780.150	04 04	07 19	04 03	03 02
026.DN.6588	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan				169.511.508				
026.DN.6588.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha				169.511.508				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 480 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DN.6588.QIH.001	Layanan pembinaan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum ketenagakerjaan bagi Perusahaan	96000	368000	Badan Usaha	148.299.483	04 04	19 07	03 04	02 04
026.DN.6588.QIH.002	Layanan pembinaan/pemeriksaan norma kerja anak di perusahaan	500	1900	Badan Usaha	21.212.026	04	17	02	01
026.DN.6590	Peningkatan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				56.669.541				
026.DN.6590.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				56.669.541				
026.DN.6590.QDH.002	Fasilitasi Sertifikasi SMK3 bagi Perusahaan	1600	6100	Badan usaha	56.669.541	04 04	07 11	04 03	04 02
026.DN.6591	Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan				20.875.645				
026.DN.6591.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha				20.875.645				
026.DN.6591.QIH.001	Layanan pelaporan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online bagi Perusahaan	448090	1721300	Badan Usaha	20.875.645	04	07	04	04
026.DN.6592	Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja				174.941.062				
026.DN.6592.QAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha				174.941.062				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 481 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
026.DN.6592.QAC.001	Layanan Pengujian K3 pada Perusahaan	5000	19200	Badan usaha	164.887.638	04	07	04	04
						04	11	03	02
026.DN.6592.QAC.002	Layanan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja	1500	5760	Badan usaha	10.053.424	04	13	01	01
026.DN.6618	Peningkatan Pelayanan Pasar Kerja				1.533.863				
026.DN.6618.QMA	Data dan Informasi Publik				1.533.863				
026.DN.6618.QMA.001	Informasi Pasar Kerja Pekerjaan Hijau	1	1	dokumen	1.533.863	02	20	01	03
						04	07	04	03
026.DN.6769	Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja				32.308.970				
026.DN.6769.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				32.308.970				
026.DN.6769.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja	3	3	Rekomendasi Kebijakan	32.308.970	02	20	01	03
						04	07	04	03
TOTAL					10.016.348.550				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 482 -

KEMENTERIAN SOSIAL

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 04.20 - Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia		- (indikator baru)	59,67	70,46
PP 04.20 - Indeks Kesejahteraan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas		- (indikator baru)	38,42	55,30
PP 06.02 - Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	jiwa/tahun	- (indikator baru)	1,5 juta	1,5 juta
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 04.15.04 - Jumlah kepesertaan segmen PBI	juta jiwa	96,7 (2023)	96,8	96,8
KP 04.20.01 - Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan	persen	99,55 (2023)	99,60	99,80
KP 06.02.01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai	persen	60 (2023)	65	80
KP 06.02.01 - Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	persen	7 (2023)	8	25
KP 06.02.01 - Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera	jiwa/tahun	10 ribu	400 ribu	1,5 juta
KP 06.02.03 - Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	persen	25	28	45



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 483 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 06.02.03 - Persentase tenaga SDM kesejahteraan sosial/pendamping perawatan yang tersertifikasi	persen	37	40	55
KP 06.03.02 - Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	jiwa/tahun	- (indikator baru)	1.000.000	3.000.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 484 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ	Program Perlindungan Sosial				406.484.383.698				
027.DQ.6274	Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu				685.360.541				
027.DQ.6274.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				647.979.041				
027.DQ.6274.QDC.101	Pendamping Pemberdayaan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar	10266	10277	Orang	647.979.041	06	07	07	04
027.DQ.6274.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				25.059.925				
027.DQ.6274.UBA.101	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT)	514	514	Kab/Kota	25.059.925	06	01	01	002
027.DQ.6274.UBA.101.0000	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - Pusat	514	514	Kab/Kota	25.059.925	01	05	02	02
027.DQ.6274.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				12.321.575				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 485 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6274.UBB.101	Pengelolaan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial	1200	1200	Desa/Kelurahan	12.321.575	06	07	02	02
027.DQ.6276	Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil				362.159.998				
027.DQ.6276.QEB	Bantuan Keluarga				362.159.998				
027.DQ.6276.QEB.101	Warga KAT Yang diberdayakan	2800	4500	KK	362.159.998	04 06 08	16 03 02	03 02 04	02 02 01
027.DQ.6277	Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan				973.707.819				
027.DQ.6277.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				779.772.940				
027.DQ.6277.QAA.101	Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	6500	11480	Orang	292.305.593	04 06	13 02	02 01	01 03
027.DQ.6277.QAA.101.0000	Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial - Pusat	1000	1500	Orang	62.278.400	01	05	02	01
027.DQ.6277.QAA.103		14530	20640	Orang	454.667.347	06	02	03	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 486 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial					07	03	02	01
027.DQ.6277.QAA.104	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Kelompok Rentan yang Terintegrasi	20000	100000		32.800.000	06	02	03	01
027.DQ.6277.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				44.534.689				
027.DQ.6277.QDB.101	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Korban Bencana dan Kedaruratan)	150	150	Lembaga	44.534.689	06	02	03	02
027.DQ.6277.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				149.400.190				
027.DQ.6277.QDC.101	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas	150	400	Orang	30.927.189	06	02	03	02
027.DQ.6277.QDC.102	Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium	2300	2415	Orang	118.473.001	06	02	03	02
027.DQ.6278	Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas				6.653.863.023				
027.DQ.6278.PBN	Kebijakan Bidang Sosial				54.932.800				
027.DQ.6278.PBN.101	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	2	4	Rekomendasi Kebijakan	54.932.800	01	05	02	01



- 487 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6278.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				6.030.009.823				
027.DQ.6278.QAA.101	Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	64100	129200	Orang	1.824.544.477	04 06	20 02	01 01	01 03
027.DQ.6278.QAA.102	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang Disabilitas yang Terintegrasi	106659	175000	Orang	22.266.360	04 06	20 02	01 03	01 01
027.DQ.6278.QAA.104	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan Permakanan	36000	73000	Orang	3.967.198.986	04 06	20 02	01 03	01 01
027.DQ.6278.QAA.110	Layanan Care Economy bagi Penyandang Disabilitas	1500	1500	Orang	216.000.000	06	02	03	01
027.DQ.6278.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				39.350.000				
027.DQ.6278.QDB.101	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas)	150	224	Lembaga	39.350.000	04 06	20 02	02 03	01 02
027.DQ.6278.QDB.101.0000	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas) - Pusat	150	224	Lembaga	39.350.000	01	05	01	02
027.DQ.6278.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				22.000.000				



- 488 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6278.QDC.101	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Penyandang Disabilitas)	300	500	Orang	22.000.000	04	20	02	01
						04	20	02	02
						06	02	03	02
027.DQ.6278.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				507.570.400				
027.DQ.6278.QEG.101	Tersedianya Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra	4370400	6300000	Unit	25.370.400	04	20	01	01
027.DQ.6278.QEG.102	Tersedianya Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	49846356	62000000	Unit	482.200.000	04	20	01	01
						06	02	03	02
027.DQ.6279	Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak				3.285.273.061				
027.DQ.6279.PBN	Kebijakan Bidang Sosial				8.095.406				
027.DQ.6279.PBN.101	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	1	3	Rekomendasi Kebijakan	8.095.406	01	05	02	01
						04	17	02	02
027.DQ.6279.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				3.197.548.327				
027.DQ.6279.QAA.101	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	41840	57927,2	Orang	972.384.267	04	17	02	02
						06	02	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 489 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6279.QAA.102	Pengasuhan Alternatif (Adopsi Inter Country)	5	9	Orang	2.694.266	04	16	03	01
						06	02	03	02
027.DQ.6279.QAA.103	Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	400	586	Orang	11.821.384	04	01	04	02
						06	02	03	02
						07	02	02	01
027.DQ.6279.QAA.104	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi	101150	148094	Orang	32.172.945	04	17	02	02
						06	02	03	01
027.DQ.6279.QAA.104.0000	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi - Pusat	101150	148094	Orang	32.172.945	01	05	02	01
027.DQ.6279.QAA.106	Anak YAPI yang mendapatkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial	270000	150000	Orang	2.178.475.465	04	17	02	02
						06	02	03	01
027.DQ.6279.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				57.047.305				
027.DQ.6279.QDB.101	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak)	250	250	Lembaga	57.047.305	01	05	01	02
						04	17	02	03
						06	02	03	02



- 490 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6279.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				22.582.023				
027.DQ.6279.QDC.101	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak)	350	512	Orang	22.582.023	04 06	17 02	02 03	03 02
027.DQ.6280	Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia				7.746.863.416				
027.DQ.6280.PBN	Kebijakan Bidang Sosial				14.036.200				
027.DQ.6280.PBN.101.0000	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia - Pusat	3	5	Rekomendasi Kebijakan	14.036.200	01	05	02	01
027.DQ.6280.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				7.682.977.216				
027.DQ.6280.QAA.101	Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	39064	63860	Orang	1.070.792.236	04 06	20 02	01 01	02 03
027.DQ.6280.QAA.102	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi	100560	147230	Orang	24.557.400	04	20	01	02
027.DQ.6280.QAA.102.0000	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi - Pusat	100560	147230	Orang	24.557.400	01	05	02	01
027.DQ.6280.QAA.104	Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan	101000	101000	Orang	6.371.627.580	04 06	20 02	01 03	02 01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 491 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6280.QAA.110	Layanan Care Economy bagi Lanjut Usia	1500	1500	Orang	216.000.000	06	02	03	01
027.DQ.6280.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				32.350.000				
027.DQ.6280.QDB.101	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Lanjut Usia)	150	600	Lembaga	32.350.000	04 04	11 20	03 02	03 02
027.DQ.6280.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				17.500.000				
027.DQ.6280.QDC.101	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Lanjut Usia)	300	700	Orang	17.500.000	04 06	11 02	03 03	03 02
027.DQ.6281	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana				2.161.041.623				
027.DQ.6281.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				48.878.523				
027.DQ.6281.QDC.101	Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana	20655	40500	Orang	48.878.523	06 08	02 04	01 04	03 02
027.DQ.6281.QEA	Bantuan Masyarakat				119.136.274				
027.DQ.6281.QEA.101	Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	30600	30600	Orang	119.136.274	06 08	02 04	01 04	03 02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 492 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6281.QEE	Bantuan Penanggulangan Kebencanaan				1.944.826.826				
027.DQ.6281.QEE.101	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	530000	530000	Paket	1.742.333.050	06 08	02 04	01 02	03 01
027.DQ.6281.QEE.102	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial	3700	4000	Paket	114.848.826	06 08	02 04	01 03	03 01
027.DQ.6281.QEE.103	Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Mendapat Bantuan	16664	16664	Paket	81.353.900	06 08	02 04	01 03	03 02
027.DQ.6281.QEE.104	Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	1500	2500	Paket	6.291.050	06 08	02 04	01 03	03 01
027.DQ.6281.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				48.199.999				
027.DQ.6281.UBB.101	Desa/Kelurahan dilokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial	100	125	Desa/Kelurahan	48.199.999	06 08	02 04	01 04	03 02
027.DQ.6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan				156.481.679.089				
027.DQ.6282.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				8.521.053.130				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 493 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	32459	39000	Orang	8.521.053.130	06	07	07	04
027.DQ.6282.QEB	Bantuan Keluarga				147.960.625.959				
027.DQ.6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	10000000	10000000	Keluarga	147.698.763.859	02	10	16	05
						04	11	02	02
						04	16	03	02
						06	02	01	01
027.DQ.6282.QEB.202	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan Keluarga	5000000	5000000	Keluarga	261.862.099	04	16	03	02
027.DQ.6283	Pelayanan Akses Sumber Daya Ekonomi				252.000.001				
027.DQ.6283.QEB	Bantuan Keluarga				252.000.001				
027.DQ.6283.QEB.301	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	1500	3500	Keluarga	252.000.001	06	06	01	03
027.DQ.6318	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial				442.589.316				
027.DQ.6318.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				46.465.624				



- 494 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6318.QAA.001	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	151120000	0	Orang	46.465.624	04	01	04	02
						06	01	02	01
027.DQ.6318.RBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				322.286.893				
027.DQ.6318.RBT.001	Jaringan Komunikasi Data dan Data Center	119	0	Titik/Lokasi	322.286.893	06	01	01	001
027.DQ.6318.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				73.836.799				
027.DQ.6318.UAB.001	Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	1	0	Sistem Informasi	73.836.799	06	01	02	01
027.DQ.6881	Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat				149.868.355				
027.DQ.6881.SCJ	Pelatihan Bidang Sosial				149.868.355				
027.DQ.6881.SCJ.101	Pelatihan Bidang Sosial	6785	6785		149.868.355	06	07	07	04
027.DQ.6882	Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana				290.546.704				
027.DQ.6882.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				290.546.704				
027.DQ.6882.QAA.101	Korban Bencana yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	8000	19630	Orang	290.546.704	06	02	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 495 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6883	Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial				1.372.211.595				
027.DQ.6883.QEB	Bantuan Keluarga				1.372.211.595				
027.DQ.6883.QEB.101	KPM kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha	10000	60000	Keluarga	1.372.211.595	03	03	03	04
						04	16	03	02
						04	19	03	01
						06	03	02	02
027.DQ.6896	Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako				225.583.103.507				
027.DQ.6896.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				1.238.103.390				
027.DQ.6896.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	1	1	layanan	1.238.103.390	06	02	01	02
027.DQ.6896.QEB	Bantuan Keluarga				224.345.000.116				
027.DQ.6896.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	18300000	18800000	Keluarga	224.345.000.116	02	10	15	02
						04	11	02	02
						04	16	03	02
						06	02	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 496 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
027.DQ.6897	Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial				44.115.652				
027.DQ.6897.PDE	Akreditasi Lembaga				19.331.815				
027.DQ.6897.PDE.101	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi	1275	1275	Lembaga	19.331.815	06	02	03	01
027.DQ.6897.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM				24.783.837				
027.DQ.6897.PDI.101	SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi	6000	5500	Orang	24.783.837	06	02	03	02
TOTAL					406.484.383.698				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 497 -

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 02.06.02 - Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP		80.00	80.00	84.00
KP 02.06.03 - Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		91.00	92.00	96.00
KP 02.10.09 - Volume produksi ikan budi daya	juta ton	6,20 (2023)	6,75	8,52
KP 02.10.09 - Volume produksi perikanan tangkap	juta ton	7,75 (2023)	6,19	7,50
KP 02.10.12 - Konsumsi ikan masyarakat	kg/kapita/tahun	25,07 (2023)	26,26	28,63
KP 02.10.13 - Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan	persen	0	70	80
KP 02.10.16 - Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi	lembaga	15	4	27
KP 02.16.01 - Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil		49,56 (2023)	50,00	58,00
KP 02.16.01 - Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	persen	8,98 (2023)	9,23	10



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 498 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.16.04 - Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau <i>appendix</i> CITES	nilai	62,40 (2023)	68,30	70,94
KP 02.18.02 - Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	ton	744,60	18	1244
KP 02.19.02 - Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi		0	55	76
KP 02.22.01 - Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	persen	91,17	13,6	100
KP 02.22.01 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		81,00	82,00	86,00
KP 02.22.01 - Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil		0,45	0,49	0,61
KP 02.22.01 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman	persen	≤80	≤80	≤80
KP 02.22.02 - Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif dikelola (kumulatif)	juta ha	16,5	18,5	21,5
KP 02.22.02 - Luas kawasan konservasi diperairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	juta ha	29,2	30	32,5
KP 02.22.03 - Pertumbuhan PDB perikanan (ADHK)	persen	5,49 (2023)	4,00-6,00	6,00-7,00
KP 02.22.03 - Volume produksi ikan	juta ton	13,95 (2023)	12,94	16,02
KP 02.22.03 - Volume produksi olahan perikanan	juta ton	3,62 (2023)	3,71	4,37
KP 02.22.03 - PDB perikanan	triliun rupiah	554,04 (2023)	595,06	718,98
KP 02.22.04 - Volume produksi garam	juta ton	2,00	2,25	3,00



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 499 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASLINE 2024</i>	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.22.04 - Produktivitas lahan garam rakyat	ton/ha	83	83	93
KP 02.22.07 - Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja	persen	74,17 (2023)	75	79
KP 05.01.07 - Volume produksi rumput laut	juta ton	10,76 (2023)	11,64	14,14
KP 05.05.04 - Nilai ekspor hasil perikanan	miliar USD	5,63 (2023)	6,25	8,50
KP 05.05.04 - Nilai ekspor rumput laut	juta USD	433,72 (2023)	574,00	898,00
KP 05.05.04 - Proporsi ekspor produk olahan rumput laut	persen	34,31	46,5	61,3
KP 08.03.01 - Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		- (indikator baru)	55	76



- 500 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				2.846.104.957				
032.DL.2375	Pelatihan Kelautan dan Perikanan				616.893.823				
032.DL.2375.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				178.736.000				
032.DL.2375.RAL.711	Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	5	10	Unit	178.736.000	02	22	07	01
032.DL.2375.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				136.972.121				
032.DL.2375.RBQ.721	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	10	Unit	136.972.121	02	22	07	01
032.DL.2375.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan				301.185.702				
032.DL.2375.SCC.831	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	25324	41000	Orang	301.185.702	02	22	07	02
						04	07	03	01
						06	03	02	01
						08	02	02	04
032.DL.2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan				1.722.632.047				



- 501 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.DL.2376.PDE	Akreditasi Lembaga				12.170.000				
032.DL.2376.PDE.541	Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	16	16	Unit Kerja	12.170.000	04 02	07 22	02 07	05 02
032.DL.2376.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM				11.750.000				
032.DL.2376.PDI.545	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	500	520	Orang	11.750.000	02	22	07	02
032.DL.2376.QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan				87.855.600				
032.DL.2376.QGC.671	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	16	16	Lembaga	87.855.600	02 04	22 07	01 02	04 05
032.DL.2376.RAA	Sarana Bidang Pendidikan				273.666.360				
032.DL.2376.RAA.711	Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3	16	Paket	273.666.360	04 02	07 22	02 07	04 01
032.DL.2376.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				65.650.000				
032.DL.2376.RAN.715	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	16	Unit	65.650.000	02	22	07	01



- 502 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.DL.2376.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah				103.200.000				
032.DL.2376.RBI.721	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	5	unit	103.200.000	02	22	07	01
032.DL.2376.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi				368.745.853				
032.DL.2376.RBJ.725	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	11	unit	368.745.853	02	22	07	01
						04	07	02	04
032.DL.2376.SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan				788.846.234				
032.DL.2376.SAC.811	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	7615	7186	Orang	788.846.234	04	07	02	05
						02	22	07	02
032.DL.2376.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling				10.748.000				
032.DL.2376.SDC.843	Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang diterapkan kepada Masyarakat	14	26	model	10.748.000	02	22	07	02
032.DL.7020	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				506.579.087				
032.DL.7020.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				80.500.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 503 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.DL.7020.QDB.646	Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	14	Lembaga	80.500.000	02	10	09	07
						06	07	02	01
						06	07	07	07
032.DL.7020.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				215.000.000				
032.DL.7020.QDD.646	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	35000	43000	Kelompok Masyarakat	215.000.000	06	07	07	07
						06	03	02	01
						02	10	09	07
032.DL.7020.QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				9.137.682				
032.DL.7020.QKA.696	Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	1	10	laporan	9.137.682	02	10	09	07
032.DL.7020.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				86.250.000				
032.DL.7020.RAL.716	Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	5	Unit	86.250.000	02	10	09	07



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 504 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.DL.7020.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				106.000.000				
032.DL.7020.RBQ.726	Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	7	Unit	106.000.000	02	10	09	07
032.DL.7020.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling				9.691.405				
032.DL.7020.SDC.648	Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan	3	19	model	9.691.405	02	10	09	07
032.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				3.295.221.966				
032.EC.2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan				624.832.160				
032.EC.2357.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				9.546.000				
032.EC.2357.PBR.003	Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	2	7	Rekomendasi Kebijakan	9.546.000	02	22	03	08
032.EC.2357.PDA	Standardisasi Produk				14.211.000				
032.EC.2357.PDA.001	Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	400	3150	produk	14.211.000	02	22	03	08



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 505 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						05	01	07	02
032.EC.2357.PEE	Kemitraan				7.649.160				
032.EC.2357.PEE.001	Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	8	32	Kesepakatan	4.060.000	02	22	03	08
032.EC.2357.PEE.002	Kerja Sama pemasaran rumput laut	6	15	Kesepakatan	3.589.160	05	01	07	02
						05	05	04	003
032.EC.2357.PEH	Promosi				308.350.000				
032.EC.2357.PEH.001	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	174	190	promosi	181.974.000	04	11	02	02
						02	10	12	002
032.EC.2357.PEH.002	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	34	38	promosi	18.576.000	02	10	12	002
						06	07	04	02
						02	22	03	08
032.EC.2357.PEH.003	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	1	7	promosi	67.100.000	02	22	03	08
						05	05	04	002
032.EC.2357.PEH.004	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	4	38	promosi	24.000.000	02	10	12	002
						02	22	03	08



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 506 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.EC.2357.PEH.005	Promosi produk rumput Laut Skala Internasional	1	2	promosi	16.700.000	05	05	04	002
032.EC.2357.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				9.760.000				
032.EC.2357.QDI.001	Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	4	15	Industri	5.260.000	02	22	03	07
032.EC.2357.QDI.002	Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	2	7	Industri	4.500.000	05	01	07	02
						05	05	04	001
032.EC.2357.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				94.316.000				
032.EC.2357.QEG.001	Peralatan Pemasaran	5170	8208	Unit	59.436.000	06	03	02	02
						02	22	03	08
032.EC.2357.QEG.002	Kendaraan Pemasaran Ikan	0	10	Unit	34.880.000	02	22	03	08
032.EC.2357.QMA	Data dan Informasi Publik				17.000.000				
032.EC.2357.QMA.001	Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	3	7	dokumen	8.500.000	02	22	03	08
032.EC.2357.QMA.002	Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	3	7	dokumen	8.500.000	02	22	03	08
032.EC.2357.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				164.000.000				



- 507 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.EC.2357.RBQ.001	Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan	2	6	Unit	164.000.000	02 07	22 15	03 01	08 08
032.EC.2358	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan				638.248.622				
032.EC.2358.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				8.000.000				
032.EC.2358.QDC.001	Masyarakat yang dibina dalam rangka pembinaan mutu dan diversifikasi	0	2000	Orang	8.000.000	02	22	03	06
032.EC.2358.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM				12.054.000				
032.EC.2358.QDG.001	Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	1510	1000	UMKM	12.054.000	02 03 06	22 03 03	03 03 01	07 03 02
032.EC.2358.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri				16.874.682				
032.EC.2358.QDI.001	Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	1963	3000	Industri	16.874.682	02	22	03	06
032.EC.2358.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				212.319.940				
032.EC.2358.QEG.001	Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP	220	510	Unit	178.701.000	02 02	10 15	09 02	09 02



- 508 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						02	22	03	09
						05	03	01	05
						07	15	01	08
032.EC.2358.QEG.002	Sarana Pengolahan Hasil KP	165	275	Unit	33.618.940	05	01	07	01
						02	10	09	09
						02	15	02	02
						02	22	03	06
032.EC.2358.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan					389.000.000			
032.EC.2358.RBQ.001	Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dibangun	0	3	Unit	194.000.000	02	10	09	09
						02	15	02	02
						02	22	03	06
032.EC.2358.RBQ.002	Pabrik Es yang dibangun	0	5	Unit	195.000.000	02	22	03	09
032.EC.3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					1.072.830.851			
032.EC.3989.PDC	Sertifikasi Produk					270.888.000			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 509 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.EC.3989.PDC.001	Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	3000	9000	produk	187.700.000	02	22	03	06
032.EC.3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	3000	9000	produk	83.188.000	02	22	03	06
032.EC.3989.PDF	Sertifikasi Lembaga				105.780.000				
032.EC.3989.PDF.001	Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	500	3000	Lembaga	31.530.000	02	22	03	06
032.EC.3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	500	3000	Lembaga	74.250.000	02	22	03	06
032.EC.3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				47.114.000				
032.EC.3989.QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	25	200	Produk	47.114.000	02	22	03	06
032.EC.3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				41.968.000				
032.EC.3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	500	2000	Lembaga	41.968.000	02	22	03	06
032.EC.3989.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				289.688.631				
032.EC.3989.RAL.001	Sarana Pengujian Mutu	5	35	Unit	289.688.631	02	10	13	02



- 510 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						02	22	03	06
032.EC.3989.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				317.392.220				
032.EC.3989.RBQ.001	Prasarana Pengujian Mutu	5	35	Unit	317.392.220	02	10	13	02
						02	22	03	06
032.EC.5279	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan				44.734.026				
032.EC.5279.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM				12.520.000				
032.EC.5279.QDG.001	UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	18	112	UMKM	12.520.000	02	22	03	07
						03	03	03	04
						06	03	01	02
032.EC.5279.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				4.622.082				
032.EC.5279.QDH.001	Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk	15	40	Badan usaha	4.622.082	02	22	07	02
032.EC.5279.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				21.591.944				
032.EC.5279.RAL.001	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	200	600	Unit	21.591.944	02	22	03	09



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 511 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.EC.5279.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				6.000.000				
032.EC.5279.RBQ.001	Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1	1	Unit	6.000.000	02	22	03	09
032.EC.7010	Manajemen Mutu				268.530.307				
032.EC.7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				48.700.351				
032.EC.7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	5	8	Rekomendasi Kebijakan	29.500.000	02	22	03	06
032.EC.7010.PBR.002	Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	15	35	Rekomendasi Kebijakan	19.200.351	02	22	03	06
032.EC.7010.PDD	Standardisasi Lembaga				101.368.000				
032.EC.7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	15	23	Lembaga	29.240.000	02	22	03	06
032.EC.7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	35	35	Lembaga	41.904.000	02	22	03	06
032.EC.7010.PDD.003	Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	25	30	Lembaga	30.224.000	02	22	03	06



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 512 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.EC.7010.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				82.961.956				
032.EC.7010.QDC.001	Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	6325	25000	Orang	82.961.956	02	22	03	06
032.EC.7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk				35.500.000				
032.EC.7010.QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	35	35	Produk	35.500.000	02	22	03	06
032.EC.7025	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan				505.092.000				
032.EC.7025.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				4.900.000				
032.EC.7025.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas	2	5	Rekomendasi Kebijakan	4.900.000	02	22	03	09
032.EC.7025.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				4.200.000				
032.EC.7025.QDB.001	Pengelola gudang yang difasilitasi resi gudang	0	50	Lembaga	4.200.000	02	22	03	09
032.EC.7025.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				7.172.000				
032.EC.7025.QDH.001		36	190	Badan usaha	7.172.000	02	22	03	09



- 513 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)					05	03	02	02
032.EC.7025.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				168.820.000				
032.EC.7025.QEG.001	Sarana Penyimpanan Produk KP	1	14	Unit	80.500.000	07	15	01	04
						02	10	09	09
						02	15	02	02
						02	22	03	09
032.EC.7025.QEG.002	Sarana Distribusi Logistik Produk KP	0	32	Unit	88.320.000	02	22	03	09
						05	03	01	05
						07	15	01	08
						02	10	09	09
						02	15	02	02
032.EC.7025.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				320.000.000				
032.EC.7025.RBQ.001	Pembangunan Gudang Beku dan Kelengkapannya	0	5	Unit	283.500.000	02	10	09	09
						02	15	02	02



- 514 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						02	22	03	09
032.EC.7025.RBQ.002	Pembangunan Gudang Kering dan Kelengkapannya	0	3	Unit	36.500.000	02	22	03	09
032.EC.7026	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan				140.954.000				
032.EC.7026.PEH	Promosi				16.800.000				
032.EC.7026.PEH.001	Promosi usaha dan investasi KP	2	6	promosi	16.800.000	02	22	03	07
						05	01	07	05
032.EC.7026.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				4.000.000				
032.EC.7026.QDB.001	Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha	22	52	Lembaga	4.000.000	03	03	01	01
						02	22	03	07
032.EC.7026.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				8.000.000				
032.EC.7026.QDC.001	Masyarakat yang dibina dalam rangka menjadi wirausaha KP	0	2000	Orang	8.000.000	02	22	03	07
032.EC.7026.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM				38.554.000				
032.EC.7026.QDG.001	UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha	327	900	UMKM	6.054.000	02	22	03	07
						03	03	02	02



- 515 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						06	03	01	02
032.EC.7026.QDG.002	Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	875	500	UMKM	13.500.000	03	03	02	02
						06	03	01	02
						02	22	03	07
032.EC.7026.QDG.003	UMKM yang diberdayakan dan dibina menuju UMKM Naik Kelas	0	456	UMKM	19.000.000	02	22	03	07
032.EC.7026.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan				73.600.000				
032.EC.7026.RBO.001	Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan	1	2	bidang	73.600.000	02	22	03	07
						05	01	07	02
032.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				2.511.239.550				
032.FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				2.260.379.680				
032.FD.2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan				18.805.000				
032.FD.2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	4	9	Rekomendasi Kebijakan	2.805.000	02	22	01	06
						02	16	01	02
032.FD.2362.PBW.002	Rekomendasi Pengelolaan Biota Perairan	0	5		2.400.000	02	22	01	06



- 516 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
				Rekomendasi Kebijakan		02	16	04	01
032.FD.2362.PBW.003	Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	0	11	Rekomendasi Kebijakan	9.600.000	02	22	01	06
032.FD.2362.PBW.004	Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	0	10	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	02	22	01	06
032.FD.2362.PCA	Perizinan Produk				62.800.420				
032.FD.2362.PCA.001	Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	0	3	Produk	6.000.000	02	22	01	06
						02	16	01	02
032.FD.2362.PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	9	9	Produk	56.800.420	02	22	01	06
						02	16	04	01
032.FD.2362.PEE	Kemitraan				2.500.000				
032.FD.2362.PEE.001	Kerja Sama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	6	9	Kesepakatan	2.500.000	02	22	02	04
						02	16	01	02
032.FD.2362.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				2.751.480				
032.FD.2362.PFA.001	Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	4	12	NSPK	2.751.480	02	22	01	06



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 517 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.FD.2362.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat				34.000.000				
032.FD.2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	0	44	Kelompok Masyarakat	34.000.000	02 02	22 16	02 03	05 01
032.FD.2362.QMA	Data dan Informasi Publik				34.056.090				
032.FD.2362.QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	5	5	dokumen	16.656.090	02 02	22 16	02 03	02 02
032.FD.2362.QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	6	10	dokumen	17.400.000	02 02	22 16	02 03	02 02
032.FD.2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				34.400.000				
032.FD.2362.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	1	5	Unit	18.000.000	02 02	22 16	02 01	03 02
032.FD.2362.RAL.002	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	0	7	Unit	16.400.000	02	22	02	03
032.FD.2362.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem				2.025.494.000				
032.FD.2362.REA.002		18500000	22500000	Hektar	34.390.000	02	22	02	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 518 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)					02	16	01	02
032.FD.2362.REA.004	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	8000000	16000000	Hektar	1.975.104.000	02	22	02	04
						02	16	01	02
032.FD.2362.REA.005	Kawasan Konservasi yang dihitung Neraca Sumberdaya	0	500000	Hektar	16.000.000	02	22	02	02
						02	16	01	02
032.FD.2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies				26.072.690				
032.FD.2362.REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	25	25	Jenis	22.072.690	02	16	04	01
032.FD.2362.REB.002	Penanganan Biota Perairan dilindungi dan/atau terancam punah	0	6	Jenis	4.000.000	02	16	02	01
032.FD.2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan				13.500.000				
032.FD.2362.SCC.001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	50	100	Orang	9.500.000	02	22	02	05
						02	16	01	02
032.FD.2362.SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	300	300	Orang	4.000.000	02	22	02	05
						02	16	03	01



- 519 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.FD.2362.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				6.000.000				
032.FD.2362.UBA.001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi	0	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.000.000	02	22	02	05
						02	16	01	02
032.FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				250.859.870				
032.FD.4346.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan				4.000.000				
032.FD.4346.PBW.001	Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	0	2	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	08	03	05	04
						02	19	02	01
						02	19	03	02
032.FD.4346.PEE	Kemitraan				4.000.000				
032.FD.4346.PEE.001	Jejaring dan Kemitraan Pengendalian Perubahan Iklim	0	2	Kesepakatan	4.000.000	08	03	05	04
032.FD.4346.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				4.788.400				
032.FD.4346.PFA.001	Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	3	NSPK	2.788.400	02	16	01	06



- 520 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.FD.4346.PFA.002	Dokumen NSPK Pengendalian Perubahan Iklim	0	1	NSPK	1.000.000	08	03	05	04
032.FD.4346.PFA.003	Dokumen NSPK Mitigasi Bencana	0	1	NSPK	1.000.000	08	04	01	03
032.FD.4346.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				38.070.830				
032.FD.4346.QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	1	53	Kelompok Masyarakat	31.941.680	02	18	02	04
032.FD.4346.QDD.002	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	1	2	Kelompok Masyarakat	4.929.150	08	04	04	01
032.FD.4346.QDD.003	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	0	2	Kelompok Masyarakat	1.200.000	08	03	05	02
032.FD.4346.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat				99.601.870				
032.FD.4346.QEH.001	Bantuan Pengembangan Kawasan Karbon Biru	0	10	Kelompok Masyarakat	20.000.000	02	19	02	01
						02	19	03	02
032.FD.4346.QEH.002	Bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	0	14	Kelompok Masyarakat	22.500.000	08	03	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 521 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.FD.4346.QEH.003	Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih	1	22	Kelompok Masyarakat	47.901.870	06	07	02	03
						02	18	02	04
032.FD.4346.QEH.004	Bantuan Pusat Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	0	7	Kelompok Masyarakat	9.200.000	02	16	01	06
032.FD.4346.RBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana				46.000.000				
032.FD.4346.RBH.001	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	0	17	unit	46.000.000	08	03	01	01
032.FD.4346.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem				54.398.770				
032.FD.4346.REA.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	5	100	Hektar	20.398.770	08	03	01	01
						02	12	04	04
						02	17	03	02
						02	19	02	01
						02	19	03	01
032.FD.4346.REA.002	Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	0	5	Hektar	1.000.000	08	03	01	01
						08	04	01	02
032.FD.4346.REA.003	Kawasan padang lamun yang direhabilitasi	0	10	Hektar	33.000.000	08	03	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 522 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						02	19	02	01
						02	19	03	02
032.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				23.464.037.327				
032.HB.2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan				491.663.000				
032.HB.2337.PCA	Perizinan Produk				24.211.000				
032.HB.2337.PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	800	4500	Produk	18.761.000	02	22	01	02
032.HB.2337.PCA.002	Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	0	35	Produk	5.450.000	02	10	09	08
032.HB.2337.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM				41.650.000				
032.HB.2337.PDI.001	Awak kapal perikanan yang disertifikasi	5000	25000	Orang	20.100.000	04	07	03	03
						02	22	07	02
032.HB.2337.PDI.002		30	150	Orang	21.550.000	02	22	07	02



- 523 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan					04	07	03	03
032.HB.2337.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				11.476.000				
032.HB.2337.QDC.001	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	14000	21000	Orang	11.476.000	02	22	01	02
032.HB.2337.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				7.350.000				
032.HB.2337.QDH.001	Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	0	700	Badan usaha	7.350.000	02	10	09	08
032.HB.2337.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				406.976.000				
032.HB.2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	11000	30000	Unit	145.276.000	02	10	09	05
						06	07	04	02
						06	03	02	02
032.HB.2337.QEG.003	Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	1100	2500	Unit	261.700.000	06	07	04	02
						06	03	02	02
						08	03	01	02
						02	10	09	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 524 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				5.832.578.000				
032.HB.2338.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM				25.313.000				
032.HB.2338.PDI.001	Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	15	105	Orang	21.600.000	02	22	07	02
032.HB.2338.PDI.002	Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	50	300	Orang	3.713.000	02	22	07	02
032.HB.2338.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi				186.575.000				
032.HB.2338.QGA.001	Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	9	9	Lembaga	29.050.000	02	22	03	02
						06	07	05	02
032.HB.2338.QGA.002	Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	200	296	Lembaga	157.525.000	02	22	01	02
032.HB.2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				146.000.000				
032.HB.2338.RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNB Perikanan Tangkap yang disediakan	0	30	Unit	146.000.000	02	10	09	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 525 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				5.452.690.000				
032.HB.2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	0	31	Unit	690.000.000	02	10	09	05
						02	12	09	06
						02	22	03	02
032.HB.2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	2	6	Unit	2.716.000.000	02	22	03	02
032.HB.2338.RBQ.004	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	4	4	Unit	1.659.000.000	02	22	03	02
032.HB.2338.RBQ.005	Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	0	25	Unit	230.000.000	02	22	03	02
032.HB.2338.RBQ.006	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II	7	0	Unit	157.690.000	02	22	03	02
032.HB.2338.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan				22.000.000				



- 526 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2338.SCC.001	Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	0	1600	Orang	22.000.000	02	10	09	07
032.HB.2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan				764.700.000				
032.HB.2339.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				27.000.000				
032.HB.2339.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	6	6	Rekomendasi Kebijakan	27.000.000	02	22	01	02
032.HB.2339.PCA	Perizinan Produk				13.350.000				
032.HB.2339.PCA.001	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	6000	10000	Produk	13.350.000	02	22	01	02
032.HB.2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				46.150.000				
032.HB.2339.QDC.001	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	5000	5000	Orang	11.600.000	02	10	09	08
032.HB.2339.QDC.002	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	700	1100	Orang	20.000.000	02	10	09	06
						06	03	02	02
032.HB.2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	750	1200	Orang	14.550.000	06	03	02	02
						02	10	09	06



- 527 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2339.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				24.700.000				
032.HB.2339.QDD.001	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	2000	2400	Kelompok Masyarakat	12.000.000	02	22	07	02
						06	03	02	02
032.HB.2339.QDD.004	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya	4	10	Kelompok Masyarakat	12.700.000	06	03	02	02
						02	10	16	03
						02	22	07	02
032.HB.2339.QEA	Bantuan Masyarakat				142.000.000				
032.HB.2339.QEA.001	Perlindungan Nelayan yang Tersalurkan	0	100000	Orang	142.000.000	02	10	09	08
032.HB.2339.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat				454.800.000				
032.HB.2339.QEH.001	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	1	10	Kelompok Masyarakat	400.800.000	02	10	09	05
						06	07	02	01
						06	03	02	02
032.HB.2339.QEH.002	Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (Korporasi)	0	10	Kelompok Masyarakat	43.000.000	02	10	16	03
						02	10	09	06
032.HB.2339.QEH.005		3	0		11.000.000	02	10	09	05



- 528 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - Ocean for Prosperity Project (Lautra)			Kelompok Masyarakat		06	07	02	01
						06	03	02	02
032.HB.2339.QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				34.600.000				
032.HB.2339.QKA.001	Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	5000	5000	laporan	9.400.000	02	10	09	08
032.HB.2339.QKA.002	Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	0	3400	laporan	11.000.000	02	10	09	06
						02	22	07	02
032.HB.2339.QKA.003	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	100000	100000	laporan	14.200.000	06	02	02	01
						02	10	09	08
032.HB.2339.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				22.100.000				
032.HB.2339.UBA.001	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	37	37	Provinsi	22.100.000	02	22	01	02
032.HB.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan				706.100.000				
032.HB.2341.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				70.700.000				



- 529 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2341.PBR.001	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	11	11	Rekomendasi Kebijakan	15.400.000	02	22	01	02
032.HB.2341.PBR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	3	11	Rekomendasi Kebijakan	15.200.000	02	22	01	02
032.HB.2341.PBR.003	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	11	11	Rekomendasi Kebijakan	21.600.000	02	22	01	02
032.HB.2341.PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Perairan Darat	3	14	Rekomendasi Kebijakan	18.500.000	02	22	01	02
032.HB.2341.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi				588.400.000				
032.HB.2341.QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	11	Lembaga	18.400.000	02	22	01	02
032.HB.2341.QGA.004	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaanya - Ocean for Prosperity Project (Lautra)	3	0	Lembaga	570.000.000	02	22	01	02



- 530 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2341.QKB	Pemantauan produk				16.000.000				
032.HB.2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	5000	35000	laporan	16.000.000	02	22	01	02
032.HB.2341.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				31.000.000				
032.HB.2341.RBQ.002	Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	0	21	Unit	31.000.000	02	22	01	02
032.HB.2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP				4.938.552.250				
032.HB.2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam				3.611.356.588				
032.HB.2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	28	140	Operasi	3.244.528.588	02	06	03	01
032.HB.2350.QHD.002	Operasi Pesawat Patroli	140	180	Operasi	246.000.000	02	06	03	01
032.HB.2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	20	50	Operasi	120.828.000	02	06	03	01
032.HB.2350.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				673.600.000				
032.HB.2350.RAL.001	Kapal Pengawas	0	2	Unit	645.000.000	02	06	02	02
032.HB.2350.RAL.002	Speedboat Pengawas	0	2	Unit	28.600.000	02	06	02	02



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 531 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2350.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				164.746.215				
032.HB.2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	4	14	Unit	164.746.215	02	06	02	02
032.HB.2350.RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				488.849.447				
032.HB.2350.RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	122	133	Unit	488.849.447	02	06	02	02
032.HB.2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				196.177.000				
032.HB.2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				175.766.000				
032.HB.2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	754	950	Lembaga	96.554.000	02	17	07	03
						02	22	01	03
						02	16	02	03
						07	02	03	01
032.HB.2352.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	681	1300	Lembaga	79.212.000	07	02	03	01
						02	17	07	03
						02	22	01	03



- 532 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						02	16	02	03
032.HB.2352.RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				20.411.000				
032.HB.2352.RDS.001	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1	1	Unit	20.411.000	02	22	01	03
032.HB.2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan				87.900.000				
032.HB.2353.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				87.900.000				
032.HB.2353.QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	89	1110	Kelompok Masyarakat	87.900.000	02	22	01	03
032.HB.2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				1.280.347.821				
032.HB.2363.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan				97.900.000				
032.HB.2363.PBW.001	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	3	3	Rekomendasi Kebijakan	10.400.000	02	22	01	05
032.HB.2363.PBW.002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi	2	2	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000	02	22	04	03
						02	16	05	01



- 533 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2363.PBW.003	Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	11	11	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000	02	22	01	05
032.HB.2363.PBW.004	Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	1	2	Rekomendasi Kebijakan	21.000.000	02	22	01	05
						02	16	04	03
						06	07	02	01
						08	02	02	04
032.HB.2363.PBW.005	Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut	1	2	Rekomendasi Kebijakan	15.000.000	02	22	01	05
032.HB.2363.PBW.006	Rekomendasi Kebijakan Berusaha Jasa Kelautan	5	5	Rekomendasi Kebijakan	17.500.000	02	22	01	05
032.HB.2363.PBW.007	Rekomendasi Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	0	2	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000	02	22	04	03
032.HB.2363.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				42.750.000				
032.HB.2363.PFA.001	Dokumen NSPK Jasa Kelautan	7	7	NSPK	42.750.000	02	22	01	05
032.HB.2363.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				10.000.000				
032.HB.2363.QDD.001	Korporasi Petambak Garam	0	6	Kelompok Masyarakat	10.000.000	02	22	04	01
						02	10	16	03



- 534 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2363.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				562.000.000				
032.HB.2363.QEG.001	Sarana Wisata Bahari	0	8	Unit	32.000.000	06	07	02	01
						02	22	06	01
						02	16	04	03
032.HB.2363.QEG.002	Sarana Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	0	2	Unit	4.000.000	08	02	02	04
032.HB.2363.QEG.003	Sarana niaga Garam Rakyat	10	15	Unit	506.000.000	02	22	04	02
032.HB.2363.QEG.004	Sarana produksi biofarmakologi	0	3	Unit	20.000.000	02	22	04	03
						02	16	05	01
032.HB.2363.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan				560.697.821				
032.HB.2363.RAI.001	Lahan Garam yang difasilitasi	0	250	Hektar	560.697.821	02	22	04	02
032.HB.2363.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan				7.000.000				
032.HB.2363.SCC.001	Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	Orang	5.000.000	02	22	06	02
						06	07	02	01
032.HB.2363.SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	0	50	Orang	2.000.000	02	22	04	03
						02	16	03	01



- 535 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				253.291.938				
032.HB.2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan				54.200.000				
032.HB.2365.PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	12	15	Rekomendasi Kebijakan	44.600.000	02	22	01	07
032.HB.2365.PBW.002	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3	5	Rekomendasi Kebijakan	9.600.000	02	22	01	07
032.HB.2365.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				3.181.938				
032.HB.2365.PFA.001	Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1	2	NSPK	1.200.000	08	02	04	03
032.HB.2365.PFA.002	Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	1	2	NSPK	1.981.938	02	22	01	07
032.HB.2365.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				22.000.000				
032.HB.2365.QDD.001	Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	2	6	Kelompok Masyarakat	9.600.000	08	02	04	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 536 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2365.QDD.003	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	2	6	Kelompok Masyarakat	12.400.000	08	02	04	03
032.HB.2365.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				47.410.000				
032.HB.2365.QEG.001	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	55	65	Unit	47.410.000	06 02	03 22	02 01	02 07
032.HB.2365.QMA	Data dan Informasi Publik				10.000.000				
032.HB.2365.QMA.001	Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	4	5	dokumen	10.000.000	02	22	01	07
032.HB.2365.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				116.500.000				
032.HB.2365.RBQ.001	Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1	10	Unit	116.500.000	02 08	22 03	01 01	07 01
032.HB.2366	Penataan Ruang Laut				369.540.000				
032.HB.2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan				122.200.000				
032.HB.2366.PBT.007	Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	500	650	Rekomendasi Kebijakan	47.200.000	02	22	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 537 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2366.PBT.008	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di daerah	34	37	Rekomendasi Kebijakan	27.900.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	8	8	Rekomendasi Kebijakan	32.000.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PBT.010	Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	60	100	Rekomendasi Kebijakan	15.100.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan				169.950.000				
032.HB.2366.PBW.001	Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	3	4	Rekomendasi Kebijakan	14.000.000	02 05	22 01	01 07	01 04
032.HB.2366.PBW.002	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	3	7	Rekomendasi Kebijakan	27.250.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PBW.003	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	3	5	Rekomendasi Kebijakan	46.700.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PBW.007	Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1	1	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000	02	22	01	01



- 538 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2366.PBW.008	Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2	6	Rekomendasi Kebijakan	22.000.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PBW.009	Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi	2	6	Rekomendasi Kebijakan	15.500.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PBW.010	Rekomendasi Perairan Laut dan Pesisir yang memiliki Rencana Zonasi Rinci	0	10	Rekomendasi Kebijakan	16.000.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PBW.011	Rekomendasi Dokumen Perairan Laut dan Pesisir yang memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	0	15	Rekomendasi Kebijakan	26.000.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				23.500.000				
032.HB.2366.PFA.001	Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	1	2	NSPK	9.500.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PFA.002	Dokumen NSPK Pemanfaatan Ruang Laut	0	2	NSPK	8.000.000	02	22	01	01
032.HB.2366.PFA.003	Dokumen NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	0	1	NSPK	6.000.000	02	22	01	01
032.HB.2366.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				9.140.000				



- 539 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.2366.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	2	10	Unit	9.140.000	02	22	01	01
032.HB.2366.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				8.000.000				
032.HB.2366.RAN.001	Sistem Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	0	1	Unit	8.000.000	02	22	01	01
032.HB.2366.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				36.750.000				
032.HB.2366.UBA.003	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	8	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18.400.000	02	22	01	01
032.HB.2366.UBA.004	Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	4	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.350.000	02	22	01	01
032.HB.2366.UBA.005	Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	3	3	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.000.000	02	22	01	01
032.HB.7021	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut				531.689.000				
032.HB.7021.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				8.000.000				
032.HB.7021.PBR.001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	6	10	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000	05	01	07	04



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 540 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7021.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga				5.114.000				
032.HB.7021.QAB.001	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	14	400	Lembaga	5.114.000	05	01	07	04
032.HB.7021.QEA	Bantuan Masyarakat				1.000.000				
032.HB.7021.QEA.001	Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya	0	100	Orang	1.000.000	05	01	07	04
032.HB.7021.QED	Bantuan Tanaman				26.025.000				
032.HB.7021.QED.001	Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	37500	80000	Unit	26.025.000	05	01	07	01
						06	07	04	02
						08	03	01	02
032.HB.7021.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				491.550.000				
032.HB.7021.QEG.001	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	170	700	Unit	76.050.000	05	01	07	01
						06	07	04	02
						06	03	02	02
032.HB.7021.QEG.002	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas	1	0	Unit	121.500.000	05	01	07	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 541 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7021.QEG.003	Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	0	4	Unit	94.000.000	05	01	07	01
032.HB.7021.QEG.004	Kampung Perikanan Budi Daya Rumput Laut yang dikembangkan	0	3	Unit	200.000.000	05	01	07	01
032.HB.7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau				5.784.700.012				
032.HB.7022.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				33.736.994				
032.HB.7022.PBR.001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	6	10	Rekomendasi Kebijakan	33.736.994	02	10	09	04
032.HB.7022.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga				5.186.428				
032.HB.7022.QAB.001	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	207	640	Lembaga	5.186.428	02	10	09	04
032.HB.7022.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				4.000.000				
032.HB.7022.QDC.001	Rekomendasi bidang lahan budi daya ikan air payau yang akan disertifikasi	0	1000	Orang	4.000.000	02	10	09	08
032.HB.7022.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				90.000.000				
032.HB.7022.QDD.001	Korporasi Pembudidaya Ikan Air Payau yang dikembangkan	0	5	Kelompok Masyarakat	90.000.000	02	10	16	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 542 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7022.QEA	Bantuan Masyarakat				3.000.000				
032.HB.7022.QEA.001	Pembudidaya ikan air payau skala kecil yang terlindungi usahanya	0	300	Orang	3.000.000	02	10	09	08
032.HB.7022.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				680.000.000				
032.HB.7022.QEG.001	Sarana Budi Daya Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	0	700	Unit	480.000.000	02 06	10 03	09 02	02 02
032.HB.7022.QEG.002	Kampung Perikanan Budi Daya Air Payau yang dikembangkan	0	3	Unit	200.000.000	02	10	09	03
032.HB.7022.QEL	Bantuan Hewan				42.038.040				
032.HB.7022.QEL.U01	Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	187	236	Ekor	109.396	02	10	09	01
032.HB.7022.QEL.U02	Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	17677	22000	Ekor	5.619.232	02	10	09	01
032.HB.7022.QEL.U03	Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	2964669	7000000	Ekor	13.226.344	02 07	10 15	09 01	01 07
032.HB.7022.QEL.U04	Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	40058988	60000000	Ekor	23.083.068	07 02	15 10	01 09	07 01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 543 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7022.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit				21.982.511				
032.HB.7022.QJC.001	Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	250	800	Sampel	8.425.000	02	10	09	01
032.HB.7022.QJC.002	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	210	800	Sampel	5.620.000	02	10	09	01
032.HB.7022.QJC.U03	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	150	800	Sampel	7.937.511	02	10	09	01
032.HB.7022.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				582.993.039				
032.HB.7022.RAL.001	Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	6224	10000	Unit	3.755.101	02 08	10 03	09 01	01 02
032.HB.7022.RAL.002	Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi	174067	400000	Unit	72.832.940	02	10	09	01
032.HB.7022.RAL.004	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	94670	500000	Unit	19.630.876	02	10	09	01
032.HB.7022.RAL.005	Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	3382065	7000000	Unit	9.476.413	02	10	09	01
032.HB.7022.RAL.006	Benih Udang yang Diproduksi	35870400	55000000	Unit	20.793.520	02	10	09	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 544 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7022.RAL.007	Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi	232542	3300000	Unit	456.504.189	02	10	09	01
032.HB.7022.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				4.321.763.000				
032.HB.7022.RBQ.001	Klaster Kawasan Revitalisasi Tambak Udang	0	15	Unit	382.500.000	02	10	09	03
032.HB.7022.RBQ.002	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	25	125	Unit	111.250.000	02	10	09	03
032.HB.7022.RBQ.003	Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)	7	0	Unit	1.273.013.000	02	22	03	03
032.HB.7022.RBQ.004	Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	0	20	Unit	300.000.000	02	10	09	02
032.HB.7022.RBQ.008	Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan	0	10	Unit	155.000.000	02	10	09	03
						02	22	03	03
032.HB.7022.RBQ.009	Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau	0	6	Unit	2.100.000.000	02	10	09	03
032.HB.7023	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut				974.097.535				
032.HB.7023.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				7.200.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 545 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7023.PBR.001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	6	10	Rekomendasi Kebijakan	7.200.000	02	10	09	04
032.HB.7023.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga				8.156.622				
032.HB.7023.QAB.001	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	23	400	Lembaga	8.156.622	02	10	09	04
032.HB.7023.QEA	Bantuan Masyarakat				1.000.000				
032.HB.7023.QEA.001	Pembudidaya ikan air laut skala kecil yang terlindungi usahanya	0	100	Orang	1.000.000	02	10	09	08
032.HB.7023.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				271.000.000				
032.HB.7023.QEG.001	Sarana budi daya ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat	20	54	Unit	71.000.000	02 06	10 03	09 02	02 02
032.HB.7023.QEG.002	Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut yang dikembangkan	0	3	Unit	200.000.000	02	10	09	03
032.HB.7023.QEL	Bantuan Hewan				61.521.506				
032.HB.7023.QEL.U03	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	174574	350000	Ekor	1.274.574	02	10	09	01
032.HB.7023.QEL.U04	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	1774489	2250000	Ekor	60.246.932	02	10	09	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 546 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7023.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit				1.952.625				
032.HB.7023.QJC.001	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	70	100	Sampel	820.000	02	10	09	01
032.HB.7023.QJC.U02	Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	75	100	Sampel	1.132.625	02	10	09	01
032.HB.7023.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				183.266.782				
032.HB.7023.RAL.001	Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	89	5000	Unit	2.213.317	02	10	09	01
032.HB.7023.RAL.002	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	10037	85000	Unit	22.910.048	02	10	09	01
032.HB.7023.RAL.003	Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	13927	60000	Unit	3.781.900	02	10	09	01
032.HB.7023.RAL.004	Benih Kepiting yang diproduksi	189790	600000	Unit	3.770.811	02	10	09	01
032.HB.7023.RAL.005	Benih Ikan Laut yang diproduksi	170811	600000	Unit	13.590.706	02	10	09	01
032.HB.7023.RAL.007	Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	0	378000	Unit	137.000.000	02	10	09	01



- 547 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7023.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				440.000.000				
032.HB.7023.RBQ.001	Kluster Komoditas Unggulan Air Laut berbasis kawasan	1	3	Unit	440.000.000	02	10	09	03
						02	22	03	03
032.HB.7024	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar				1.252.700.771				
032.HB.7024.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				41.000.000				
032.HB.7024.PBR.001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	6	10	Rekomendasi Kebijakan	41.000.000	02	10	09	04
032.HB.7024.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga				4.672.450				
032.HB.7024.QAB.001	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	375	540	Lembaga	4.672.450	02	10	09	04
032.HB.7024.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				4.000.000				
032.HB.7024.QDC.001	Rekomendasi bidang lahan budi daya ikan air tawar yang akan disertifikasi	0	1000	Orang	4.000.000	02	10	09	08
032.HB.7024.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				90.000.000				
032.HB.7024.QDD.001	Korporasi Pembudidaya ikan air tawar yang dikembangkan	0	6	Kelompok Masyarakat	90.000.000	02	10	16	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 548 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7024.QEA	Bantuan Masyarakat				10.000.000				
032.HB.7024.QEA.001	Pembudidaya ikan air tawar skala kecil yang terlindungi usahanya	0	500	Orang	10.000.000	02	10	09	08
032.HB.7024.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana				641.950.000				
032.HB.7024.QEG.001	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	230	450	Unit	341.950.000	02	10	09	02
						06	03	02	02
032.HB.7024.QEG.002	Kampung Perikanan Budi Daya Air Tawar yang dikembangkan	0	6	Unit	300.000.000	02	10	09	03
032.HB.7024.QEL	Bantuan Hewan				63.332.537				
032.HB.7024.QEL.U01	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	54332	68600	Ekor	10.961.372	02	10	09	01
032.HB.7024.QEL.U06	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	27108670	34300000	Ekor	52.371.165	02	10	09	01
						07	15	01	07
032.HB.7024.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit				16.759.075				
032.HB.7024.QJC.001	Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	150	900	Sampel	8.675.000	02	10	09	01
032.HB.7024.QJC.002	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	70	950	Sampel	6.668.000	02	10	09	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 549 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.HB.7024.QJC.U03	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	105	350	Sampel	1.416.075	02	10	09	01
032.HB.7024.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				252.486.709				
032.HB.7024.RAL.001	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	220326	278100	Unit	36.189.459	02	10	09	01
032.HB.7024.RAL.002	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	147806	400000	Unit	16.921.700	02	10	09	01
032.HB.7024.RAL.003	Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	7401833	13000000	Unit	17.220.550	02	10	09	01
032.HB.7024.RAL.004	Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	0	22	Unit	16.700.000	02	10	09	02
032.HB.7024.RAL.005	Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	2	0	Unit	26.155.000	02	10	09	03
032.HB.7024.RAL.007	Ikan Konsumsi air tawar hasil budi daya yang diproduksi	0	1893000	Unit	139.300.000	02	10	09	01
032.HB.7024.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				128.500.000				
032.HB.7024.RBQ.001	Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	0	3	Unit	43.500.000	02	10	09	02
032.HB.7024.RBQ.002	Klaster Komoditas Unggulan Air Tawar Berbasis Kawasan	0	7	Unit	85.000.000	02	10	09	03



- 550 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.WA	Program Dukungan Manajemen				204.550.356				
032.WA.2322	Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama				35.535.424				
032.WA.2322.PEC	Kerja sama				35.535.424				
032.WA.2322.PEC.001	Kerja Sama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	Dokumen	35.535.424	02	22	01	04
032.WA.2329	Pengelolaan Data dan Informasi				169.014.932				
032.WA.2329.QMA	Data dan Informasi Publik				48.083.460				
032.WA.2329.QMA.001	Layanan Data Kelautan dan Perikanan	245	245	Data	48.083.460	02	22	01	04
						06	01	02	01
032.WA.2329.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				73.704.154				
032.WA.2329.RAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	1	Unit	70.000.000	02	22	07	01
						02	22	01	04
032.WA.2329.RAN.002	Sarana Data Citra Satelit Radar	6	6	Unit	3.704.154	02	22	01	04



- 551 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
032.WA.2329.RCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				47.227.318				
032.WA.2329.RCL.001	OM Sarana Data Citra Satelit Radar	1	1	Unit	47.227.318	02	22	01	04
TOTAL					32.321.154.156				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Sasaran Utama Pembangunan				
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3	8,0
GNI Per Kapita	USD	4.870 (2023)	5.410	8.000
Kontribusi PDB Maritim	persen	7,9 (2022)	8,1	9,1
Kontribusi PDB Manufaktur	persen	18,67 (2023)	20,8	21,9
Rasio Gini		0,379	0,378 - 0,382	0,372 - 0,375
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional				
PN 02 - Indeks Ketahanan Energi		6,64	6,77	6,95
PN 02 - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	peringkat	45 (2023)	43	40
PN 03 - Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	persen	23,96	35,00	46,00
PN 03 - Rasio PDB pariwisata	persen	3,60 (2022)	4,50 - 4,60	4,90 - 5,00
PN 03 - Devisa pariwisata	miliar USD	14,00 (2023)	19,00 - 22,10	32,00 - 39,40
PN 04 - Tingkat pengangguran terbuka	persen	4,91	4,50 - 5,00	4,00-4,71



- 553 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
PN 05 - Rasio PDB Industri Pengolahan	persen	18,67 (2023)	20,80	21,90
PN 05 - Biaya logistik	persen PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50
PN 05 - Pembentukan modal tetap bruto	persen PDB	29,3 (2023)	29,4	29,9
PN 07 - Tingkat inflasi	persen	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 02.14 - Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	persen	8	8-9	12-13
PP 02.15 - Tingkat input material sirkular	persen	9	9,2	10
PP 04.19 - Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan	ribu rupiah	Laki-laki: 16.736; Perempuan: 9.579 (2023)	Laki-Laki: 16.891; Perempuan: 9.920	Laki-Laki: 17.899; Perempuan: 10.603
PP 05.03 - Biaya transportasi logistik terhadap PDB	persen	8,79 (2022)	8,27	7,56
PP 05.03 - Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan	hari	1,8	1,7	1,2
PP 07.15 - Tingkat inflasi	persen	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 02.09.06 - Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen initial memorandum kepada sekretariat OECD (2024-2025)	persen	- (indikator baru)	100	-
KP 02.09.06 - Persentase dokumen initial memorandum yang selesai proses reviu dari komite OECD (2025-2028)	persen	- (indikator baru)	30	-



INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.09.06 - Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)	persen	- (indikator baru)	20	100
KP 03.04.03 - Indeks literasi keuangan	persen	51,20 (2023)	57,25	69,35
KP 05.02.01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe	triliun rupiah	0,55	0,80	2,65
KP 05.02.02 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei	triliun rupiah	5,50	6,03	12,22
KP 05.02.03 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang	triliun rupiah	2,40	13,80	13,20
KP 05.02.05 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik	triliun rupiah	21,70	22,80	25,22



- 555 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
035.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				256.861.904				
035.CL.2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital				27.628.156				
035.CL.2491.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				27.628.156				
035.CL.2491.PBA.001	Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	1	1	Rekomendasi Kebijakan	27.628.156	02 04 03	14 19 02	001 03 04	004 02 03
035.CL.2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal				5.027.557				
035.CL.2492.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				5.027.557				
035.CL.2492.PBA.001	Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal yang Mendukung Terjaganya Inflasi Di Kisaran Sasaran	2	0	Rekomendasi Kebijakan	5.027.557	07	15	01	11
035.CL.2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional				11.051.263				
035.CL.2500.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				11.051.263				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 556 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
035.CL.2500.PBA.001	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	2	2	Rekomendasi Kebijakan	11.051.263	05	03	03	02
035.CL.2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral				6.199.443				
035.CL.2513.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				6.199.443				
035.CL.2513.PBA.001	Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Keanggotaan OECD	2	0	Rekomendasi Kebijakan	6.199.443	02	09	06	02
035.CL.2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil				0				
035.CL.2519.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				0				
035.CL.2519.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	0	0	Rekomendasi Kebijakan	0	05	01	06	07
035.CL.2519.PBK.003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	0	0	Rekomendasi Kebijakan	0	05 05	01 01	05 01	04 06
035.CL.2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor				5.525.631				
035.CL.2521.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan				5.525.631				
035.CL.2521.PBB.001		2	2		5.525.631	05	05	02	001



- 557 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi			Rekomendasi Kebijakan		05	01	06	07
035.CL.4539	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan				24.782.457				
035.CL.4539.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				24.782.457				
035.CL.4539.PBA.001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	2	2	Rekomendasi Kebijakan	24.782.457	04	19	03	02
035.CL.4539.PBA.001.0000	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan - Pusat	2	2	Rekomendasi Kebijakan	24.782.457	03	04	03	007
035.CL.4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan				19.339.709				
035.CL.4545.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				19.339.709				
035.CL.4545.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	8.288.447	04	19	03	02
						04	07	04	03
035.CL.4545.PBK.002	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2	2	Rekomendasi Kebijakan	5.525.631	04	19	03	02
						04	07	04	03
035.CL.4545.PBK.003		2	2		5.525.631	04	07	04	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 558 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja			Rekomendasi Kebijakan		06 04	03 19	02 03	01 02
035.CL.4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja				33.153.788				
035.CL.4550.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				33.153.788				
035.CL.4550.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	2	2	Rekomendasi Kebijakan	33.153.788	04 04	07 19	04 03	03 02
035.CL.5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis				59.801.945				
035.CL.5266.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				59.801.945				
035.CL.5266.PBF.001	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	2	0	Rekomendasi Kebijakan	59.801.945	05	04	01	02
035.CL.6920	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK				14.366.641				
035.CL.6920.PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah				14.366.641				
035.CL.6920.PBP.001	Rekomendasi Perencanaan dan Pembentukan KEK	1	1	Rekomendasi Kebijakan	14.366.641	05 03	02 05	01 05	03 008



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 559 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
035.CL.6920.PBP.001.0000	Rekomendasi Perencanaan dan Pembentukan KEK - Pusat	1	1	Rekomendasi Kebijakan	14.366.641	03	05	13	008
						03	05	06	008
						03	05	07	008
						03	05	11	008
035.CL.6921	Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK				13.814.079				
035.CL.6921.PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah				13.814.079				
035.CL.6921.PBP.001	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	1	1	Rekomendasi Kebijakan	13.814.079	05	02	02	06
						05	02	03	05
035.CL.6921.PBP.001.0000	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK - Pusat	1	1	Rekomendasi Kebijakan	13.814.079	03	05	11	008
						03	05	07	008
						03	05	06	008
						03	05	05	008
						03	05	13	008
035.CL.6922	Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerja Sama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK				22.102.025				



- 560 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
035.CL.6922.PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah				22.102.025				
035.CL.6922.PBP.001	Rekomendasi Peningkatan Investasi Kerja Sama Komunikasi dan Sistem Informasi di KEK	1	1	Rekomendasi Kebijakan	22.102.025	05	02	03	06
035.CL.6922.PBP.001.0000	Rekomendasi Peningkatan Investasi Kerja Sama Komunikasi dan Sistem Informasi di KEK - Pusat	1	1	Rekomendasi Kebijakan	22.102.025	03	05	05	008
						03	05	13	008
						03	05	06	008
						03	05	07	008
						03	05	11	008
035.CL.6923	Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK				9.821.901				
035.CL.6923.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				9.821.901				
035.CL.6923.QAH.002	Pelayanan Investasi Administrator KEK Tipe B	1	1	layanan	9.821.901	05	02	05	04
TOTAL					256.861.904				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 561 -

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

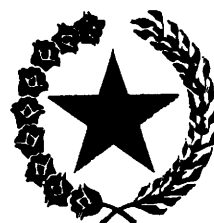
INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Sasaran Utama Pembangunan				
Indeks Modal Manusia		0,54 (2020)	0,56	0,59
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional				
PN 04 - Rata-rata nilai PISA: (a) membaca; (b) matematika; (c) sains		(a) 359; (b) 366; (c) 383 (2022)	(a) 396; (b) 404; (c) 416	(a) 409; (b) 416; (c) 426
PN 04 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	9,22	9,33	9,82
PN 04 - Harapan lama sekolah	tahun	13,21	13,32	13,58
PN 04 - Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	persen	66,30 (2023)	66,78	67,66
PN 04 - Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	persen	10,15 (2023)	11,11	12,68
PN 04 - Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional: (a) literasi membaca; (b) numerasi		(a) 60,89; (b) 51,36 (2023)	(a) 62,89; (b) 54,36	(a) 66,89; (b) 59,86



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 562 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
PN 04 - Usia harapan hidup (UHH)	tahun	72,13 (2023)	74,43	75,4
PN 04 - Angka kelahiran total (Total fertility rate)	rata-rata kelahiran per wanita usia subur (WUS) 15-49 Tahun	2,14 (2023)	2,12	2,10
PN 04 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,447 (2023)	0,430	0,394
PN 04 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		69,51 (2023)	72,89	75,55
PN 04 - Indeks Pembangunan Pemuda		60,59 (2023)	65,16	73,27
PN 04 - Indeks Pembangunan Gender		91,85 (2023)	92,02-92,11	92,34-92,54
PN 04 - Indeks Perlindungan Anak		68,29 (2023)	70,19	75,29
PN 04 - Mobilitas penduduk lanjut usia	persen	92,94 (2023)	94	96
PN 04 - Mobilitas penduduk penyandang disabilitas	persen	68,42 (2023)	69	71
PN 04 - Peringkat indeks inovasi global	peringkat	54	53	49
PN 04 - Jumlah perolehan medali emas pada olympic games	medali	2	4-6 (2028)	
PN 04 - Jumlah perolehan medali emas pada paralympic games	medali	1	4-6 (2028)	
PN 04 - Peringkat pada Asian Games	peringkat	13 (2023)	9-11 (2026)	
PN 04 - Peringkat pada Asian Para Games	peringkat	6 (2023)	5-7 (2026)	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 563 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
PN 04 - Peringkat pada SEA Games	peringkat	3 (2023)	3	2-4
PN 04 - Peringkat pada ASEAN Para Games	peringkat	1 (2023)	1-2 (2029)	
PN 04 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	persen	9,04	10,36 - 11-45	12,13 - 13,40
PN 08 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		62,85 (2021)	65,49	68,13
PN 08 - Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	persen	0,140 (2022)	0,137	0,135
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 04.01 - Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	persen	67,07	67,44	69,71
PP 04.01 - Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun	anak tidak sekolah	4.185.957 (2023)	3.776.239	3.112.816
PP 04.02 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	(a) 48,31; (b) 37,04 (2023)	(a) 50,55; (b) 41,36	(a) 55,00; (b) 50,00
PP 04.02 - <i>Early Childhood Development Index</i> (ECDI)		87,70	88,30	91,27
PP 04.04 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	persen	35,21 (2023)	41,63	54,47
PP 04.10 - Nilai dimensi budaya literasi IPK		60,49 (2023)	63,24	67,05



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 564 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
PP 04.19 - Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	persen	Laki-Laki: 42,62; Perempuan: 37,60 (2023)	Laki-Laki: 43,41; Perempuan: 38,89	Laki-Laki: 44,49; Perempuan: 40,27



- 565 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
036.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				8.173.590				
036.CL.6339	Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan				8.173.590				
036.CL.6339.PEA	Koordinasi				8.173.590				
036.CL.6339.PEA.002	Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis	1	2	kegiatan	8.173.590	04	13	01	01
TOTAL					8.173.590				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 566 -

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional				
PN 07 - <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMN	persen	3,14 (2023)	3,21	3,42
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 07.11 - <i>Profit margin ratio</i> (PMR) BUMN	persen	11,15 (2023)	10,50	10,98
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 07.11.01 - Total asset turnover BUMN	kali	0,282 (2023)	0,305	0,311
KP 07.11.02 - Peringkat risiko komposit BUMN minimal 3	persen	- (indikator baru)	60,9	78,3



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 567 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
041.EI	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN				178.685.470				
041.EI.4407	Pengembangan BUMN Sektor Industri Energi, Minyak dan Gas				9.438.711				
041.EI.4407.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				9.438.711				
041.EI.4407.PBA.004	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur Energi IKN	1	1	Rekomendasi Kebijakan	2.144.787	06	05	01	04
						07	11	02	01
						03	02	04	01
041.EI.4407.PBA.005	Rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik	2	2	Rekomendasi Kebijakan	3.550.113	02	11	02	03
						03	02	03	01
041.EI.4407.PBA.006	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pengembangan sektor hulu dan hilir migas	2	2	Rekomendasi Kebijakan	3.743.811	07	11	01	03
041.EI.4408	Pengembangan BUMN Sektor Industri Mineral dan Batubara				16.354.461				
041.EI.4408.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				16.354.461				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 568 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
041.EI.4408.PBA.004	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Hilirisasi Komoditas Tambang	3	3	Rekomendasi Kebijakan	13.501.452	05 07	01 11	03 01	02 03
041.EI.4408.PBA.005	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan EV Battery	1	1	Rekomendasi Kebijakan	2.853.009	07 05	11 01	01 12	02 03
041.EI.4409	Pengembangan BUMN Sektor Industri Kesehatan				9.161.406				
041.EI.4409.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				9.161.406				
041.EI.4409.PBA.006	Rumusan Kebijakan Penguatan dan Penataan Bisnis Holding BUMN Farmasi	3	3	Rekomendasi Kebijakan	4.882.565	07	11	01	01
041.EI.4409.PBA.007	Rumusan Kebijakan Pengembangan Rumah Sakit dan Center of Excellence di Holding RS BUMN	3	3	Rekomendasi Kebijakan	4.278.841	07 04	11 15	01 02	04 01
041.EI.4410	Pengembangan BUMN Sektor Industri Manufaktur				3.299.723				
041.EI.4410.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				3.299.723				
041.EI.4410.PBA.005	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN Dalam Rangka Mendukung Defend ID sebagai Industri Pertahanan Nasional yang Maju, Kuat, dan Mandiri	2	2	Rekomendasi Kebijakan	3.299.723	07	11	01	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 569 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
041.EI.4412	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Keuangan				6.955.310				
041.EI.4412.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				6.955.310				
041.EI.4412.PBA.004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro	3	3	Rekomendasi Kebijakan	6.955.310	07	11	01	07
						03	03	02	02
						02	10	16	03
041.EI.4412.PBA.004.3173	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro - Kota Administrasi Jakarta Pusat	3	3	Rekomendasi Kebijakan	6.955.310	03	04	01	002
041.EI.4413	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur				3.071.631				
041.EI.4413.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				3.071.631				
041.EI.4413.PBA.004	Rumusan kebijakan dalam restrukturisasi Waskita Karya dan Wijaya Karya	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.700.712	07	11	01	01
041.EI.4413.PBA.005	Rumusan kebijakan bidang BUMN dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.370.919	07	11	01	05
041.EI.4414	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun				12.320.692				



- 570 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
041.EI.4414.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				1.773.383				
041.EI.4414.PBA.007	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pelaksanaan KUR UMKM	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.773.383	03	03	02	02
041.EI.4414.QDA	Fasilitasi dan Pembinaan BUMN				10.547.309				
041.EI.4414.QDA.001.3173	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun - Kota Administrasi Jakarta Pusat	5	5	BUMN	10.547.309	03	04	02	001
041.EI.4415	Pengembangan BUMN Sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan				9.934.997				
041.EI.4415.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				9.934.997				
041.EI.4415.PBA.004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka restrukturisasi BUMN perkebunan dan kehutanan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	7.113.955	07	11	01	01
041.EI.4415.PBA.005	Rumusan kebijakan bidang BUMN dalam Peningkatan Swasembada Gula	1	1	Rekomendasi Kebijakan	2.821.042	07 02	11 10	01 17	03 01
041.EI.4416	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung				9.627.538				
041.EI.4416.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				9.627.538				



- 571 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
041.EI.4416.PBA.004	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Kapasitas dan Transformasi Operasional Bandara	2	2	Rekomendasi Kebijakan	2.387.582	07	11	01	05
041.EI.4416.PBA.005	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Destinasi dan Penyelenggaraan Event di Destinasi Pariwisata Prioritas	4	4	Rekomendasi Kebijakan	4.668.439	07	11	01	06
						04	09	04	02
041.EI.4416.PBA.006	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Health and Wellness Tourism di Sanur	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.547.157	07	11	01	06
041.EI.4416.PBA.006.3173	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Health and Wellness Tourism di Sanur - Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.547.157	06	04	01	07
						03	05	02	001
041.EI.4416.PBA.007	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Penataan Hub and Spoke serta Pengembangan Air Connectivity Domestik dan Internasional	1	0	Rekomendasi Kebijakan	546.140	07	11	01	05
041.EI.4416.PBA.008	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Kapasitas Navigasi Penerbangan dan Penataan Metroplex System Greater Jakarta	2	0	Rekomendasi Kebijakan	478.220	07	11	01	05



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 572 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
041.EI.4416.PBA.008.3173	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Kapasitas Navigasi Penerbangan dan Penataan Metroplex System Greater Jakarta - Kota Administrasi Jakarta Pusat	2	0	Rekomendasi Kebijakan	478.220	03	05	04	001
041.EI.4420	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum				13.248.926				
041.EI.4420.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				13.248.926				
041.EI.4420.PBD.003	Rumusan Kebijakan Bidang Pembinaan BUMN dalam Perundingan Internasional	1	1	Rekomendasi Kebijakan	13.248.926	02	09	04	01
041.EI.4421	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Keuangan BUMN				5.417.620				
041.EI.4421.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				5.417.620				
041.EI.4421.PBA.002	Rumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas BUMN	3	3	Rekomendasi Kebijakan	5.417.620	07	11	01	01
041.EI.4828	Pengembangan BUMN Sektor Industri Pangan dan Pupuk				6.588.105				
041.EI.4828.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				6.588.105				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 573 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
041.EI.4828.PBA.004	Rumusan Kebijakan Bidang Pembinaan BUMN dalam rangka Restrukturisasi dan Transformasi oleh ID FOOD dan PIHC	3	3	Rekomendasi Kebijakan	6.588.105	07	11	01	01
041.EI.5810	Peningkatan Kualitas SDM BUMN				34.364.695				
041.EI.5810.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM				34.364.695				
041.EI.5810.PBK.005	Rumusan Strategi Manajemen Talenta BUMN	1	1	Rekomendasi Kebijakan	12.219.390	07	11	01	01
041.EI.5810.PBK.006	Penyusunan Kebijakan Reward Strategy and Perfomance Management	1	1	Rekomendasi Kebijakan	5.625.998	07	11	01	01
041.EI.5810.PBK.007	Rekomendasi Kebijakan Program Pengembangan SDM BUMN	1	1	Rekomendasi Kebijakan	16.519.307	07	11	01	01
041.EI.5813	Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN				23.737.512				
041.EI.5813.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				23.737.512				
041.EI.5813.PBA.002	Hasil pembinaan BUMN dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	4	4	Rekomendasi Kebijakan	23.737.512	02 07	10 11	16 02	03 02
041.EI.6601	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media				3.813.335				



- 574 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
041.EI.6601.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				3.813.335				
041.EI.6601.PBA.004	Rumusan Kebijakan restrukturisasi BUMN Sektor Telekomunikasi dan Media	1	1	Rekomendasi Kebijakan	3.813.335	07	11	01	01
041.EI.6602	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Logistik				11.350.808				
041.EI.6602.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				11.350.808				
041.EI.6602.PBA.004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka Pengawasan BUMN sektor Perkeretaapian	3	3	Rekomendasi Kebijakan	8.318.569	07	11	01	05
041.EI.6602.PBA.006	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam Penguatan Sinergi dan Integrasi BUMN Logistik	1	1	Rekomendasi Kebijakan	3.032.239	07	11	01	05
						05	03	03	02
						05	03	02	01
						03	02	01	002
TOTAL					178.685.470				

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat



- 575 -

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 04.17 - Indeks Pemenuhan Hak Anak		65,58 (2023)	67,57	72,91
PP 04.17 - Indeks Perlindungan Khusus Anak		79,91 (2023)	81,44	86,44
PP 04.17 - Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	persen	Laki-laki : 31,11 Perempuan: 36,31	Laki-laki : 25,37 Perempuan: 31,6	Laki-laki : 22,82 Perempuan: 29,73
PP 04.17 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	persen	2,37	2,41	2,70
PP 04.19 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	persen	6,6	6,3	4,9
PP 04.19 - Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	lembaga	KL: 3; Provinsi: 2; Kab/Kota: 3	KL: 4; Provinsi: 3; Kab/Kota: 5	KL: 16; Provinsi: 15; Kab/Kota: 47
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 04.16.01 - Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir	persen	20,50	19,76	16,79
KP 04.16.01 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir	persen	9,02	8,82	8,64



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 576 -

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.17.01 - Jumlah kab/kota dengan peringkat dalam kab/kota Layak Anak (KLA)	kab/kota	KLA: 0; Utama: 19; Nindya: 76; Madya: 130; Pratama: 135 (2023)	KLA: 0; Utama: 20; Nindya : 77; Madya: 132; Pratama: 140	KLA: 2; Utama: 23; Nindya: 88; Madya: 140; Pratama: 160
KP 04.17.01 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	persen	77,89	78,03	78,57
KP 04.17.01 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir	persen	7,28	7,06	6,16
KP 04.17.01 - Jumlah kab/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan	kab/kota	280 (2023)	325	429
KP 04.17.02 - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	persen	6,92 (2023)	6,45	5,03
KP 04.17.02 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	56,64 (2023)	85	85
KP 04.17.02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	Laki-laki: 2,18; Perempuan: 2,17	Laki-laki: 1,56; Perempuan: 2,09	Laki-laki: 1,28; Perempuan: 1,88
KP 04.17.02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	Laki-laki: 1,83; Perempuan: 2,67	Laki-laki: 1,42; Perempuan: 2,25	Laki-laki: 1,13; Perempuan: 1,46
KP 04.17.02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir	persen	Laki-laki: 27,03; Perempuan: 33,07	Laki-laki: 21,98; Perempuan: 28,52	Laki-laki: 20,05; Perempuan: 26,70



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 577 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.17.02 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir	persen	12,64	12,42	11,70
KP 04.19.01 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	persen	0,258 (2023)	0,255	0,248
KP 04.19.02 - Persentase perempuan di jabatan tinggi pratama dan madya	persen	Pratama 14; Madya 16	Pratama 14,5; Madya 16,5	Pratama 16,5; Madya 18,5
KP 04.19.02 - Persentase perempuan di posisi managerial	persen	35,02	38,68	44,88
KP 04.19.02 - Persentase perempuan kepala desa	persen	5,76	6,26	8,26
KP 04.19.03 - Persentase kesenjangan upah laki-laki dan perempuan	persen	22,09	21	17
KP 04.19.03 - Rasio kewirausahaan perempuan	persen	1,70 (2023)	1,79	2,21
KP 04.19.04 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain	persen	3,70	3,59	3,19
KP 04.19.04 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	persen	5,7	5,54	5,23
KP 04.19.04 - Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	persen	18	17,35	14,73
KP 04.19.04 - Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan	persen	75,41	77,51	85,90
KP 04.19.04 - Prevalensi Perempuan yang Mengalami P2GP	persen	46,3	43,86	34,09



- 578 -

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 04.19.04 - Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	persen	49,25 (2023)	85	85
KP 04.19.04 - Jumlah perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	orang	26.161 (2023)	28.777- 30.085	42.133 - 44.048
KP 04.19.05 - Persentase anggaran responsif gender	persen	K/L: 4,04; Prov/Kab/Kota: 10	K/L 5,20; Prov/Kab/Kota: 11,2	K/L 10,00; Prov/Kab/Kota: 16,00
KP 04.19.05 - Persentase RO/sub kegiatan responsif gender	persen	K/L: 3,80	K/L: 4,00	K/L: 10,00
KP 04.19.05 - Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan rencana aksi kesetaraan gender	persen	- (indikator baru)	Prov: 7; Kab/Kota: 0	Prov: 38; Kab/Kota: 155



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 579 -

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak				957.347.603				
047.DE.2787	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)				64.624.371				
047.DE.2787.PBN	Kebijakan Bidang Sosial				6.661.190				
047.DE.2787.PBN.001	Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	4	6	Rekomendasi Kebijakan	6.661.190	04	17	01	02
047.DE.2787.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				14.393.411				
047.DE.2787.QAA.001	Layanan atas Pengaduan Masyarakat terkait Pelanggaran Hak Anak	2000	2400	Orang	8.740.806	04 06	17 02	02 03	02 01
047.DE.2787.QAA.002	Layanan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak	15	15	Orang	5.652.605	04	17	02	02
047.DE.2787.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat				1.750.000				
047.DE.2787.QIB.001	Laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU terkait Perlindungan Anak	100	100	Laporan	1.750.000	04	17	02	02
047.DE.2787.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				6.907.220				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 580 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2787.QIC.001	Pengawasan Penyelenggaraan perlindungan anak di K/L	26	38	Lembaga	6.907.220	04	17	01	02
047.DE.2787.QIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah				32.714.410				
047.DE.2787.QIE.001	Pengawasan terhadap penyelenggaraan PA di daerah (Prov/Kabupaten/Kota)	50	70	Pemerintah Daerah	32.714.410	04	17	01	02
047.DE.2787.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				2.198.140				
047.DE.2787.UAE.001	Laporan Hasil Pemantauan, Penelaahan dan Evaluasi serta Pelaporan PA	2	3	Laporan	2.198.140	04	17	02	03
047.DE.2790	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum				57.101.575				
047.DE.2790.PDD	Standardisasi Lembaga				4.202.550				
047.DE.2790.PDD.001	Standardisasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik dan Hukum	5	5		4.202.550	04	19	02	02
047.DE.2790.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				15.600.000				
047.DE.2790.QDB.001	K/L Bidang Politik dan Hukum yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Penyelenggaraan PUG	6	5	Lembaga	6.270.000	04	19	05	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 581 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2790.QDB.002	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Politik dan Hukum yang Responsif Gender	4	3	Lembaga	6.380.000	04	19	05	01
						04	19	02	01
047.DE.2790.QDB.003	Organisasi Kemasyarakatan yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan KG Bidang Politik dan Hukum	5	5	Lembaga	2.950.000	04	19	02	01
						04	19	05	01
047.DE.2790.QMB	Komunikasi Publik				3.350.000				
047.DE.2790.QMB.001	KIE PUG Bidang Politik dan Hukum	1	1	kegiatan	3.350.000	04	19	02	02
047.DE.2790.SCJ	Pelatihan Bidang Sosial				15.489.025				
047.DE.2790.SCJ.001	SDM Pendamping Program Bidang Politik dan Hukum yang dilatih tentang KGPA	100	100	Orang	2.652.550	04	19	02	02
047.DE.2790.SCJ.001.0000	SDM Pendamping Program Bidang Politik dan Hukum yang dilatih tentang KGPA - Pusat	100	100	Orang	2.652.550	01	05	01	02
047.DE.2790.SCJ.002	Perempuan Potensial di Perdesaan yang dilatih tentang Kepemimpinan	350	350	Orang	9.983.925	01	03	01	02
						04	19	02	01
047.DE.2790.SCJ.003	Anggota Legislatif dan Kepala Daerah yang diberikan Peningkatan Kapasitas	100	100	Orang	2.852.550	01	03	01	02
						01	05	01	02



- 582 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
						04	19	02	01
047.DE.2790.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				18.460.000				
047.DE.2790.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG di Bidang Politik dan Hukum	3	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.130.000	01	03	01	02
						01	04	02	01
						04	19	05	02
047.DE.2790.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	13	13	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.930.000	04	19	02	01
047.DE.2790.UBA.003	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	4	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.400.000	04	19	02	01
047.DE.2790.UBA.003.9500	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA - Provinsi Papua Selatan	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	232.496	06	07	04	01
047.DE.2794	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya				62.606.141				
047.DE.2794.PDD	Standardisasi Lembaga				2.250.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 583 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2794.PDD.001	Standardisasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya	5	5	Lembaga	2.250.000	04	19	01	02
047.DE.2794.PEA	Koordinasi				5.860.355				
047.DE.2794.PEA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam KG	2	2	kegiatan	1.681.530	04	16	01	03
						04	19	01	02
047.DE.2794.PEA.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kebijakan PUG bidang Sosial dan Budaya	3	3	kegiatan	4.178.825	04	19	01	01
047.DE.2794.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				23.031.948				
047.DE.2794.QDB.001	K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG	5	3	Lembaga	5.750.000	04	19	05	01
047.DE.2794.QDB.002	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Sosial dan Budaya yang Responsif Gender	4	4	Lembaga	4.900.000	04	19	05	01
047.DE.2794.QDB.003	Organisasi Masyarakat yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan KG bidang sosial dan budaya	10	6	Lembaga	8.050.000	04	19	05	01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 584 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2794.QDB.004	KL Penggerak PUG yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Penyelenggaraan PUG	6	0	Lembaga	4.331.948	04	19	05	01
047.DE.2794.QMB	Komunikasi Publik				3.407.273				
047.DE.2794.QMB.001	KIE Kebijakan PUG Bidang Sosial dan Budaya	1	1	layanan	3.407.273	04	19	01	02
047.DE.2794.SCJ	Pelatihan Bidang Sosial				2.432.065				
047.DE.2794.SCJ.001	SDM Pendamping Program Bidang Sosial Budaya yang Dilatih tentang KGPA	162	162	Orang	2.432.065	04	19	01	02
047.DE.2794.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				25.624.500				
047.DE.2794.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG	3	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.904.100	04	19	05	02
047.DE.2794.UBA.002	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Lingkungan yang Responsif Gender (stunting/aki, perubahan iklim, kespro)	6	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.257.650	04	19	01	01
047.DE.2794.UBA.003		6	6		7.957.650	04	16	01	03



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 585 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Pendidikan dan Keluarga yang Responsif Gender (tingkat desa)			Daerah (Prov/Kab/Kota)		04	19	01	02
047.DE.2794.UBA.004	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	4	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.505.100	04	19	01	02
047.DE.2795	Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi				81.710.664				
047.DE.2795.PDD	Standardisasi Lembaga				7.431.375				
047.DE.2795.PDD.001	Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1	1		7.431.375	04	19	03	02
047.DE.2795.PEA	Koordinasi				7.020.000				
047.DE.2795.PEA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG bidang Ekonomi	6	6	kegiatan	7.020.000	04	19	03	02
047.DE.2795.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				19.508.925				
047.DE.2795.QDB.001	K/L bidang Ekonomi yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Penyelenggaraan PUG	5	4	Lembaga	6.000.000	04	19	05	01
047.DE.2795.QDB.002		4	3	Lembaga	4.000.000	04	19	03	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 586 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi yang Responsif Gender					04	19	05	01
047.DE.2795.QDB.003	Organisasi Kemasyarakatan yang di Fasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan KG bidang Ekonomi	10	10	Lembaga	9.508.925	04	19	05	01
047.DE.2795.QMB	Komunikasi Publik				3.850.000				
047.DE.2795.QMB.001	KIE PUG Bidang Ekonomi	1	1	kegiatan	3.850.000	04	19	03	02
047.DE.2795.SCJ	Pelatihan Bidang Sosial				20.878.739				
047.DE.2795.SCJ.001	SDM Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilatih tentang KGPA	100	100	Orang	2.076.275	04	19	03	01
047.DE.2795.SCJ.002	SDM yang diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan	1056	1056	Orang	18.802.464	03	03	03	04
						04	16	03	02
						04	19	03	01
						06	03	02	02
047.DE.2795.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				23.021.625				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 587 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2795.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Penyelenggaraan PUG	3	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.830.050	04	19	05	02
047.DE.2795.UBA.002	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	10	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14.062.750	04	19	03	01
047.DE.2795.UBA.003	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA Mandiri	3	3	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.128.825	04	19	03	01
047.DE.2795.UBA.003.9600	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA Mandiri - Provinsi Papua Tengah	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.336.515	06	07	04	01
047.DE.2797	Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan				51.700.000				
047.DE.2797.PDD	Standardisasi Lembaga				7.600.000				
047.DE.2797.PDD.001	Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan	19	19	Lembaga	7.600.000	04 01	19 05	04 02	02 02
047.DE.2797.PEA	Koordinasi				2.750.000				
047.DE.2797.PEA.001	Koordinasi pelaksanaan kebijakan PHP dari KDRT, kekerasan di ruang publik, Perempuan perdamaian dan keamanan dan	3	11	kegiatan	2.750.000	04	19	04	02



- 588 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	perempuan dalam kebencanaan, KK yang Responsif Gender								
047.DE.2797.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				14.800.000				
047.DE.2797.QDB.001	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PHP dari KdRT, Ruang Publik, Perempuan perdamaian dan keamanan dan perempuan dalam kebencanaan, KK yang Responsif Gender	24	47	Lembaga	9.250.000	04	19	04	01
						04	19	04	02
						08	04	01	01
						01	05	02	02
047.DE.2797.QDB.002	K/L Yang Diberikan Bimtek Dan Supervisi Tentang Lembaga Layanan PHP dari KDRT, Ruang Publik, Perempuan perdamaian dan keamanan dan perempuan dalam kebencanaan, KK yang Responsif Gender	13	13	Lembaga	5.550.000	01	05	02	02
						04	19	04	02
						08	04	01	01
047.DE.2797.QMB	Komunikasi Publik				10.450.000				
047.DE.2797.QMB.001	Pelaksanaan KIE PHP dari KDRT, kekerasan di ruang publik, Perempuan perdamaian dan keamanan dan perempuan dalam kebencanaan, KK yang Responsif Gender	3	3	layanan	4.100.000	04	19	04	01
						07	02	03	01
						08	04	04	01
						04	16	01	03
047.DE.2797.QMB.002		3	3	layanan	3.950.000	04	19	04	01



- 589 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Pelaksanaan KIE dalam rangka 16 hari Anti Kekerasan					07	02	03	01
047.DE.2797.QMB.003	KIE Kemitraan Kebijakan PPPA	5	5	layanan	2.400.000	04	19	04	01
047.DE.2797.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				16.100.000				
047.DE.2797.UBA.001	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari KdRT, RP, Perempuan perdamaian dan keamanan dan perempuan dalam kebencanaan, KK yang Responsif Gender	19	19	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.500.000	04	19	04	02
						08	04	01	01
						04	16	01	03
047.DE.2797.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri	4	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.600.000	04	19	04	01
047.DE.2797.UBA.002.1200	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri - Provinsi Sumatera Utara	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	550.000	06	07	04	01
047.DE.2797.UBA.003	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan peningkatan kualitas Keluarga dalam PHP dlm rumah tangga & rentan	6	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.000.000	04	19	04	01
						01	05	02	02
						04	16	03	02



- 590 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2800	Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO				59.050.000				
047.DE.2800.PDD	Standardisasi Lembaga				11.100.000				
047.DE.2800.PDD.001	Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO	10	10	Lembaga	3.500.000	01 04	05 19	02 04	02 02
047.DE.2800.PDD.002	Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan	0	19	Lembaga	7.600.000	04	19	04	02
047.DE.2800.PEA	Koordinasi				4.700.000				
047.DE.2800.PEA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHP dari TPPO	2	2	kegiatan	2.450.000	04	19	04	02
047.DE.2800.PEA.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHP Pekerja	2	2	kegiatan	2.250.000	04 01	19 05	03 02	02 02
047.DE.2800.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				14.750.000				
047.DE.2800.QDB.001	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PHP dari TPPO	5	5	Lembaga	4.300.000	04	19	04	02
047.DE.2800.QDB.002		2	1	Lembaga	4.500.000	01	05	02	02



- 591 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PHP dari Pekerja					04	19	03	02
047.DE.2800.QDB.003	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Lembaga Layanan PHP dari TPPO yang Responsif Gender	1	1	Lembaga	3.650.000	04	19	04	02
047.DE.2800.QDB.004	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Lembaga Layanan PHP dari Pekerja yang Responsif Gender	1	1	Lembaga	2.300.000	04 01	19 05	04 02	02 02
047.DE.2800.QMB	Komunikasi Publik				14.800.000				
047.DE.2800.QMB.001	KIE PHP Pekerja dan dari TPPO	4	4	layanan	8.600.000	04 07	19 02	03 03	02 01
047.DE.2800.QMB.002	KIE PHP (dalam rangka PHI)	1	1	kegiatan	6.200.000	04	19	04	01
047.DE.2800.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				13.700.000				
047.DE.2800.UBA.001	Daerah yang diberikan Pendampingan tentang pelaksanaan kebijakan dan Layanan PHP dari TPPO	5	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.400.000	04 01	19 05	04 02	02 02
047.DE.2800.UBA.002		5	5		4.800.000	01	05	02	02



- 592 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Daerah yang diberikan Pendampingan tentang pelaksanaan kebijakan dan layanan PHP Pekerja			Daerah (Prov/Kab/Kota)		04	19	03	02
047.DE.2800.UBA.003	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.500.000	04	19	04	01
047.DE.2800.UBA.003.9100	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri - Provinsi Papua Barat	0	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	600.000	06	07	04	01
047.DE.2805	Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus				30.936.010				
047.DE.2805.PDD	Standardisasi Lembaga				3.052.550				
047.DE.2805.PDD.001	Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	10	15	Lembaga	3.052.550	06 04	02 17	03 02	02 03
047.DE.2805.PEA	Koordinasi				4.073.570				
047.DE.2805.PEA.001	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dalam kondisi khusus	2	6	kegiatan	4.073.570	04	17	02	03
047.DE.2805.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				7.936.630				



- 593 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2805.QDB.001	K/L yg diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PAKK (Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Mental Psikososial)	10	10	Lembaga	2.442.040	04	17	02	03
047.DE.2805.QDB.002	K/L yg diberikan bimtek dan supervisi tentang Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	10	10	Lembaga	5.494.590	04	17	02	03
047.DE.2805.QMB	Komunikasi Publik				13.431.220				
047.DE.2805.QMB.001	KIE Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2	2	layanan	1.221.020	04	17	02	01
						07	02	03	01
047.DE.2805.QMB.003	KIE Promosi Perlindungan Khusus Anak dalam rangka Hari Anak Nasional	8	8	layanan	12.210.200	04	17	02	01
047.DE.2805.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				2.442.040				
047.DE.2805.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri	4	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.442.040	04	17	02	03
047.DE.2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan				65.760.000				
047.DE.2809.PDD	Standardisasi Lembaga				17.500.000				



- 594 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2809.PDD.001	Standardisasi dan Sertifikasi PUSPAGA yang Ramah Anak	20	20	Lembaga	7.000.000	04	16	02	02
						06	02	03	01
047.DE.2809.PDD.002	Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak	15	15	Lembaga	5.250.000	04	16	02	01
						04	17	01	01
047.DE.2809.PDD.003	Standardisasi dan Sertifikasi Daycare Ramah Anak	15	15	Lembaga	5.250.000	04	16	02	01
						04	17	01	01
						06	02	03	01
047.DE.2809.PEA	Koordinasi				4.500.000				
047.DE.2809.PEA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	8	8	kegiatan	4.500.000	04	17	01	02
047.DE.2809.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				4.170.000				
047.DE.2809.QDB.001	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	3	2	Lembaga	1.260.000	04	17	01	02
047.DE.2809.QDB.002	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Menyediakan Layanan PHAPL yang Ramah Anak	3	3	Lembaga	1.260.000	04	17	01	02



- 595 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2809.QDB.003	LM yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PHA atas pengasuhan dan lingkungan	4	4	Lembaga	1.200.000	04	17	01	02
047.DE.2809.QDB.004	K/L yang diberikan bimtek dan supervisi dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam PHA	1	1	Lembaga	450.000	04	16	01	02
047.DE.2809.QMB	Komunikasi Publik				1.250.000				
047.DE.2809.QMB.001	KIE Kebijakan PHA atas Pengasuhan dan Lingkungan	1	1	kegiatan	1.250.000	04	17	01	01
047.DE.2809.SCJ	Pelatihan Bidang Sosial				3.500.000				
047.DE.2809.SCJ.001	SDM Pendamping Program Peningkatan Kualitas Keluarga yang dilatih diberikan penguatan DKMP	200	200	Orang	3.500.000	04 06	16 02	01 03	03 02
047.DE.2809.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				34.840.000				
047.DE.2809.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	10	20	Provinsi	24.100.000	04	17	01	02
047.DE.2809.UBA.002		10	10	Provinsi	5.940.000	04	11	01	02



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 596 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak					04	17	01	02
047.DE.2809.UBA.003	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga dalam PHA	3	3	Provinsi	1.800.000	04	16	01	02
047.DE.2809.UBA.004	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri	3	3	Provinsi	3.000.000	04	17	01	02
047.DE.2809.UBA.004.9700	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri - Provinsi Papua Pegunungan	1	1	Provinsi	1.000.000	06	07	04	01
047.DE.2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan				34.870.500				
047.DE.2810.PDD	Standardisasi Lembaga				7.652.500				
047.DE.2810.PDD.001	Standardisasi Lembaga Pemberi Layanan Perlindungan Khusus Anak (UPTD PPA)	25	25	Lembaga	7.652.500	04	16	02	01
						04	17	02	03
047.DE.2810.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM				3.393.000				
047.DE.2810.PDI.001		300	420	Orang	3.393.000	01	05	02	02



- 597 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
	Sertifikasi SDM (Penyidik dan Petugas Layanan UPTD PPA) dalam penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi					04	17	02	03
047.DE.2810.PEA	Koordinasi				1.500.000				
047.DE.2810.PEA.002	Koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan anak yang bekerja, Pekerja Anak, dan BPTA	1	1	kegiatan	750.000	04	17	02	03
047.DE.2810.PEA.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran	1	1	kegiatan	750.000	04	17	02	03
047.DE.2810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				7.305.000				
047.DE.2810.QDB.001	K/L yg diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	10	10	Lembaga	3.055.000	04	17	02	03
047.DE.2810.QDB.002	K/L yg diberikan bimtek dan supervisi tentang Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)	4	4	Lembaga	2.000.000	04	17	02	03
047.DE.2810.QDB.003	LM yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PKA	7	15	Lembaga	2.250.000	04	17	02	03
047.DE.2810.QMB	Komunikasi Publik				2.820.000				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 598 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2810.QMB.001	KIE Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan (Sosialisasi dan Advokasi PKAK)	4	4	layanan	2.820.000	04	16	01	02
						04	17	02	01
						07	02	03	01
047.DE.2810.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				12.200.000				
047.DE.2810.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Anak berbasis Masyarakat)	17	29	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.700.000	04	16	01	02
						04	17	02	03
047.DE.2810.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri	7	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.500.000	04	17	02	03
047.DE.2810.UBA.002.5300	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri - Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	600.000	06	07	04	01
047.DE.2810.UBA.002.9400	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri - Provinsi Papua	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	640.000	06	07	04	01



- 599 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2811	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak				39.502.500				
047.DE.2811.PDD	Standardisasi Lembaga				5.400.000				
047.DE.2811.PDD.001	Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHSIPA	18	18	Lembaga	5.400.000	04	17	01	01
047.DE.2811.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				10.947.500				
047.DE.2811.QDB.002	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Menyediakan Layanan PHSIPA yang Ramah Anak	12	12	Lembaga	5.380.000	04	17	01	02
047.DE.2811.QDB.003	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	12	12	Lembaga	5.567.500	04	17	01	02
047.DE.2811.QMB	Komunikasi Publik				1.961.000				
047.DE.2811.QMB.001	KIE Kebijakan PHSIPA	1	1	layanan	1.961.000	04	17	01	01
						07	02	03	01
047.DE.2811.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				21.194.000				



- 600 -

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	INDIKASI ALOKASI 2025—2029 (Rp Ribu)	PN	PP	KP	PROP
047.DE.2811.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHSIPA	13	8	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18.750.000	04	17	01	02
047.DE.2811.UBA.004	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA Mandiri	4	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.444.000	04	17	01	02
047.DE.2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan				58.179.424				
047.DE.2812.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				11.060.200				
047.DE.2812.QDB.001	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAKP	15	13	Lembaga	11.060.200	04	17	01	02
047.DE.2812.QMB	Komunikasi Publik				1.831.530				
047.DE.2812.QMB.001	KIE Kebijakan PHA atas Kesehatan dan Pendidikan	2	2	layanan	1.831.530	04	17	01	01
047.DE.2812.SCJ	Pelatihan Bidang Sosial				23.032.594				
047.DE.2812.SCJ.001	Anak penyintas kekerasan yang menerima penguatan resiliensi dan kapasitas anak	789	789	Orang	23.032.594	04	17	02	02
047.DE.2812.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				22.255.100				